

Senyum Untuk Calon Penulis



"Eka Budianta orangnya baik, ajakannya mendidik, penuturannya menarik dengan gaya berbisik. Lebih dari itu, caranya menyemangati benar-benar mengusik. Ini buku yang baik."

-ARSWENDO ATMOWILOTO, Budayawan

EKA BUDIANTA

Pujian Senyum untuk Calon Penulis

"It's a remarkable book that draws on value, social issue, writer's experience and cyber technology which can influence writer in building their capacity."

— Ir. LIEKE RIADI, Ph.D, *Vice Rector I, UBAYA*

"Eka Budianta memberi pembelajaran bagaimana karya sastra dapat bermanfaat bagi gerakan advokasi publik. Bukan main!"

— AGUS PAMBAGIO, *Visi Anak Bangsa*

"... luar biasa, dan menunjukkan kematangan penulisnya, satu kalimat langsung masuk ke sanubari paling dalam dari pembaca."

— ISWAR DENI, *Corporate Secretary, PT Pan Brothers, Tbk.*

"Mengajar dan mengajak orang untuk menulis, sudah banyak dilakukan. Tapi menggugah orang untuk segera memulainya adalah suatu yang langka. Latar belakang sastra, budaya, jurnalistik dan sosial menjadikan Eka Budianta seorang guru yang gigih dan artikulatif."

— BUDI PUTRA, *Wartawan Koran Tempo*

"Penting untuk dibaca - kaya akan nuansa dan cerita. Dengan buku ini, agaknya, Bung Eka ingin menjadi saksi dan memberikan kesaksian."

— LUTHFI YAZID, *Advokat, Luthfi Yazid and Partners Law Firm*

"Eka Budianta memberi perimbangan dengan opininya di tengah begitu banyak opini yang mengambil posisi memihak. Kita jadi punya ruang pandang yang lebih lega untuk bernafas dan kemudian mengambil opini sendiri. Ruang seperti itulah yang kini semakin langka di negeri kita ini."

— PUTU WIJAYA, *Novelis, dramawan, budayawan*

"Berbagai pernyataan bernas dalam buku ini akan memberi 'amunisi' bagi para calon penulis."

— YANUSA NUGROHO, *Cerpenis*, pekerja budaya

"Eka Budianta menyuratkan sekaligus menyiratkan banyak sumber untuk pemantik bara antusiasme."

— SAENO M. ABDI, *Chief Editor*, PT Penerbit Djambatan

"Buku ini mencoba mengingatkan kembali bahwa tidak ada tulisan yang bebas nilai. Ideologi penulis senantiasa mewarnai tulisannya."

— MUHAMMAD ABDUH AM, *Praktisi HRD*, pengamat sosial

"... menawarkan pesan moral untuk menghayati sifat-sifat luhur manusia."

— RACHMAT HIDAYAT (*Wartawan majalah GATRA*)

"... penuh dengan gambaran menarik yang digali dari pengalaman penulis dalam menekuni peran sebagai perantara ide dan kenyataan menjadi informasi dan inspirasi bagi masyarakat pembaca Indonesia."

— ALI FUAD RIZALDI, *Internal QMS Auditor*

"Sesuai judulnya: *Senyum untuk Calon penulis* - sebuah toleransi dan dorongan lecutan bagi setiap orang untuk menulis, apa pun motivasinya"

— NUGROHO PRIYADI, *mahasiswa S2 Maritime Affairs, Malmo, Swedia*

"Kalau Anda hanya sekedar meraba-raba tanpa arah untuk menulis, Pulanglah dalam kehampaan karena karya ini bukan untukmu. Kalau roh Anda tergerak dalam kepekaan jiwa untuk menyuarakan kebenaran, inilah jembatan untuk melangkah di antara jurang perubahan."

— RUDI DUSTIKA TEJA, *Category Management Analyst*,
P.T. Sayap Mas Utama

"Saya mengenal sosok seorang Eka Budianta walaupun serba sedikit ... kepenyairannya juga dihayati sekaligus sebagai pekerja sosial atau pejuang kemanusiaan. Seni sastra juga menjadi mediasi perjuangan perubahan sosial menuju situasi hidup manusia yang lebih baik."

— F. SUKAMTO, *Aktivis Paroki St. Matius, Bintaro*

"Kebanyakan penulis pemula itu malu belajar sama yang sudah mahir. Begitu sebaliknya, yang mahir juga terkadang sulit untuk mengajari penulis pemula. maka dengan adanya buku seperti ini masalah itu jadi teratasi."

— GIRI PRAKOSA, penulis lepas

"Sebuah karya apik dari seorang maestro esai di Indonesia, Eka menuliskannya dalam rangkaian kata-kata yang begitu bebas, kreatif, berseni, berani dan realistis. Buku ini mengajak kita untuk menanggapi arti keterbukaan, kebebasan dan nilai-nilai sosial yang hakiki dari seorang Eka Budianta."

— MOHAMMAD YUNUS, Moderator Trainers Club Indonesia

"Seni menurut pengarang buku ini adalah wahana untuk mengantarkan manusia menjadi bermartabat dan menjadi pengayom alam semesta."

— ASEP HAERUL GANI, Praktisi Sumber Daya Manusia,
Pengajar Luar Biasa Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Karya ini setidaknya memberikan angin segar dan motivasi bagi calon penulis maupun penulis pemula, untuk menjadi peka bahwa menjadi seorang penulis bukan hanya sekedar menulis namun menulis dengan hati."

— APRIYANTI ZUROIDA, PT Unilever Indonesia, Tbk

"Buku ini mengilhami setiap insan untuk setidaknya memaknai hidup dengan hal sederhana."

— HILMI MUHAMMAD,
Marketing Communication Indosat, Makassar

"Ada daya yang besar pada Eka untuk mempengaruhi dan menginspirasi. Tulisannya yang gamblang dan merdeka, informatif sekaligus melibatkan, lahir dari kekuatan moral dan inovasi sosial yang "menjunjung kemanusiaan, membela kehidupan, dan memelihara perdamaian."

— RIRIS K. TOHA SARUMPAET, kritikus sastra,
guru besar FIB Universitas Indonesia

"Buku yang sangat luar biasa, yang membuat Anda untuk memiliki semangat Menulis."

— JOHANES ARIFIN WIJAYA, *Life Inspirator*,
penulis *best seller* "Kualitas Mental Positif untuk Meraih Sukses"

"... buku ajar yang bersifat mendidik, membuat orang lebih kreatif, bebas dan merdeka."

— HARRY KARTIWA, aktivis lingkungan, Telapak, Bogor

"Membaca buku ini saya menjadi terdidik...banyak sekali gugahan-gugahan nurani yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya."

— ANI RAHARDJO, Relawan GE Elfun

"Wajib dibaca oleh calon penulis dan penulis yang ingin terus memperluas wawasan kepenulisannya."

— SUTAN ISMANTO, *Marketing* PT Java Books Indonesia

"Wajib dibaca oleh mereka yang ingin membuat perubahan."

— ANY SULISTYOWATI, alumni LEAD International

"Eka merdeka sekali melanglang berwacana, menggagas, atau berbagi pengalaman, tahu persis bagaimana cara bertutur. Kita seakan dibawa ke sebuah napak tilas panjang, penggalan jalan tol, lorong, dan gang-gang sempit kehidupan yang dinikmatinya. Eka punya banyak gentong wawasan, rasanya tak satu pun tulisannya berlabel kacamata kuda. Gara-gara kepenyairannya ia mendapatkan semuanya: karsa, karya, penggalan hidup yang lumayan elok, seorang istri yang sentausa, dan "rumah dunia."

— HANDRAWAN NADESUL, penyair, dokter

"Salah satu tugas sastrawan, yaitu menjadikan "a drop of ink makes millions think." Satu tetes tinta membuat banyak orang berpikir, tentu saja, untuk menjadi lebih bijaksana. Karena itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Eka Budianta, penyair pada hakikatnya adalah "man of thought" yang tidak secara langsung berambisi untuk mengubah zaman, namun menjadi saksi zaman. Kesaksian zaman inilah yang langsung atau tidak, akan mengantar manusia untuk berpikir mengenai perubahan-perubahan ke arah perbaikan."

— BUDI DARMA, Novelis, kritikus sastra,
guru besar di Universitas Negeri Surabaya

"Mudah dipahami dan menarik. Eka menekankan menulis bukanlah sekedar membongkar tapi juga harus bisa mengajukan alternatif, merupakan wakil hati kita yang mengetuk hati pembaca."

— VICTOR SIAGIAN, PT Roche Indonesia - Jakarta

"Kiat-kiatnya sederhana dan dapat dilakukan, serta sangat terasa nuansa kepentingan umum yang harus dibela yang merupakan ciri dari budayawan dan sastrawan yang luwes dan humanis ini. Menurut saya *Senyum untuk Calon Penulis* wajib dibaca oleh penulis, guru dan wartawan, baik pemula maupun senior sebagai bahan referensi."

— YATIE SALOH, BirdLife Indonesia - Bogor

"Mengajari seseorang menulis - dengan baik - identik dengan mengajar sebuah bangsa untuk bertumbuh dengan kokoh. Karya Eka ini dapat menjadi salah satu batu pijakan untuk memulai sebuah proses kesadaran."

— RONNY MUSTAMU, pemred Surabaya Post,
Ketua Jurusan Komunikasi, Universitas Petra - Surabaya

"Buku ini lebih banyak bergumul dengan tema besar yang sungguh memotivasi, yang membuat calon penulis nyaman berdiri di atas pijakan yang ia pilih. Dengan pijakan yang kokoh dan daya tahan pelari marathon, saya percaya persoalan 'how to' akan terselesaikan."

— PURWAJI - alumnus Psikologi UI, bekerja di sebuah PMA

"Pengamatan yang sangat tajam, akurat dan selalu mengemukakan hal-hal baru, membuat 'rasa' yang berbeda yang 'mendidik' para calon penulis seperti saya untuk lebih kreatif."

— LAMBERT M. LOUIS, Sahabat Burung Indonesia

"Ajakannya mendidik, penuturannya sangat menarik dengan gaya berbisik. Lebih dari itu, caranya menyemangati benar-benar mengusik. Ini buku yang baik."

— ARSWENDO ATMOWILOTO, budayawan

Senyum Untuk Calon Penulis



EKA BUDIANTA

Senyum untuk Calon Penulis

Oleh Eka Budianta
Diredaksi oleh Eva Rohilah

Cetakan 1, September 2005

Diterbitkan oleh Pustaka Alvabet
Anggota IKAPI

Ciputat Mas Plaza, Blok B/AD,
Jl. Ir. H. Juanda, Ciputat - Jakarta 15411
Telp. (021) 74704875, 7494032 - Faks. (021) 74704875
e-mail: redaksi@alvabet.com
www.alvabet.com

Desain sampul: Asa Rahmana
Tata letak: Priyanto

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Budianta, Eka
Senyum untuk Calon Penulis
oleh Eka Budianta

Cet. 1 — Jakarta: Pustaka Alvabet, September 2005
274 hlm: 14 x 20,5 cm.

ISBN 979-3064-17-X

1. Menulis

I. Judul

652.1

*Untuk
Maria Anindyaswari*

pustaka-indo.blogspot.com



Pengantar

KALAU anda mau memberi petunjuk bagaimana meledakkan bom, tentu tidak dengan menyulut bom atom, bom hidrogen atau bom molotov yang sesungguhnya. Sebab, pada saat bom itu meletus, hancurlah semuanya.

Demikian juga kalau mau teknik bercinta, kita dilarang memperagakan alat-alat kelamin pria dan wanita. Apalagi betul-betul mempraktikkannya di depan para siswa. Tidak sopan! Cukuplah menggunakan gambar, atau memakai jasa kata-kata. Bisa dengan menunjukkan teks pendidikan seks yang dibumbui ajaran agama. Bukan petikan film biru! Tapi sketsa ilmiah, patung, lukisan, boneka atau foto-foto baik yang mungkin saja agak pornografis, erotis, jorok maupun suci dan mulia.

Singkatnya, kita harus menggunakan media yang berbeda dan hanya dapat memberikan stimulasi. Begitu juga memberi petunjuk untuk menulis, mestinya juga tidak menggunakan tulisan. Mengajar menulis, memerlukan lebih dari merangkai kata-kata! Ketika mengarang, manusia berpikir, berimajinasi, berbagi pengalaman, berangan-

angan, berkomunikasi. Stimulusnya tidak cukup dengan latihan merangkai 26 macam huruf dalam abjad menjadi kata, kalimat atau alinea. Tapi juga perlu gerak, suara, aroma, warna, nafas, denyut jantung, gelora hati, gelak tawa dan airmata!

Dalam beberapa contoh, menulis bisa mulai dengan pergi tamasya, meneliti bintang di langit, mendengarkan musik, menonton film, berpacaran, mendengar ceramah, menanam pohon, memelihara anjing, membaca buku dan berlatih kungfu. Begitulah!

Saya pernah dikirim ke sebuah lokakarya mengarang yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan Australia. Selama dua hari sama sekali tidak diajar bagaimana membuat kalimat. Tapi kami dilatih bertanya dan menjawab berbagai persoalan hidup. Misalnya susunlah urutan barang yang harus anda bawa kalau sampai pesawat yang ditumpangi jatuh di padang gurun. Benda apa yang paling anda pentingkan, dan harus dipertahankan: sekaleng air, sebilah pisau, seutas tali, atau sekotak korek api?

Seorang yang sangat terpelajar, sangat kecewa pada latihan seperti itu. Ia marah dan meninggalkan kelas dengan urutan pikiran yang keliru, yaitu membuang korek api lebih dulu. "Saya ingin tahu bagaimana memilih topik, menyusun kalimat dan alinea," katanya menggerutu. "Bukan berkhayal dan memecahkan persoalan yang mengada-ada begini."

Setelah profesor itu keluar ruangan, sebagian peserta kursus bersorak. Rupanya, pendidikan tinggi belum tentu membuat kita berpikiran terbuka dan rendah hati.

Padahal, dengan latihan berpikir, berimajinasi, dengan sendirinya kita belajar mengarang, dan menjadi bijaksana. Termasuk di dalamnya: belajar berkomunikasi dan bertanggung jawab atas segala yang kita pikirkan. Lebih penting lagi, anda boleh tertawa kalau sudah paham bahwa inovasi manusia dalam mengelola api, justru yang akan menyelamatkan hidup ini hingga esok hari.

Belajar mengarang juga berarti berlatih memberi makna dan memperpanjang kehidupan. Caranya antara lain adalah dengan membuat sendiri pertanyaan dan mencari jawabnya. Sebagai contoh, berkali-kali dalam kumpulan makalah ini saya minta pembaca menjawab, "Mengapa bayi menangis?"

Saya percaya, bila anda pandai memahami dan menghayati tangis bayi akan berhasil menjadi pengarang besar. Mengapa? Sebab anda tahu mengapa harus menulis, apa yang harus ditulis, untuk siapa, di mana, dan bagaimana menulis sebebaskan-bebasnya. Setelah sukses menjadi bayi, kita akan setuju dengan Sapardi Djoko Damono ketika berkata, "Karena hidup itu indah, aku menangis sepuasnya."

Terima kasih kepada penerbit Pustaka Alvabet, khususnya Zaky dan Eva, yang telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan "tabungan" naskah ini. Sekalipun bukan berbentuk monograf, dan diwarnai oleh berbagai tumpang-tindih di sana-sini, semoga masih ada gunanya. Sekurangnya menjadi bukti, bahwa ada juga penulis yang mencoba menulis untuk menyuruh orang lain agar menulis. Sebuah perjuangan yang mungkin tidak seharusnya ditempuh karena mudah sia-sia.

Syukurlah, dan penghargaan setinggi-tingginya, cukup banyak rekan yang secara spontan memberikan *endorsement*, atau komentar yang diperlukan untuk terbitnya buku ini. Dalam waktu kurang dari sepekan, melalui tayangan internet, saya mendapat hampir 50 tanggapan. Lebih dari 30 di antaranya tercantum sebagai seruan atau rekomendasi agar masyarakat membaca buku ini. Jadi kalau sampai buku ini menjadi 'best seller' yang bertanggung-jawab adalah para pemberi rekomendasi itu!

Maka, dari awal kita perlu berterima kasih. Sejarawan terkemuka, Louis Gotschalk berkata, seratus orang penentang buku, tidak lebih berharga dari seorang pembaca yang serius. Karenanya, kita juga berharap, sudah saatnya Indonesia memiliki pembaca-pembaca yang serius, supaya produksi bacaan pun semakin bagus.

Dunia perbukuan, penulisan, dan pembacaan kita memang sudah jauh lebih berkembang. Ratusan, bahkan ribuan penulis mulai bermunculan. Bukan hanya penulis serius, tapi juga penulis santai, yang melahirkan berbagai macam buku laris manis. Tetapi jangan sangka mereka sukses karena berbakat besar, atau lahir untuk menjadi penulis. Memasuki abad ke 21 ini, kita diperkenalkan dengan penulis-penulis meteorit, yang cepat melambung. Bukan hanya menjadi begitu terkenal, tetapi juga menjadi kaya raya. Ketrampilan mengarang menjadi topik hangat yang layak dipertaruhkan.

Pertanyaannya: apakah sukses mengarang merupakan bagian dari takdir kehidupan pribadi? Memang ada orang menjadi sukses karena suaranya bagus. Contohnya adalah para penyanyi. Ada juga yang sukses dan jadi kaya karena

wajahnya cantik, ototnya kuat, atau pikirannya brilian. Sedangkan untuk penulis rasanya lain. Kalau ia sampai sukses, seperti sama-sama kita ketahui, jelas bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena dibantu oleh begitu banyak pembaca yang tergerak hatinya. Semua sudah mengerti, sukses pengarang terletak di tangan pembaca!

Hanya saja, harus digali lebih dalam: apakah pembaca membaca hanya sekadar untuk membaca? Apakah membaca untuk menulis? Dan menulis untuk menciptakan sesuatu yang lain? Bukankah ketika kita membaca Thomas S. Raffles telah mendirikan Singapura kita jadi ingin membangun kota sendiri? Bukankah pada saat membaca doa kita jadi merasa mampu mensyukuri dan memperbaiki hidup ini? Tidak mungkinkah membaca untuk menjadikan dunia lebih patut dibela? Lingkungan dijaga? Hak asasi manusia dihargai? Dan sejarah dijadikan pelajaran? Jadi, pesan terakhir yang perlu dijawab adalah, setelah puas atau tidak puas membaca, kita mau berbuat apa?

Tidak cukup dijawab dengan kata-kata, tetapi lebih tepat dengan perbuatan. Dan perbuatan itu bukanlah meledakkan bom, apalagi menyebarkan kebencian. Kalau itu yang ingin anda lakukan sekarang, lemparkan saja buku ini keluar jendela!

Jakarta, 2 September 2005

Eka Budianta

Daftar Isi

Pengantar	xi
✿ Penyair dalam Struktur Mediasi	1
✿ Tulisan dan Perubahan	11
✿ Menulis, Mendidik, Merdeka	21
✿ Puisi dan Kekerasan	32
✿ Sastra Pasca-Nasionalisme	38
✿ Jurnalisme dalam Transisi	46
✿ Kebudayaan dalam Reformasi	54
✿ Kepeloporan dan Reformasi	65
✿ Mobilisasi dan Peran Media	75
✿ Bila Penyair Berkicau	95
✿ Dokumentasi = Jati Diri	111
✿ Belajar dari Rahardi	121
✿ Sastra Indonesia dan Pasar Global	131
✿ Persahabatan dan Kreativitas	138
✿ Pro dan Kontra <i>Sweeping</i> Buku	145
✿ Dari Puisi untuk Kehidupan	151

☛ Di Balik Sukses Non Fiksi	159
☛ Masyarakat <i>Cyber</i> dan Sastra Multimedia	170
☛ Dengan Hati dan Akal Sehat	180
☛ Senyum untuk Calon Penulis	193
☛ Sastra Industri dan Industri Sastra	205
☛ Sastra Kita mau global atau universal	211
☛ Membuka Diri pada Tradisi	218
☛ Menimba Kekuatan dari Reruntuhan	224
☛ Mengelola Uang dan Rahasia	238
Sumber Tulisan	249
Biodata Penulis	252

Penyair dalam Struktur Mediasi

*... di antara ransel-ransel kosong
dan api unggun yang membara
Aku terima ini semua
Melampaui batas-batas hutanmu,
melampaui batas-batas jurangmu.*

– Soe Hok Gie

MENANAM rasa cinta pada bangsa dan negara pada hakikatnya adalah membagi hidup dan pengalaman pribadi. Petikan puisi “Mandalawangi – Pangrango” karya Soe Hok Gie itu menunjukkan, betapa dalam kesendirian, secara sangat pribadi kita bisa mengungkapkan rasa bakti kita yang terdalam pada tanahair, masyarakat, dan sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya membagi pemikiran dan pengalaman dalam menjalankan peran perantara, *mediating structure* di antara masyarakat dan negara, baik sebagai seniman-budayawan, maupun sebagai wirausahawan sosial. Sebagaimana wartawan, seniman dan pengarang pada umumnya, penyair bertugas sebagai jembatan. Karya-karyanya menghubungkan dunia idea dan dunia kenyataan. Juga mengkritisi bagaimana sebaiknya, dan bagaimana yang telah terjadi.

Mencegah Revolusi Sosial

Beruntung pada awal 1999 saya ditelpon penyair Rendra. Ia minta saya datang ke rumahnya untuk berdiskusi dengan pengusaha Setiawan Djodi. Ketika saya sampai di Cipayung, halaman rumah Rendra ternyata telah dipenuhi sekitar seratus orang, termasuk beberapa tokoh masyarakat dan ulama. Kami disuguhi minuman akar ilalang rebus, dan macam-macam jajan pasar dari jagung, singkong, pisang dan ketela, hasil dari kebunnya.

“Kita harus mencegah terjadinya revolusi sosial,” kata Setiawan Djodi. Sebagai alternatif, ia mengajukan konsep-konsep “Revolusi Kebudayaan”. Saya ikut terpesona dan sangat terkesan. Tapi saya katakan, sebaiknya dia tidak “mengasinkan garam” yaitu bicara hanya di kalangan budayawan, teristimewa seniman, aktivis LSM, dan agamawan. “Lebih baik anda melakukan presentasi di kalangan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia,” saya bilang. Tapi Rendra merasa pembicaraan di lingkungan sendiri lebih penting. Termasuk menanamkan kesadaran sosial politik, dan menyebarkan suasana prihatin yang mendalam. Sampai-sampai muncul kesan, masa depan seluruh Indonesia tergantung sepenuhnya pada hati kita.

Betulkah demikian?

Sejak sebelum Jendral Soeharto “lengser”, penyair Rendra, musikus Iwan Fals, dan pengusaha Setiawan Djodi sibuk luar biasa “membenahi moral” bangsanya. Mereka melancarkan berbagai kritik sosial, koreksi politik, dan meluncurkan pemikiran-pemikiran yang kreatif maupun proaktif untuk “membongkar zaman lama” dan menyong-

song munculnya “zaman baru”. Mereka sangat takut akan munculnya biaya sosial (*social cost*) yang sangat mahal, untuk tidak menyebutkan penjarahan, pengrusakan, pemerkosaan, pertumpahan darah dan kematian. Karenanya, mereka menawarkan “Revolusi Kebudayaan”.

Tentu saja mereka tidak hanya bicara. Sore itu saya juga melihat Setiawan Djodi membagi-bagikan “sembako” (sembilan bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, sabun, dst.) kepada warga seputar rumah Rendra. Selama terjadi krisis ekonomi, beberapa kali Bengkel Teater Rendra yang didukung oleh seniman dan aktivis LSM dari Jakarta, membagi-bagi kebutuhan dasar itu untuk beratus-ratus keluarga yang hidup kelewat sederhana. Lebih penting lagi, Bengkel Teater juga ikut dalam berbagai gerakan mahasiswa, maupun aktivitas sosial, politik, maupun lingkungan hidup. Maka jangan heran kalau melihat “anak buah” Rendra hadir di berbagai rapat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun di kampus Universitas Atmajaya.

Maka, setelah Pemilihan Umum dan pemerintah baru terbentuk, kita melihat munculnya iklan berisi pokok-pokok reformasi yang mereka yakini, dengan tanda tangan: Setiawan Djodi, Rendra, serta Abdurrahman Wahid! Barangkali, itulah ungkapan syukur mereka atas perjuangan panjang, berat, tanpa akhir, dan paling penting: tidak sia-sia.

Sekarang, kalau anda seorang pengusaha dan budayawan, peran apa yang harus dilakukan? Apa yang dapat anda lakukan untuk turut memperjuangkan terwujudnya *Civil Society* di Indonesia?

Masyarakat kesenian dan masyarakat informasi sebagai agen perubahan, memainkan peranan lumayan penting. Senjata utamanya adalah ketrampilan komunikasi dan bakat-bakat artistik. Tetapi tanpa disertai daya inovasi di bidang sosial, saya khawatir sumbangan kalangan seniman tidak akan banyak mengubah apalagi memperbaiki kebudayaan. Dalam pergaulan saya bersama sesama seniman, semangat avantgardisme, dan keinginan untuk menjaga kemurnian seni (*l'art pour l'art*), ada kalanya menonjol dan tanpa sebab yang jelas mendapatkan tempat cukup terhormat.

Saya sama sekali tidak keberatan, apalagi memusuhi para pendukung seni murni yang memandang keterlibatan sosial politik di kalangan budaya sebagai “pop art”. Tetapi saya lebih mendukung aktivis-aktivis kebudayaan yang punya komitmen sosial, politik dan lingkungan yang jelas, serta berorientasi bagi kepentingan rakyat banyak. Karenanya, saya sangat bangga setiap kali mendengar penghargaan tinggi diberikan kepada seniman yang menyuarakan kepentingan masyarakat, seperti Pramodya Ananta Toer, Titiek Puspa, Garin Nugroho, Sardono W. Kusumo, Riantiarno dan Joko Pekik.

Orang-orang ini secara istimewa telah menumbuhkan kepedulian sosial politik yang mendalam. Pendidikan publik melalui karya-karya film, musik, senirupa, seni tari dan seni sastra turut membentuk persepsi kita terhadap bangunan masyarakat dan negara, atau secara ringkas disebut wawasan kebangsaan. Sajak-sajak yang saya tulis (dalam buku antara lain: **Rumahku Dunia, Sejuta Milyar Satu**, dan **Cerita di Kebun Kopi**) sarat dengan keinginan

untuk mengembangkan tanggungjawab pribadi, yang populer dengan istilah “individualisme”.

Pada hemat saya, hanya kepribadian kukuh yang layak diajak bekerjasama dan berjuang untuk menegakkan kolektivisme. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*a person with a strong constitution*”. Konstitusi di sini mungkin dapat dipadankan dengan “mentalitas” atau akhlaq. Peran kesenian dalam membangun budaya adalah menanamkan konstitusi yang kuat, dan memberikan kerangka estetik yang pada gilirannya dapat memupuk citarasa publik dan kualitas hidup yang lebih baik. Dalam hidup bermasyarakat di Indonesia, gairah untuk mengutamakan kepentingan bersama sering kalah atau memang belum ada. Akibatnya sukar sekali melembagakan sistem bermasyarakat, berpolitik, bahkan berbahasa.

Sejarah memperlihatkan betapa mudahnya konfigurasi penduduk kepulauan Nusantara dalam ber“negara”, ber“adat-istiadat”, bahkan “bahasa” berubah. Dalam seribu tahun belakangan ini, misalnya, berbagai macam bahasa dan negara muncul, berkembang dan mati di kepulauan ini. Bila kita melihat daya hidup dan wawasan waktu (*time span*) yang berlangsung di Jepang atau di Inggris, penghayatan (*notion*) yang sama pada orang Jawa relatif lebih pendek, lebih singkat. Sebagai ilustrasi, sebuah rumah di perdesaan Jawa, dibangun untuk sepuluh atau duapuluh tahun. Di Jepang mungkin untuk 50-60 tahun, sedangkan di Inggris untuk seratus tahun dan seterusnya.

Kesadaran ini mendorong saya ingin mengembangkan persepsi waktu yang lebih baik. Caranya dengan memupuk individualisme dan konservasionisme, dalam pengertian

tanggungjawab pribadi untuk keberlanjutan sistim hidup bersama. Saya sangat bahagia kalau bisa menjual nilai-nilai kesetiaan, dan keberanian untuk memelihara sarana publik, baik yang kongkrit seperti jalan, rumah, dan irigasi; maupun yang abstrak seperti undang-undang, sopan santun, budi pekerti.

Selain itu, saya berusaha agar karya-karya seni mempunyai kegunaan, atau fungsi yang nyata dalam hidup sehari-hari. Aspek kebermanfaatan ini membuat saya menikmati karya-karya sastra yang populis, sajak yang dapat dipakai sebagai iklan dan ungkapan-ungkapan persahabatan, kekecewaan dan harapan. Prinsip ini kiranya dapat dipakai untuk memahami mengapa saya suka menggunakan puisi sebagai bahan iklan, cendera mata, kartu, poster dan pamflet. Dalam masa reformasi, saya menyumbangkan puisi untuk pemberdayaan suara perempuan, untuk iklan kemerdekaan (di RCTI dengan sponsor PT Perusahaan Rokok Gudang Garam) dan sebagai saksi tragedi Semanggi, ketika terjadi penembakan terhadap demonstran.

Pilihan untuk mementingkan azas kebermanfaatan ini membuat saya ingin mengedepankan semangat melayani. Ini mungkin bertentangan dengan kekerasan hati yang mestinya dimiliki setiap seniman. Seharusnya saya seperti Soe Hok Gie dalam sajaknya "Mandalawangi-Pangrango" itu. Ia bilang, "Walaupun setiap orang berbicara tentang manfaat dan guna/Aku bicara padamu tentang cinta dan keindahan."

Dalam seni, penemuan dan penciptaan keindahan sangat penting. Tetapi saya dalam bekerja lebih mencari ino-

vasi sosial ketimbang inovasi estetika atau artistika. Akibatnya tentu perlu kompromi antara semangat untuk mengadakan pembaruan (eksperimentalisme dan avant-gardisme) dengan perasaan untuk lebih mengutamakan selera pasar, nilai-nilai yang dijunjung oleh banyak orang. Dengan kata lain, saya menjadi seniman yang kurang eksentrik, tidak cukup keras kepala untuk menjalani hidup yang “tanpa kompromi” dan tanpa pilihan lain di luar kesenian. Sekiranya ada pertanyaan, “Anda ini seniman atau aktivis LSM?” Jawabnya saya pulangkan pada yang bertanya.

Menjual Bakat atau Menjual Hati?

Konsekuensi lain dari sikap kompromistis dan “menjual bakat” ini adalah keraguan, bahkan kecurigaan orang apakah tidak terjadi “pelacuran intelektual”. Pada 1986, ketika saya mendapat Hadiah Ashoka sebagai “*innovator for the public*”, seorang kritikus dan seorang pelukis menyarankan agar hadiah itu ditolak. Mereka takut Indonesia kehilangan seorang penyair hanya untuk mendapat seorang pekerja sosial. Pelukis Hardi pernah kecewa karena seorang lulusan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) yang dinilainya berbakat, yaitu Moelyono juga mendapat Hadiah Ashoka karena menggunakan “senirupa untuk penyadaran”. “Itu kan Cuma pekerjaan sosial yang bisa dilakukan siapa saja,” kata Hardi.

Saya katakan bukan pekerja sosial, tapi wirausaha sosial. Sindhunata menyebutnya “pejuang sosial” sebagaimana “pejuang lingkungan hidup” atau *social entre-*

preneur yang mengutamakan inovasi dan kreativitas untuk perubahan menuju tatanan masyarakat yang lebih baik.

Dengan kata lain, saya ingin memanfaatkan bakat dan kegemaran menulis (dan bicara!) untuk menjadi agen perubahan sosial dan perbaikan lingkungan. Untuk itu perlu melakukan investasi dalam berbagai aktivitas, baik di lingkungan birokrasi, media massa, bisnis dan industri. Saya bersyukur telah mencoba berbagai bidang ini. Saya pernah bekerja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa baik di UNIC maupun di UNDP. Melalui Prof. Dr. Mubyarto, saya pernah menjadi konsultan untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Akhirnya saya juga menjadi aktivis LSM, baik di Bina Swadaya (sejak 1992) maupun sebagai Direktur Eksekutif Dana Mitra Lingkungan (1994-1998).

Di lingkungan industri saya pernah jadi staf teknis PT New Sahid Builders (1983-1984) dan staf direksi kelompok pengelola sumber daya alam, April Group, yang lebih populer sebagai Raja Garuda Mas (RGM Group). Jabatan saya pada 1994 adalah administratur Yayasan Sayap Garuda. Di sana saya bertemu Profesor Otto Soemarwoto yang berupaya menanamkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup di kalangan industri.

Di RGM itulah saya belajar memahami dan memperbaiki hubungan masyarakat dengan karyawan di kilang-kilang kayu lapis, pabrik pulp, perkebunan kelapa sawit, coklat dan perhutanan industri (akasia mangium maupun pinus merkusi) di Sumatera Utara dan Riau. Melalui yayasan, saya mengelola pemberian beasiswa kepada

mahasiswa-mahasiswa berprestasi di sejumlah universitas negeri. Di antara pengalaman yang mengesankan adalah, ketika berbicara dengan para penerima beasiswa Sayap Garuda di Universitas Gajahmada, Yogyakarta. Saya sadar bahwa memberikan uang untuk biaya sekolah, supaya lebih berprestasi, ternyata belum cukup.

Nyatanya, banyak penerima beasiswa yang menjadi manja, tidak punya daya juang, apalagi daya hidup mandiri. Beasiswa, hibah dana, dan *charity* ternyata membawa dampak negatif karena bisa menciptakan ketergantungan. Itu sebabnya, selain biaya untuk sekolah, penyandang dana juga diharapkan mampu memberikan motivasi, dorongan dan desakan agar penerima bantuan menjadi lebih kuat. Cukup banyak contoh yang menunjukkan mantan penerima beasiswa dan subsidi, menjadi sarjana dan manajer koperasi yang rapuh, setelah uang santunannya habis.

Selama bekerja saya berusaha tidak menggantungkan pada penerimaan uang baik besar maupun kecil. Karena-nya dalam “meniti karir” (istilah yang tidak saya sukai dan kurang saya setuju) belum pernah saya merasa takut kehilangan. Seorang yang proaktif, kreatif dan inovatif pada hemat saya selalu siap dengan prinsip “*to loose nothing*”, tidak akan pernah kehilangan apapun.

Perasaan sehari-hari (*mood*) kita dapat menjadi buruk atau baik sekali, tetapi kualitas hati kita hendaknya tetap baik, bahkan kalau bisa semakin baik dari waktu ke waktu. Bagi saya hati nurani itulah modal utama yang memungkinkan kita berbakti, dan menawarkan spiritualitas untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Almarhum YB Mangunwijaya berkata, “Ada sastrawan

pencari nafkah, sastrawan istana penyanjung penguasa, sastrawan pelampias nafsu, sastrawan iseng, macam-macam. Ada juga... yang disebut sastrawan hati nurani.” Saya berusaha menjadi jenis terakhir itu, sambil tetap menghormati sastrawan lain maupun berbagai macam profesi lainnya.



Tulisan dan Perubahan

DAPATKAH kita mengubah perilaku dengan tulisan? Berita saja mungkin tidak. Tapi provokasi, ya. Karenanya, tulisan untuk memperbaiki lingkungan hidup perlu provokatif. Perlu lebih dari sekadar obyektif. Perlu menggigit, dan menyeret pembaca ke “jalan yang benar”. Inilah konsep inti menulis untuk membela bumi dan isinya.

Advokasi lingkungan memang bermula dari tulisan. Mulai dari buku **Silent Spring** karya Rachel Carson yang mendorong bangkitnya paham melindungi lingkungan atau *Environmentalism* sejak 1962, hingga **It Takes A Village** Hillary Clinton, yang populer 1996. Bahkan dokumen-dokumen penting seperti **Agenda 21**, juga didorong oleh tulisan Sir Shridath Ramphal, terdahulu, yaitu **Our Common Future**. Sungguh tidak berlebihan bila diyakini bahwa tulisan dapat menggerakkan dunia.

Dalam hidup sehari-hari, sayangnya, tulisan adalah tulisan. Sedangkan advokasi untuk kehidupan, teristimewa usaha pelestarian alam adalah kegiatan yang lain. Keduanya seringkali belum terkait. Contoh nyata adalah banyak-

nya sampah bertumpuk justru di bawah papan pengumuman “Jangan buang sampah di sini”. Atau tercium bau pesing dekat papan berbunyi: “Dilarang kencing di sini, kecuali anjing”. Padahal tak ada anjing di sekitarnya.

Pendeknya kita boleh merakukan poster, sticker, brosur, apalagi sekadar artikel di koran. Tapi kalau kita terus ragu-ragu, kapan lingkungan dapat diperbaiki? Atau masih perlukah kita menulis agar masyarakat mencegah polusi, mendaur-ulang sampahnya, atau menghemat energinya? Dapatkah kita membuat esai agar pantai terjaga, flora dan fauna terlindungi? Mungkinkah kita melakukan konservasi air hanya dengan menulis?

Di sini letak tantangannya. Pesan tertulis, konon hanya punya efektivitas paling tinggi tujuh persen. Jauh di bawah pesan lisan yang hampir 30 persen, dan tindakan langsung yang bisa di atas 40 persen. Dalam komunikasi industri, memo-memo hampir tidak mungkin disuruh jalan sendiri. Biasanya memo hanya menegaskan pembicaraan sebelumnya, baik yang dilakukan pertelepon atau tatap muka. Sebaliknya, setelah menyampaikan memo, selalu ada tindak lanjut berupa komunikasi lisan, permintaan laporan atau tanggapan kongkrit.

Sedangkan kita dengan koran, majalah atau buletin kita tidak demikian. Setelah menulis, kita biarkan artikel, berita, esai atau pengumuman kita “jalan sendiri”. Kita juga segera sibuk mencari berita dan menyiapkan tulisan yang lain. Kecil kemungkinan kita “menindak lanjuti” lontaran gagasan, atau peringatan kita sendiri. Lagi pula, seringkali bukan wewenang wartawan untuk menutup pabrik yang mencemari pantai, atau menangkap para

perusak terumbu karang.

Wartawan adalah wartawan adalah wartawan. Tanggung jawabnya terbatas pada produktivitas, kontinuitas dan jaminan kebenaran atas tulisannya. Tetapi wartawan lingkungan, mungkin perlu sedikit tambahan. Ia tidak mungkin membiarkan seorang anak kelaparan sampai mati, dimakan burung kondor, sehingga dapat menulis cerita lengkap yang bagus. Kita juga tak akan menunggu sampai seluruh hutan hangus terbakar supaya mendapat berita yang komplrit. Wartawan lingkungan dihadapkan pada tantangan untuk menghentikan bencana. Lebih dari itu, kalau bisa: menahan kiamat.

Tapi dalam advokasi lingkungan hidup, yang sering berkembang justru dakwah akhir zaman, alias "*doomsday sayer*" itu. Pembaca dibikin ngeri sedemikian rupa, sehingga tergetar, merinding, ketakutan dan akhirnya mau tak mau harus melakukan sesuatu. Itulah teknik pertama membuat tulisan lingkungan menjadi efektif. Tunjukkan akibat terburuk yang langsung menyentuh pembaca, lantas kalau bisa kasih tahu jalan keluarnya.

Misalnya bikin semua orang takut kekeringan air, tak bisa mandi dan pelan-pelan mati kehausan. Lantas untuk mencegahnya kasih tips bagaimana bikin sumur resapan, penampungan air hujan, penghijauan di daerah tangkapan air, dan seterusnya. Dengan begitu, mungkin kita akan didengarkan.

Cara kedua, yang paling populer dan sering menguntungkan penulisnya adalah memberi langsung "petunjuk praktis". Tahukah anda bahwa pada 1998 buku **Beternak**

Jangkrik terbitan Bina Swadaya habis terjual 80.000 eksemplar hanya dalam tempo empat bulan? Juga buku **Budidaya Cacing** yang laku lebih dari 30.000 eksemplar? Tulisan-tulisan begitu banyak disukai meskipun belum tentu membuat orang langsung bertindak. Demikian juga resep-resep masakan, cara menjahit, dan memelihara kesehatan.

Tapi dunia berangsur-angsur tergantung dan sebetulnya juga bermula dari tulisan. “Kitab Taurat” konon berisi instruksi manusia kepada Tuhan, agar membuat alam semesta seperti keinginan orang-orang Yahudi. Jadi manusia mendikte sang maha pencipta agar melakukan berbagai hal yang menyenangkan. Dan itu bisa sama dengan doa-doa yang kita panjatkan sepanjang hari. “Mohon perlindungan, rejeki, perdamaian, nikmat hidup,” dan seterusnya.

Kepada tetangga mungkin kita boleh merayu. Di Jawa ada pendapat bahwa jumlah anak ditentukan oleh tetangga. Kalau tetangga ngomel terus karena warga di sampingnya beranak melulu, kita bisa buka kios kontrasepsi. Tapi “mendidik tetangga” boleh dibilang paling susah. Dapatkah anda menasihati mereka bagaimana cara buang sampah, agar tidak merokok, dan tidak berisik; tanpa harus bertengkar? Inilah tantangan komunikasi lingkungan dalam masyarakat yang tak mengenal “National Geographic” sebagai media informasi maupun sarana *civil society*.

Setiap penulis bertugas meningkatkan rasa ingin tahu dan minat baca masyarakat. Kelahiran dan kematian gagasan kita menentukan intelektualitas Indonesia. Kalau pikiran kita jalan, tulisan kita tangkas, dan suara kita bisa menyayat-nyayat perasaan, mungkin advokasi lingkungan akan ada hasilnya. Tapi kalau cenderung mengiyakan

atau jadi corong pejabat, jurnalisme lingkungan jadi konyol. Kecelakaan yang sering terjadi dan harus dihindari adalah maraknya slogan dan istilah. Jurnalisme lingkungan jadi terperosok dalam tumpukan propaganda. Cuma suaranya meraung-raung seperti lagu frustrasi yang berkepanjangan.

Seruan-seruan lingkungan disertai jargon tidak usah dibaca. Dalam lomba-lomba esai dan liputan lingkungan internasional malah didenda kalau pemakaian terminologi, istilah, dan motto. Jurnalisme lingkungan yang kita kembangkan hendaknya bebas dari bermacam “sila”. Masyarakat sudah mengerti bila dibodohi dengan semboyan-semboyan dan slogan-slogan yang klise. Termasuk juga kalau dicekoki dengan terlalu banyak data.

Jadi opini dan data yang berlebihan, serta teknik berbunga-bunga harus dihindari. Ingat, pengkhotbah yang pandai mengundang tepuk tangan, tidak banyak bikin perubahan. Sehabis mengikuti lokakarya anda bisa buktikan sendiri mudahnya bikin seruan, petatah-petitih, dan nasihat-nasihat mempesona. Akan anda lihat sendiri, betapa tulisan indah itu bisa sama sekali tak berguna. Justru makian, hentakan, dan semprotan yang bikin orang tidak lupa, marah, dan mungkin membenci anda untuk selamanya. Tapi kalau dampak tulisan anda sebaliknya, maka itupun bukan advokasi yang baik.

Jurnalisme lingkungan justru jangan bikin orang muak, sebal dan malah menentang anjuran. Kunci **pertama** yang mampu mengubah perilaku menjadi lebih positif, adalah bila berasal dari perbuatan nyata. Makanya kita kenal jargon ISO seri 9000 yaitu “Tulis yang anda lakukan dan lakukan yang anda tulis.” Di kalangan birokrat “Orde Baru”

semboyan macam itu sayangnya tidak berlaku. Sering kita lihat kenyataan yang jauh berbeda dari yang ditulis, apalagi yang sekadar diucapkan.

Keberanian kita membongkar dusta sekarang dipertaruhkan. Karenanya, jurnanisme lingkungan memerlukan banyak investigasi. Di sisi lain, juga rekaman tindakan nyata, perbuatan kongkrit sehari-hari. Makanya lebih baik anda menulis tentang kecambah yang betul-betul ditanam sendiri, daripada berkisah tentang pohon raksasa nun di hutan angan-angan. Kalau kita jujur dan bumi, tidak melebih-lebihkan prestasi sendiri, dan tidak merasa lain dari yang lain, mungkin sudah satu langkah mendekati kebenaran. Kedekatan kita pada kenyataan menentukan apakah tulisan kita bisa memperbaiki keadaan.

Dengan kata lain tulisan lingkungan harus realistis. Tapi realistis tanpa disertai daya gugah, empati dan inovasi, tulisan kita akan mati. Tiap tulisan perlu roh. Jadi kecuali realistis, ia juga perlu idealis, sehingga mampu memberikan inspirasi. Misalnya, agar penghuni pantai yang kumuh berhenti berak sembarangan, anda bisa usulkan bikin jamban bersama. Sudah ada ahli dan resepnya membuat "sepiteng" kolektif yang dapat menampung limbah biologis beberapa keluarga.

Atau untuk menggalakkan daur ulang kertas, anda tawarkan hasil-hasilnya yang spektakuler, seakan-akan sedang bikin iklan. Itu namanya insentif. Boleh juga dicatat: agar lebih rajin meliput lingkungan dan kependudukan, anda juga diiming-imingi berbagai hadiah. Seusai lokakarya lingkungan dan kependudukan yang diadakan di Jakarta, Makassar, Palangkaraya, Medan,

Kupang, dan Manado (Oktober 1999-Februari 2000), ada banyak insentif untuk liputan terbaik. Program Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) melalui kerjasama dengan CARE International Indonesia menghargai media massa dan wartawan yang pandai membangkitkan kesadaran pembaca untuk memperbaiki perangai sosial dan lingkungan hidupnya.

Tapi jangan lupa, tulisan kita harus menggugah. Sekecil apapun, anda harus ganti perilaku setelah baca tulisan ini. Dengan begitu, anda juga belajar memperbaiki perangai pembaca pada lingkungan. Suruh mereka masing-masing punya pohon kesayangan. Katakan hanya orang yang pernah tanam pohon bisa bahagia di abad 21. Kalau tidak percaya, lepaskan ular, tikamkan belati, pukulkan tinju atau ledakkan bom dalam tulisan anda. Selanjutnya, cepat-cepat sedia obatnya. Jangan biarkan korban bergejimpangan hanya karena kritik anda mematikan, meracuni atau terlalu tajam.

Jurnalisme “tabrak lari” malah bikin orang alergi pada berita lingkungan. Kita tak bisa berhenti bicara hanya sebatas kehancuran, tragedi, dan menelanjangi penjahat, atau si tertuduh dan korbannya. Ada banyak langkah yang harus ditawarkan, setelah mendesak pembaca ke jalan buntu. Demikian kunci **kedua**.

Keseimbangan pemberitaan pencemaran air, udara, penggundulan hutan, dan hancurnya bentang alam, mudah sekali dipertanyakan. Kita bisa bicara panjang lebar seolah-olah tahu segalanya, tapi tak punya jendela untuk menatap persoalan dengan lebih arif, dan menjalin jejaring dengan berbagai pihak secara bijaksana. Catat, ada dua unsur

utama dalam gerakan lingkungan modern, yaitu *entry point* sebagai jendela masalah; dan *networking*, untuk menjalin kerjasama.

Ketiga, kita dorong lembaga-lembaga masyarakat untuk memfokuskan kegiatan sesuai dengan jendela masalahnya, dan membebaskan pergaulan untuk membangun jejaring mereka. Di atas semua, kita ingatkan bahwa semua berlangsung dalam perubahan yang terus menerus. Wartawan yang berjiwa merdeka, kreatif dan betul-betul sadar akan masa depannya. Pekerjaan kita terbuka pada setiap perubahan, jungkir balik nilai-nilai, kecaman, dan dorongan untuk keluar dari tiap masalah.

Dunia penulisan nyaris tidak terbatas. Tulisan menjangkau berbagai suku, umur, latar belakang ekonomi, pendidikan, agama, dan wawasan geografi pembacanya. Karenanya, tulisan yang baik boleh diharapkan dapat menjembatani masa lalu dan masa depan, kondisi yang buruk dan yang baik, yang salah dan yang benar, yang miskin dan yang kaya, yang bodoh dan yang pintar, dan seterusnya. Silakan berbagi informasi dan menanamkan pengertian dan resep kepada siapa saja. Banyak buku memuat berbagai cara melindungi dan memperindah dunia.

Sekarang, dapatkah anda bayangkan bahwa setelah membaca tulisan ini anda akan dapat hadiah bila berhasil menjawab quiz? Apa inti tulisan ini, misalnya. Sebutkan empat sarat jurnalisme lingkungan yang sehat. Dekat dengan kenyataan, tidak banyak slogan, mengandung empati, provokatif tapi tidak terlalu mengajari.

Hal yang harus dihindari lainnya, adalah terlalu banyak pesan. Akibatnya pembaca kurang didesak memecahkan satu masalah. Kalau mau, anda boleh bertanya-tanya saja. Misalnya, pembaca yang baik, apakah tulisan jelek ini bisa mendobrak kesunyian dan berhentinya berpikir satu bangsa? Atau, apakah Indonesia harus menyerah pada kondisi alam yang makin miskin, tidak sehat karena warganya pasrah pada kesuburan atau tandusnya tanah tumpah darah mereka? Tidak dapatkah kita membuat bumi Indonesia kian hari makin subur dengan pupuk biologis?

Banyak pokok dapat dimasukkan sebagai pertanyaan, gugatan, sanjungan maupun jawaban-jawaban atas kekosongan di kanan kiri kita. Itulah kunci **keempat**. Selembar daun bisa menjelaskan mengapa kita harus lahir, tumbuh, dewasa dan akhirnya berguguran. Sebutir debu dapat menghentikan penglihatan kita untuk selamanya. Tapi sebaliknya, setetes obat yang tepat juga dapat memperpanjang umur kita. Begitu juga seberkas sinar matahari. Rasanya, tak ada lain yang dapat kita banggakan kecuali kekuatan kata dari tulisan anda sendiri, yang dapat membuat pembaca menggeleng-geleng atau tertawa geli.

Akhirnya, kunci **kelima** yang mungkin perlu anda ingat seumur hidup adalah berdialog dengan pembaca. Bicaralah seakrab mungkin dengan pembaca anda. Kembangkan jurnalisme dialog. Belajarlah dari majalah **Tempo**. Tanyakan pada pembaca apa hubungan mereka dengan pelestarian pantai, dan konservasi air; sama seperti **Tempo** bertanya apa hubungan pasar modal dan kantong anda. Jangan biarkan persoalan yang anda pikirkan melayang-layang saja di langit.

Kita bawa pembaca ke tanah yang kering, atau sungai yang kotor penuh sampah. Dengan begitu mungkin mereka turut berpikir menyuburkan padang gersang dan membersihkan got. Tapi sekali lagi, berpikir saja belum cukup. Tangan dan kaki harus digerakkan. Mulut dan telinga harus dibuka. Hati harus dipenuhi dengan semangat, seperti kalau anda memupuk anggrek agar lebat berbunga. Otot, hidung dan mata harus digerakkan, dibikin lebih peka.

Selamat menulis. Selamat mengamati. Dan selamat merenungkan bahwa banyak referensi, resep, dan pemecahan yang dapat anda tawarkan kalau betul-betul mau jadi inspirasi bagi rakyat negara besar yang sedang terpuruk di bidang politik dan ekonomi, seperti Indonesia ketika memasuki tahun 2000 yang lalu. Selamat bekerja. Selamat mencegah kerusakan pantai melalui kata-kata! Pembaca tulisan saya bisa bikin orang makin dekat dan sayang pada lingkungan.



Menulis, Mendidik, Merdeka

TERIMA kasih atas kehormatan untuk menjadi penatar dalam program penulisan buku untuk para guru yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam. Selama satu tahun (2000-2001) tiga kali saya mengunjungi Banda Aceh untuk urusan karang mengarang. Penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia yang dipimpin oleh Drs. Adnan Abdullah. Rangkaian kurikulumnya sudah sangat rinci, komplit dan mendalam, sehingga tidak mudah mencari celah yang masih harus diisi. Karenanya izinkan saya sedikit memperluas bahasan, dengan menambah beberapa hal yang bersifat konseptual, ideal, normatif, dan mungkin diperlukan untuk memperkuat spiritualitas kegiatan menulis.

Mengapa dan untuk Apa Mengarang?

Mengapa seorang bayi menangis? Mungkin karena takut. Atau merasa dingin. Sakit. Lapar. Haus. Basah, buang

air kecil, atau besar. Ia minta tolong. Ia ingin berkomunikasi. Ia ingin perhatian. Ia mau berkomunikasi, memberi informasi dan menghendaki perubahan. Begitu juga bila seorang manusia dewasa menulis buku. Ia menulis karena ingin menyatakan sesuatu. Bukan hanya sekadar menarik perhatian, tetapi karena ada sesuatu yang harus diperbaiki.

Sayangnya, buku yang ada tidak selalu demikian. Di dunia ini, kabarnya ada lima jenis pengarang. Pertama, adalah orang yang menulis karena “iseng”. Kalangan ini mengarang karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Contohnya adalah remaja yang menulis di mana-mana, tanpa tahu maunya sendiri. Modalnya bisa mesin tik dan komputer yang baru diservis, spidol atau cat untuk men-corat-corek dinding tetangga. Ada kalanya bukan remaja, tapi pensiunan. Mereka merasa berbakat mengarang. Kerjanya menulis tiap hari, di mana saja, tentang apa saja. Tetapi tulisan itu bukan untuk siapa pun dan hanya nikmat bila dibaca sendiri.

Kedua, adalah “Pujangga Kraton.” Jenis ini mengarang karena dipesan. Ada pejabat yang mempekerjakan penulis pidato, pembuat biografi, dan penyalin surat. Kalau tidak dipelihara raja, bupati, gubernur, atau menteri; pengarang demikian kita kenal sebagai sekretaris. Peralatannya bisa sangat komplit. Ada *word processor*, pulpen bertinta emas, alat pahat di batu marmer, macam-macam. Pengarang jenis ini bisa membuat banyak sekali buku. Bisa juga populer, numpang nama tuannya. Bisa juga sama sekali tak dikenal. Ia setuju dengan ungkapan: kambing punya susu, sapi punya nama.

Ketiga, adalah “sastrawan proyek”. Mereka ini menulis buku, artikel, atau naskah apa saja karena ada proyek, pesanan, perlombaan. Sebetulnya tidak suka menulis. Tetapi karena tertarik oleh hadiah besar, atau sudah terlanjur menyatakan sanggup, maka terpaksa mengarang. Penulis-penulis terpaksa dan memaksa diri ini suka sekali mengikuti penataran. Terutama yang mengajarkan bagaimana menyusun kalimat, membuat alinea, mengumpulkan kutipan, dan seterusnya. Kegiatan ini dilakukan dengan mencuri-curi waktu, sembunyi-sembunyi, atau terang-terangan mengumumkan: harap jangan diganggu, saya sedang mengarang.

Keempat: penulis profesional. Ini banyak kita kenal sebagai penyiar radio dan wartawan. Mereka ini mau tidak mau, suka tidak suka harus menulis. Kadang dalam bentuk buku. Tapi yang paling sering dalam bentuk laporan. Bisa pendek bisa panjang. Kalau sampai tidak menulis barang sehari saja, bisa mati. Pekerjaan mereka memang menulis, menulis, dan menulis. Karena itu mereka hidup dan mati untuk mengarang. Nasibnya bisa baik bisa buruk. Begitu juga hasil karyanya. Ada yang asal jadi, tapi ada juga yang bisa mengguncangkan dunia. Modalnya: ketrampilan. Kalau absen mengarang bisa dipecat. Minimal gajinya dipotong, kinerjanya dianggap buruk.

Kelima, YB Mangunwijaya menyebutnya “pengarang nurani”. Artinya, orang yang menulis karena panggilan hatinya. Jenis ini tidak banyak. Tetapi penulis yang begini biasanya betul-betul serius. Ia tidak mengarang karena diperintah. Bukan karena tertarik honorarium atau “iming-iming” hadiah. Bukan juga karena terpaksa, bukan juga

karena ingin mencari popularitas, membuat heboh dan mendapat ketenaran. Ia menulis karena merasa ada sesuatu yang perlu dilakukan. Mungkin untuk kepentingan anak-cucunya. Mungkin juga untuk membela alam lingkungannya, kebudayaannya, agamanya, bahkan sejarah dan kebudayaan bangsanya.

Pendeknya, jenis terakhir inilah yang patut kita bicarakan. Mereka mungkin dapat dihormati, bahkan diteladani. Mengapa, untuk apa, serta bagaimana sampai demikian? Sebab jenis inilah yang memperkenalkan kita dengan roh kepengarangan. Untuk memahaminya, mari kita kenang dongeng seorang penari.

Menulis dengan Jiwa Merdeka

Di sebuah negeri, ada seorang yang pandai menari. Bila ia menari, semua orang ikut gembira. Ada yang menyanyi, memainkan musik, memukuli apa saja, dan ikut menari. Kalau ia menari di pasar, semua orang ikut menari. Jalanan jadi kacau, lalu-lintas macet. Ia ditangkap dan dipenjara. Tetapi ketika ia menari di penjara, semua narapidana ikut menari. Penguasa marah, dan memotong tangannya. Ia menari dengan kakinya. Dipotong kakinya, ia menari dengan badan dan kepalanya. Dipotong lehernya, ia masih menari dengan matanya. Semakin banyak lagi orang yang ikut menari. Penguasa jadi kesal dan bertanya, “bagaimana caranya menghentikan tarian anda?”

Penari sejati itu menjawab, “untuk menari saya tidak memerlukan musik. Untuk menari saya tidak memerlukan

kaki dan tangan. Untuk menari saya hanya memerlukan jiwa yang merdeka.”

Begitu juga bagi seorang penulis sejati. Modal utamanya bukan komputer canggih dengan pentium lima. Bukan tinta emas dengan bulu angsa. Bukan selembur surat perintah, pengumuman dan sarat-sarat sayembara. Bukan juga suasana yang tenang, langit yang sunyi dan makanan yang enak-enak, kamar dengan alat pendingin, dan pelayan yang siap sedia. Modal utama bagi seorang pengarang adalah jiwa yang merdeka. Dia bergerak karena hatinya bebas. Pikirannya luas, karena jiwanya leluasa.

Dengan modal kemerdekaan jiwa, kita bisa mengarang tentang apa saja, untuk siapa saja, dan teknik bagaimana saja. Semua yang disampaikan oleh tangan, akan ditangkap oleh tangan. Hasil pemikiran akan dicerna oleh pemikiran. Isi hati akan dirasakan oleh hati. Inilah rumus pertama, mengapa, untuk apa dan bagaimana mestinya kita mengarang. Sama seperti pendapat Haji Rhoma Irama, yang berasal dari hati, akan sampai ke hati lainnya.

Pengarang sejati itu seperti bunga yang mekar dan berbau harum. Seperti burung yang indah dan bersuara merdu. Mereka tetap mekar, berkembang, terbang dan berkicau meskipun berada di hutan yang sunyi. Mereka tidak menunggu penonton. Mereka tidak mencari-cari perhatian. Tetapi mereka menjalankan panggilan hidup. Mekar dan mewangi seharum-harumnya. Terbang dan berkicau seindah-indahnya. Mereka tidak mencari hadiah. Tidak juga berhenti sekiranya ditanam dalam kebun atau dimasukkan dalam sangkar. Pengarang sejati tidak merasa lebih baik dari penulis iseng, sastrawan kraton, pengarang proyek,

atau wartawan profesional. Pengarang sejati bisa hidup dalam hati dan pekerjaan mereka semua. Ia bisa menjadi guru, tukang cukur, bupati, bahkan petani sederhana yang hidup tenteram di Nanggroe Aceh Darussalam.

Begitulah, tujuan terakhir dari berkarya adalah mempersembahkan kemerdekaan, dan mencapai kebebasan pribadi. Dengan bekerja sepenuh hati, bermodal kemerdekaan jiwa, kita dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya.

Mengenai hasilnya, tentu terpulang pada masyarakat. Yang penting, kita menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Seorang tukang sapu bertanya pada pejuang hak-hak asasi manusia, Martin Luther King Jr. "Saya hanya seorang tukang sapu. Bagaimana saya dapat ikut berperan dalam kebudayaan dan ikut berjasa?" Jawabnya singkat: "Bila anda dapat menyapu secermat Einstein menyusun rumus-rumusnyanya dan seindah Shakespeare menggubah puisinya, maka seluruh bumi akan berkata, di sini ada seorang tukang sapu yang benar-benar menjalankan tugasnya."

Menulis untuk Pendidikan

Kadang-kadang ada pertanyaan kalau tukang sapu yang betul-betul menjalankan tugas secermat Beethoven menggubah lagu, berapa gajinya? Tentu saja uang di seluruh dunia tidak cukup untuk membayarnya. Demikian juga bagi pengarang. Kalau seorang pengarang berhasil menanamkan budi pekerti yang baik, berapa honorariumnya? Tidak ada hadiah yang memadai untuk jasanya. Bahkan seluruh bintang di langit mungkin masih kurang.

Demikianlah kita melihat pengarang yang membaktikan tenaga, ketrampilan dan waktunya untuk menjadi guru, mendidik anak-anak pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam bentuk paling nyata, adalah dengan menulis buku ajar. Jangan lupa, setiap orang pada prinsipnya adalah pengarang. Hanya saja ada yang aktif, ada yang pasif. Ada yang menulis dengan sangat produktif, ada yang hanya bicara.

Karena itu setiap tahun, selalu ada penghargaan dari Pusat Perbukuan untuk para guru yang menulis naskah bacaan atau buku pelajaran untuk murid-muridnya. Hadiahnya tidak seberapa, pada tahun 2001, misalnya, pemenang pertama hanya Rp 5 juta. Tidak sampai seribu dolar, belum cukup untuk membeli komputer dan printer-nya. Tetapi kalau buku mereka terbit dan memenangkan hadiah, kebahagiaannya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Para guru penulis buku ajar itu akan menutup mata sambil tersenyum. Mereka tahu namanya akan terpatери dalam hati anak-cucu, untuk seterusnya.

Buku-buku ajar ditulis dengan berbagai motivasi. Ada yang karena ingin menambah penghasilan, naik pangkat, dan menjadi terkenal. Tetapi ada juga yang karena sadar pada kurangnya bahan bacaan, dan pentingnya menuliskan pelajaran yang dapat dimasukkan sebagai “muatan lokal”. Permasalahannya tentu bagaimana menghasilkan karya terbaik dan menampilkan bukunya dengan elegan. Kelihatannya sepele, tetapi justru pada bagian inilah yang paling sulit. Buku yang ditulis dengan pretensi mengajari orang lain cenderung tidak disukai. Kadang-kadang “kedodoran” karena muatannya terlalu banyak. Tetapi

yang paling sering adalah karena lemahnya teknik penyajian.

Untuk menanggulangi hal terakhir inilah diadakan berbagai pelatihan. Manfaat pelatihan, sama seperti kursus pesantren kilat, sudah tentu besar sekali. Tetapi daya gunanya baru akan terasa bila para peserta dapat memperoleh bekal untuk melakukan latihan secara rutin. Menulis, menggambar, bernyanyi, memasak, sama seperti kegiatan lain yang memerlukan praktik terus menerus sehari-hari. Bila seseorang mau menjadi pelari atau perenang handal, ia harus melakukan latihan sebanyak mungkin. Ber-*jogging* tiap pagi, adalah sarat untuk menjadi pelari. Menulis jurnal dan mengisi buku harian, adalah kebiasaan bagi setiap pengarang.

Dalam hal menulis buku ajar, pengarang perlu melengkapi dirinya dengan informasi yang tepat dan keahlian tersendiri. Keahlian itu terkait dengan bidang ilmu yang hendak diajarkan. Misalnya untuk ilmu bumi, matematika, biologi, sejarah, agama, bahasa, olahraga dan seterusnya. Selain itu, pengarang dituntut agar mampu menakar kemampuan dan memahami dunia anak didiknya. Namun pesan-pesan seperti ini, hendaknya tidak ditafsirkan sebagai upaya membatasi kebebasan. Setiap pembelajaran dan pekerjaan, tujuannya tetap pada upaya membebaskan dan mengembangkan kemampuan pribadi. Hidup adalah proses memerdekakan diri.

Ilmu pengetahuan adalah alat untuk mempercepat tercapainya kebebasan. Dengan sendirinya hal ini mengandung pesan, agar buku ajar mendorong manusia untuk berpikir merdeka, bertindak leluasa, dan berkembang den-

gan sebaik-baiknya.

Setiap buku ajar diharapkan memperkaya otak, menyentuh hati, dan terakhir: menggerakkan otot untuk bertindak. Tiga komponen ini merupakan pilar utama dalam upaya memberikan pengalaman membaca. Untuk dapat memperkaya otak, seorang penulis perlu memberikan banyak informasi, banyak pilihan. Untuk menyentuh hati, penulis diharapkan punya kehangatan, afeksi, ketrampilan dalam berkomunikasi. Sedangkan untuk menggerakkan badan, penulis dituntut pandai memprovokasi, memberi arahan dan lapangan. Semakin kaya pilihan, semakin efektif komunikasi, dan semakin luas bidang garapan, biasanya semakin baik.

Masalahnya sekarang, siapa yang akan menerima ajaran itu? Bukankah penulis bertugas menghidangkan “masakan” untuk jiwa-jiwa yang haus, lapar dan ingin tumbuh secepat-cepatnya? Di sanalah peran penulis buku ajar untuk dapat memilih menu yang tepat. Di sana juga kuncinya agar hubungan antara penulis dan pembaca terjalin dengan efektif. Di sana diharapkan agar instruksi dapat ditanggapi dengan gembira, dijalankan dengan benar, dan tidak *counter-productive*. Jangan sampai arahan untuk bertindak justru membuat pembaca tidak bersedia melakukan apapun, atau bertindak kebalikan dari yang dianjurkan.

Terakhir, ada baiknya sebuah buku ajar dan pengarangnya mampu membebaskan manusia berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing pribadi. Engku Sjafei, pejuang pendidikan dari INS Kayutanam, yang juga pernah menjadi menteri pendidikan punya kisah populer.

Pada suatu hari beliau membawa sebatang kayu besar dan membawanya pada seorang murid. "Dapat dibuat apakah kayu ini?" beliau bertanya. Karena kayu itu cukup besar, muridnya berkata "almari". Engku Sjafei setuju dan mempersilakan muridnya membuat almari dalam waktu 15 hari.

Ternyata dalam dua pekan almari yang dijanjikannya tidak jadi. Kayunya terlanjur dipotong-potong sehingga tidak mungkin menjadi almari lagi. "Tetapi ini bisa dibuat meja. Saya kerjakan dalam 10 hari," muridnya berjanji. "Bagus sekali. Kebetulan saya memerlukan meja," kata Engku. Sepuluh hari berikutnya beliau kembali, ternyata meja yang didambakan juga tidak jadi. Peralatannya kurang, kata muridnya. Lalu, untuk apa potongan-potongan kayu itu sekarang? "Kursi," jawab muridnya. "Ditanggung beres dalam tempo lima hari."

Pada hari yang terakhir, dengan senang dan sabar, Engku datang lagi. Ternyata, kursi yang dipesannya juga tidak jadi. Dengan takut dan malu, muridnya menghadap, membawa sepasang sepatu kayu yang berukir. Engku Sjafei terpesona. "Mengapa dari dulu kamu tidak membuat sepatu kayu? Ini luar biasa. Kalau kamu mulai dari awal tentu sudah jadi lebih dari sepuluh pasang!" Semua orang memuji sepatu kayu dan ukirannya. Pesan pendidikannya sangat jelas: seorang guru wajib membebaskan murid untuk memberikan respons, sesuai dengan keahliannya.

Harapan besar boleh saja. Tetapi yang paling bagus, mempersilakan orang menentukan sendiri, apa yang hendak dilakukan dengan informasi, afeksi, dan provokasi yang diberikan. Semoga catatan ini dapat mendasari setiap

upaya menulis buku. Teristimewa untuk buku ajar, yang ditulis untuk menggerakkan generasi penerus. Penyusunnya perlu belajar pada bayi, yang mampu menangis dan mendorong terjadinya perbaikan. Hari esok yang lebih diminati.



Puisi dan Kekerasan

*anakku kijang
dipikatnya pemburu
ditangkapnya anak panah
dipermainkannya singa*

BEGITU sajak Medy Loekito “Anakku” dalam Antologi **Angkatan 2000**, halaman 485. Alangkah jenaka puisi, dan betapa mengerikan kekerasan. Dengan ringan, untaian kata-kata telah memanipulasi ide kekerasan menjadi mainan anak-anak. Bila kita bahas keduanya tentu muncul pertanyaan: apa itu puisi, dan apa pula kekerasan.

Sejuta macam definisi untuk puisi. Mulai dari “seni kata-kata” sampai “ungkapan perasaan”, dan “nafas zaman”. Puisi dipercaya sebagai tapak-tilas kehidupan batin dan perasaan manusia. Melalui puisi kita mengenal kepribadian seorang manusia, jiwa sebuah kelompok, sukma bangsa, roh bahasa, bahkan darah kebudayaan. Puisi menghidupi peradaban dan kerohanian sebuah makhluk yang disebut manusia. Puisi menjadi benang merah sejarah. Menghubungkan masa lalu dan masa depan, menyelam jauh ke lubuk hati, dan terbang bebas dari bintang ke bintang.

Selanjutnya, apakah kekerasan itu? Tentu saja sesuatu yang keras. Batu, besi, tulang, kaca, peluru, pisau, dan

segala sesuatu yang bisa menghancurkan. Apakah yang bisa hancur? Macam-macam. Hati, telur, kehidupan, perasaan, kepala, tomat, pepaya, dan segala yang lunak-lembut, rapuh-rentan. Yang kukuh perkasa pun bisa hancur. Bisa luluh, bisa berantakan. Jadi difinisi kekerasan adalah... Sesuatu yang menyakitkan. Bisa fisik, emosional, spiritual, material. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, *violence*, sesuatu yang mengandung pelanggaran.

Tapi dalam bahasa Indonesia, yaitu tadi: berhubungan dengan sesuatu yang (terlalu) kuat, kelewat keras. Bagi yang menyangka keindahan dekat dengan kelembutan, lunak, cepat berlalu, rapuh; kekerasan mungkin memberi alternatif sebagai situasi yang lebih awet, lebih bertahan. Keindahan dalam puisi memang bisa dilukiskan dengan batu dan kerikil hitam yang terserak rata di taman. Tapi lebih mudah dan lebih sering diwakilkan pada bunga, pelangi, bahkan embun yang segera luruh kena sinar matahari.

Sebaliknya, kekerasan muncul dalam format yang lebih “menggugah”. Ada tank, tembok, pembunuhan, dan pemukulan, baik kecaman, kritik, sinisme, cemooh, ejekan dan sumpah serapah. Kalau kita mau sedikit teliti, pujian dalam berbagai bahasa di Pulau Jawa, misalnya, tidak sebanyak makian dan hujatan. Dengarkan ungkapan di kampung-kampung. Tonjokan, ejekan, celaan, lebih banyak ketimbang apresiasasi, pujian, rayuan, dan ungkapan kekaguman. Jangan-jangan, itulah dasar perpuisian kita yang lahir dan dibesarkan di Indonesia.

Si bengal tersayang telah menjadi penyair. Ia hidup dalam bayang-bayang Ramayana dan Mahabharata, dua epos yang mengarahkan negara ke dalam kancah per-

tempuran. Ia dididik dalam ancaman bakal masuk neraka. Ia bergaul dalam wacana bahwa tidak mudah menjadi orang baik. Hati-hati banyak orang jahat. Selalu waspada karena bahaya mengintai dari segala penjuru. Ada copet di bus dan kereta api, ada perampok di perempatan jalan, ada penipu di toko, di kantor, dan ada santet melayang-layang di malam sepi. Si bengal hanya salah seorang di antara kita, yang ditakdirkan lahir, hidup, dan kelak mati di sini, di bumi Indonesia.

“saat tertikam keris anusapati / berkata ia, revolusi tak akan mati / akan tumbuh bagai duit di jalan tol / ken arok-ken arok baru yang bahkan lebih dahsyat ...” tulis Omi Intan Naomi. Ia hanya salah satu sastrawan Indonesia yang memanfaatkan Ken Arok. Berbagai penulis lain menekuni hidup petualang, anak rakyat jelata yang kemudian menjadi raja di Singasari, pada abad ke 13. Negara yang didirikannya hanya bertahan 70 tahun (1222 hingga 1292). Tapi inspirasi yang diberikannya berlanjut ratusan tahun kemudian. Pramoedya Ananta Toer pun terpenggil untuk mengungkapkan perjuangan politik dan kehidupan cintanya.

Selain Omi, di kalangan **Angkatan 2000**, Agus R. Sarjono pun menulis “Akulah Ken Arok yang menikam Tunggul Ametung dan kekuasaan untuk menikahi singgasana.” – dalam puisi “Suatu Hari, Cintaku”, halaman 102. Medy, Omi, dan Agus hanya contoh dari ratusan penyair Indonesia, yang berkarya, dan digolongkan pendukung Angkatan 2000. Mereka adalah generasi yang muncul pada saat pembunuhan bisa terjadi di trotoar, kepala dipenggal dan diarak dengan sepeda motor, dan

pelbagai berita maupun cerita, lebih-lebih film, rasanya tidak mantap kalau tidak memuat bom, granat, pembakaran, tabrakan kereta api atau tergencetnya gadis-gadis cilik yang ingin potret bersama bintang kesayangan.

“Dunia yang kita bina adalah dunia baja,” tulis Rendra memasuki dasawarsa 1970-an. Sejak itu sajak-sajak Indonesia berangsur-angsur menyajikan kekerasan. Bahkan Sapardi Djoko Damono yang terkenal lembut dan menghanyutkan dengan **Mata Pisau** (!) pada puncaknya menyemburkan **Ayat-Ayat Api**. Goenawan Mohamad yang menangisi korban pemilihan umum (pemilu) kemudian tersaruk-saruk di belantara perang saudara di Bosnia. Hampir tidak mungkin kita menemukan penyair Indonesia yang bisa hidup terus dengan bulu angsa, anggrek bulan, atau titik-titik hujan di negeri bambu dan kampung berkabut.

Secara kasar, boleh disimpulkan bahwa perpuisian Indonesia modern ditopang kukuh oleh kekerasan. Mulai dari Chairil Anwar yang termenung antara “Krawang-Bekasi” hingga Medy Loekito yang melukiskan anaknya sebagai kijang “mempermainkan singa”. Dunia perpuisian Indonesia adalah lanjutan dari khasanah umpatan, cemooh dan tegur-sapa jalanan, yang dipupuk oleh carut-marut kehidupan. Desakan ekonomi, guncangan politik, kungkungan sosial, tembok-tembok dan jebakan berbagai ajaran, moral, agama, pendidikan, slogan-slogan, jargon-jargon, rekayasa sejarah dan tuntutan kanan-kiri, menghasilkan penyair-penyair yang terlanjur tangguh memainkan kekerasan dengan kata-kata.

Jadi sekarang mau apa? Hari Puisi Sedunia kita rayakan dengan membaca sajak-sajak “anti kekerasan”.

Tetapi bukankah dengan menyatakan “anti” kita ikut melakukan “tindak kekerasan”. Bukankah Sutardji Calzoum Bachri telah berpesan, “jangan katakan jangan”? Para penyair Indonesia tidak boleh munafik. Para pejuang perdamaian dalam kenyataannya memang lahir dan dibesarkan oleh kekerasan, sebagaimana kita baca pada puisi-puisi itu. Dalam kondisi tidak berdaya, Wiji Thukul bahkan “ingin jadi peluru”. Rasa tidak berdaya telah membuat penyair terpaksa berlajar menginjak-injak kekerasan.

Akhirnya, coba kita lihat dunia yang lebih luas. Bagaimana puisi-puisi bertahan dan menyebar luas dalam hati manusia ratusan bahkan ribuan tahun belakangan? Apakah sajak-sajak itu disusun dengan hati dendam, dan berbahan baku kekerasan? Kita membaca Amsal Sulaiman. Kita melafalkan **Al Qur'an** yang tidak lebih adalah super-puisi, maha karya ilahi dalam seni kesusasteraan. Kita juga ingat betapa perang saudara dipertanyakan sampai ke dasar-dasarnya dalam **Bhagawat Gita**.

Pesan moral tulisan ini jelas: penyair jangan menjadi agen kekerasan. Puisi mudah sekali diberi muatan cinta atau benci, keras atau lembut, lucu atau menegangkan. Tentu saja sah dan boleh memasukkan unsur-unsur kekerasan, atau mengolah kekerasan menjadi sebuah puisi yang hebat. Tetapi alangkah sayangnya bila puisi berhenti pada arena kekerasan itu sendiri. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, mengingat pembunuhan, kekejaman, penipuan, pembodohan, perundungan dan pemerasan juga dapat dilakukan dengan puisi. Penyair berpotensi membawa pendengar dan pembacanya menyelami, menghadapi, dan mengatasi kekerasan. Dengan puisi, mungkin

dunia yang keras dapat ditundukkan, dan dibangun kembali menjadi alam yang lembut, terhargai, dan tersyukuri.

Masa-masa yang berat telah melahirkan penyair yang pandai mengumpat. Kita membaca **Bangsat!** dari Darmanto Jatman. Untungnya, itu bukan satu-satunya karya Darmanto. Masih banyak karyanya yang lain yang lebih reflektif dan apresiatif terhadap kehidupan. Tapi pada saat yang sama kita ingat ada “penyair mbeling” Remy Sylado, penyair “Biarin” Yudhistira Massardi, dsb. Pada masanya kita melihat dan membaca sajak-sajak yang tidak lebih dari kecaman, kutukan, pembunuhan pribadi, dan hujan yang terang-terangan maupun tersembunyi.

Pada Hari Puisi sedunia (tiap 21 Maret), mari kita renungkan. Apakah yang telah dilakukan penyair Indonesia dengan puisi mereka? Adakah dengan sajak-sajak kita telah dibawa ke dunia yang muak pada kekerasan? Ataukah dengan puisi kita dibuat semakin tidak percaya pada orang lain, suka sensasi, pandai mengecam dan haus darah. Semoga masih ada harapan bahwa puisi Indonesia telah lahir dan tumbuh untuk mendewasakan massa penggemarnya, dan membuat masyarakat semakin halus budi pekertinya.



Sastra Pasca-Nasionalisme

SETELAH rezim militer yang tersohor sangat otoriter ini ambruk, apakah kita masih dapat menulis puisi protes? Pertanyaan macam itu muncul dalam diskusi Reformasi Kegiatan sastra Indonesia, oleh Komunitas Sastra Indonesia (KSI), Minggu 10 Mei 1998. Sebelas hari berikutnya Jendral Soeharto menyatakan berhenti, dan Indonesia memasuki babak sejarah baru. Situasi politik, ekonomi, kebudayaan tidak menentu, ditingkahi oleh huru-hara, pembakaran toko, penjarahan, pemerkosaan, teror dan pembunuhan di banyak tempat. Bagaimana nasib sastra sebagai satu bentuk ekspresi bangsa Indonesia?

Sekilas, seperti tak ada gunanya lagi menulis puisi protes. "Penindasan" oleh rezim militer yang otoriter, berpandangan sempit, memuja stabilitas semu dan sangat histeris pada komunisme mendadak berakhir. Gelombang aksi mahasiswa yang polos, tanpa senjata, tanpa rancangan macam-macam, hanya duduk-duduk di atap gedung parlemen, ternyata berhasil meruntuhkan otoritarianisme yang telah bercokol sejak 1966. Zaman apakah yang akan

datang berikutnya? Siapa yang akan bercokol? Demokrasi atau terorisme? Keteraturan atau suasana tidak menentu?

Seperti tidak ada gunanya juga menulis novel. Sebab yang terjadi sehari-hari lebih memilukan, mengharukan, menyesak nafas. Kisah fiktif yang paling seram pun tidak lebih dahsyat daripada pemerkosaan, pemancungan, penculikan, pembakaran toko-toko sementara ratusan anak masih menjarah di dalamnya. Hidup seperti masuk dalam sebuah teka-teki, perlu diceritakan atau tidak?

Kita sedang menunggu jawabnya. Sastra tidak dalam posisi mengarahkan situasi, apalagi suasana zaman. Di mana pun ia menjadi saksi zaman. Bisa kritis, cerdas. Bisa juga bego, linglung dan ikut saja kemauan yang berkuasa. Pada saat demikianlah kita mengantisipasi bagaimana perkembangan sastra pada pasca nasionalisme Indonesia. Apakah puisi Chairil Anwar tetap berkibar? Apakah naskah-naskah drama Rendra akan tetap berpengaruh dan disukai?

Kita ingat betapa sandiwara “Perjuangan Suku Naga” karya Rendra sangat kontekstual dengan perjuangan kebijaksanaan tradisional melawan modernisasi dan pembangunanisme yang menggebu-gebu? Kita juga mencatat bahwa novel-novel Iwan Simatupang merespons secara spontan kemelaratan rakyat kecil dalam peralihan “Orde Lama” ke “Orde Baru”. Demikian juga cerpen-cerpen Seno Gumira Ajidharma, yang dengan lincah berkelit di antara tekanan terhadap kebebasan berekspresi dan ganasnya pembreidelan terhadap media massa. Apakah semuanya akan lebih mudah diproduksi dan disebar-luaskan? Atau justru semuanya tidak menarik lagi untuk ditulis, karena Indonesia bakal memasuki zaman baru?

Itulah persoalan sastra Indonesia setelah mengalami reformasi, yang sebagaimana diharapkan oleh almarhum YB Mangunwijaya, akan memasuki era “pasca nasionalisme”. Pengertian “pasca nasionalisme” bukan berarti hilangnya semangat kebangsaan, melainkan semakin dewasanya nasionalisme. Secara sederhana “pasca nasionalisme” sering dianalogikan dengan “pasca sarjana”. Jadi pada zaman yang diwarnai nasionalisme, seolah-olah bangsa Indonesia baru lulus, mendapatkan status kebangsaannya. Sedangkan pada masa pasca nasionalisme, sudah lebih mantap lagi, seperti lulus Strata 2, Strata 3, Pasca Doktoral, dan seterusnya.

Maka, sastra Indonesia pada masa pasca nasionalisme dapat diduga akan lebih matang, setidaknya perlu lebih mendalam, ketimbang pada saat-saat baru ditulis ketika masyarakat ini bebas dari kolonialisme. Reformasi memberi kesempatan Indonesia memperoleh kebebasannya lebih luas lagi. Demikian pula bila terjadi transformasi atau pun revolusi lagi, tujuannya adalah untuk mendewasakan dan memperdalam kemerdekaan hidupnya. Itu artinya, lebih memaknai kebebasan, dan memanfaatkan peluang emas selama bernafas di dunia.

Sastra adalah isi hati manusia. Pramoejaya Ananta Toer menjadi hati nurani Indonesia yang baru lahir, tatkala dengan jernih menceritakan kebangkitan bangsanya dari kungkungan kolonialisme. Serialnya “Bumi Manusia” dengan lantang mengungkapkan bagaimana seorang pribadi bangkit dari status “pribumi” yang dilecehkan, menjadi “anak semua bangsa” yang duduk sederajat dengan bangsa-bangsa lain, terlepas dari perbedaan warna kulit.

Bahwa cinta menjembatani, menyatukan, dan memisahkan manusia yang semula dibedakan atas ras, atas mata angin (Barat dan Timur), atas “bawahan” dan “atasannya”.

Bila karya-karya besar Pramoedya Ananta Toer, Chairil Anwar, Idrus dan Sutan Takdir Alisjahbana, boleh dianggap sebagai “skripsi sarjana” yang meluluskan bangsa Indonesia; maka bagaimanakah thesis dan disertasi “pasca sarjana” keindonesiaan itu? Sudahkah Ayu Utami, Seno Gumira Ajidharma, Sitok Srengenge, para penulis sezaman, dan kita semua menjawabnya? Di sini barangkali dipertanyakan peran kita yang paling nyata dalam turut mengembangkan sastra Indonesia. Kepeloporan untuk menjawab tantangan pasca-nasionalisme kini terbuka.

Bagaimanakah kira-kira sosok sastra pasca nasionalisme itu? Dalam diskusi reformasi kegiatan sastra, di Universitas Tirtayasa saya mengajukan sedikitnya empat agenda. **Pertama**, perlunya kebebasan berkreasi yang dijamin oleh undang-undang. **Kedua**, peningkatan otoritas sastrawan untuk mendobrak monokulturisasi. **Ketiga**, keseimbangan jender, dengan memperhatikan pentingnya feminisme. Dan **keempat**, kebebasan berbudaya dan berbahasa, dalam pengertian untuk lebih menghargai bahasa daerah, dialek regional, maupun bahasa internasional.

Keempat agenda itu masih harus ditambah tugas **keli-****ma** yang maha penting, yakni mengembalikan kemanusiaan Indonesia. Peri kemanusiaan dan budi pekerti yang diluhurkan oleh setiap bangsa, seolah-olah hilang dengan munculnya penyiksaan, pembantaian etnis dan konflik yang mengatas-namakan agama, ras, ideologi. Di sini barangkali bedanya menjadi pengarang di negara maju dan

di negara seperti Indonesia. Sudah menjadi kesadaran para pengarang senior bahwa menjadi sastrawan di negara berkembang, berarti juga ikut dalam “*nation building*”, pengembangan hidup berbangsa, dan bernegara.

Beda benar dengan menjadi pengarang di negara maju, yang seolah-olah tidak terbebani pesan untuk mendidik, mengasah, mengasih, dan mengasuh. Kebebasan berkreasi dan berekspresi di Indonesia hingga 50 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, selalu di-*embel-embeli* agar bertanggung jawab, dan berkewajiban turut memikul ketenteraman negara, bahkan persatuan dan kesatuan masyarakat.

Akankah prasyarat macam itu tetap menjadi beban dalam pengembangan sastra pasca nasionalisme? Tak bolehkah kita leluasa menulis sajak, novel, drama, esai, dan cerpen tanpa harus ingat slogan-slogan, ideologi negara, termasuk jargon “kesatuan dan persatuan”? Satu hal yang pasti adalah, perjuangan untuk menegakkan negara dan “kebudayaan” Indonesia bukan hal yang remeh. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan untuk memelihara kebanggaan Indonesia.

Kesusasteraan di kepulauan ini, hampir selama abad 20, telah turut terlibat dalam pengukuhan mimpi bersama “Indonesia” itu. Mulai dari penulis-penulis Tionghoa keturunan di akhir abad lalu, kesadaran akan pentingnya nasionalisme telah dikobarkan. Puncaknya muncul ketika penyair-penyair 1950-an dan 1960-an menulis “Selamat Pagi, Indonesia” (Sapardi Djoko Damono) atau “Kembalikan Indonesia Padaku” (Taufiq Ismail). Demikian pula novel-novel absurd Putu Wijaya, sedikit apapun telah

berperan memperkuat “tradisi budaya Indonesia”.

Sudah lama kita merenungkan bagaimana “pasca nasionalisme” akan mewujutkan keindonesiannya. Apakah istimewanya menjadi Indonesia di tengah pasar bebas dan masyarakat terbuka abad 21, baik dalam lingkup Asia Tenggara (ASEAN) maupun Asia Pasifik (APEC). Keberhasilan Pramoedya Ananta Toer untuk menembus pasar dunia, dengan pikiran dan karya-karyanya, mesti mengilhami, bagaimana kualitas dan warna yang dapat dikembangkan pada era pasca nasionalisme itu.

Pertimbangan lainnya adalah “Gelombang Ketiga” Alfin Toffler, yang mengarahkan dunia ke Era informasi, dikombinasikan dengan maraknya teknologi informasi. Kita dihadapkan pada dua frontier baru sekaligus: komunikasi modern, dan tatanan masyarakat informasi yang sangat berbeda, baik dibandingkan dunia agraris maupun dunia industri.

Charles Dickens di Inggris tampil sebagai juru-bicara rakyat kecil, di tengah berkembangnya borjuasi masyarakat transisi setelah Revolusi Industri. Rendra dipupuk oleh kapitalisasi dunia yang memerlukan kearifan terhadap nilai-nilai tradisional, dan pegangan “akal sehat” alias *common sense*. Kini dengan berkembangnya komunikasi elektronik, internet, satelit, serat kaca dan tenaga atom, kepekaan manusia sebagai spesies baru semakin berubah. Generasi penerus memiliki citarasa dan kemampuan berpikir yang hampir tidak sama dengan pendahulunya. Bagaimanakah nasib sastra?

Akankah Mahabharata, Ramayana, dan Illiad tetap

populer di mata “super kids” dan ABG (anak baru gede) di abad 21? Demikian juga berkembangnya teknologi perang, manajemen penaklukan budaya, serta invasi-invasi melalui perniagaan, diplomatik, ilmu pengetahuan, dan industri informasi. Sastra Indonesia dan dunia mesti berpikir serius untuk menyiasati kehidupan yang semakin rumit, semakin kompleks, baik dari segi kependudukan maupun dari perubahan perilaku.

Satu hal yang sangat terasa adalah, sastra nasional diciptakan ketika manusia Indonesia masih berada dalam hitungan di bawah seratus juta. Memasuki periode “pasca nasional” jumlah itu sudah berlipat dua. Dalam perspektif global, jumlah penduduk dunia 1970 baru sekitar 3 milyar jiwa. Sedangkan dalam 30-an tahun, atau satu generasi kemudian, berlipat 2 menjadi 6 milyar. Bagaimana mungkin suara hati manusia terdengar tetap keras di depan pasang telinga dan duaratus juta pasang telinga?

Maka, kalau pada pertengahan 1950-an, ada Surat Kepercayaan Gelanggang yang mendukung universalitas ekspresi, dua generasi berikutnya belum tentu ada kecocokan, seandainya para penulis Indonesia bisa merumuskan seribu surat kepercayaan sekaligus. Artinya, kemajemukan akan semakin berkembang, demikian pula keinginan untuk tetap merasakan kesamaan yang integral.

Maka, kalau harus ditemukan formula untuk sastra pasca nasionalisme Indonesia, jawabnya terletak pada seberapa jauh kita mampu berbeda, sambil tetap mempertahankan kemanusiaan yang sama. Koeksistensi damai, kemampuan bersaing, dan daya produktivitas para penerus sastra Indonesia betul-betul dipertaruhkan. Modal kita

untuk memenangkan persaingan masih ada, yakni kekayaan latar belakang sejarah, kebudayaan, maupun kemiskinan kita di bidang ekonomi, pendidikan, dan pengalaman. Bukankah ketidak-tahuan dan “kebutaan” kita pada teknologi, sains dan sastra juga merupakan hal yang istimewa?

Dalam dialog di Universitas Tirtayasa, Serang, Minggu, 2 Mei 1999, pokok-pokok pikiran ini ditanggapi dengan nada pesimis oleh penyair-penyair setempat termasuk Toto Radik. Dikatakannya seperti tidak ada tenaga baru yang sanggup melanjutkan kerja keras bangsa ini untuk merumuskan isi hatinya, menciptakan visi ke masa depan yang serba tidak stabil, tidak otoriter, dan tidak terkendali seperti semasa “rezim Orde Baru”. Pada saat yang sama, di Serang dan bagian Banten lainnya, timbul gairah untuk “memisahkan diri” dari Jawa Barat, dan menjadi propinsi tersendiri





Jurnalisme dalam Transisi

YAYASAN Kippas di Medan, Oktober 1999, mengundang saya untuk bicara masalah "Independensi Wartawan pada masa Reformasi". Perkaranya, sering wartawan di daerah merasa takut pada pemerintahan militer setempat. Terutama ketika masalah separatisme di Aceh banyak dibahas, ada panglima yang suka menakut-nakuti wartawan. Hal ini mendorong saya ingin bicara tentang Jurnalisme pada masa Reformasi. Boleh juga pada masa Revolusi. Atau Jurnalisme Perang, kalau anda mau. Pokoknya jurnalisme dalam periode gawat. Masa perubahan yang dahsyat. Lantas bagaimana para jurnalis harus mengarifi perombakan zaman. Tetap menegaskan kebenaran atau ikut terayun-ayun bersama "penentu kebenaran".

Dalam pemerintahan yang otoriter, seringkali kebenaran dimonopoli oleh penguasa. Kita ingat, sebelum rezim "tangan besi" Ceausescu di Rumania tumbang, informasi mengenai cuaca pun diatur pemerintah. Kalau suhu udara terlalu dingin, pemerintah menipu rakyat dengan pengumuman beberapa derajat lebih hangat. Kalau terlalu

panas, juga didinginkan supaya terkesan sejuk.

Begitu pula terjadi dalam rezim militer di Indonesia. Kalau ada segerombolan penduduk menyatakan bosan, tak mau dipaksa menjadi warga negara dan ingin bikin negara sendiri, serta merta dicap GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Padahal mereka tentu punya cita-cita mulia, dan nama terhormat. Ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM), ada Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan lain-lain di Riau, Timor Timur, Jawa Barat, dan di mana saja di mana suka.

Kebanggaan yang Memalukan

Pada awal 1990-an beredar spanduk-spanduk di Aceh. Bunyinya: ABRI siap memberantas GPK sampai ke akar-akarnya. Koran-koran Indonesia dengan bangga menyiarkan operasi yang hebat itu, dan menyanjung langkah-langkah militer dalam menegakkan kesatuan dan persatuan. Pada saat yang sama saya juga membacanya di New York. Bedanya, bukan dengan rasa bangga dan gembira, tapi justru dengan sangat malu. Mengapa GPK diberantas?

Kita ingat istilah-istilah yang seru seperti “Ganyang Malaysia!” “Inggris kita linggis, Amerika kita seterika!” dan seterusnya. Di negeri ini, pada suatu masa kata-kata itu diucapkan dengan penuh emosi. Dengan bangga dijadikan seruan nasional seperti “Merdeka!”. Banyak orang dapat menyerukannya dengan bangga. Tapi banyak juga yang merasa risi, bahkan malu memekikannya.

Pertanyaannya: mengapa hal itu terjadi? Pertama-tama adalah karena perbedaan nilai. Nepotisme atau kepercayaan

an pada keluarga yang diagungkan sebagai nilai luhur “ketimuran” bisa dianggap menjijikkan bagi pembela profesionalisme. Sebaliknya, kebebasan berpikir dan kemerdekaan berpendapat yang diagung-agungkan di “barat” bisa dinilai sangat kurang ajar, bagi para pembela feodalisme.

Kedua, perasaan tidak enak muncul mana kala kita tidak mampu menerima perbedaan wacana dan kepentingan. Jurnalisme, selain punya paradigma sendiri, juga menyampaikan cara berpikir pihak lain. Pada saat meliput harimau Jawa yang hampir punah, misalnya, seorang wartawan mau tak mau harus memilih wacana. Ia bisa membela hak hidup harimau itu, bisa juga membela hak berkembang industri dan pertumbuhan penduduk.

Demikian juga ketika meliput pertikaian dari dua kubu yang saling bertentangan, dan menyampaikan proses perubahan sebuah zaman. Jurnalis tidak hanya dituntut mencerminkan keadaan yang sedang terjadi, tapi juga menyuarakan hatinya sebagai manusia. Bukan hanya opininya, tapi juga harapannya, serta prinsip-prinsip hidupnya dalam menghadapi perubahan.

Sekarang, di manakah jurnalisme berdiri? Apakah seorang jurnalis ikut berteriak-teriak bersama demonstran yang menghujat setan belang? Atau menangis pilu bersama pengungsi? Atau justru harus dingin, datar, tidak boleh berpihak sama sekali, apalagi “ikut-ikutan”. Kalau ya, apakah itu mungkin. Apakah wartawan tak boleh tertawa dan menambah riuh-rendahnya pentas humor, atau menjerit-jerit untuk menambah kerasnya gempa bumi?

Hubungan emosional antara jurnalis dengan peristiwa tak dapat dielakkan. Sebagai manusia, jurnalis boleh ikut bergembira, mabuk kekuasaan, atau ketakutan menghadapi hari-hari depan yang tidak menentu. Dalam meliput perubahan jurnalisme berfungsi sebagai penerang, untuk membuat pemandangan lebih jelas mengenai segala sesuatu yang sedang terjadi.

Laporan dan Investigasi

Lebih dari sekadar melaporkan peristiwanya, jurnalis perlu menjelaskan mengapa suatu perubahan bisa terjadi. *Investigative reporting* adalah dasar utama jurnalisme modern. Dengan keahlian, bakat dan hak-haknya, seorang jurnalis punya kewajiban untuk mengungkap latar belakang, dan akibat terjadinya sesuatu. Apalagi bila sesuatu itu perubahan dahsyat, seperti yang melanda Indonesia dalam bergantian abad 21.

Masa transisi dipenuhi oleh bermacam-macam perubahan. Ada perubahan berpikir, yang dulu dipuja kini dibenci. Ada perubahan sosial ekonomi. Ada pula perubahan nilai-nilai, dari ada jadi tak ada, atau sebaliknya: muncul ukuran yang baru sama sekali. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana jurnalis tetap menegakkan kepala di tengah situasi yang serba berganti.

Kelemahan umum wartawan Indonesia seperti yang sering dikatakan Mochtar Lubis adalah “terlalu mudah takluk pada pejabat eksekutif”. Formalisme yang berlebihan seperti membuat birokrat menjadi segala-galanya. Selama

pemerintahan rezim militer hal itu diperkokoh dengan kontrol tangan besi, baik melalui Departemen Penerangan, maupun organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Setelah rezim militer tumbang, pers sejenak bisa bernapas, dan jurnalisme mendapatkan kembali kebebasan. Semula, untuk bernafas pun perlu bermacam-macam surat izin. Sisa-sisa pengaruh “budaya sensor” itu masih juga terasa. Misalnya, bila ada jendral kecewa kenapa pemberontak di Aceh seolah-olah dimunculkan sebagai pahlawan, sedangkan pihak militer diperlihatkan seperti “bajingan”.

Selama kekuasaan militer distribusi informasi dibatasi oleh slogan-slogan, peraturan dan undang-undang demi kewibawaan (sebetulnya: kekejaman) negara. Setelah situasi berubah, informasi jadi mengalir leluasa. Tidak perlu lagi dibendung, dibingkai, atau disalurkan dalam kerangka “pembangunan” atau “stabilitas keamanan”, “ketahanan nasional” dan macam-macam omong kosong lainnya.

Informasi adalah informasi adalah informasi. Begitu juga kebebasan jurnalisme sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia. Di mana saja, bangsa apa saja, dan kapan saja selalu memerlukan informasi. Jurnal, yang dimulai dari pengumuman harian legiun tentara Romawi, lebih dari 2000 tahun lalu, adalah alat untuk komunikasi masyarakat untuk mengetahui apa-apa yang penting dari hari ke hari.

Dalam abad ini, jurnalisme telah melahirkan bisnis dan industri informasi multidolar dan multinasional. Pada gilirannya bahkan tengah melahirkan masyarakat infor-

masi, budaya informasi, yang membuat berita menjadi konsumsi pokok sehari-hari. Di tingkat nasional, jurnalisme bukan hanya melahirkan “masyarakat baru” mendobrak, kalau tidak menghancurkan tatanan masyarakat lama, yang suka pada ketertutupan dan seringkali menikmati kerahasiaan.

Kekuatan Moral dalam Civil Society

Satu hal yang sedang ditegakkan di Indonesia dengan runtuhnya dominasi militer dan otoritarianisme adalah “ pilar-pilar ” Civil Society. Suatu bangsa tidak hanya dipimpin oleh “ pemerintah ” tetapi juga diarahkan dan diperkuat oleh kalangan non-pemerintah (organisasi swadaya masyarakat), kalangan perguruan tinggi yang otonom, kalangan bisnis dan industri yang bermoral, serta yang terpenting oleh kelompok informasi baik kalangan konsultan dan terutama media massa.

Para pemain utama dalam kebangsaan inilah membuat satu bangsa terus berkembang, melalui zaman demi zaman. Media massa dalam perkembangannya sangat berpengaruh justru pada saat terjadi perubahan-perubahan dahsyat seperti reformasi. Sekarang, kalau dipertanyakan, apakah independensi itu perlu? Jawabnya jelas: tidak lebih besar dan tidak lebih kurang. Media massa sebagai pilar masyarakat warga, sama pentingnya dengan pemerintahan, bisnis dan industri, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Di Amerika Serikat yang terkenal dengan kebebasan

persnya, media massa sering disebut sebagai “Negara Bagian Ke 51”. Artinya, setiap pemerintah federal, terutama pihak eksekutif di Washington, tak akan dapat berbuat leluasa tanpa pengawasan dan kewibawaan oleh maupun terhadap “Negara Bagian” yang menentukan reputasinya ini, yakni pers. Pemerintah Indonesia, cukup lama mengkooptasi pers dengan meletakkannya di bawah kendali “Departemen Penerangan”. Syukurlah, Presiden Abdurrahman Wahid menyadari kekeliruan yang melembaga itu, dan membebaskan media massa agar mengendalikan dirinya sendiri.

Dengan demikian, pers menjadi komponen bangsa yang merdeka. Panglima Daerah Militer (Pangdam) tak bisa lagi suka-suka hati menegur, mengintimidasi wartawan di daerah untuk memuat atau tidak muat berita tertentu. Begitu juga pihak penguasa di ibukota. Mereka tak mungkin lagi menakut-nakuti media massa dengan ancaman mencabut “Surat Izin Terbit” atau membreidelnya. Pers kita, serta merta bertanggung-jawab dan bertugas menjaga kelangsungan hidupnya sendiri. Bukan di bawah ancaman siapapun.

Sekarang, siapakah yang harus mengontrol pers? Pertama tentu pihak pers sendiri. Dan kedua, masyarakatnya. Kita dituntut untuk lebih dewasa dalam membaca, mendengar atau menyaksikan liputan pers. Tidak sebaiknya masyarakat larut dan terbawa arus begitu saja oleh “kebenaran” atau tren berita yang dibesar-besarkan atau dikecil-kecilkan oleh pers. Sebaliknya, pers juga tidak perlu terombang-ambing oleh selera pembaca. Kalau misalnya pembaca diduga gemar berita kriminal, atau liputan jorok,

pornografi, sadisme, dan sensasional, tidak semestinya pers ikut memanaskan atau “terbawa arus”. Pers perlu senantiasa independen, punya moral kuat dan berdiri tegak sebagai pembawa kebenaran.

Masalahnya, dalam ceramah saya di Medan, muncul sanggahan bahwa independensi dan transparansi pers tidak dapat ditegakkan karena wartawannya “lapar”. Sebagian wartawan terpaksa hidup dari “amplop” atau suap yang diberikan oleh pejabat sipil maupun penguasa militer. Ada juga yang hidup dari belas kasihan artis yang haus publikasi. Jadi mereka menulis berdasarkan imbalan, dan tergantung pada pemberi sponsornya. Hal ini jelas sangat memprihatinkan.

Dalam sejarah perkembangan pers dunia, kita mengenal profesionalisme dan bisnis informasi murni. Kita belajar dari suksesnya Henry Luce, pendiri majalah berita *TIME*, di Amerika Serikat. Atau raja media terkemuka Rupert Murdoch dari Australia. Atau juga sastawan dan wartawan terkemuka Indonesia seperti Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, Goenawan Mohamad. Sukses mereka justru terbangun karena moralitas yang kuat. Bukan karena sogokan, amplop, apalagi tunduk pada tuntutan “perut” dan rongrongan ideologi. Sejarah menunjukkan bahwa pers Indonesia bisa berfungsi dengan sangat baik, pada zaman yang abnormal, apalagi pada masa yang betul-betul demokratis dan penuh kebebasan.



Kebudayaan dalam Reformasi

PALING sedikit ada tiga versi penafsiran **Bhineka Tunggal Ika**. Pertama, berbeda-beda tapi sama. Kedua, sama tapi berbeda-beda. Ketiga, berbeda atau sama boleh saja. Kalangan *statusquo & konservatif* konon lebih suka tafsiran pertama. Maksudnya boleh berbeda tapi harus sama. Sedangkan kalangan *progresif idealis* lebih suka yang kedua: sama tapi perlu berbeda. Terakhir, didukung kalangan praktis pragmatis: sama boleh, beda juga boleh. Menurut dongeng, orang-orang yang pernah disebut *konglomerat* paling suka tafsiran nomor tiga.

Kalau direnungkan, mungkin di sini letak persoalan reformasi kebudayaan Indonesia. Untuk mencegah disintegrasi, harus diciptakan kebudayaan bersama yang berbeda-beda. Atau yang berbeda tapi sama. Atau sama dan beda boleh saja. Terserah mau tafsiran yang mana. Yang penting, jangan memaksakan tafsiran mana yang paling benar dan paling harus diikuti. Sama halnya kita juga tidak mungkin memaksakan satu strategi kebudayaan, agar semua orang melaksanakannya.

Amerika juga punya **E Pluribus Unum** yang disebut *Unity in Diversity*, persatuan di dalam perbedaan. Semua boleh lain-lain tetapi tetap bersatu. Caranya bagaimana? Amerika membebaskan tindakan, tetapi menyederagamkan sarana. Warganya mau berbuat apa saja boleh dan bisa, tetapi alatnya sama. Itulah Amerika. Persisnya apa Amerika itu? Ada sarana umum, jalan, pelabuhan, komunikasi, transportasi, bahasa, lapangan terbang, restoran, uang, aparat kenegaraan, fasilitas keamanan, dan sistem perpajakan, ekonomi, politik. Semua sudah baku, meskipun selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan.

Lantas di mana letak perbedaan-perbedaannya? Mungkin pada pluralisme dan inklusivisme. Segala sesuatu diupayakan banyak pilihan, berlimpah, macam-macam. Kalau bisa jangan sampai cuma ada satu jawaban untuk sebuah persoalan. Jangan sampai ada satu macam pers, satu macam musik, satu macam agama, satu macam pendapat, satu macam kebenaran. Lebih penting lagi, jangan meng-*exclude* siapapun. Justru kita terima lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tidak terkecuali bagi yang secara apriori kita cemas akan bakal “mengacaukan hidup kita”.

Pepatah mengatakan, ketakutan adalah pengetahuan yang tidak lengkap. *Fear is an uncomplete knowledge*. Kita takut pada setan, karena tidak tahu persis dia ada atau tidak, bagaimana wujudnya, dst. Kita takut pada perampok karena tidak mengenal mereka. Juga kita takut pada terorisme karena tidak yakin bisa memahami apalagi menguasai sepak terjangnya. Bila kita tahu bagaimana mengendalikan dan memanfaatkan, bahkan kepada harimau pun kita tidak takut.

Masalahnya sekarang, bagaimana kalau kita jadi takut untuk seragam dan takut untuk berbeda. Mungkin ada yang takut bagaimana kalau Indonesia bubar? Saya pernah mencemaskannya, sampai tidak bisa tidur dan tidak enak makan tiga hari lamanya. Gara-garanya, “Kelurahan Indonesia” di Ithaca, New York “berantakan”. Lurah mendadak dilecehkan, dan teman-teman memilih hidup sendiri-sendiri. Saya sedih sekali. Hal itu bermula dengan datangnya aparat kedutaan yang membagi-bagi “dana kampanye” Pemilu 1992. “Kelurahan” kami menerima 200 dolar untuk “kegiatan” Permias (Perkumpulan Mahasiswa Indonesia di AS).

Sejumlah teman marah besar. Pertama, secara turun temurun mahasiswa Indonesia di Universitas Cornell menolak Permias. Ada alergi luar-dalam terhadap segala sesuatu yang direkayasa pemerintah. Mungkin sama dengan penderitaan sejumlah besar mahasiswa Universitas Indonesia yang menentang pembentukan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dalam pertengahan 1970-an. Atau juga sinisme dan rasa sebal tak terhingga pada “Kirab Remaja” dalam dasawarsa berikutnya. Perasaan sebal ini demikian dahsyatnya sampai membuat orang berpikir lebih baik bubar, tak usah berteman, dan jalan sendiri-sendiri.

Saya yang biasa hidup dalam “kosmologi kerukunan” betul-betul sangat terganggu. Beberapa teman menertawakan saja. “Memangnya kalau Indonesia bubar kenapa?” tanya mereka. Saya pikir kalau Indonesia bubar, langit runtuh, dunia kiamat, dan saya tak ada lagi. Begitu pentingkah arti sebuah negara? Kalau tidak, mengapa berjuta-juta

orang rela berkorban tenaga, harta, bahkan jiwa untuk sesuatu yang abstrak, yaitu “negara” mereka?

Hal itu hampir terasa kembali ketika saya mendengar berbus-bus “Orang Jawa” menyingkir dari Daerah Istimewa Aceh. Juga ketika orang mulai bercanda “Jangan lupa bawa paspor kalau ke Makassar”. Maksudnya, bisa saja Indonesia Timur mendadak jadi negara lain. Rasa takut itu pula yang konon memaksa elit politik tidak memilih Megawati Soekarno Putri menjadi presiden. Mereka pikir, kalau dipaksakan negara ini bisa terpecah. Dan kalau itu benar terjadi, mungkin saya tidak akan bisa tidur apalagi makan enak selama-lamanya.

Masalahnya tentu apakah betul begitu dan mengapa demikian? Ketakutan rupanya mendapat giliran berkuasa di suatu negeri pada suatu zaman. Ada yang merasa terpaksa bersatu karena takut berlebih-lebihan. Ada juga yang terpaksa berpisah, memilih hidup di negeri lain, ikut kelompok bangsa lain, dan membangun kebudayaan yang lain pula.

Takut atau Tidak Takut?

Bila kita punya kemampuan dan kesempatan untuk merancang kebudayaan, maka agenda pertama yang perlu dipilih adalah: membuat kebudayaan yang bebas dari ketakutan. Kita perlu takut, tapi tidak takut yang berlebih-lebihan. Bila sekarang kita amati bagaimana rumah-rumah dipagar besi (termasuk kampus Universitas Indonesia!) yang terpampang jelas adalah rasa takut itu. Ketakutan

pada maling, ketakutan pada komunisme, ketakutan pada *lasjkar jihad*, ketakutan pada kristenisasi, ketakutan pada bangkit kembalinya “Orde Baru”, bahkan ketakutan pada “kok repot”nya Gus Dur, dapat kita rasakan di mana-mana.

Sekarang, siapa mau berjualan “Obat Anti Takut”? Dialah yang harus menyusun strategi. Kita perlu strategi untuk membuat Indonesia gagah-berani, tidak terkungkung oleh “sindrom penjajahan”, takut pada orang (dan kebudayaan) asing. Tidak histeris pada komunisme dan paham apapun. Tetapi pada saat yang sama, kita juga perlu menjaga agar tetap mempunyai rasa takut. Jangan sampai rasa takut jadi hilang sama sekali, sehingga dengan leluasa menyedot hutang luar negeri dan merampok sumber-sumber alam sesuka hati. Perasaan takut yang positif tetap harus dipelihara agar hidup lebih panjang, tidak menganggap enteng bahaya, tidak mempermainkan api.

Apakah itu artinya? Kita boleh takut tapi juga dilarang terlalu takut? Kalau demikian di mana jalan tengahnya? Bagaimana kita menciptakan jalan tengah agar tidak menganggap enteng, dan tidak ketakutan pada “Jawanisasi”, “Amerikanisasi”, atau desakan neo-kapitalisme dan materialisme? Pengembangan toleransi disertai penyebaran informasi kini menjadi agenda utama bangsa Indonesia. Reformasi telah mendobrak keteraturan yang semu, dan kerukunan yang terpaksa. Berbagai bentuk kemunafikan dan sandiwara, yang selama bertahun-tahun dimainkan dan dianggap wajar, kini mulai disadari sebagai kekeliruan, bahkan kejahatan.

Perubahan dan Wacana Krisis

Masa penyadaran ini memberi kesempatan kita untuk melakukan pendalaman dan kesungguhan di berbagai kegiatan. Tetapi perlu diperhatikan beberapa determinan “jalannya” kebudayaan. Pertama, berbeda dengan beribu tahun sebelumnya, kini masyarakat luas punya akses langsung pada informasi, berkat terbukanya dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Kedua, pasar bebas telah membuka berbagai sekat, sehingga batas-batas wilayah kebudayaan hilang sama sekali. Perekonomian dunia mengembangkan karakteristik baru yang cepat berubah, penuh variasi dan fluktuasi, sehingga tidak memungkinkan diterapkannya strategi baku. Jadi, strategi pengembangan kebudayaan perlu berubah cepat dari waktu ke waktu. Ketiga, dunia menemukan berbagai hal baru dalam aspek kesehatan dan rekayasa genetika. Belum pernah manusia merasakan ancaman penyakit hilangnya kekebalan tubuhnya sendiri (AIDS) dan mendapatkan makanan dengan karakteristik baru sama sekali melalui bioteknologi.

Ketiga faktor itu menerpa Indonesia dengan tidak semena-mena dalam tempo kurang dari tiga tahun. Krisis perekonomian Asia telah membuat bangsa yang dinyatakan berpenghasilan perkapita \$ 700 pada awal 1997, mendadak jatuh miskin menjadi kurang dari separuhnya. Kekacauan sosial-politik dan runtuhnya “Orde Baru” diperjelas dengan terjadinya penjarahan, hilangnya norma-norma dan tatanan hukum. Pertanyaan yang segera timbul adalah, kebudayaan apa yang lahir pada masa kalut demikian, dan strategi apa yang perlu ditempuh agar

Indonesia tidak kehilangan segala-galanya. Langkah-langkah apa yang dapat menyelamatkannya? Singkatnya: bagaimana bisa tetap hidup berbudaya di dalam kekalutan, kesemrawutan, dan perubahan besar-besaran itu?

Tunggu dulu. Ada lagi faktor keempat yang menambal runyam semuanya: kerusakan lingkungan hidup! Hanya dalam satu abad manusia menghancurkan kualitas dan kapasitas bumi menjadi jauh lebih buruk daripada yang dilakukan nenek moyang selama 20.000 tahun sebelumnya. Di Indonesia, kerusakan alam itu berlipat ganda dengan terjadinya kebakaran hutan, pencemaran oleh industri, serta habis-ludasnya sumber-sumber alam. Jadi, bukan saja masyarakat yang menjadi jauh lebih miskin karena krisis ekonomi, tapi juga lingkungan yang hancur, membuat semakin sukar hidup dengan perasaan tenang. Manusia dan alam Indonesia menjadi miskin luar dalam, lahir batin. Jadi bagaimana cara menyelamatkannya?

Salah satu jawaban yang paling dominan adalah memecahkan masalah dengan uang. Program Pangan Dunia (WFP) memasok makanan kabarnya untuk 2 juta orang di Jabotabek saja. Berbagai jaring pengaman sosial diciptakan, baik melalui pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dengan bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Rakyat ditolong agar tetap hidup, tetap *nyanyi*, menari, melukis, bersastra, berpendidikan, menciptakan berbagai produk budaya.

Masalahnya mungkin, produk budaya apa yang lahir pada periode gawat demikian? Lebih penting lagi, bagaimana dan kapan kondisi semrawut ini berhenti? Dapatkah kita menciptakan keteraturan baru, kejajaran

baru, supremasi hukum dan kesepakatan. Atau justru semuanya akan semakin bebas, terbuka, dan *semrawut* pada masa mendatang? Gelagatnya itulah yang akan kita hadapi. Berbagai wacana baru seperti federalisme, otonomi daerah, dan kemerdekaan merebak dan bertarung seru. Keleluasaan berpikir dan berbicara membuat banyak orang yang beratahun-tahun dipaksa diam, tidak boleh berpikir, harus menentukan nasibnya sendiri. Sihir “Orde Baru” yang seakan-akan menentukan nasib siapa saja mendadak hilang sama sekali, dan setiap orang dipersilakan menemukan, menciptakan sihirnya sendiri.

Strategi paling penting menurut saya dalam menciptakan sihir itu adalah secara konsisten menanamkan *sense of crisis*. Kita bangun wacana bahwa setiap orang sedang berada di ujung tanduk nasibnya masing-masing. Presiden Abdurrachman Wahid pada hemat saya telah mempelopori hal ini dengan sangat brilian. Gus Dur membuat suasana tidak pasti justru menjadi hal yang rutin, yang berkembang dari hari ke hari. Bisa dipahami bila banyak pihak merasa terancam, terpukul, dan terganggu dengan persilangan politiknya. Tetapi justru itulah yang kita perlukan. Kita tidak butuh rasa *adem ayem* untuk bekerja enak-enakan. Justru kegelisahan, kebingungan itulah yang bisa membuat kita berprestasi. Dalam pengembangan sumber daya manusia dikenal motivasi dikejar macan, atau “berada di ujung tanduk”.

Sejak awalnya kita menyaksikan bagaimana Gus Dur dikarikaturkan dalam bahaya. Misalnya sebagai orang buta mengemudikan bus atau meniti selembur rambut, menyeberangi neraka, dan seterusnya. Itu bagus sekali. Manusia

diletakkan selalu dalam bahaya, dalam ancaman, dalam ketegangan, dalam dorongan besar sampai berhasil melakukan hal-hal yang mungkin jauh di atas kemampuannya. Selanjutnya adalah giliran kita masing-masing untuk diletakkan di ujung tanduk. Kita jadi sadar bahwa sewaktu-waktu bisa kehilangan pekerjaan, toko dan pabrik bisa dibakar, dan mahasiswa yang paling pintar pun bisa *lontang-lantung* tidak mendapat lowongan.

Dalam masyarakat industri, paradigma “membunuh atau dibunuh” mulai diperkenalkan dan mendapat berbagai tanggapan. Perusahaan Aqua-Danone, tempat saya bekerja sejak 1999, misalnya, menerapkan motto: **Go, Fight, and Win!** Kita sedang perang. Paradigma ini dikembangkan di seluruh dunia untuk memupuk semangat kompetisi dan aktualisasi dari waktu ke waktu. Kabarinya paradigma “di ujung tanduk” ini pula yang telah membuat Jepang dan Israel menjadi sangat kuat. Dari waktu ke waktu masyarakat disadarkan bahwa mereka berada dalam bahaya, hidup semakin sulit, ancaman semakin besar dan datang dari mana-mana. Akibatnya orang menjadi kreatif, inovatif, berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan peran hidupnya.

Di Indonesia, pada masa lalu, justru menekankan bahwa suasana tentram, adil, makmur. Adem ayem. Dalam bahasa Jawa malah ada slogan *Gemah-ripah lohjinawi, tata-tentrem kertaraharja*. Maksudnya subur makmur, tentram teratur, sejahtera. Padahal, itu diucapkan di daerah yang tandus, miskin, sukar air, banyak maling dan sama sekali tidak sejahtera. Uniknya orang percaya dan menikmati “nina-bobo” itu sebagaimana para guru sekolah

dasar mabuk kepayang ketika dinyanyikan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, padahal digaji *nauzubillah* rendahnya.

Sekarang paradigmanya terbalik: Indonesia ini melarat, rusak, kacau balau dan cepat harus diperbaiki. Hukum tidak jalan. Korupsi merajalela. Moral bangsa amburadul, sementara dunia sedang perang dan mau mengunyah-ngunyah kita. Tentu saja kalangan yang sudah biasa berkhayal hidup tentram jadi terusik dan marah. Mereka tidak bisa lagi berbuat sesuka hati. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat subur bila presiden diam-diam saja. Tetapi pada saat *reformasi*, orang jadi sadar bisa sewaktu-waktu digugat, kehilangan pekerjaan, dikecam dan dipermalukan di muka umum. Makanya tidak ada alasan untuk bekerja malas-malasan. Terutama bagi para seniman dan budayawan.

Seharusnya sejak dulu budayawan menyadari pentingnya kreatif, kompetitif, produktif, evaluatif, korektif, apresiatif, aspiratif dan berkarya seperti dikejar macan. Saya yakin Sutan Takdir Alisjahbana dan HB Jassin telah memberi contoh yang baik. Demikian juga di bidang senirupa: Affandi, Sudjojono, dan banyak lagi di lapangan tari, film, musik, teater, patung, dan lain-lainnya. Mereka telah bekerja keras untuk membangunkan bangsanya. Anda boleh bertanya kalau seniman dan budayawan tidak mau mendevasakan masyarakat, lalu mau apa?

Sudah waktunya menghapus kesan bahwa kebudayaan Indonesia digarap dengan enak-enakan. *Adem ayem*, penuh basa-basi, tanpa gairah, miskin kritik, apalagi persaingan terbuka. Sudah terlalu lama juga kesenian dipersempit menjadi sekadar “hiburan”. Sekarang, betul-betul

ada kesempatan untuk mendobrak, mengguncang dan mendewasakan Indonesia. Dalam kerangka itulah saya pikir kita perlu berlari-lari, berbeda-beda dan bersama-sama.



Kepeloporan dan Reformasi

*Menjaga Bung Karno
menjaga Bung Hatta
menjaga Bung Sjahrir...*

SEMINAR Asas di kampus IKIP Bandung, 29 April 1999, saya anggap penting mengingat genap 50 tahun Chairil Anwar meninggalkan kita. Mengapa wafatnya Chairil relevan diperingati? Karena diharapkan mati satu tumbuh seribu! Setelah kematiannya, 28 April 1949, ribuan anak muda dengan ratusan sepeda dan andong, mengarak jenasahnya dari kamar jenasah di CBZ (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sekarang) ke kuburan Karet Bivak. Perdana Menteri, Sutan Sjahrir, hadir memberikan pidatonya. Indonesia tiba-tiba dikenal sebagai bangsa yang berbudaya, punya penyair besar, dan punya karya-karya sastra.

Tahun 1999 Indonesia kembali mengenang Sutan Sjahrir sebagai “guru bangsa”. Wafatnya Ibu Poppy Sjahrir, bulan Maret, dan Rahmi Hatta bulan berikutnya, sekaligus memicu semangat bahwa pikiran-pikiran cendekiawan muda 1940-an masih sangat relevan. Luapan semangat untuk mengadakan perubahan justru sangat tepat untuk diteruskan. Gelora reformasi Indonesia mengingatkan pada kita bahwa kepeloporan generasi muda selalu diperlukan.

Keberhasilan mahasiswa menyegarkan sejarah perjalanan bangsa, dengan menumbangkan rezim militer di bawah Jendral Soeharto, Mei 1998, adalah bukti nyata betapa pentingnya peranan angkatan muda.

Chairil Anwar adalah monumen besar generasi muda Indonesia. Usianya baru 27 tahun ketika berhenti bernafas. Tapi hidup dan semangatnya dilanjutkan oleh beribu-ribu Chairil baru. Ribuan penyair di sekolah, kampus-kampus, dan anak-anak jalanan Indonesia mendapatkan kebanggaan dan kesempatan mengekspresikan isi hatinya berkat “kebebasan berkreasi” yang digulirkan melalui sajak-sajak bebas dengan gaya Chairil. Itulah jasa pertama “Pelopor Angkatan 45” dalam kesusasteraan Indonesia. Tanpa hembusan besar dari nafas Chairil, sukar membayangkan bagaimana kebebasan menulis puisi modern yang bebas dapat merasuk hingga ke desa-desa.

Kita ingat, hingga penghujung 1930-an perpuisian Indonesia belum terbiasa dengan bentuk-bentuk bebas. Bahkan pembaruan oleh Muhamad Yamin juga mengutamakan disiplin format, meskipun dianggap baru, yaitu soneta, yang patuh dengan rambu-rambunya. Begitu juga dengan persajakan Indonesia dalam kurun *Poedjangga Baroe*. Berkat Chairil, generasi penerus sastra Indonesia seperti terbebas dari kungkungan kaidah penulisan, sehingga muncul penulis-penulis non-konvensional dan generasi “pewaris kebudayaan dunia” seperti Rifai Apin, Asrul Sani, Rendra, Ajip Rosidi, Ramadhan KH, Toto Sudarto Bachtiar, dan seterusnya.

Jasa Chairil Anwar lain yang sangat menentukan perkembangan kebudayaan Indonesia adalah menyulut

dan mengobarkan individualisme. Pramoejya Ananta Toer mencatat, bahwa Chairil adalah orang Indonesia pertama yang dengan gagah berani menampilkan kepribadiannya, “keakuannya” atau individunya. Hal itu masih dapat dirasakan kebenarannya hingga 1990-an bila orang lebih suka menggunakan “kami” atau “kita” sebagai kata ganti pertama, dan bukannya “Aku” atau “Saya”.

Sajak-sajaknya yang bermuatan politis dan ditulis mirip teks pidato selanjutnya banyak digemari dan dipanggungkan dalam format kesenian yang baru, yakni seni membaca puisi. Pembacaan sajak-sajak Chairil Anwar yang pertama kali mendapatkan publikasi nasional diadakan di Singaraja, Bali, kira-kira 40 hari setelah kematiannya. Sejak itulah karya-karya Chairil Anwar melahirkan profesi baru, yakni deklamator. Dunia melihat acara baca puisi Indonesia sebagai cabang dalam “seni pertunjukan” (*performing arts*). Hal itu berkenaan dengan kostum, properti, gaya, *setting*, *blocking* dan unsur-unsur tontonan yang seringkali dipakai untuk menyedot perhatian pemirsa.

Pertanyaan yang sering terlupa adalah, mengapa Chairil Anwar, yang hanya mendapatkan pendidikan sampai kelas 2 MULO (atau SLTP, sekarang) menjadi begitu penting, bahkan juru bicara sastra Indonesia di panggung dunia. Jawaban yang sinis mengatakan, bahwa Chairil menjadi begitu penting karena dibesar-besarkan oleh Hans Bague Jassin. Tentu jawaban itu keliru, kendati HB Jassin sendiri mengatakan bahwa Chairil besar karena tak punya saingan. “Di langit yang sepi dan gelap, seekor kunang-kunang pun menjadi lebih terang daripada obor,” begitu katanya pada saya.

Pada hari Jumat, saya mengajak HB Jassin menjenguk makam Chairil di Karet. Bagi banyak sastrawan, adalah hal biasa menengok kuburan temannya. Termasuk Rendra, juga menziarahi Chairil bila akan pergi melawat ke luar-negeri untuk menyiarkan sastra Indonesia. Pendek kata, Chairil telah menjadi simbol lahirnya kesusasteraan Indonesia modern, yang dihormati oleh para penerusnya.

Tetapi sekali lagi, mengapa ia menjadi begitu penting, meskipun hanya menulis sekitar 80 judul sajak, dan banyak di antaranya terbukti “saduran”? Jawaban yang simpatik mengatakan, Chairil seperti halnya Kartini, berhasil menjadi hati nurani yang menyuarakan hak asasi bangsanya, untuk menjadi warga dunia yang berbudaya.

Perlawanan Chairil terhadap kekakuan tradisi sastra, kungkungan berekspresi oleh kolonialisme Jepang, dan sikap proaktifnya dalam mendukung kemerdekaan, membela pemimpin, ternyata membuka mata dunia, bahwa Indonesia punya hati nurani, punya roh yang kreatif dan merdeka.

Tentu saja pemujaan terhadap Chairil juga seringkali berlebihan. Tetapi yang penting adalah, kekaguman terhadap Chairil murni timbul dari bawah. Dalam acara-acara lomba baca puisi, kita mudah menemukan anak-anak muda yang bergaya-gaya seperti Chairil Anwar, pakaiannya, potongan rambutnya, cara memandang yang acuh tak acuh, dan “nyentrik” seperti yang tergambar setiap kali ingat si “Binatang Jalang”. Gejala itu, masih nampak dalam Lomba Puisi Perempuan dan Reformasi, di Jakarta 21-24 April 1999, kendati popularitas baca puisi mulai dipertanyakan.

Kedua, seperti halnya RA Kartini, Chairil muncul sebagai “pahlawan” karena desakan dari rakyat jelata. Mulai 1965, misalnya diusulkan agar 28 April menjadi “Hari Sastra Nasional”. Kita harus catat juga, bahwa Hari Kartini diperingati rakyat sejak jauh-jauh hari, sebelum Kartini dinyatakan sebagai pahlawan pada 1964. Rasanya, Chairil juga belum dinyatakan sebagai pahlawan nasional hingga sekarang, sehingga penerbitan karya lengkapnya, 28 April 1999 oleh puterinya bersama majalah Horison, dapat menggaris-bawahi kepeloporan dan jasa-jasanya.

Mulai 1992 nama Chairil Anwar menjadi lambang tertinggi penghargaan sastra Indonesia. Hingga 1997, tiga orang telah menerimanya: Mochtar Lubis, Rendra, dan Sutardji Calzoum Bachri. Apakah nama Chairil Anwar kini berubah dari simbol kepeloporan, pemberontakan generasi muda menjadi simbol “kemandegan”, *establishment* bagi pengarang-pengarang senior yang dianggap telah mencapai puncak prestasinya? Kalau itu yang telah terjadi, rasanya setiap generasi muda Indonesia harus merebutnya! Chairil Anwar adalah perlambang bangkitnya “binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang”. Mungkin akan tepat seandainya diabadikan buat penyair muda usia, dan luar biasa karyanya. Bukan cuma mahkota bagi sastrawan diambang pensiun, sekalipun melambangkan puncak keberhasilan mereka.

Meskipun demikian, harus juga disadari bahwa Chairil Anwar adalah pencipta tradisi yang bersinambungan. Keindahan sajak-sajaknya “Derai-Derai Cemara”, “Senja di Pelabuhan Kecil” akan selalu abadi. Chairil telah juga menciptakan puisi-puisi monumental, yang tidak semata-mata

kontekstual dengan keadaan zaman revolusi yang dilewatinya. Betul juga kata John Keats, *“A thing of beauty is a joy forever”*.

Ia juga mengantisipasi masa depan bangsa Indonesia, seperti diungkapkannya dengan sajak “Diponegoro” atau “Pembangunan”. Memang ungkapannya “kuno” dengan “pedang di kanan, keris di kiri” dan seterusnya. Tapi tetap aktual karena “berselempang semangat yang tak bisa mati.”

Secara singkat, Chairil Anwar penting, karena ia menjadi prototipe manusia Indonesia yang inovatif, korektif, proaktif, bertoleransi tinggi dan berpandangan luas. Sajaknya “Isa” untuk “pemeluk teguh” (LK Bohang) adalah satu contoh penghayatan religius mendalam, yang akan selalu menjadi pelajaran bagi para generasi sesudahnya. Chairil Anwar tidak mempermasalahkan lagi “Barat” dan “Timur”, karyanya bebas dari dendam kolonialisme, atau penindasan rasial. Ia mengobarkan individualisme, lengkap dengan tanggungjawabnya menjaga kebebasan dan kehidupan.

“Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sjahrir”, adalah satu contoh responsifnya terhadap kebutuhan zaman dan kondisi politik saat itu, yang ternyata dapat kita rasakan relevan hingga sekarang. Dengan serta merta, ketika ancaman teror terhadap para pejuang reformasi, kata-kata Chairil dapat dilanjutkan “Menjaga Amien Rais, menjaga Megawati, menjaga Gus Dur...” dan seterusnya.

Semangatnya untuk melindungi – betapapun lemahnya – dan semangatnya untuk hidup – betapapun pendek

usianya – tetap menjadi inspirasi bagi putera-puteri Indonesia untuk kreatif, inovatif, dan berani mengemukakan diri sekuat tenaga serta setulus-tulusnya.

Membicarakan Chairil Anwar pada dasarnya adalah mengungkapkan awal kebangkitan kreativitas anak-anak Indonesia dalam mengolah bahasa, pemikiran, dan isi hatinya. Dari Chairil juga saya mulai terdorong untuk turut menjadi penyair buat sejarah, masa depan, buat gunung, buat kota, laut, hutan dan rakyat Indonesia. Patungnya setengah dada yang menghiasi pusat kota Malang, tempat saya dibesarkan, mengungkapkan aspirasi dan apresiasi rakyat Indonesia, betapa bangga kita punya penyair seperti dia. Begitu juga sajak-sajaknya yang dipahatkan di taman kota, makam pahlawan, kantor-kantor, sekolah, maupun sekadar di simpang jalan.

Memang ada bahaya bahwa kita jadi lebih kenal dengan mitos Chairil ketimbang karya-karyanya. Dalam kenyataannya, sulit mendapat buku puisi Chairil, meskipun namanya menjadi nama jalan dan taman hampir di setiap kota. Reformasi sosial, budaya, politik dan ekonomi, hendaknya mengarahkan kita untuk lebih mendekatkan diri pada kebenaran. Chairil Anwar, Kartini, dan nama siapa-pun tidak semestinya dicatut untuk memudahkan kita menyusun satu acara dan mencari dana.

Semangat para tokoh itu yang hendaknya lebih menggerakkan kita, untuk memberi makna kebebasan berkarya, yang kini semakin terbuka dengan runtuhnya rezim militer yang otoriter. Semangat hidup bebas dan berpikir bebas, seperti diteladankan Chairil hendaknya memupuk gairah kita untuk mencapai prestasi terbaik, bakat dan kemampuan

terbesar yang kita miliki. Seperti halnya para pelopor di bidang-bidang lain, Chairil telah memberikan contoh terbaiknya bagi kita.

Maka, dapatkah kita melihat semangat Chairil Anwar pada mahasiswa, penyair muda Indonesia 1990-an bila menerbitkan puisinya sendiri, menyuarakan penderitaan rakyat di Aceh, Papua, perempuan yang diperkosa, menyerukan agar Presiden Habibie serius, dan Jendral Wiranto berani menghancurkan kejahatan? Kesusasteraan Indonesia menunggu munculnya Chairil Anwar masa kini, yang berani dan mampu menjawab tantangan zamannya.

Ayu Utami, Sitok Srengenge, Seno Gumira Ajidharma, adalah segilintir contoh kecil dari ratusan, bahkan ribuan penulis-penulis baru Indonesia yang memperlihatkan bakat dan kesanggupannya untuk tampil di panggung internasional. Sekarang, tantangan yang harus dijawab adalah, bagaimana sastra pasca nasionalisme Indonesia. Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, dan penulis lain sejamin mereka telah mempersembahkan karya-karya yang memungkinkan Indonesia “lulus” menjadi bangsa yang beradab dan berbudaya. Dapatkah para penerus mereka menghasilkan karya-karya yang menunjukkan meningkatnya kedewasaan bangsa Indonesia?

Relevansi memperingati Chairil Anwar pada reformasi politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan Indonesia, terletak pada pertanyaan: mampukah para penulis Indonesia abad 21 meneruskan semangat pembaruan sebagaimana dikobarkan oleh pria kerempeng, sakit-sakitan dan mati sengsara, dalam kemelaratan materi, tetapi berlimpah-limpah dalam semangat, sampai berani bilang

“aku mau hidup 1000 tahun lagi!”

Sejarah bahasa dan sastra di kepulauan ini memperlihatkan bahwa hampir setiap pujangga adalah juga pemberontak, kalau bukan pembaharu tradisi di kalangan masyarakat. Pada abad sebelum Chairil, di kalangan Melayu kita mengenal Abdullah Abdulkadir Munsyi, yang juga pelopor percetakan, setelah menjadi kerani pada Thomas Stamford Raffles. Di Jawa ada “pemberontak” dan “*trend setter*” lain, yakni Ronggowarsito, yang berteman dengan C.F. Winters.

Selama “Orde Baru” ada upaya untuk merendahkan martabat pemberontak sebagai “pengacau keamanan” dan para pujangga seumur Chairil sebagai “penyair muda”. Padahal, dalam pikiran yang bebas dan merdeka, RA Kartini yang meninggal dalam umur 24 tahun sudah menjadi “Ibu Kita”, Sudirman yang 30-an tahun diperlakukan sebagai “Panglima Besar”, begitu juga Chairil, adalah “Penyair Besar”. Maka, kalau ia hidup, saya yakin tidak akan rela melihat kaum sebayanya diperlakukan sebagai “pengarang remaja” atau Anak Baru Gede (ABG), seperti yang sering kita dengar kalau kalangan statusquo merendahkan martabat penerusnya sendiri.

Oleh sebab itu, reformasi pertama yang dapat membuat kenangan terhadap Chairil menjadi relevan dan bermakna, adalah: bila kita sanggup berhenti berpikir bahwa laki-laki dan perempuan berumur 25 tahunan masih dianggap “ABG”, “Remaja”, dan “Angkatan Muda” yang secara sengaja dimanjakan dan dikerdilkan perannya. Kita bisa kembali gunakan kata-kata Chairil, bahwa para mahasiswa Indonesia tahun 2000-an, “sudah lama bukan kanak

lagi. Sebab ada suatu bahan yang jadi perhitungan kini", yakni: telah menumbangkan otoritarianisme dan kepicikan generasi pendahulu, yang bangga sebagai "Angkatan 45", dan Chairil termasuk seorang pelopornya!





Mobilisasi Massa dan Peran Media

SEBETULNYA banyak hal dapat dilakukan oleh media massa untuk ikut mendidik rakyat. Kita ingat betapa efektif dan efisien pengerahan massa untuk kampanye pemilihan umum. Kampanye serupa untuk program pembersihan sungai dan penjernihan udara jauh lebih praktis. Juga apa bila terjadi bencana alam, sentilan pers sedikit saja sudah berhasil mengumpulkan bermilyar rupiah. Karena itu, mestinya pers dapat membakar semangat orang untuk menjaga sungai, pantai, bumi dan langitnya. Buktinya pers dapat berfungsi dengan sangat efektif ketika mengumpulkan dana bantuan bagi para korban bencana alam dan pengungsi.

“Kemalasan” pers untuk lebih serius menyoroti masalah pencemaran udara dan air ini diperburuk lagi oleh sikap acuh-tak acuh, beo membeo dan bebek membebek di kalangan masyarakat. Ada pengalaman lucu di muka kantor Gubernur Jawa Barat di Bandung. Pada suatu hari beberapa ratus murid Sekolah Menengah Umum (SMU) berbaris di seputar kolam yang sangat kotor. Seorang turis

Belanda heran luar biasa. “Mengapa mereka hanya baris berbaris? Apakah tidak mungkin disuruh mencebur ke air dan membersihkan kolam itu?” Kalau kepala kita sehat, tentu sukar mengerti apa gunanya baris berbaris di seputar kolam yang kotor itu? Tetapi dengan berlagak pilon, kita bisa bilang, para pemuda-pemudi harapan bangsa tidak mungkin membersihkan got dengan pakaian necis ber-seragam.

Para wartawan Jepang juga menyinggung parodi kebersihan ini di Yomiuri Shimbun, NHK, dan lain-lain. Ketika hal itu saya tanyakan sebabnya pada sastrawan Pramodya Ananta Toer, beliau menjawab singkat, “Bangsa Jepang secara tradisional memang pembersih.” Dengan kata lain, pikiran kita yang tidak dilengkapi dengan *notion of cleanliness*, sehingga secara umum tidak dapat membedakan mana yang bersih dan mana yang tercemar. Masyarakat yang pengotor otomatis menghasilkan pers yang pengotor dan tidak adil pula. Masalahnya sekarang, apakah kita rela media massa Indonesia menjadi sumber polusi, dan ikut-ikutan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakatnya?

Secara fundamental hal itu mudah kita jawab. Pers Indonesia yang sejak kelahirannya dikenal sebagai media perjuangan, tentu berharap dapat senantiasa berperan dalam mendidik dan mengantar masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Tinggal sekarang masalah teknis, bagaimana mengolah dan menyiasati peduli pencemaran air dan udara yang merata di kota-kota, desa-desa, bahkan di hutan saat terjadi kebakaran. Seperti telah dimaklumi, menjadi wartawan lingkungan bukan me-

nunggu sampai segalanya terjadi. Sebagian tugasnya justru menuntut agar ikut mencegah yang terburuk jangan sampai terjadi. Wartawan lingkungan adalah juga aktivis, pejuang, yang tidak akan membiarkan bencana terjadi di depan mata.

Sayangnya, pers juga terikat pada kaidah komersial yang menentukan laku atau tidaknya sebuah berita. Sungguh menyedihkan bila ada yang berpikir berita akan laku kalau bersifat sensasional, ekstrim, dan dilebih-lebihkan. Secara mencolok hal itu dapat muncul dalam bentuk peliputan sepihak, analisa yang dangkal dan narasumber yang asal comot. Demokrasi telah memungkinkan pendapat seorang pakar lingkungan sejajar dengan “sembarang suara keras” yang lebih menarik, meskipun belum tentu lebih benar. Satu contoh, pernah ada wawancara dengan seorang tukang ojek yang kebetulan sakit hati pada sebuah pabrik. Ia menjadi tukang ojek setelah terkena PHK, dan dalam wawancara seolah-olah menjadi pakar *waste water treatment*, padahal sebelumnya hanya seorang satpam.

Pendekatan *human interest* semacam itu bisa sangat menarik. Namun bila peliputannya tidak adil, berita sekecil apapun dapat menimbulkan kerugian finansial bagi industri dan menanamkan kebencian di hati publik.

Peliputan yang adil bukan bertujuan destruktif, melainkan untuk menegaskan kebenaran. Dalam hal pencemaran udara dan air, kebenaran bukan hanya didasarkan pada kepentingan manusia (antroposentris) tetapi juga kepentingan alam (ekosentris). Bocornya kapal tanker di laut yang sunyi adalah berita besar, sekalipun tidak menjatuhkan korban manusia secara langsung. Begitu

juga pembuangan berjuta liter minyak goreng bekas dari dapur warga kota sebesar Jakarta, mestinya bisa selalu menjadi berita. Seorang wartawan yang cermat dapat menghitung dengan mudah, berapa liter konsumsi minyak di Jabotabek, dan berapa yang dicurahkan begitu saja ke got. Begitu juga emisi gas asam arang ketika kompor minyak tanah dipadamkan sembarangan.

Tidak mudah menuding masyarakat luas sebagai pencemar. Apalagi dalam masyarakat yang rendah kepekaannya terhadap lingkungan. Sepotong puntung rokok di trotoar Singapura bisa bikin masyarakat gempar, tapi seribu perokok menyesakkan angkot dan pertokoan di Jakarta, tidak menjadi berita apapun. Dengan kata lain, wartawan Indonesia masih harus bekerja keras untuk mengasah kepekaan publik. Inilah peluang besar bagi setiap wartawan, untuk sekaligus menjadi pejuang lingkungan. Wartawan bisa mengoreksi berbagai paradoks dan parodi yang mewarnai pemberitaan masalah pencemaran air dan udara, atas nama kesehatan rakyat.

Menulis untuk Kejernihan

Pencemaran air dan udara terjadi setiap hari. Tetapi mengapa jarang menjadi berita? Apakah seorang yang terbatuk-batuk, terserang sesak napas karena tetangganya merokok, lantas jadi sakit-sakitan dan mati, tidak cukup menarik untuk diberitakan? Atau jika anda melihat ribuan ikan mati terserak di sepanjang pantai dan sungai karena teracuni limbah, tidak tersentak lagi, karena sudah sering terjadi dan menjadi hal yang biasa?

Jawaban pertama, mungkin wartawan kurang pandai memilih sudut pandang, atau menggali aspek-aspek yang menarik.

Sebelum perang, ada pabrik candu di Jalan Salemba Raya, yang menjadi bagian dari kampus Universitas Indonesia. Konon, kalau pabrik sedang memproduksi, burung yang terbang di atasnya bisa jatuh, mabuk atau teler karena menghisap udara tercemar candu. Cerita pencemaran macam ini terus saja menarik, sekalipun sudah lama tidak terjadi lagi. Kita dapat berulang-ulang menceritakannya pada saat bicara tentang “narkoba”, pengusuran gedung tua, bahkan kalau menyinggung sumber-sumber gas buangan.

Sekarang, alangkah baiknya kalau kita tetap terus mendapat cerita-cerita tentang pencemaran, terutama yang sedang terjadi. Masalahnya, mungkin untuk apa kita beritakan adanya pencemaran, dan betulkah cerita itu ‘laku dijual’. Jangan-jangan tidak menarik segmen pasar yang kita bidik, dan malah menurunkan oplah media kita.

Jawaban kedua, tak banyak peminat cerita atau berita pencemaran.

Jadi ada mitos (atau kenyataan?) pertama yang harus didobrak, yaitu “sedikit peminat kisah lingkungan”, terutama peminat masalah pencemaran air dan udara. Dalam karir saya sebagai environmentalis, baru sekali merasa sukses meluncurkan isu pencemaran, yakni ketika mengadakan seminar “Kualitas Udara dalam Ruang”. Waktu itu, 1997, hampir semua media mengutip pidato saya, “Kemitraan untuk Bernafas”, dan dengan penuh antusias

memberitakan perlunya menjaga mutu udara di dalam kamar dari dampak pencemaran.

Sumber-sumber pencemaran yang baru diketahui, seperti karpet, cat tembok, asbestos, dan baterai bekas, rupanya menarik minat para wartawan. Mereka menulis agar masyarakat mewaspadaikan bahan-bahan pembersih lantai, shampo karpet, dan pengawet kayu untuk meja dan kursi. Apakah hal-hal itu tidak menarik lagi pada masa kini?

Jawaban ketiga, banyak berita lain yang lebih menarik.

Salah satu alasan yang membuat kita enggan menampilkan berita pencemaran, adalah takut kalah menarik dengan berita lain. Banyak gosip, isu politik, dan cerita ketegangan sosial yang mungkin lebih layak dibaca orang. Akibatnya, kita merasa malas menggali, melakukan investigasi, maupun mengolah masalah-masalah pencemaran udara dan air. Kecuali, barangkali sudah ada korban yang berjatuh, menyangkut keluarga atau diri sendiri, dan membawa-bawa nama yang “bisa dijual”.

Untuk merespons ketiga sebab itu, saya pikir perlu diperkenalkan wacana baru. Kita perlu meningkatkan sensitivitas publik pada masalah pencemaran. Selain itu juga melengkapi diri kita dengan cara pandang baru, mengenai manfaat dan pengaruh memberitakan masalah pencemaran, khususnya yang terjadi terhadap air dan udara.

Sumber Berita Potensial

Sarat pertama untuk menampilkan kisah pencemaran, adalah menyangkut dengan tokoh masyarakat, pejabat,

atau orang-orang terkenal (*celebrity*) yang bisa memancing minat orang. Kalau bintang film pujaan banyak orang, atau Da'i Sejuta Ummat terbatuk-batuk, atau terserang gatal-gatal karena mandi dengan air tercemar, barangkali berita pencemaran dapat menduduki halaman muka. Atau pabrik yang dimiliki pejabat penting, tokoh penting, ternyata mengeluarkan limbah dan mencemari sungai, maka kita berebut menulisnya.

Jadi sumber berita ini penting untuk mendongkrak daya tarik kisah pencemaran. Untuk memenuhi hal itu, wartawan dapat mewawancarai tokoh-tokoh penting yang bersedia melibatkan diri dengan kejadiannya. Minimal memberikan komentar terhadap peristiwa pencemaran. Sebagai contoh, orang terkaya di satu daerah dapat diwawancara mengenai kualitas udara dan air di sekitar rumah atau pabriknya. Demikian juga turis yang kebetulan berkunjung ke daerah, atau orang-orang penting lain, meskipun bukan pakar untuk air dan udara.

Tetapi siapakah sumber berita paling potensial? Sebetulnya adalah wartawan itu sendiri. Anda akan lebih akurat mengutip pendapat sendiri, daripada pendapat orang lain. Untuk itulah anda perlu mengembangkan kemampuan berpendapat. Siapakah yang lebih gampang diwawancarai kecuali diri sendiri? Tentu tidak ada. Masalahnya, apakah anda telah membangun kepribadian sedemikian rupa sehingga layak diwawancarai, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan paling kritis yang datang dari lubuk hati sendiri?

Bila wartawan mampu mengembangkan diri sedemikian rupa, bahan apapun yang diolahnya akan menarik perhatian banyak orang. Khususnya untuk pencemaran air

dan udara, kita dapat memanfaatkan keterkaitan masalah lokal dengan isu regional maupun global. Tidak ada batas geografis dalam peliputan masalah pencemaran.

Mengenal Indiktor Mutu Udara dan Air

Hal kedua, selain potensi sumber berita, wartawan dapat melengkapi diri dengan pengetahuan mengenai indikator lingkungan yang baik. Seringkali kita tidak tahu baku mutu udara dan air. Kita perlu mendapat pegangan sampai di mana kualitas udara atau air dapat dinyatakan buruk. Lebih dari itu, kita perlu mengenali indikator biologis yang sewaktu-waktu dapat menolong kita untuk memahami kualitas air dan udara.

Untuk air, misalnya, kita dapat mengenali berbagai jenis serangga atau kutu air. Bila sebuah sungai masih dihuni oleh banyak satwa, tandanya masih belum terlalu tercemar. Juga bila kita masih menemukan kunang-kunang beterbangan di malam hari, tandanya kualitas udara dan air di sekitar itu masih baik. Kita bisa catat bahwa kunang-kunang sangat peka terhadap udara yang tercemar, dan hanya bisa berkembang di lingkungan yang masih serba alami. Mereka hidup sekitar 7 hingga 10 hari, mengkonsumsi embun, dan bertelur di aliran sungai yang jernih.

Mengumpulkan Kiat Mencegah Pencemaran

Informasi yang banyak diminati oleh pembaca, pendengar maupun pemirsa adalah petunjuk-petunjuk praktis

bagaimana mencegah, menghadapi, atau memecahkan suatu masalah. Khusus untuk menangani masalah pencemaran, kita dapat memanfaatkan sumber-sumber lokal. Misalnya di mana dan kapan ada uji coba emisi kendaraan secara gratis. Apa manfaatnya menggunakan bensin tanpa timbal. Bagaimana caranya menjernihkan dan memanfaatkan air limbah rumah tangga, dan seterusnya.

Di kalangan industri malahan ada organisasi yang menangani program mencegah pencemaran. Kepada mereka dapat ditanyakan bila kita perlu memberikan masukan bagi industri lokal, sesuai dengan jenis-jenisnya, dan besar kecil pencemaran yang mungkin ditimbulkan.

Kiat-kiat lain dapat dicari melalui publikasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melibatkan diri pada masalah pencemaran. Juga pada berbagai *mailing-list* dan pusat-pusat informasi, *website*, pada internet. Kita dengan mudah dapat menggunakan *serach engine*, seperti *Alta Vista*, *Yahoo! Info Seek*, dan sebagainya, asal tahu memilih kata kunci yang tepat.

Yang terang, dalam suasana informasi terbuka dan kebebasan pers pada masa sekarang, mustahil bila kita kekurangan bahan. Hanya kemampuan teknis untuk mengolah menjadi menarik, menggunakan sudut pandang baru, dan kemampuan meningkatkan kepekaan publik yang kini menjadi taruhan.

Pencemaran dan Keadilan

Pencemaran sebagai terjemahan dari **pollution**,

semestinya punya konotasi dan denotasi yang jauh lebih kuat. Pencemaran tidak hanya meluluh-lantakkan hal yang kongkrit, tapi juga menghancurkan hal-hal yang abstrak, seperti nama baik, keperawanan, kepolosan dan ketulusan hati. Pencemaran yang terjadi terhadap air dan udara, menimbulkan akibat yang jauh lebih dahsyat, lebih besar, daripada sekadar kerusakan material yang bersangkutan sebab secara fisik berdampak sangat jauh dan sangat lama. Contoh: tumpahnya bahan beracun di hulu sungai bisa dirasakan beratus kilometer ke arah muara, dan membunuh bermacam spesies, lalu secara akumulatif memperluas zona-zona kematian di laut. Bagi manusia, dampak yang terukur bukan hanya pada kesehatan, tapi juga pada kegiatan ekonomi, dan kelangsungan peradaban.

Asap hutan terbakar di Sumatera mengganggu pernapasan berjuta-juta penduduk Asia Tenggara, dan mengganggu perniagaan di seluruh dunia. Parlemen Eropa bersidang khusus untuk menghitung berapa ton zat asam arang (CO₂) dilepaskan ke atmosfer bumi kita, dan sampai kapan akibat itu akan tertanggung oleh anak cucu kita. Kongkritnya saja, ketika kebakaran hutan menghebat 1997, seorang bayi yang lahir bulan Juli di Pekanbaru, tidak terkena sinar matahari sampai Oktober, paru-parunya sekotor pria yang menghabiskan 20 batang rokok dalam sehari.

Sekarang tantangannya, bagaimana wartawan dapat menemukan kata yang lebih tajam ketimbang “sekadar” pencemaran; atau mampu memberi bobot keseriusan bencana itu tanpa melebih-lebihkan? Secara ringkas, “dunia pencemaran” memerlukan ilmu tersendiri, baik pada

tingkat pemahaman, pencegahan, maupun penanggulangannya. Dunia pencemaran bukan hanya berkaitan dengan masalah ilmu alam dan teknologi, tapi juga menyangkut hukum, kesehatan, ekonomi, dan komunikasi. Dari sisi pemahaman, misalnya, para wartawan memerlukan kepekaan terhadap sumber-sumber pencemaran, maupun mencatat dan melukiskan dampak pencemaran dari yang paling nyata hingga yang tidak kelihatan.

Azas Pembuktian Terbalik

Dari segi kriminologi, undang-undang yang menindak pencemar memberlakukan azas pembuktian terbalik. Artinya, penegak hukum tidak perlu menangkap pelanggarnya disertai dengan bukti, tetapi pihak terdakwa yang harus mampu membuktikan dirinya tidak bersalah. Demikian juga wartawan, tidak perlu terbebani tanggungjawab untuk membawa bukti adanya pencemaran bau sampai berkilometer, sebab bau tak dapat difoto maupun direkam. Cukup dicatat pengakuan korban yang mual dan muntah pada jam-jam sebuah pabrik mengeluarkan bau tajam tertentu.

Asap kendaraan yang hitam pekat juga hilang disapu angin, sebelum polisi selesai membuat laporannya. Jadi yang penting bagaimana memaksa pemilik mesin pabrik dan atau kendaraan pencemar beroperasi maksimal, dengan menggunakan perangkat kendali pencemaran (**pollution control**) atau pencegah pencemaran (**pollution prevention**) yang sebaik-baiknya. Seperti contoh sederhana, yakni menekan pemakaian bensin bertimbal yang terbukti

meracuni syaraf (**neurotoksin**) dan secara akumulatif merusak pertumbuhan otak, sehingga anak-anak yang tumbuh di tepi jalan-jalan raya menurun tingkat kecerdasannya.

Sayangnya, karena penegakan hukum menyangkut pencemaran air dan udara ini mungkin kurang serius, kita jarang mendengar ada orang Indonesia masuk penjara karena meracuni sungai atau mengasapi paru-paru tetangganya. Tugas wartawan pertama-tama adalah mengembangkan kepekaan terhadap terjadinya pencemaran itu. Kita tahu, sebatang puntung rokok di trotoar Singapura berarti denda atau hukuman kurungan. Sedangkan seonggok sampah di tepi jalanan Indonesia belum berarti apa-apa. Perbedaan kesadaran terhadap lingkungan, telah membuat sikap kita berlain-lainan, meskipun menghadapi bencana yang kurang lebih sama.

Mengasah Kepekaan Warga

Masalah utama yang menyulitkan wartawan untuk mengangkat isu pencemaran air dan udara **pertama** adalah karena “warga tidak peduli”. Meskipun air sungai kotor, mereka tetap mandi dan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Meskipun ada penumpang merokok, angkutan kota tetap berjalan. Di negeri maju, sopir bus tidak mau mengemudikan kendaraan bila ada penumpang merokok. Sirene di pertokoan, apalagi perpustakaan, juga akan meraung-raung kalau ada sinyal asap. Jadi wartawan Indonesia perlu kerja lebih keras agar pencemaran sekecil apapun layak menjadi berita.

Kedua, wartawan kita perlu melengkapi dirinya dengan pengetahuan dasar mengenai kualitas air dan udara yang layak konsumsi, baik untuk kehidupan secara keseluruhan maupun untuk manusia sebagai kebutuhan asasi. Sudah saatnya dikembangkan wacana bahwa merusak kualitas udara, air dan ketenangan, berarti ancaman dan gangguan terhadap hak asasi manusia. Ini bukan hanya bersifat psikologis, tapi juga nyata-nyata mengganggu fisik baik dari segi kesehatan, maupun kinerja ekonomi, dan kreativitas untuk mengembangkan kebudayaan.

Ilustrasi: tahukah kita bahwa polisi lalu-lintas berpotensi mandul karena terlalu banyak menghirup udara bertimbal? Begitu juga warga perkebunan yang udara dan airnya tercemar pestisida. Studi kasus tentang pencemaran logam berat, kualitas udara dalam ruangan, ancaman baterai bekas yang menjadi racun dan zat-zat karsinogenik, termasuk dampak radiasi, perlu dijadikan bekal buat para wartawan untuk memperdalam kepekaan dan kesadaran masyarakat. Baik sensitivitas pribadi maupun kolektif, konsientisitas masyarakat luas maupun masing-masing anggotanya.

Ketiga, pemasyarakatan hukum, perundang-undangan dan peraturan yang bertalian dengan pencemaran udara dan air harus lebih ditingkatkan. Di beberapa kota besar seperti Jakarta telah dipasang alat-alat pengukur tingkat pencemaran udara. Misalnya untuk kandungan timah hitam dan debu tiap meter kubik. Ambang batas nasional (satu mikron per meter kubik) yang dua kali lebih ringan dari baku mutu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), harus lebih ditaati dengan memperbanyak titik-titik pemantauan,

yang dapat didesakkan kapan saja dan di mana saja oleh wartawan, maupun oleh warga masyarakat yang merasa berkepentingan.

Keempat, apakah hasil yang diharapkan dari peliputan oleh wartawan? Yang paling pokok adalah kepedulian warga. Dunia sedang menunggu munculnya masyarakat yang ramah lingkungan, sebuah *eco-society* yang mencintai udara, air, sinar matahari, tanah, dan ketenangan hidupnya. Dalam berbagai kasus kita melihat runtuhnya kota-kota industri akibat pencemaran air dan udaranya. Tetapi segalanya akan pulih lagi setelah sungainya kembali bersih dan udaranya kembali segar.

Munculnya peri keadilan di kalangan warga juga sangat penting untuk melindungi korban pencemaran dan menindak pelaku pencemaran. Kita perlu ingat, ketidakadilan mulai terjadi ketika seorang ibu harus mencuci rambutnya berulang-ulang hanya karena sekali naik bus kota, dan terkena bau rokok yang tak mudah hilang. Ketidakadilan sudah merajalela tatkala ratusan penduduk tepi sungai harus berobat, karena sakit kulit, gatal-gatal akibat airnya tercemar entah oleh limbah pabrik apa nun jauh di hulu sana.

Kelima, tantangan buat media massa adalah menampilkan isu-isu pencemaran secara memikat, mengena dan teringat lama dalam benak pembaca maupun pemirsa. Kita tahu, setiap wartawan harus berpihak kepada lingkungan dan masyarakat luas. Tapi itu bukan berarti boleh menghancurkan kepentingan industri, termasuk interest dari kalangan media sendiri. Mensuper-burukkan satu pihak, dan membaik-baiki pihak lain, bisa jadi malah

tidak mendidik sama sekali. Tindakan tegas dan pentaatan hukum harus dilaksanakan, mungkin menelan korban, tapi tanpa sensasi. Sayangnya, atas nama keadilan seringkali kriminalitas yang satu diatasi oleh kekejaman yang lain.

Contoh, dibakar dan dirusaknya pabrik-pabrik pencemar sungai di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Pola pikir yang hitam putih, memudahkan timbulnya korban yang dikambing-hitamkan. Padahal pelaku pencemaran air maupun udara bisa terdiri dari masyarakat luas sendiri, baik melalui pembuangan sampah rumah tangga ke sungai, pembakaran sampah, maupun sekadar pemadaman kompor berbahan kerosin dibekap kain basah. Bau kebakaran dan emisi gas yang muncul dari pemadaman kompor ini setara dengan 25.000 batang rokok dibakar sekaligus. Itu bukan hanya memberikan kesan jorok dan tidak sehat, tapi juga membahayakan kesehatan banyak orang.

Menyehatkan Pranata Sosial

Akhirnya, keseimbangan meliputi pencemaran air dan udara sangat diperlukan mengingat banyak masalah polusi kurang diperhatikan dan kurang disadari. Sistem *data base*, atau perhimpunan informasi di kalangan media massa, yang tidak memperhatikan perkembangan lain kecuali beritanya sendiri, pada gilirannya juga menjadi problem besar. Contoh: PT Indah Kiat di Prawang (Riau) dan di Tangerang (Jawa Barat) pernah diberitakan melakukan pencemaran, pada 1980-an. Hingga dasawarsa berikutnya, berita pertama yang telah mendorongnya melakukan

berbagai perbaikan, tetap dimunculkan berulang-ulang. Sedangkan upaya-upaya baik, dan penghargaan yang telah diterimanya sama sekali tidak masuk dalam catatan pers.

Etik dan moral masyarakat berkenaan dengan lingkungan terbentuk oleh berbagai tragedi pencemaran besar seperti pencemaran merkuri di Minamata yang membangun kesadaran bangsa Jepang, polusi kabut industri (**smog**) di Inggris, bencana Union Carbide di India, bocornya kapal tanker Exxon Valdez di Alaska, dan bencana nuklir di pulau-pulau Three Miles, Amerika Serikat. Sayang benar bila Indonesia tidak berhasil menarik hikmah dan memunculkan kesadaran hidup ramah lingkungan setelah hutan-hutan dibakar dan polusinya menyesakkan nafas seluruh dunia, pada 1997-1998.

Kalau itu tidak terjadi, siapakah yang bertanggung-jawab? Pemerintah yang dungu, masyarakat bebal, lembaga swadaya yang mandul, atau media massa dan perguruan tinggi yang gagal menanamkan kepedulian? Kita cenderung berkata, **Civil Society** atau pranata sosial di negeri ini rupanya belum berjalan baik, seperti yang dapat diharapkan. Dalam menuju masyarakat informasi, rasanya di situlah panggilan tugas setiap wartawan.

Apapun dalihnya, pencemaran udara dan air merupakan masalah penting yang harus diberitakan. Tujuan pemberitaannya memang agak berbeda dengan isu-isu lain. Masalah lingkungan hidup perlu kita angkat, dengan niat istimewa, yaitu memperbaiki ekologi, dan kalau bisa: mengubah perilaku masyarakat. Sekarang, bagaimana kita mengarifinya, agar liputan pencemaran air dan udara menarik pembaca, pendengar dan pemirsa? Lebih penting

lagi, bagaimana bikin liputan lingkungan yang justru meningkatkan tiras media kita?

Pertama, tentu **menyesuaikan selera bahasa audiens** sasaran. Wartawan sering berkilah bahwa segmen pasar medianya, bukan cuma pecinta lingkungan. Sehari-hari koran atau tabloidnya lebih mengutamakan masalah-masalah perempuan, rumah tangga, dunia selebriti, dan gosip; misalnya. Sekarang bagaimana memasukkan isu lingkungan ke dalamnya, tanpa membuat media kita jadi “terlalu serius”? Tentu harus menggunakan bahasa mereka. Bisa bahasa anak-anak muda, bahasa ibu-ibu, bahasa cendekiawan, bahasa bisnis, atau bahasa humor.

Tentu ada formulanya. Jangan lupa, kita tidak boleh menyajikan isu apapun secara mentah-mentah. Bahkan topik-topik yang pornografis, erotis dan sensual (meskipun diasumsikan bakal menarik banyak peminat) pun tidak mungkin disajikan apa adanya. Semua harus diolah dan dikemas sedemikian rupa sehingga tidak ditinggalkan. Kita harus tetap mengutamakan siapa yang akan membaca, mendengar atau menonton liputan kita.

Kedua, **jangan over dosis**. Kalau sampai sajian kita melampaui batas, atau “over dosis” pembaca, pendengar atau pemirsa seringkali sulit menerima. Tidak tertelan, apalagi tercerna.

Limbah pengalengan ikan yang menimbulkan pencemaran udara berupa bau, dan mengotori perairan, mestinya bisa diangkat sedikit demi sedikit, dan terus menerus tanpa mengalami “over dosis”. Yang membuat orang sulit mencerna liputan lingkungan, biasanya adalah kesan

ekstrim, berlebih-lebihan, menakut-nakuti dan... “skenario hari kiamat” itu.

Memang ada teknik untuk mendramatisir masalah. Tapi itu dilakukan pada saat isu sudah menjadi sangat gawat, sehingga para environmentalis melakukan pendekatan yang konfrontatif. Misalnya, ketika kapal aktivis lingkungan hidup Green Peace, yaitu Rainbow Warrior melakukan penghadangan dan pengejaran terhadap pembuang limbah nuklir di lautan. Atau teman-teman aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terjun ke sungai yang sudah sangat tercemar sebagai protes agar industri berhenti membuang limbahnya ke sungai itu.

Berita-berita demikian hanya cocok untuk “stopper” atau “ice breaker” yang memecahkan kebekuan dan kebisuan. Tetapi formula yang lebih bersinambungan justru memerlukan konsistensi dan kemampuan bertahan dalam rutinitas. Untuk itu ada cara ketiga, yaitu teknik **menulis yang persuasif**. Kita tidak perlu menggunakan kata pencemaran, misalnya, meskipun isi beritanya tentang udara bertimbal yang bikin anak-anak kecil sepanjang jalan toll jadi lebih bodoh, karena mengganggu pertumbuhan otaknya.

Dalam menulis yang persuasif, kita bisa tampilkan masalah secara lebih halus. Misalnya, “Mengapa ayam anda malas bertelur?” Jawabnya tentu berkaitan dengan polusi bunyi. Kita tahu ayam yang hidup dalam radius 500 meter dari circuit balap mobil bisa jadi mandul dan tak mau bertelur. Atau, “Betulkah Ayam Jago Pak Polisi Loyo?” Judul macam ini bisa sangat cocok untuk menampilkan bahaya terlalu lama berdiri di tepi jalan.

Formula keempat adalah **menghindari slogan, jargon dan idiom-idiom**. Orang tidak tertarik pada bahasa lingkungan, konon karena terlalu banyak memakai slogan. Dengan menggunakan istilah “pelestarian” atau konservasi, “pencemaran” atau polusi, sebetulnya kita telah menggiring pembaca, pendengar dan pemirsa jadi jenuh dan bosan. Karenanya wartawan perlu jeli dan kreatif agar tidak terjerembab ke dalam macam-macam istilah. Kasihan pembaca, pendengar dan pemirsa kita.

Kelima, mengurangi pola pikir yang stereotipis, **jangan keburu menilai** dengan kerangka berpikir yang mengkotak-kotakkan. Hal ini mudah sekali terjadi, karena orang suka menilai satu perkara dari kacamata agama, suku, kebangsaan, atau paham-paham lainnya. Lingkungan hidup, diakui atau tidak, juga telah mendorong orang berpikir sempit, fanatik, dan “hitam-putih”. Akibatnya, setiap kali bicara masalah pencemaran, tak ada lain yang terbayang kecuali “negatif-positif”, siapa yang jahat dan siapa yang jadi korban.

Bila hal itu dapat dikurangi, mungkin peliputan anda menjadi lebih menarik. Kita bisa saja bicara “Bau Uang Menyengat Tapanuli Utara” untuk bercerita tentang maraknya aroma bubur kertas pulp setiap sore hari. Atau “Manfaat Ikan Busuk di Teluk Kendari”, bila kita tahu pemecahan masalah limbah pabrik pengalengan ikan. Atau justru dengan positif kita kisahkan upaya penurunan emisi kendaraan berjudul “Demi Kenyamanan Waktu Pacaran.”

Ada banyak sekali judul bagus yang dapat kita ciptakan, ketimbang sekadar “Bahaya Pencemaran Air dan

Udara". Ada banyak substansi dan materi cerita baru maupun lama yang akan terus menerus menarik, dan membuat media kita layak dibeli, diperhatikan, dan dicintai. Kita selalu akan menemukan petatah-petitih, lelucon, kata-kata mutiara, atau anekdot yang membuat masyarakat sadar, alangkah bagusnya bumi dan kehidupan ini kalau udara tetap segar, air jernih, sejuk, dan sehat sepanjang masa.



Bila Penyair Berkicau

MENJADI penyair dalam era globalisasi? Mengapa tidak. Setiap orang punya peluang dan kebebasan. Ketika krisis ekonomi merebak, beberapa korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mencoba menulis. Kebetulan banyak koran, tabloid, dan majalah baru bermunculan. Mereka tentu memerlukan banyak karangan. Maka lowongan besar untuk menjadi jurnalis, kolumnis, dan sastrawan pada umumnya jadi terbuka.

Beberapa kali orang menelpon saya. Mereka minta bertanya bagaimana caranya mengarang. Sudah banyak buku panduan untuk belajar mengarang. Saya juga pernah menulisnya pada 1992, dan telah dicetak beberapa kali. Judulnya "Menggebrak Dunia Mengarang". Cukup banyak respons terhadap buku itu dari banyak penjurur tanah air.

Sekarang saya ingin berbagi pengalaman. Bagaimana menjadi penyair itu? Apakah perlu sarat-sarat yang berat? Apa suka dukanya? Kepada siapa kita belajar secara efektif? Bagaimana menerbitkan buku puisi dan memasarkannya? Hadiah-hadiah apa yang dapat kita harapkan dan

yang tak perlu diharapkan? Mungkin semua perlu diceritakan.

Lebih penting lagi, barangkali, bagaimana teknik menulis puisi. Tapi mungkinkah itu diuraikan? Bukankah menulis itu seperti naik sepeda? Mana bisa kita memerinci langkah demi langkah? Sekali loncat, langsung dikayuh dan jalan. Begitu juga menulis puisi, mengayunkan stick golf, dan melemparkan pancing ke laut. Semua seperti otomatis.

Tapi siapa bilang semua tak dapat dipelajari? Kalau kita mau tahu, tentu ada caranya. Tentu ada kiat menggoreng telur, menyapu lantai, mengendarai mobil balap, terjun bebas, menyelam, dan menjahit. Tentu ada resep bagaimana menjadi guru yang disayangi, sopir favorit, dan tukang buah langganan. Mari kita coba pelajari cara-cara itu. Kali ini kita belajar, bagaimana menjadi penyair. Apa untung ruginya. Dan bagaimana menjadikan karir ini sebagai sebuah pilihan. Perkara ini pilihan terakhir, tentu terserah anda. Tapi bagi saya sendiri, karena kepenyairan itulah saya mendapatkan semuanya.

Kenangan Masa Sekolah

Saya mulai belajar menulis puisi, ketika bersekolah di Malang. Sejak kelas 3 SD sudah gemar berdeklamasi. Pada bulan Agustus 1965, ketika ada lomba deklamasi di Taman Senaputra, saya sudah ikut. Saya berpakaian Jawa lengkap. Dengan blangkon dan surjan. Dengan selop dan menyandang keris mainan. Lalu naik ke panggung, membawakan

sajak “Bangsa yang Jaya”.

Sajak itu ada dalam buku “Bahasaku”. Sampai dewasa saya masih suka melafalkannya. “Zaman gemilang zaman yang lampau/Banyak pahlawan bangsa kita/Musuh mencoba hendak mengacau... dan seterusnya.”

Menghapal sajak memberikan kenikmatan tersendiri. Selama menjadi siswa Sekolah Menengah Atas St. Albertus, saya hapal sekitar 30-an puisi karya berbagai penyair nasional. Tentu saja yang paling banyak adalah sajak-sajak Rendra, Taufiq Ismail, dan Chairil Anwar. Tapi berkat dorongan guru bahasa Indonesia saya, bapak FX Soewadi, saya menghapal lebih banyak lagi sajak-sajak bagus karya S. Waluyati, Toto Sudarto Bachtiar, dan fragmen-fragmen drama William Shakespeare yang sudah diterjemahkan oleh Trisno Sumardjo.

Saya mengagumi Rabindranath Tagore, Khalil Gibran, dan Walt Whitman. Buku-buku mereka dapat dibaca di perpustakaan. Di Malang ada perpustakaan umum. Kecil tapi lumayan menyenangkan. Tidak banyak orang datang. Justru itu yang menyenangkan saya. Di sekolah saya juga ada perpustakaan lengkap yang dibuka sejak 1938. Sekolah saya sudah sangat terkenal sejak zaman Belanda. Menteri Pendidikan Muhamad Yamin pernah memujinya sebagai sekolah lanjutan terbaik di Indonesia.

Saya belajar di SMA St. Albertus, yang populer dengan nama SMAK Dempo, sejak Januari 1972 hingga Desember 1974. Saya pikir itu terlalu singkat. Masa SMA adalah masa paling bahagia. Kalau boleh saya ingin jadi murid SMA selamanya. Sayangnya tidak boleh. Setelah lulus kita diusir,

disuruh cari sekolah lain yang belum tentu langsung menerima kita.

Saya tidak suka istilah mahasiswa. Bagi saya semuanya adalah pelajar. Kata mahasiswa bernuansa diskriminatif. Juga sombong. Mengapa murid sekolah dasar dan murid perguruan tinggi mesti dibedakan? Bukankah semangat untuk mencari ilmu harus sama? Dalam bahasa Inggris juga ada student, artinya sama saja yaitu manusia yang belajar. Boleh belajar di taman kanak-kanak, kursus-kursus, maupun untuk program master dan doktor, strata 2,3, dan seterusnya.

Pada masa menjadi pelajar ini saya suka menyair. Menulis puisi disebut menyair. Kerjanya menggali perasaan, mengamati alam sekitar, memikirkan berbagai hal dan mengungkapkannya dengan kata-kata yang bagus. Dengan menulis puisi, kita berharap dapat mengkomunikasikan perasaan kita pada orang lain. Perasaan itu bermacam-macam. Ada perasaan sedih, terharu, kagum pada keindahan, gembira, maupun marah. Kalau menulis laporan adalah menyampaikan hal-hal yang dilihat dan dikerjakan, menulis puisi menyampaikan hal-hal yang dirasakan.

Mengapa perasaan penting? Karena perasaan itulah yang membedakan kita dengan banyak makhluk lain dan benda-benda di bumi ini. Hidup manusia jadi kaya karena pintar memendam dan mengungkapkan berbagai rasa. Ada rasa manis, ada rasa pahit, ada rasa cinta, ada rasa benci dan seterusnya. Semua orang kecil atau besar perlu memproduksi dan mengonsumsi perasaan ini. Salah satu caranya adalah dengan membaca dan menulis puisi.

Memang ada banyak cara lainnya. Perasaan bisa diperoleh dari musik, tarian, seni rupa, grafis komputer, kembang api, makanan yang aneka cita-rasa, pakaian, parfum, dan bermacam seni hidup lainnya. Kalau anda memakai parfum cendana, barangkali ada perasaan tertentu yang ingin anda bagi. Kalau anda bikin rumah warna-warni, penuh dengan sangkar burung dan aquarium, juga karena anda memproduksi dan mengkonsumsi perasaan yang paling anda sukai.

Sejak kecil saya suka menggali perasaan pada kata. Setiap kata tentu ada rasanya. Ada kata yang keras. Ada yang lembut. Ada yang membingungkan. Ada pula yang memberikan harapan dan kepastian. Ada kata-kata yang menghibur. Tapi banyak juga kata yang menakutkan dan menteror. Kalau anda ingin jadi penyair, mula-mula anda perlu mengenali karakter kata ini.

Anda bisa mendaftar kata-kata yang bikin hati sedih. Misalnya sendu, ungu, rindu, pilu dan banyak lagi yang berakhir dengan huruf u. Anda juga bisa membuat daftar kata-kata yang menyenangkan dan berakhir dengan huruf a. Misalnya gembira, suka, pesta, riang-ria, pariwisata, gegap-gempita. Dan seterusnya dan seterusnya.

Sejak di SMA Dempo itu saya mulai belajar melafalkan kata-kata itu. Kadang saya pergi mendaki gunung atau menyusuri sungai. Di hutan yang sepi atau di hadapan air terjun yang gemuruh, saya teriakkan kata-kata yang saya pelajari. Kalau mau, boleh juga melafalkan frase-frase atau kalimat yang kita suka. Pada usia 17 tahun, saya suka berteriak: "Hijau aku cinta padamu hijau!" Itulah petikan sajak penyair Spanyol, Federico Gracia Lorca, yang sudah

diterjemahkan oleh Ramadhan KH.

Selain teriak-teriak, belajar menulis juga penting. Kadang-kadang saya mengarang di pantai. Tapi yang paling sering tentu di dalam kota. Ada banyak tempat yang memungkinkan kita menyalurkan perasaan. Misalnya di rumah ibadah, di museum, rumah sakit, dan taman makam pahlawan. Kalau perlu saya juga pergi ke rel kereta api. Ada berbagai perasaan yang dapat kita serap di sana.

Sebagai contoh, di belakang penjara Lowokwaru, kota Malang, ada rel kereta api jurusan Surabaya. Di kanan-kiri rel kereta itu, ditanami bunga-bunga kana. Suasananya lumayan asri. Terutama waktu senja. Pada suatu sore, saya dan teman dekat saya, namanya Fransiska, berjalan-jalan di rel kereta itu. Jauh sekali kelihatannya. Rel itu menjulur jauh sampai ke kaki langit. Rel itu selalu kompak, sebagai sepasang besi yang pergi berdua kemana saja. Sama seperti saya dan Siska waktu itu.

Tapi pernahkah kami bersentuhan? Tidak. Makanya saya jadi merasa begitu takut kehilangan. Pulang dari jalan-jalan itu saya ungkapkan kecemasan saya. Jadinya sebuah sajak pendek berjudul "Rel". Rel, melurur sepanjang musim/padanya berkaca cinta/seiring tak kenal pisah/membrambah ngarai jurang dan lembah/. Tapi pernahkah mereka bersinggung/walaupun horison menyatukan?

Sajak ini kemudian dimuat dalam majalah Semangat di Yogyakarta. Bukan hanya dimuat, tapi juga diulas oleh kritikus terkenal, Bakdi Soemanto, disertai contoh-contoh bagus lainnya karya Rendra dan Chairil Anwar. Aduh, alangkah senangnya hati saya! Perasaan saya tersampaikan.

Berbagai perasaan lain harus diungkapkan. Rasa hormat pada guru. Sebal pada orangtua. Rindu pada negeri-negeri yang jauh. Cinta pada ibu pertiwi. Bangga pada gunung, hutan, kota-kota dan rakyat yang bekerja keras. Semua tentu menimbulkan perasaan yang dapat diungkapkan dalam kata-kata. Itulah ini pekerjaan menjadi penyair.

Wartawan dan Sastrawan

Kegemaran saya bersyair selama jadi pelajar, ternyata berguna untuk mencari pekerjaan. Menjelang umur 24 tahun, saya menulis kepada Redaktur majalah berita mingguan **Tempo**. “Kalau anda mau memberi hadiah ulang tahun bagi saya, mungkin saya dapat menghadiahkan diri saya menjadi seorang wartawan handal buat **Tempo**.” Begitu kira-kira isinya. Saya dipanggil. Goenawan Mohamad memperkenalkan saya dalam Rapat Selasa, “Teman-teman. Hari ini kita mendapat seorang penyair baru. Mudah-mudahan tidak berarti tambah problem buat **Tempo**.”

Sejak saat itu saya jadi wartawan. Tugas pertama adalah melayat dan meliput pemakaman Bung Hatta.

Di sana saya bertemu dengan gadis yang sangat saya hormati dan kagumi. Namanya dalam lindungan Tuhan. Kami berkenalan di Universitas Indonesia. Saya belajar di fakultas sastra, dia di fakultas ilmu-ilmu sosial. Ketika makan siang, ia mengambilkan makanan buat saya. Gugup betul saya menerimanya. Karena terlalu bahagia, saya gemetar dan... prang! Terjatuh, tumpah. Piringnya pecah, isinya berantakan. Itulah musibah terbesar dalam hidup

saya. Perasaan saya tidak mungkin dijelaskan dalam esai, novel, maupun puisi. Mungkin hanya saya yang akan teringat selamanya. Aduh! Aduh, aduh... Kenapa hal ini sampai saya ceritakan? Jangan percaya. Sekali lagi, jangan percaya! Itu hanya mimpi. Mohon dianggap dongeng, yang hanya sekali melintas dalam pikiran.

Yang bukan dongeng adalah suri teladan Bung Hatta. Beliau wafat dalam kesederhanaan. Beliau tak mau dimakamkan di Taman Pahlawan. Beliau ingin bersatu dengan rakyat jelata, di pekuburan Tanah Kusir, Kebayoran Lama. Dalam perjalanan ke Tanah Kusir, saya duduk dalam bis, bersama Emil Salim, seorang menteri yang terkenal. Waktu itu hampir seluruh anggota kabinet melayat. Kami naik bus umum yang telah disediakan.

Menjadi wartawan banyak untungnya, bila anda suka bertemu "Orang Besar". Sebagai wartawan majalah **Tempo**, saya dapat ikut sarapan bersama wakil presiden Adam Malik, bertemu menteri negara untuk riset dan teknologi, Bacharuddin Jusuf Habibie, dan mengikuti berbagai acara kepresidenan. Tapi yang paling menyenangkan adalah bertemu dengan para artis yang cantik-cantik. Saya memotret Camelia Malik, Hetty Koes Endang, dan menyelidiki kasus peragawati yang terbunuh. Banyak kenangan. Banyak perasaan dapat diolah menjadi sajak-sajak, baik yang menyedihkan maupun yang menggemaskan.

Saya tidak berhenti di **Tempo**. Saya juga ingin menjadi wartawan media luar negeri. Ada banyak media massa di bumi ini. Ada elektronik, ada cetakan. Ada banyak media cetak di Jakarta. Beberapa di antaranya datang dari luar negeri. Pada tahun 1950-an, masyarakat Indonesia punya

koran berbahasa Inggris, Belanda, Jawa, Sunda, Tionghoa, dan macam-macam. Dalam pemerintahan Jendral Suharto, semua dibatasi. Semua harus pakai izin. Semua diseragamkan. Sampai-sampai saya ingin sekali menulis buku "Izinkan Saya Bernapas".

Semua wartawan diharuskan menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Semua pegawai negeri diharuskan menjadi anggota Korps Pegawai Negeri (Korpri). Semua orang harus menerima propaganda Pancasila. Jumlah partai dibatasi hanya tiga biji: Partai Persatuan Pembangunan untuk yang berafiliasi pada Islam. Golongan Karya untuk aparat pemerintah. Dan Partai Demokrasi Indonesia pada para nasionalis yang dikerdilkan. Kasihan. Blo'on. Sudah jelas-jelas salah. Dan para penyair tidak berdaya. Saya hanya bisa menulis sajak "Di Belakang Penyuling Sakti".

Semua harus menurut pemerintah, mendukung pemerintah, dan berpikir seperti pemerintah. Kalau kita mau bebas dari iklim yang tidak sehat ini, caranya tidak banyak. Pertama yang paling mudah: pindah ke negeri lain dan menjadi warga negara lain. Kedua, berpura-pura gila dan acuh tak acuh. Saya mengenal seorang tokoh yang berpura-pura sableng selama pemerintahan Suharto. Hal demikian kita kenal dengan istilah *gendengisme*, atau pendukung aliran plesetan.

Ketiga, bekerja untuk perusahaan atau kantor internasional. Saya memilih ini. Saya tidak mau mendapat Penataran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang terkenal dengan istilah P-4. Saya menghindari indoktrinasi. Kalau saya bekerja di kantor masyarakat internasional, saya

akan bebas dari gelombang pembodohan dan penindasan bangsa sendiri itu. Tapi masyarakat internasional pun dijelekkkan. Pemerintah dan banyak pihak menggunakan istilah “Asing” untuk segala sesuatu yang datang dari luar negeri.

Maka ada istilah “Orang Asing”, “Pers Asing”, “Valuta Asing” (Valas), “Produk Asing”, bahkan “Kebudayaan Asing”. Saya benci sekali dengan penggunaan kata “asing” untuk segala sesuatu yang bukan dari “dalam negeri”.

Saya menulis protes ke harian Merdeka, 1983, tapi sama sekali tidak dimuat. Saya pilih koran itu karena tercium paling nasionalistis, dan suka “mengasingkan” segala yang dianggap jelek. Waktu itu saya telah keluar dari majalah **Tempo**. Saya menjadi staf teknik pada PT New Sahid Builders, salah satu anak perusahaan dari konglomerasi “pribumi” terbesar yaitu Sahid Grup.

Ada beberapa hal yang saya sukai bekerja di Hotel Sahid. Misalnya makan siang yang enak dan teratur, serta bertemu banyak orang cantik. Tetapi banyak juga yang tidak saya sukai. Antara lain adalah semboyan mereka “Tiji Tih” *Mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh*. Semboyan itu juga dipakai oleh Rezim Suharto, teristimewanya di kalangan “Keluarga Cendana”. Artinya “Sukses satu sukses semua, mati satu mati semua”.

Mereka sangat suka pada semboyan ini. Saya tidak. Bagi saya boleh saja satu mati, yang lain harus hidup. Gagal satu tidak berarti harus gagal semua. Kekompakan yang berlebihan ini membuat pribadi kurang berkembang.

Hanya delapan bulan saya berada di Sahid Grup, seba-

gai staf teknik yang diproyeksikan untuk menjadi Sekretaris Eksekutif. Salah satu tugas yang terkenang lama adalah turut menyiapkan pembukaan pabrik tekstil Sadetex di Cimanggis. Dalam acara puncaknya, saya bertemu dan berbicara dengan “Ibu Negara” Tien Soeharto. Itulah satu pengalaman yang lazim dianggap menyenangkan.

Tetapi secara keseluruhan, perusahaan kami sangat feodalistis. Kekuasaan dipegang oleh pemilik, dan eksekutif tak lebih dari tenaga profesional yang ditenakkan. Untung ada tawaran untuk mengadakan riset buat koran Jepang Yomiuri Shimbun. Selama beberapa hari saya menekuni sepotong gang di Cikini Kecil.

Di sana ada jalan yang tak sampai 200 meter panjangnya. Tapi di gang itu ada kantor kelurahan, hotel, perumahan rakyat miskin, warung-warung, mushola, dan beberapa rumah orang kaya yang banyak mobilnya. Ada juga sebuah pusat kesehatan masyarakat yang populer dinamakan Puskesmas. O, ya. Satu ciri dari pengaruh militerisme di Indonesia adalah kegemaran membuat singkatan. Bahkan nama tempat-tempat yang bagus seperti daerah pantai utara pulau Jawa pun disingkat menjadi Pantura. Terus terang, itu adalah vandalisasi bahasa, yang bisa melukai hati penyair.

Kembali ke gang kecil itu. Ternyata dia bisa bercerita panjang. Sepotong gang kecil, dengan madrasah, dengan kantor lurah, berbatas sungai Ciliwung, dan berujung sebuah lorong di samping hotel mewah, bisa jadi cerita berseri dalam koran Jepang terbesar, harian Yomiuri. Dari gang kecil itu saya diminta menceritakan kondisi sosial,

politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, keagamaan, olahraga, dan lingkungan hidup Indonesia.

Anak-anak kecil yang berlarian dan tidur dalam mobil-mobil yang diparkir di sepanjang gang itu waktu malam, bisa bercerita banyak. Begitu juga tukang kredit yang sehari-hari lalu lalang, mengetuk pintu demi pintu. Orang paling tua di gang itu, bisa bercerita bagaimana sejarah masyarakatnya sejak zaman Belanda. Berapa harga segelas es cendol yang dijualnya pada zaman Jepang. Sedangkan perempuan di warung-warung menjelang malam, juga bisa mengisahkan profesi mereka.

Itulah nikmatnya jadi wartawan. Nikmat karena kita bebas berpikir. Bebas bertanya, maupun menjawab sendiri bermacam problem yang terbentang di depan mata. Pada saat menjadi wartawan Yomiuri (1984-1986) ini saya mendapat banyak pengalaman dengan orang penting maupun rakyat paling jelata. Saya bertemu Yaser Arafat, Javier Perez de Cuellar, Margaret Thatcher, dan yang paling sering, Mochtar Kusumaatmaja. Dia adalah menteri luar negeri Indonesia untuk beberapa periode, dan ahli hukum internasional terkemuka.

Ketika menjadi wartawan **Tempo**, saya berkenalan dengan negarawan besar dan tokoh sejarah Filipina, yaitu Carlos Romulo. Sedangkan pada saat bekerja di Yomiuri, saya turut meliput kunjungan presiden Amerika, Ronald Reagan di Bali, dan perayaan 30 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung. Itulah saat-saat yang menyenangkan. Tentu saja dalam banyak kesempatan saya menulis puisi. Di antaranya dimuat dalam kumpulan **Sejuta Milyar Satu** (1984) dan **Lautan Cinta** (1986).

Birokrat Boleh Bersajak

Hidup ini harus memilih. Itulah masalah utama. Kita harus memilih makanan, minuman, dan pekerjaan yang cocok. Bukan itu saja. Kita harus juga memilih teman, jodoh, tempat tinggal, bahkan yang lebih berat: agama dan kewarganegaraan. Dua yang terakhir ini banyak yang tak ambil peduli. Kita biasa menerima begitu saja agama yang dianut orangtua, atau menjadi warga negara di tempat kita lahir dan dibesarkan. Padahal semuanya dapat dipilih. Kalau kita merasa ada yang lebih cocok, kita dapat pindah keyakinan.

Penyair memiliki kebiasaan yang ketat dalam memilih. Pertama-tama ia harus memilih kata yang tepat. Ia harus memilih dengan teliti warna, nuansa, dan latar untuk setiap puisinya. Dalam hidup sehari-hari, penyair tidak hanya memilih kata. Saya juga harus memilih tempat tinggal dan pekerjaan. Saya memilih bacaan dan tayangan televisi yang ingin saya nikmati. Saya memilih pohon yang hendak saya tanam, lukisan yang pantas dipasang di dinding, burung yang harus dibebaskan pada 17 Agustus, dan sate yang paling enak di Jakarta Selatan.

Pilihan-pilihan itu hanya mungkin dilakukan bila kita punya alternatif. Penyair harus selalu punya alternatif. Bukan hanya penyair. Untuk hidup ini, semua orang harus selalu punya pilihan. Jangankan pekerjaan, negara pun orang boleh memilih. Jangan lupa, negara hanya alat untuk memuliakan manusia. Bukan sebagian dari langit, bukan pula sebagian dari Tuhan. Kita tidak perlu mendewakan negara, meskipun ada ajaran boleh membelanya sampai titik darah penghabisan.

Seorang wartawan bertanya, “Apa tujuan hidup anda, Eka Budianta?” Saya jawab, saya ingin jadi manusia yang sebanyak-banyaknya bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu saya tidak keberatan kalau mesti jadi penjual obat, pegawai negeri, pengantar nasi (*catering*) atau pelayan publik. Untuk itu saya pernah menjadi asisten pada Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIC) dan Pejabat Penerangan pada Program Pembangunan PBB (UNDP). Tugas utama birokrat adalah melayani publik. Itulah yang saya lakukan pada 1987 disambung 1993-1994.

Seperti siapapun, birokrat boleh bersajak. Dalam periode itu muncul sajak-sajak yang sedih dan sloganistik. Beberapa dimuat dalam antologi Negeri Poci 3, dengan judul **Puisi untuk Liliana**. Judul itu bukan saya yang menentukan, tapi para editor buku yang diterbitkan oleh majalah Tiara. Di antara editornya adalah Handrawan Nadesul, Adri Darmaji Woko, dan Kurniawan Junaedhie. Nama Liliana yang disebut dalam judul itu, adalah sekretaris di kantor saya, tempat munculnya lembaran-lembaran kertas *print-out*, bila kita mencetaknya dari komputer di kamar masing-masing. Maklumlah, kantor saya serba berhubungan *on-line*, dan sejak 1988 saya terbiasa dengan internet dan E-mail.

Penyair Sebagai Perantau

Saya sampai di Inggris pada 29 Februari 1988, dijemput Franz Hardy di bandar udara Gatwick. Frans Hardy sudah tinggal di London sejak awal 1950-an, ketika saya belum lahir. Istrinya orang Inggris, dan anaknya cantik sekali.

Saya terpesona pada puteri bungsunya, Rachel. Sayang, kami hanya sempat bertemu satu kali. Ia suka menunggang kuda, dan bekerja sebagai pramuwisata. Rumahnya di Kent, satu tempat yang terkenal sebagai “The Garden of England”, Taman Inggris.

Saya merasa, masa tinggal saya di Inggris, selama tiga tahun, hingga Januari 1991, seperti seorang wisatawan. Seorang penyair, yang hidup dari hobbynya, yaitu bicara dan bicara. Seorang penikmat hidup, dan pengagum alam semesta. Di Inggris saya membaca banyak buku, bertemu dengan tokoh-tokoh tekemuka, dan menghadiri acara-acara penting. Di Inggris saya merenungi kesendirian dan kebersamaan dalam menjalani hidup yang singkat di dunia.

Kalau dipikir-pikir, tugas paling cocok buat seorang penyair adalah menjadi penyiar. Dan kalau dirasa-rasa, negeri paling cocok untuk seorang penyair dan penyiar adalah Britania Raya. Itulah Inggris, yang meliputi Wales, England, Ireland dan Scotland. Di Wales, saya bertemu dengan penyair-penyairnya yang hebat. Semua orang Welsh praktis penyair. Sastra mereka, musik mereka, bahkan burung dan pantai mereka sangat puitis. Saya yakin seandainya lahir di Wales, saya juga menjadi seorang penyair. Tak bisa lain. Di England, saya anggota macam-macam kumpulan sastrawan. Badan saya kecil dan pendek, mungkin mirip Shakespeare. Itulah yang saya bayangkan tiap kali melihat patungnya bertopang dagu di Leicester Square.

Di Scotland saya sangat menghayati kehidupan Robert Burns, tokoh yang paling saya kagumi sejak remaja. Setiap

kali melihat uang lima pondsterling Bank of Scotland, saya selalu berdoa, semoga Indonesia pada suatu hari punya pecahan lima rupiah dengan lukisan wajah saya. Sama seperti wajah Robert Burns, pencipta puisi *Auld Lang Syne* yang suka dinyanyikan bila datang perpisahan, atau tahun baru.

Saya pikir, dengan bergemanya lagu itu dalam hati kita masing-masing, izinkan saya mengakhiri kicauan ini. Saya khawatir perantauan akan terus berlangsung selama kita hidup di bumi. Atau sama sekali kita tidak pergi ke mana-mana. Tidak mengembara, sebab kita tinggal di bumi yang sama. Untuk kesadaran itulah saya pernah mengumpulkan 200 sajak saya terbaik dalam buku **Rumahku Dunia**.



Dokumentasi = Jatidiri

DOKUMENTASI adalah bukti identitas atau jatidiri kehidupan. Bukan hanya untuk kehidupan seekor cacing, seorang manusia atau sebuah bintang di langit, tapi juga untuk kehidupan majalah pertanian seperti **Trubus**. Kelebihan manusia, konon adalah kemampuannya membuat dokumentasi, bukan hanya untuk kehidupannya sendiri, tapi juga untuk benda, makhluk lain, jernihnya langit dan derasny hujan.

Sekarang pada zaman *cyber community* kemampuan membuat dokumentasi ini semakin penting. Manajemen dokumentasi menumbuhkan bisnis dan industri tersendiri, semisal Astragraphia yang sedang populer di Jakarta. Bagi media massa, dokumentasi adalah bukti bahwa ia hidup, bahwa ia kaya atau miskin, bahwa ia cerdas atau dungu. Itulah sebabnya kita paham, mengapa pada saat dilarang terbit, majalah **Tempo** sangat dihargai, karena dokumentasinya tidak ternilai.

Bekerja di satu tempat yang kaya akan dokumentasi, bagi seorang anggota masyarakat informasi boleh diibarat-

kan menjadi tukang kebun di taman firdaus. Tanaman apapun ada, dan masing-masing bisa diajak bicara. Saya ingat ketika menjadi kuli kontrak Radio **BBC World Service**, di London, Inggris, yang punya beberapa ruang dokumentasi suara. Kalau mau dengar pidato Bung Karno, Winston Churchill, bahkan gemuruh gergaji yang menggunduli hutan Kalimantan pun tersedia.

Bagi industri informasi, dokumentasi adalah modal utama sesudah wartawan yang arif cendekia. Kedua hal ini sebaiknya berjalan seiring. Dokumentasi menambah kepandaian wartawan. Sebaliknya, kepandaian wartawan memperkaya dan menghidupkan dokumentasi. Masalahnya kini, apa, bagaimana, di mana, kapan dan siapa yang mengelola dokumentasi itu.

Apa saja yang patut didokumentasikan? Setiap wartawan punya kesukaan dan keahlian tersendiri. Dokumentasikan hal-hal yang paling anda sukai dan dapat meningkatkan keahlian anda. Kalau suka daun, kumpulkan segala jenisnya. Boleh asli yang dikeringkan, diawetkan dalam larutan, atau difoto. Pada suatu hari akan mendapat manfaat bahkan uang dari ketekunan dan dokumentasi anda. Tentu saja harus dilengkapi dengan keterangan, nama latin, dan literturnya. Lebih bagus lagi kalau ada fosilnya, kerajinan tangan dari perak, tekstil, atau lukisan tentang daun-daun itu.

Begitu juga kalau anda suka buah-buahan, burung, serangga, penampang kayu, jenis rumputan, bunga liar, ikan, dan hama tanaman. Jangan takut jadi kolektor. Jangan ngeri jadi spesialis. Seorang wartawan yang kaya data akan didatangi, diundang, dan dihargai tinggi oleh

media massa, wartawan lain, dan penggemarnya. Secara akumulatif, dokumentasi yang dihimpun tiap karyawan ini pada masanya akan menjadi arsip bersama, bahkan museum berharga bagi media yang bersangkutan.

Bagaimana mencari dan menyimpan **dokumentasi**? Kliping koran gampang menyimpannya. Begitu juga koleksi disket, VCD, video cassette, maupun pita kaset rekaman. Masalahnya baru timbul kalau anda suka mendokumentasikan barang-barang besar seperti mobil, pesawat terbang, kapal tanker, dan rumah. Seorang kolektor rumah yang memiliki sekitar 100 rumah di berbagai *real-estate*, mempekerjakan ratusan satpam, tukang kebun, dan pembantu rumah tangga.

Untuk merawat dan mendokumentasikan koleksi lukisan, anda perlu kurator dan museum. Jangan panik. Bagi saya dokumentasi dan koleksi sama saja. Bedanya, dokumentasi lebih mengutamakan data. Hanya saja kita perlu ingat, data ada di mana-mana. Bukan hanya di selembarnya dokumen, tapi juga pada perangko, mata uang, sebuah gedung, *hard disk*, *potret*, *slide*, bahkan di lembar-lembar daun dan penampang kayu seperti saya telah sebutkan. Jadi penyimpanannya tergantung dari yang kita dokumentasikan.

Di mana kita memperoleh dan memanfaatkan dokumentasi? Acap kali kita tidak perlu memiliki dokumentasi sendiri. Untuk melihat perkembangan tekstil, kita cukup datang ke museum tekstil. Untuk sastra, ada pusat dokumentasi sastra HB Jassin. Di sana disimpan buku harian, puisi kongkrit, apa saja yang menyangkut perkembangan sastra Indonesia. Begitu juga di museum wayang, museum

keramik, dan taman prasasti, tempat kita bisa melihat dokumentasi bermacam batu nisan.

Yang paling penting adalah bila kita perlu menggunakan dokumentasi itu detik ini juga. Banyak situs di internet dapat kita kunjungi. Dapat juga menggunakan *search engine* seperti **Yahoo! InfoSeek, Alta Vista, Lycos, HotBot**, dan seterusnya. Kalau dokumentasi itu yang kita perlukan, maka yang kita perlukan adalah keahlian dan fasilitas untuk *browsing* dan *surfing* di *cyber space*. Dokumentasi *cyber* bersifat global dan virtual, realitas yang maya. Harus pandai membacanya. Dokumentasi *cyber* tidak menyajikan ukuran sebenarnya, tidak memberikan bau dan mengisyaratkan berat yang sesungguhnya.

Kelebihannya kita bisa mengunjungi tempat mana saja dan merasa mengenal berbagai hal tanpa harus meninggalkan tempat dan tanpa menyentuh benda yang ingin kita pahami.

Kapan kita memerlukan dokumentasi? Selalu pada saat menulis, dan kadang-kadang untuk acara penting (pernikahan, kelahiran, pekerjaan baru, meninggal dunia). **Siapa** yang melakukan dokumentasi itu? Yang pertama adalah kita sendiri. Pramoedya Ananta Toer, misalnya, memiliki tradisi kuat untuk mendokumentasi apa saja yang dianggapnya penting. Kumpulan klipingsnya tentang diri sendiri bisa melebihi 3000 halaman setiap tahun. “Kalau saya tidak mendokumentasikannya, lalu siapa?” katanya. Jadi jangan mengharap orang lain membuat dokumentasi untuk kita.

Yang terpenting di atas kemauan mendokumentasi,

adalah kegemaran dan kemampuan untuk menggunakannya. Sebagaimana kita tahu, tulisan yang anda bikin dapat menyampaikan apa saja. Tulisan kita bisa menyala seperti bermacam-macam lampu, dapat mengeluarkan berbagai aroma dan bau, serta dapat menyalurkan bermacam perasaan: takut, kesal, bersemangat, mengharukan, memukul, mengejutkan, bahkan membuat muntah pembaca. Karenanya, ayo berpandai-pandai memanfaatkan dokumentasi.

Menggunakan dokumentasi berarti menanam informasi memanen kenangan. Kita memakai catatan masa lampau untuk memperkaya memori publik yang baru. Memori ini menambah dimensi dan memperluas cakrawala pembaca. Berilah wawasan sejarah pada sebatang pohon singkong yang nenek-moyangnya datang dari Brazil. Ingatkan pembaca pada dongeng kuno Russia, tentang sekelompok penguasa muda yang menyingkirkan kaum tua, sehingga tidak tahu bagaimana membalik tanah untuk menanam gandum. Kasih tahu durian kegemaran Bung Karno, supaya generasi penerus tahu jenis buah dan sayur yang disukai proklamator Republik Indonesia.

Banyak hal baru yang muncul menarik justru karena informasi lama. Di sini letak aplikasi dokumentasi baik untuk lembaga maupun untuk pribadi. Kunci penggunaan dokumentasi terletak pada keterbukaan kita memakai berbagai data yang relevan. Cakrawala kita tidak boleh terkurung pada problem hari ini. Seperti dilakukan William Shakespeare, jangan berpikir sebatas yang kita lihat, tapi lihat sejauh yang kita pikirkan.

Spesialisasi atau mendalami satu ilmu, memang bagus. Tapi terkungkung pada satu bidang, bisa membuat kita

seperti berkacamata kuda. Kita tidak boleh terlalu asyik dengan sebatang pohon, padahal hutan sedang terbakar. Maka, pada saat menulis tentang jahe, ingatlah perdagangan sokoteng di berbagai kota. Ketika bercerita tentang ayam kampung, jangan ragu menyingung legenda Cindelasas, yang punya ayam aduan dan terkenal jadi dongeng dari Daha sejak abad 11. Atau ketika bicara tentang ikan mas, muatlah lukisan Leungli, mitologi Jawa Barat yang memikat hati.

Referensi yang jitu membuat tulisan kita mudah diingat. Jangan terpukau pada satu gaya yang “sok obyektif”. Tolonglah bicara dengan belut, biarkan Lidah Buaya bicara sendiri dari balik harumnya rambut seorang dara. Jangan lupa juga memuat foto pemakai lidah buaya, sehingga pembaca tidak hanya berhadapan dengan empat halaman penuh tanaman saja. Jadikan dokumentasi alat mendobrak kejemuan anda sendiri, sehingga karya dan hidup anda penuh warna.

Dokumentasi bukan hanya baik untuk wartawan, peneliti, maupun konsultan. Dokumentasi juga sangat berguna buat ibu rumah tangga, bayi yang baru lahir, maupun pensiunan yang terancam buta. Setiap manusia perlu punya dokumentasi. Mulai dari fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), surat nikah, sampai kelak surat kematian bila sudah sampai waktunya.

Sekarang, bagaimana menerapkan “kesadaran berdokumentasi” ini? Untuk kepentingan masyarakat kita mengenal “Arsip Nasional”. Bagaimana untuk lembaga pers, lembaga pendidikan, rumah tangga, apalagi untuk pribadi? Mulai anak kita lahir, biasakan punya *Document*

Keeper. Itu semacam album, yang hanya bagus untuk menampung surat-surat, kartu ucapan selamat, atau bungkus kado yang berkesan. Yang tidak boleh dilupakan adalah sobekan kalender, atau penanggalan ketika anak itu lahir. Harap disimpan dengan seksama, lengkap dengan kwitansi biaya kelahirannya. Kalau kebetulan diiklankan di koran, harap simpan juga klipungnya.

Untuk wartawan, guru, akuntan, desainer pakaian, pedagang asongan, bahkan pengemis, tentu bisa memilih bahan-bahan yang dapat didokumentasikan dan menunjang profesi masing-masing. Ketika suka “turun ke lapangan” saya mendokumentasikan setiap jenis topi dari daerah yang saya kunjungi. Ada topi rotan pengusir setan dari Kalimantan, ada topi nipah sangat ringan buatan petani Okinawa di Jepang, topi bambu Tasikmalaya, topi lontar Thailand, topi bersulam dari Vietnam, topi kulit hewan dari Afrika Selatan dan topi daun palm dari Amerika Latin. Semua bisa kita dokumentasikan rapi, lengkap dengan harga masing-masing, dan spesifikasinya.

Kalau anda seorang penggemar perangko, bisa juga kumpulkan seri buah, seri binatang, seri pohon, seri orang terkenal dari seluruh dunia. Pada waktu menulis laporan tentang kontes kecantikan kucing, bisa menggunakan kucing Cleopatera, baik dari perangko maupun dari poster film. Saya salut pada upaya **Library of Congress** mengumpulkan segala macam bahan publikasi selama kampanye pemilihan umum. Poster, spanduk, bendera partai, semua bakal menjadi bahan dokumentasi yang sangat berharga. Ketika bekerja sebagai asisten khusus di Perpustakaan Universitas Cornell, Ithaca, New York, saya sangat terkesan

pada dokumentasi poster di zaman Jepang.

Pada zaman Jepang, rakyat dikerahkan untuk menjadi romusha, untuk giat menabung, untuk menyumbangkan hasil panen, dan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Semua itu ada posternya yang indah-indah. Poster-poster itu diambil dari mana saja, dirawat, diawetkan, disimpan dan dipamerkan pada waktu yang tepat untuk memberi inspirasi kepada siapa saja.

Jadi sungguh bukan hal yang aneh bila kekayaan setiap orang ditentukan oleh kepandaian dan ketekunannya dalam menyusun dokumentasi. Pada akhir hidup ini, kita bisa berkata bahwa yang membedakan jati diri seseorang dengan orang lain adalah dokumentasinya. Demikian juga dalam kompetisi media massa. Hidupnya 25 persen didukung oleh dokumentasi yang baik, 25 persen oleh ketrampilan menulis wartawannya, 10 persen kepaiawaian *lay-out* dan percetakan, 10 persen oleh kepandaian mencari iklan, 10 persen oleh kekuatan promosi, 10 persen pembaca yang kritis, 10 persen lagi oleh distribusi dan penjualan baik pada pelanggan maupun eceran.

Dokumentasi juga berarti modal dasar yang terakumulasi. Ia adalah tabungan informasi yang tidak ternilai, dan bisa membuat anda memiliki tambang emas. Sekadar contoh dari yang telah sukses adalah **Yayasan Lontar**, hidup dari penjualan dokumentasi surat-surat lama dari para raja. Pada masanya, Pusat Data Bisnis Indonesia adalah sumber penghidupan dan industri informasi yang handal dari Christianto Wibisono.

Banyak contoh konsultan dan penulis handal yang

sukses karena pandai memanfaatkan berbagai dokumentasi dan sumber informasi yang ada, seperti Perpustakaan Nasional, Biro Pusat Statistik, Lembaga Demografi, berbagai *search engine* di internet, dan membuat dokumentasinya sendiri. Pramoeuya Ananta Toer, adalah satu contoh yang gilang gemilang bagaimana seorang anak Indonesia pandai memanfaatkan berbagai sumber dokumentasi. Kalau dia bisa, mestinya anda, saya, dan kita semua juga bisa. Apalagi kalau kita sama-sama percaya bahwa "*Knowledge is Power*". Pengetahuan adalah kekuatan. Dan sumber utama setiap pengetahuan adalah dokumentasi yang baik.

Jadi langkah-langkah praktis apa yang dapat kita lakukan? Secara pribadi, mari kita mulai dengan buku harian. Kualitas orang media dapat dilihat dan ditingkatkan melalui buku hariannya. Soe Hok Gie, Ahmad Wahib, Kartini, Mohamad Hatta, dan siapa saja yang cinta informasi, tentu punya buku harian, agenda, dan dokumentasi pribadinya. Dari kecil, upayakan punya *scrap book*, untuk menempel bon, kwitansi, sampul surat, karcis bioskop, bahkan bungkus kondom yang paling berkesan dalam hidup anda. Mari kita mulai dari sekarang, sebab tidak ada istilah terlambat untuk mengubah keadaan.

Pada tingkat organisasi atau perusahaan, arsip dan perpustakaan adalah kebutuhan pokok. Lembaga yang tidak punya dokumentasi boleh diibaratkan seperti makhluk tanpa otak, yang gerakanya hanya tergantung pada tangan dan kaki. Perjalanannya tidak akan jauh, dan tidak akan mengalami institusionalisasi, pelembagaan, keteraturan sistem dan akumulasi ilmu pengetahuan. Karenanya, tidak

ada salahnya setiap lembaga yang baik punya pusat dokumentasi bahkan museum tersendiri. Kalau baik mengelolanya, bahkan museum perusahaan pun dapat mendatangkan pamor tersendiri. Contoh: museum **Jamu Jago** di Semarang yang dikembangkan Jaya Suprana menjadi museum rekor.

Atau pergilah ke kantor media mana pun. Di ruang tamu Gramedia, anda akan melihat mesin cetak tua yang menerbitkan harian **Kompas** pertama kali. Di balitbang LIPI Cibinong kita bisa melihat kumpulan spesies beribu macam hewan Indonesia yang mulai didokumentasikan sejak abad 19. Di kantor redaksi koran-koran perdesaan Amerika, anda akan dipameri bundel-bundel mereka yang telah disusun rapi sejak dua abad silam, dan setiap kali dibuka, kalau ingin tahu sesuatu. Misalnya apa betul bulan purnama 21 Desember 1999 yang 14 persen lebih besar dari biasanya itu terakhir kali terjadi 138 tahun yang lalu? Atau, tahukah anda, dimana terakhir kali saya melihat harimau Jawa? Dalam museum *Natural History* di London! Selamat menyusun dokumentasi, selamat membentuk jati diri, keistimewaan dan identitas tempat bekerja maupun untuk pribadi anda.





Belajar dari Rahardi

FLORIBERTUS RAHARDI termasuk deretan sastrawan Indonesia yang berjuang keras dalam mendidik dirinya sendiri. Meskipun tidak pernah kuliah, hasil karyanya tidak kalah dengan banyak pengarang lain yang berpendidikan sarjana. Dua bukunya terbagus menurut saya adalah kumpulan cerpen **Kentrung Itelile** dan prosa lirisnya **Migrasi Para Kampret**. Kedua buku ini mencerminkan intelektualitas, daya juang, dan mungkin puncak-puncak kreativitasnya. Kabarnya juga telah mendorong munculnya berbagai pembicaraan, termasuk penulisan sejumlah skripsi.

Pada tahun 2000, F. Rahardi genap berusia 50 tahun. Maka sungguh tepat teman-teman di Fakultas Sastra Universitas Indonesia melakukan pembahasan tentang manusia dan karyanya. Rahardi menulis buku-buku puisi yang kontroversial pada akhir 1980-an. Misalnya **Soempah WTS** dan **Buku Harian Sang Koruptor**. Tetapi ia juga membuat buku-buku praktis di bidang pertanian dan peternakan. Dua bukunya yang laris adalah **Bercocok Tanam Dalam Pot** dan **Beternak Kodok**.

Tentu menarik membahas buku-bukunya yang bervariasi, cerdas dan bernilai sastra. Tetapi bagi saya, membicarakan orangnya justru lebih penting. Rahardi tergolong aktivis lingkungan dan pecinta kehidupan yang serius di Indonesia. Ia gemar mendaki gunung, memancing di laut, dan berkebun. Lebih dari itu ia termasuk pemerhati masyarakat yang betul-betul berada di lapangan. Salah satu buku puisinya bahkan diluncurkan di kompleks hiburan seks di Surakarta, Jawa Tengah.

Rahardi memang berasal dari Jawa Tengah. Ia lahir di Ambarawa, 10 Juni 1950 dari sebuah keluarga Katolik Jawa. Ayahnya penjahit di lingkungan gereja. Salah seorang kakaknya, PC Rahardja, juga menjadi penulis cerita pendek yang muncul dalam majalah sastra **Horison** dan kumpulan cerpen bertaraf nasional. Saya mulai mengenal namanya ketika ia mengulas sajak-sajak saya, di harian **Kompas**, bulan Februari 1977. Ia tidak menyanjung, tapi juga tidak melecehkan. Tidak membesar-besarkan. Tidak mengecilkan. Dalam bahasanya sendiri, ia boleh dikatakan "biasa-biasa saja."

Tetapi, justru kebiasaannya itulah yang istimewa. Selain menulis, Rahardi juga gemar melukis. Seperti halnya puisi dan cerpennya, lukisannya juga diwarnai dunia flora dan fauna. Ia suka menggambarkan badak, burung dan anggrek. Pengalamannya di berbagai taman nasional seperti Ujungkulon dan Komodo, dapat kita ikuti baik dalam lukisan, cerpen maupun puisi. Demikian juga hidupnya yang sederhana, serba pas-pasan tetapi dijalannya dengan ringan dan gembira. Dunia Rahardi berkembang sangat cepat.

“Istriku sakit. Istri satu-satunya” tulisnya membuka cerpen “Guci Wasiat”, dalam **Kentrung Itelile**, halaman 32-35. Dua alinea berikutnya: “Aku tetap mantap dan yakin. Tapi dua bulan kemudian istriku mati. Aku menangis.” Dua halaman berikutnya kita diajak menyimpulkan: Nasibku kurang baik memang. Istriku baru saja meninggal. Aku jatuh sakit. Belum juga sembuh, aku telah dicap “tidak normal.”

Tragedi semacam ini hampir menjadi ciri karya-karya F. Rahardi. Tetapi ia tidak cengeng. Inilah penutup cerpen itu selengkapnya: *Belum juga kuat aku berangkat bekerja sudah datang surat pemberhentian dengan hormat karena aku telah dianggap “tidak normal” oleh Yayasan tempatku bekerja. Aku protes lagi. Kupanggil seorang psikiater untuk kumintai keterangannya. Ternyata aku memang tetap normal. 100% waras! Tapi kenapa aku dipecat? Entahlah. Tapi lega hatiku. Aku yakin. Sembuhku bukannya karena “Guci Wasiat”, tapi karena dokter. Yang konon sekolahnya sampai bertahun-tahun. Aku lega! Lega.*

Mentalitas “dipecat tapi lega” seperti itu harus dicatat istimewa. Rahardi punya keberanian hidup yang sangat khas. Hal ini dapat kita saksikan dalam hidupnya sehari-hari. Setelah lebih dari 20 tahun bekerja untuk majalah **Trubus**, ia mengundurkan diri. Alasannya adalah membela para karyawannya yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagai wakil pemimpin redaksi ia bertanggung-jawab atas kinerja karyawan maupun produk yang dijualnya. Waktu itu kondisi keuangan dan penjualan majalahnya mungkin “sedang sial”. Rahardi rela keluar,

menjadi penulis lepas, pelukis, konsultan masalah pertanian, dan mendirikan Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia.

Kebanggaan terbesar bagi pengamat sastra, menurut hemat saya, adalah bila tahu latar belakang, kegiatan dan kehidupan sastrawan yang kita amati. Kehidupan Chairil Anwar, Rendra, Pramoedya Ananta Toer, dan jelas lebih menarik ketimbang karyanya. Mengapa? Sebab hidup mereka fana dan tidak terulang, sedangkan karya-karya mereka abadi dan dapat dinikmati kapan saja. Saya berpikir, mungkin ada hubungan yang erat antara pengalaman hidup yang luar biasa dan karya-karya sastra yang besar dan kaya. Minimal, perjalanan hidup yang dahsyat membuat teks sebagai buah pikiran sastrawan menjadi hidup, penuh semangat, bergejolak dan berjiwa.

F. Rahardi dalam batas-batas popularitasnya, adalah juga seorang pembuat berita. Berbagai label dikenakan pada dirinya. Mulai dari “manusia singkong” sampai “penyair sarkastis dari pegunungan”. Puisinya main-main dan informal, tapi sarat dengan cinta lingkungan dan tanah air. Sekadar contoh dari **Migrasi Para Kampret** halaman 119, kita baca:

*Sudah 45 tahun kita setia
mengheningkan cipta di perayaan tujuh belasan
sudah 45 tahun keringat menetes dari wajah
anak-anak sekolah yang kepanasan
tapi yang kudapat hanya pohon-pohon tumbang
tanah yang pecah-pecah dan udara
yang tak bersahabat*

Dalam banyak kesempatan Rahardi mencerminkan dirinya sebagai produk zaman dan masyarakat yang sedang terlunta-lunta mencari jati dirinya. Ia tampilkan segi-segi yang jarang dipuja orang. Contohnya adalah **Tuyul** dan **Silsilah Garong**. Ia juga juga meluhurkan “bangsa tempe”. Mungkin untuk mengejek hipokrisi banyak kalangan yang merasa patriotis. Tapi mungkin juga dengan sengaja menampilkan kelemahan dan kekurangan sebagai kekuatan dan kelebihan Indonesia.

Tidak seperti stereotip penyair yang suka menyendiri dan egoistis, Rahardi suka bergaul dan pandai berorganisasi. Ia mendirikan berbagai perhimpunan dan mengurus sejumlah perkumpulan. Misalnya perhimpunan petani buah, masyarakat anggrek, dan Ikatan Sarjana Katolik, meskipun ia hanya *drop out* SMA. Pada tahun 1985, diajaknya saya mendirikan **Yayasan Pustaka Sastra**. Tugasnya menerbitkan buku-buku yang sudah pasti ditolak penerbit komersial. Rahardi sangat membela mereka yang terpinggirkan. Prestasinya yang patut dipuji menyangkut hal ini, adalah menyunting dan menerbitkan buku antologi puisi **Dari Negeri Poci 2** (1994) yang memuat karya-karya 45 penyair Indonesia.

Menjadi editor kumpulan puisi bukan hal yang mudah di negeri ini. Selain harus cermat, tekun dan bekerja sendiri, hasil yang kelak diperoleh sering kali berupa keluhan, umpatan dan caci-maki. Demikian pula dialami oleh Rahardi yang telah berpayah-payah mempertaruhkan integritasnya. Selalu saja ada pihak-pihak tidak puas yang melampiaskan kekesalannya. Sekadar catatan, ada berbagai kompetisi yang aneh di antara sastrawan di Indonesia

1990-an. Teman-teman di Tegal, Jawa Tengah, misalnya, tidak suka daerahnya dijadikan obyek penulisan para penyair dari Jakarta. Rahardi berperan besar dalam situasi semacam itu.

Sebagaimana lazimnya pengarang (*author*), Rahardi suka mengesankan punya otoritas, atau kekuasaan. Ia berkuasa tidak hanya dalam menentukan kriteria memilih puisi dan penyair, tapi juga dalam merekrut orang, memberi nama dan menyusun organisasinya sendiri. Saya pernah menikmati otoritasnya ini, ketika pulang dari merantau dari Amerika dan Inggris (1987-1992). Dengan ringan Rahardi meminta saya memilih meja sendiri di kantornya. Maka mulailah saya berkarir di kelompoknya sebagai ketua editor PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, yang selanjutnya populer dengan nama **Puspa Swara**.

Bersama Rahardi saya menikmati keliling Jawa dengan mobil yang dikemudikannya. Kami juga menghadiri acara-acara sastra di Unpad Bandung, Undip Semarang, di Universitas Gajahmada, Yogya, di Tegal, Purwokerto dan banyak lagi. Tetapi acara-acara yang paling mengesankan adalah mendaki gunung Gede-Pangrango, dan berlayar ke Pulau Peucang, Ujung Kulon. Dalam perjalanan semacam itu kita dapat lebih mengenal Rahardi sebagai seorang naturalis. Ia pandai menyalakan api, memasak, dan memasang tenda. Kesehatannya luar biasa, sehingga sanggup membawa beban sampai lebih dari 30 kilogram dan berjalan kaki terus menerus semalaman.

Kekuatan fisik, petualangan, dan kecintaannya pada flora dan fauna, memberi daya gigit yang kuat. Hal ini mudah dirasakan. Rahardi bukan orang yang suka

berbasa-basi. Ia termasuk orang yang dengan leluasa, tanpa beban dapat menjelaskan perselingkuhan, sebagai kerinduan dua kelamin yang berbeda. Ia tidak pandai berbahasa asing. Tetapi hal itu tidak membatasi gerakannya untuk berjalan-jalan ke Jerman, Perancis, Thailand, Taiwan, dan entah negara mana lagi. Hidupnya menjadi sangat berharga karena bermodal jiwa yang merdeka.

Kemerdekaan berpikir, merasa dan bicara inilah yang kita jumpai dalam puisi, cerpen dan esai-esainya. Ia menulis buku **Petani Berdasi** yang memuat kolomnya di harian **Kompas**, majalah mingguan **Tempo**, dan berbagai media massa bergengsi lainnya. Ada kalanya ia memancing kontroversi. Tetapi selalu dapat ditanggapinya kembali dengan humor. Pada dasarnya dia seorang humoris. Tapi ada kalanya mendapat pesanan pekerjaan yang sangat serius. Misalnya mengupas puisi-puisi Goenawan Mohamad, merancang dan melaksanakan community development, serta memberikan konsultasi buat perkebunan-perkebunan besar.

Ia bukan insinyur. Tapi ia pernah memimpin satu tim yang terdiri atas 30-an lulusan berbagai fakultas teknik pertanian, bahkan magister manajemen. Ia hampir selalu menulis dengan pena, bukan mesin tik atau komputer. Justru tulisan tangannya itulah yang menciptakan kesibukan sendiri buat teman-teman dan sekretarisnya. Kalau kita punya waktu dan mau menekuni tulisannya, tidak mustahil akan dapat menggali semangat kreatif, keberanian hidup, dan kesanggupan mengolah umur ini dengan senak-enaknya. Itulah yang paling penting bila kita harus menarik hikmah dari pengenalan kita pada sastrawan F. Rahardi.

Pada tahun 2000 itu, dalam usia 50 tahun, tiga orang anaknya kuliah di Universitas Indonesia: fakultas psikologi, fakultas sastra, dan politeknik. Istrinya, Sri Winarti, guru bahasa Indonesia. Rahardi sering bepergian, pergaulannya luas dan menjadi kolumnis tetap tabloid **Kontan**. Pikirannya jernih, polos dan jarang diwarnai literatur dari luar negeri. Kondisi penerbitan buku dan industri kesusasteraan di Indonesia tidak mendorongnya untuk memproduksi secara optimum. Kecuali Pramoedya Ananta Toer, rata-rata sastrawan Indonesia masih bekerja ala kadarnya.

Begitu juga kesan saya pada F. Rahardi. Sekalipun dia dapat dikatakan penyair purnawaktu, produktivitas dan pemasaran sajak-sajaknya masih jauh dari menggembirakan. Dari begitu banyak buku puisinya, setahu saya belum ada yang berhasil dicetak ulang. Kupasan dan ulasan panjang lebar mengenai sajak-sajak dan cerpennya lebih berfokus pada kaitannya dengan masalah-masalah sosial. Bukan pada kualitasnya sebagai karya sastra sebagaimana kita dengar pada perbincangan tentang William Shakespeare, Robert Frost atau Rabindranath Tagore.

Ciri khas sajak-sajak dan cerpen Rahardi sangat kontekstual, terkait erat pada suasana zaman dan perkembangan sosial-politik di Indonesia pada saat ia berkarya. Para penggemarnya belum dipersilakan menjelajahi sendiri dua, sejarah dan lanskap pemikiran secara lebih umum dan universal. Spiritualitas dan religiusitas karya-karyanya lebih cocok bila dikomentari secara pribadi ketimbang dibahas dari sudut pandang kolektif. Saya belum dapat membela isinya, tetapi sangat menghormati dan turut

memperjuangkan kebebasannya dalam berkarya.

Tetapi ada karya-karyanya yang mungkin bakal monumental. Misalnya prosa liris **Migrasi Para Kampret**, kumpulan cerpen **Kentrung Itelile**, dan sebuah cerpennya *Bertarung Dengan Banteng*, yang dimuat dalam Cerita Pendek Indonesia IV, suntingan Satyagraha Hoerip. Selain itu, Rahardi perlu dihargai ketika menyusun antologi topikal, baik **Dari Negeri Poci 2** maupun **Cerita Dari Hutan Bakau** (Pustaka sastra, 1994). Yang pertama itu mencatat upayanya dalam membela dan menampilkan sastrawan dan karya sastra yang terpinggirkan. Sedangkan yang kedua adalah kumpulan puisi yang dapat memperkaya dan mengawali literatur lingkungan (*environmental literature*) di Indonesia.

Sudah lebih dari 23 tahun saya mengenal F. Rahardi. Tapi belum sekalipun saya mendengar dia mendapat penghargaan, hadiah sastra, piala maupun medali. Kegiatan dan profilnya sering diulas dan diberitakan di media massa. Penampilannya sering dicap hanya mengundang sensasional. Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Toeti Heraty dengan hormat membatalkan pembacaan sajaknya di Teater Tertutup Taman Ismail Marzuki, ketika Rahardi akan menampilkan sejumlah pekerja seks komersial ke atas panggung. Wartawan sangat menyukai berita pelarangan dan supresi terhadap kreativitas. Maka beritanya besar-besaran. Tetapi bagi seniman, hal-hal seperti itu menjadi bahan introspeksi yang mendalam.

Sekali waktu saya pernah mengajaknya membaca puisi di RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia) untuk mimbar agama Katolik. Kalau melihat bagaimana dia mempermain-

kan ritual tanda salib, jargon-jargon gereja dan dogma-dogma mengenai Bunda Maria, seperti dalam bukunya **Sumpah WTS**, rasanya sukar mengajaknya “kembali ke jalan yang benar”. Tetapi saya yakin bahwa eksperimen dan “main-main”nya dengan agama tidak dilakukan untuk merusak, apalagi memberontak. Ia hanya ingin tampil lucu, polos, apa adanya. Memang di sana-sini jadi keterlaluan, tidak lucu, bahkan dapat menyakitkan. Tetapi ejekan-ejekan itu seringkali justru memperkuat iman banyak orang.

F. Rahardi seorang *drop out* SMA yang kemudian bekerja sebagai guru di perdesaan, lulus penyesuaian Sekolah Pendidikan Guru dan menjadi kepala sekolah. Ia mulai bekerja dalam usia 17 tahun hingga pindah ke Jakarta dan menjadi wartawan majalah **Trubus**, pada usia 27 tahun. Dua puluh tahun menjadi wartawan, mulai dari ilustrator hingga wakil pemimpin redaksi. Pada usia 47 tahun menyatakan sepenuhnya menjadi seniman, menafkahi keluarga dan sejumlah karyawan. Ia mulai karir baru sebagai cendekiawan, konsultan, dan organisator. Sajak-sajak, cerpen dan nya memang membuat hidupnya menjadi sangat bernilai. Tapi penghargaan yang tulus pada hemat saya tetap ditujukan pada upayanya menjaga kesehatan, integritas dan kreativitasnya sebagai manusia. Dalam hal ini Rahardi mampu menjadi inspirasi untuk hidup lebih baik Itulah sumbangannya terbesar bagi masyarakat.



Sastra Indonesia & Pasar Global

KESADARAN bahwa sastra Indonesia adalah warga sastra dunia mulai dicetuskan dalam Surat Kepercayaan Gelanggang yang diumumkan oleh Asrul Sani 1950. Seperempat abad berikutnya, almarhum HB Jassin menegaskan lagi dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia. Kenyataannya, tentu sudah jauh-jauh hari sastra, di mana pun, dan dalam bahasa apapun adalah “warga dunia”. Sifatnya yang universal membuat setiap karya dan setiap penulis terbebas dari batas-batas politik, geografis, agama, dan ekonomi.

Dalam bahasa apapun, kebudayaan apapun, dan perekonomian apapun, karya sastra terbuka untuk pasar dunia. Artinya, karya itu dapat dijual kepada masyarakat manapun, bagaimana masyarakat mana pun boleh menyumbangkan karya untuk sastra itu. Indonesia ‘membeli’ karya-karya dunia dengan menerjemahkan drama-drama Shakespeare, novel Hector Mallot, puisi-puisi Rabindranath Tagore, maupun karya-karya klasik Yunani, Persia (Seribu Satu Malam!), dan berbagai kitab suci.

Sebaliknya, dari kepulauan ini kita “mengekspor” cerpen-cerpen Pramoedya Ananta Toer, renungan-renungan Goenawan Mohamad, dan pikiran-pikiran hebat dari Kartini, Tan Malaka, Soekarno, Sutan Takdir Alisjahbana. Kebutuhan mendesak saat ini adalah bagaimana mempersilakan para sastrawan Indonesia yang baru tumbuh agar memanfaatkan peluang keterbukaan global. Runtuhnya pemerintahan yang menyebut dirinya sendiri “Orde Baru”, telah membuka mata para penulis muda bahwa dunia bukan hanya Indonesia.

Kebebasan dan keleluasaan berkarya mengembalikan cara berpikir yang sehat: manusia yang menentukan kata-kata, dan bukannya hidup diatur oleh slogan-slogan, perintah-perintah dan aturan-aturan sepihak yang diterapkan oleh pemerintah militer. Masa teror mental telah berakhir. Tinggal kebebasan kini sedang mencari bentuknya. Maka tantangan utama para penulis muda adalah memanfaatkan kebebasan berpikir, yang kini terkuak pelan-pelan di Indonesia.

Ada yang mengatakan saat ini sedang merebak euphoria politik. Ada juga yang menuduh reformasi telah terlampau jauh. Ada yang menilai masyarakat memasuki zaman anarki, hukum tidak berdaya, dan Indonesia dalam proses disintegrasi. Seolah akan hancur berkeping-keping. Bagaimanakah pandangan yang sehat di dunia kesusasteraan? Apakah para pekerja sastra juga berpikir bahwa sastra Indonesia sedang memasuki masa kritis, bangkrut, bubar dan selesai?

Ada penyakit kronis di kalangan komunitas sastra kita sejak Indonesia merdeka. Setelah Chairil Anwar, kalangan

macam itu bilang tak ada lagi sastrawan. Tak ada penyair, puisi Indonesia telah mati. Demikian juga setelah HB Jassin wafat, 11 Maret 2000. Tak ada lagi kritikus, dan apresiasi sastra Indonesia dianggap berhenti. Selalu saja ada komunitas yang mempersalahkan bahwa tak ada sastrawan yang serius, karya-karya tidak intens, dan buku-buku yang terbit, meskipun banyak sekali, tak menarik untuk dibaca.

Diro Aritonang, redaktur budaya harian **Pikiran Rakyat**, Bandung, tampaknya mencoba menjawab masalah ini dengan menyoroti Sastra Indonesia dalam pergaulan di dunia. Ia bertanya “Siapa saja sastrawan Indonesia yang sudah mampu berkiprah dalam pergaulan sastra dunia?” Wah! Tentu saja banyak sekali. Ada Pramoedya Ananta Toer yang karya-karyanya sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa. Ada Rendra yang puisi-puisinya dinikmati di berbagai penjuru bumi. Ada Goenawan Mohamad yang mulai menulis dalam bahasa Inggris, Toeti Heraty yang fasih mensosialisasikan karya-karya Indonesia dalam bahasa Belanda, Perancis, Inggris, dan seterusnya.

Kita punya lumayan banyak bakat yang telah menembus selera internasional. Ada Seno Gumira Ajidharma, Ayu Utami, Zawawi Imron, dan seterusnya. Yang penting, pergaulan dalam kesusasteran hendaklah dipahami sebagai tercapainya prakondisi, atau sarat yang memungkinkan pertukaran karya. Artinya, pergaulan terjadi bila sajak-sajak Nenden Lilis Aisyah dari Bandung bisa diterjemahkan dan disukai di dalam bahasa lain di kota manapun di muka bumi ini.

Inilah tantangan globalisasi pasar. Bukan hanya untuk karya sastra, tapi juga musik lokal, jamu, makanan,

minuman, barang kerajinan maupun karya-karya manufaktur, industri berat maupun ringan.

Permasalahan mendasar adalah belum kuatnya industri sastra kita. Mahalnya harga buku, rendahnya minat baca, sedikitnya produksi sastra, lemahnya promosi, miskinnya teknik penulisan, mendorong kita menyimpulkan bahwa karya-karya sastra kita rendah mutunya. Untuk memecahkan itu, konon perlu ditingkatkan gairah belajar dan dibangun pergaulan yang sehat antara para sastrawan baik di dalam maupun di luar negeri.

Selama ini baru sedikit sekali sastrawan Indonesia yang mampu “bergaul” dengan sastrawan-sastrawan lain di negara tetangga, di Asia, Eropa maupun Amerika. Kalau ada yang sempat berkelana dan belajar, biasanya terjadi berkat belas kasihan masyarakat atau negara lain. Misalnya Sapardi Djoko Damono diundang membaca puisi di Australia. Sutardji Calzoum Bachri ke Amerika Latin. Saya diundang ke Amerika Serikat, dan seterusnya.

Belum pernah Indonesia mendatangkan pengarang-pengarang besar dari negara lain. Ramadhan KH pernah memprakarsai mengundang pemenang hadiah Nobel, Najib Mahfouz dari Mesir ke Indonesia, tetapi siapa yang mampu melaksanakannya? Selama bertahun-tahun kebudayaan Indonesia berkembang dalam wacana kemiskinan. Kita tertahan oleh kungkungan, kalau bukan pesona sebagai masyarakat yang melarat.

Akibatnya, cara berpikir kita selama ini juga cara berpikir orang miskin. Sastra yang miskin. Sastrawan yang hidup susah, tidak berdaya. Inilah yang harus kita

tinggalkan. Dunia telah berkembang sedemikian hebatnya, sementara kesusasteraan kita tetap tertinggal sebagai buah cipta dan karya pribadi-pribadi yang rapuh, manja, tergantung pada belas kasihan orang lain. Umar Khayam, misalnya. Kita ingat betapa susahnyanya menulis sebuah novel. Bahkan untuk menyelesaikan buku **Para Priyayi**, ia perlu santunan berbagai lembaga dana Amerika.

Seolah-olah ada kesan, Indonesia belum bisa melahirkan sastrawan besarnya sendiri. Kebesaran Pramoedya Ananta Toer dan Mochtar Lubis, misalnya, terlebih datang dari luar negeri. Apresiasi masyarakat masih menunggu rekomendasi masyarakat internasional. Bukan hanya di bidang seni. Untuk ilmu pengetahuan dan olahraga pun masih demikian. Bayangkan, apakah Susi Susanti akan kita hargai sebagai pahlawan bila tidak menang di luar negeri?

Apakah Pramoedya Ananta Toer kita pandang hebat sekiranya tidak mendapat berbagai pengakuan dari PEN (organisasi penyair, esais dan novelis) di mana-mana? Lihatlah, beberapa universitas di luar negeri telah memberinya gelar doktor dan macam-macam penghargaan. Padahal belum satu pun perguruan tinggi di tanah tumpah darahnya sendiri menghargainya. Bahkan seluruh karyanya belum dibebaskan dari pembreidelan, dan secara resmi masih terlarang untuk dibaca.

Jadi, pekerjaan rumah pertama yang mesti kita selesaikan adalah memperbaiki apresiasi masyarakat terhadap karya-karya bangsanya. Kalau toh suatu saat bangsa Indonesia tak ada lagi, lantaran lebih pas dan bahagia menjadi bangsa Papua, Aceh, Bali, Madura, dan seterusnya, kita tetap perlu mekanisme untuk menghargai dan menjunjung

tinggi keindonesiaan kita.

Siapa pun boleh menjadi bangsa tersendiri, baik berdasarkan etnis, agama, aliran politik, latar belakang ras, sejarah maupun letak geografis. Tetapi itu tidak mungkin menghilangkan keterlibatannya dalam entitas yang lebih besar. Indonesia, seperti halnya Eropa, Asia, atau Amerika, merupakan benua kepulauan. Memang ia juga anak benua Asia. Tetapi itu tidak berarti membatasi warganya untuk membangun identitas masing-masing, sebaik kalau mereka juga berseikeras untuk menyamakannya diri sebagai “Orang Indonesia”.

Sastra Indonesia berperan besar di sini. Manakala prasarana fisik belum memadai, prasarana spiritual mungkin dapat menggantinya. Sastra barangkali dapat merupakan sarana komunikasi, wahana untuk menenempa cita-cita bersama, membangun memori kolektif, dan memperbaiki citarasa sekelompok besar manusia. Dalam kesusasteraan pula kita belajar mendidik, mengembangkan pribadi, menegakkan hukum, dan membagi-bagi semangat hidup berkonstitusi.

Saya menaruh harapan besar, bila kedewasaan sastra-wan Indonesia meningkat, maka akseptabilitas kita dalam pergaulan internasional juga akan semakin baik. Tetapi selama Indonesia masih ingin diperlakukan lain dari yang lain, manja dan sombong dengan rasa mindernya, selama itu pula sastra Indonesia sukar masuk ke pasaran global, apalagi kedalam hati dunia. Kita masih harus selalu bekerja keras untuk menjadikan Indonesia bangsa yang jujur, bangsa yang inovatif, bangsa yang terhormat dan mampu menghormati bangsa-bangsa lain.

Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan studi dan penerjemahan. Bukan hanya produksi dari dalam negeri yang mesti dipacu dan dibahas, tapi juga penerjemahan karya-karya dari luar. Siapakah yang bertugas untuk itu? Bukan hanya departemen pendidikan nasional dan kementerian pariwisata, tapi juga masing-masing sastrawan, satu persatu.



Persahabatan dan Kreativitas

SEBETULNYA setiap buku adalah hasil kerjasama antara berbagai pihak. Bukan semata-mata seorang pengarang, tapi juga sumbangan narasumber, penerbit, editor, korektor, ilustrator, dan akhirnya pembaca. Atas pikiran itu, saya menyambut permintaan Franz Daehler pada 1995. Dr. Franz Daehler adalah seorang polyglot, menguasai banyak bahasa, mantan pastor Jesuit, dan humanis yang saya hormati. Kami berkenalan, pada 1976, ketika saya memacari seorang muridnya, yaitu Maria Albertha Felisitas Melanita Pranaya, yang kini kita kenal sebagai Dr. Melani Budianta.

Kerjasama menulis buku **Pijar Peradaban Manusia** berlangsung sangat lama dan sangat menyenangkan. Meskipun sebetulnya tidak banyak berperan, saya merasa bangga, karena pertama mendapat kehormatan. Kedua banyak belajar. Dan ketiga, karena saya ingin berbakti pada seorang “mantan pastor” yang menikahkan saya dengan Melani pada hari Minggu, 6 Februari 1977, di kapel Santa Ursula, Jalan Pos, Jakarta. Meskipun senang dengan tiga alasan, saya juga merasa takut dengan lebih banyak alasan.

Pertama, mana bisa? Saya pasti tidak bisa mengikuti jalan pikiran beliau. Beliau berbicara dan berpikir dalam banyak bahasa. Kedua, mana sempat? Saya ini penulis asongan. Waktu saya habis di jalan. Dan ketiga, mana mungkin?

Banyak orang berpendapat mengarang bersama adalah hal yang mustahil. Kalau pun jadi, hasilnya tempel-tempelan. Tambal sulam. Inilah yang sangat saya takutkan. Tetapi, bukankah setiap buku perlu penyuntingan? Bahkan novelnya Pramoedya Ananta Toer memerlukan penyuntingan Jusuf Ishak? Apalagi buku-buku non fiksi, yang pada prinsipnya dapat digarap beramai-ramai? Jadi kegembiraan saya tidak perlu kurang seandainya hasilnya dinilai “tambal sulam”. Yang penting, apakah sulaman-sulaman itu memperbagus buku dan menambah kegunaan. Bahkan untuk pembacaan puisi, kita dapat menyusun mozaik, menyambung-nyambung, seperti membuat *medley* untuk nyanyian.

Sebenarnya sudah beberapa kali saya melakukan hal ini. Pertama, yang paling saya rasakan berhasil adalah buku biografi **Siapa Sudi Saya Dongengi?** “karya otobiografi” H. Boediardjo, almarhum. “Proyek” itu sangat berhasil karena banyak faktor. Pertama adalah sumbernya, yaitu kehidupan mantan menteri penerangan kita yang sangat kaya akan berbagai pengalaman. Kedua karena kepemimpinan tim penulisan dan penerbitan, yaitu Aristides Katoppo. Dan ketiga karena didukung oleh satu tim periset handal dari universitas Indonesia dan Arsip Nasional. Maka tugas saya jadi sangat ringan. Seperti koki yang dilengkapi dengan berbagai bahan mentah dan dapur super modern.

Nah! Bagaimana dengan penulisan Pijar Peradaban Manusia? Sumber utama buku ini adalah karya Franz Daehler dan almarhum Julius Chandra, yang berjudul **Asal dan Tujuan Manusia**. Saya sudah menerima buku itu sebagai hadiah pernikahan, 23 tahun lalu. Buku itu sangat laris dan sudah dicetak belasan kali. Kesan pertama ketika membacanya, saya merasa Franz Daehler sangat termotivasi oleh Teilhard de Chardin. Rasa kagumnya pada cendekiawan besar itu mendorong Franz Daehler untuk tampil, menerangi dunia, berbakti kepada masyarakat. Pendidikan dan pengajaran yang saya terima rupanya belum membuat saya pandai mengagumi orang lain. Agaknya mengapresiasi atau menghargai, bukanlah kata kerja buat anak-anak.

Di lapangan seni sastra rasa kagum ini justru seringkali harus disembunyikan. Sedangkan dalam bidang senirupa, sebaliknya, seseorang pelukis justru bangga bila biografinya menyebut ia belajar dari Affandi, Sujoyono, Nashar, dan seterusnya. Dunia sastra, bermodalkan kata-kata yang menuntut orisinalitas dan pikiran yang bebas dari pengaruh siapapun. Oleh sebab itu di Indonesia “pembaruan” dianggap sangat penting. Sedangkan kesamaan teknik dilecehkan dan dipandang rendah dengan mengenakan predikat epigon, pengikut, bahkan pengekor saja. Di negeri yang haus akan “kepeloporan” kesusasteraan bisa beralih fungsi sebagai “pemuliaan diri sendiri”, *self glorification*!

Mempribumikan Manusia

Franz Daehler, secara langsung atau tidak mengajarkan rasa kagum pada manusia itu. Ia tidak hanya menyukai pemandangan alam, atau “panorama yang indah” tapi juga manusia yang hidup di dalamnya. Padahal sering saya mendengar seseorang kagum pada gunung atau pantai, tetapi tidak kagum sama sekali pada penduduknya. **Buku Pijar Peradaban** memperlihatkan perhatian yang mendalam itu. Franz Daehler bisa mengagumi, dan membenci hal-hal yang ditemuinya secara terus terang. Itulah yang membuat orang percaya pada kata-katanya.

Saya dibesarkan di masyarakat yang kurang ekspresif, bahkan cenderung menahan perasaan. Kita tidak diajar bagaimana menyatakan gembira, menyatakan suka atau menyatakan benci secara betul. Maka, ketika saya baca kalimat demi kalimat yang ditulis Daehler, keinginan pertama adalah bagaimana menekan agar pikirannya tidak terdengar terlalu berterus terang. Saya lupa contoh-contohnya. Tetapi bila masih ada yang lolos, anda dapat menemukan ungkapan-ungkapan seperti “hatiku bergelora mendengar ceramah Teilhard de Chardin.”

Kalimat seperti itu seharusnya tidak perlu dibuang, karena sangat manusiawi. Tetapi tugas penyunting, anehnya, justru menyaring emosi, menghilangkan luapan perasaan yang dianggap berlebihan. Kalau buku ini lantas terasa datar dan dingin, maka sayalah yang bertanggung-jawab. Franz Daehler sendiri seorang pribadi yang hangat, penuh gairah, dan hampir selalu menutup surat-suratnya dengan kata-kata: “Salam Rangkulan!”

Jadi sebetulnya apa peran saya dalam penulisan buku ini? Tidak banyak. Semua bahan telah disiapkan oleh Franz Daehler selama bertahun-tahun. Bagi yang mengenalnya selama 20 tahun atau lebih, tentu tahu obsesinya yaitu: membuat manusia memahami dan menyambut gembira hidupnya. Ia sangat merasa cocok dengan orang-orang muda, remaja, mahasiswa. Ia ingin membagikan segala sesuatu yang diketahuinya kepada semua orang. Bukan basa-basi, bukan sandiwara.

Saya sendiri cenderung mengambil jarak. Saya seringkali lupa apa yang sudah saya tulis. Dalam banyak kesempatan saya merasa menulis sesuatu yang saya anggap sebagai pendidikan, misalnya **Mempertimbangkan Sekolah di Luar Negeri** (Grasindo, 1994), atau “pariwisata” dalam **Menggebrak Dunia Wisata** (Puspa Swara, 1993), atau juga “lingkungan” seperti dalam **Moral Industri** (Pustaka Sinar Harapan, 1999). Tetapi terus terang, saya sudah lupa isinya, perihal apa saja, dan mengapa saya menulisnya. Sekarang saya takut hal itu juga bakal terjadi pada buku kami berdua ini. Padahal saya juga ingin menjadi “bapak yang baik” bagi tulisan-tulisan saya.

Satu-satunya hal yang paling teringat, mengapa saya terlibat dalam buku ini adalah ingin “mempribumikan” pikiran-pikiran yang ada kalanya dicap “barat”, “asing” dan “tidak sesuai dengan adat-istiadat” dalam masyarakat kita. Saya merasa punya pretensi, bahwa pikiran-pikiran dalam buku ini murni, tulis dan asli Indonesia, sebagaimana mestinya juga asli untuk Swiss yang berbahasa Jerman. Saya berharap pikiran-pikiran dalam buku ini dapat dipakai untuk melihat persoalan lokal. Bahkan

kasarnya dapat diterapkan dan dimiliki masyarakat sebagai pikiran mereka sendiri. Bukan ekspor, bukan impor, tetapi memang sudah menjadi milik bersama “dari sananya”.

Kalau rata-rata pengetahuan dari “barat” diharapkan mampu menjadi alat “transfer of knowledge” dan “transfer of technology”, saya berharap buku ini justru menjadi alat untuk menjalin persahabatan, menjalin dan saling menyumbang pengertian. Saya ingin membuat perhitungan akan perlunya “transfer of emotion” dan untuk bersama-sama melahirkan mitos-mitos baru, kalau tak dapat dianggap sebagai hal yang sejati dan kebenaran.

Saya menyadari dalam turut menggarap buku ini telah mengeksploitir “tukangisme” alias sekadar ketrampilan menyusun kata. Tetapi justru “kebodohan” itulah agaknya yang dapat saya sumbangkan. Data-data yang diberikan oleh Franz Dahler begitu luas dan kaya. Kalau bahan mentah itu dapat diibaratkan sebagai batu alam, saya sebagai pemahat barangkali akan membuatnya patung gajah yang besar. Franz dahler sendiri seorang pemahat handal yang menguasai berbagai bahasa. Ia dapat membuat batu besar itu menjadi gajah yang bertubuh manusia, menjadi Ganesha yang duduk anggun, arif dan bijaksana.

Ketika patung bagus itu diberikan pada saya, dengan spontan, mudah dan tanpa merasa bersalah, saya pukul keras salah satu gadingnya sampai patah. Begitulah konon Ganesha yang sempurna menurut adat. Maka kalau anda menemukan hal-hal yang jadi rusak di sana-sini akibat ulah saya, anggaplah saya pemahat kedua, yang sengaja mematahkan gading kanan Ganesha, justru untuk menyem-

putusannya. Demikian kilah saya sebagai upaya mem-
pribumikan manusia, satu hal yang sebenarnya tidak perlu
dilakukan, kecuali kalau kita percaya bahkan kebodohan
adalah kepandaian, kemiskinan adalah kekayaan, dan
kelemahan adalah kekuatan. Entah kata siapa.



Pro dan Kontra *Sweeping* Buku

"KOMUNISME sudah mati, kebodohan kita belum." Begitu komentar seorang teman ketika mendengar ada kelompok (kecil?) masyarakat "anti komunis" akan memusnahkan buku-buku "berbau kiri". Katanya para pemilik toko-toko buku ketakutan mendengar istilah "sweeping" atau "sapu bersih". Menurut rekan yang berkomentar itu, kelompok yang kali ini menyatakan anti komunis itu juga akan men"sweeping" buku *Das Kapital* karya Karl Marx, dengan alasan yang sangat kocak: "Das Kapital mendorong orang jadi kapitalis."

Saya terharu, geli, kasihan, dan juga *gregetan*. Pada hari Kamis, 10 Mei 2001 pukul 08.15 pagi saya dengarkan wawancara radio Ramaco, Jakarta, dengan koordinator kelompok pembakar buku. (Mohon maaf, kalau terkesan saya tidak terlalu mengenalnya.) Ketika ditanya mengapa buku karangan Franz Magnis Suseno dibakar, jawabnya polos dan sederhana. Katanya, kebetulan saja yang tersedia adalah buku Magnis Suseno itu. Konon, pembakaran itu hanya simbolik, belum sempat mencari judul yang lebih

pas. Malah katanya sweeping itu dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mempelajari “buku-buku yang berbahaya”.

Stasiun radio yang memanggil pendengarnya “magic listeners” itu juga menampilkan Asvi Warman Adam dari LIPI, yang dengan tegas menyatakan bahwa pembakaran buku bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Ketika “lawan bicara”nya menampilkan Ketetapan MPRS sebagai landasan, Warman Adam bilang, Tap MPRS itupun tak dapat dijadikan dasar, karena sudah “keropos”. Obrolan akhirnya ditutup dengan tetap bersemangat. Yang satu terkesan sederhana: “menjunjung ajaran agama” dogmatis dan patriotis. Sedangkan lainnya yakin semua orang bisa lebih bahagia kalau bersikap terbuka dan pandai memaafkan.

Untuk ke sekian kalinya saya melihat orang berebut jendela. Satu kelompok ingin menutup dan menguncinya. Satu kelompok lagi ingin membukanya lebar-lebar. Keduanya yakin punya tujuan yang sama: agar orang dalam ruangan sehat sentosa. Yang satu berpikir angin bisa bikin flu, bersin-bersin dan mati. Lainnya percaya bahwa orang lebih kuat bila suka dihembus angin, (mungkin debu), dan sinar matahari. Sekarang, “pikiran bodoh” saya mengatakan, kita sedang membahas dua sudut pandang yang berlawanan ini. Sedangkan “pikiran pintar” saya memperingatkan, masalahnya tidak begitu sederhana.

Pertama, ada perbedaan perilaku antara pembakar buku dan penyayang buku. Yang satu ingin melenyapkan bukunya dan mungkin juga penulisnya dari muka bumi. Lainnya justru ingin menambah, memperkaya, dan mem-

buatnya lebih beraneka ragam. Kedua, forum untuk membahasnya belum membebaskan pikiran beradu dengan pikiran. Wawancara radio atau diskusi internet menjamin keamanan pembicara kedua kubu. Sedangkan pertemuan yang bersifat fisik, masih membuka peluang terjadinya hal-hal “di luar pikiran”. Pengalaman menunjukkan bahwa “silat lidah” dan “tukar pikiran” bisa berlanjut dengan hal-hal yang menyedihkan.

Karenanya, forum diskusi seperti ini menjadi lebih bermakna, dan insyaallah lebih dapat mendewasakan pembicara maupun pendengarnya. Kita mendapat kesempatan beradu pendapat, tanpa harus melukai, menghanguskan, merusak, apalagi “melenyapkan” hal-hal yang diyakini berbeda, berseberangan, maupun “membahayakan” kehidupan. Dengan hati-hati kita melihat perbedaan, justru bukan sebagai ancaman melainkan sebagai berkah. Tentu dengan catatan, bila kita yakin dapat mengendalikan hal-hal yang “berbenturan” teristimewa dalam diri kita masing-masing.

“Jangan berkata jangan,” kata seorang teman. Enak sekali memberi petuah demikian. Nyatanya sangat sulit untuk tidak mengatakan “jangan” sekali saja dalam sehari. Peradaban yang kita jalani bahkan banyak ditopang oleh larangan untuk tidak begini, tidak begitu. Masyarakat yang melahirkan dan membesarkan kita bahkan kaya akan organisasi “Anti ini” dan “Anti itu”. Anak-anak kita dilatih untuk membenci setan, iblis, korupsi, kebatilan, dan sekarang muncul istilah favorit yaitu “Anti KKN” dengan pengertian menentang kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Terus terang saya termasuk yang tidak bahagia dengan

kegiatan anti ini dan anti itu. Saya ingat pengalaman seorang kader partai (apapun!) pada awal 1960-an. Berbagai macam lagu “anti” dan “ganyang” dinyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Ada mars yang gegap gempita, “Awaslah Inggris dan Amerika, musuh seluruh dunia!” Ada juga semboyan “Inggris kita linggis, Amerika kita seterika”. Bahkan ada slogan jadi salam: “Ganyang Malaysia!” Dan apa yang terjadi tak lama kemudian? Perasaan kita harus berubah setegas-tegasnya: dari marah dan jengkel pada Belanda, Inggris, Jepang, sekutu dan lain-lain jadi sebaliknya. Kader partai itu pun diselamatkan dan dihidupi oleh “Inggris” yang ingin dilinggisnya.

Bung Karno sudah memberi catatan “kita tidak benci pada Belanda atau Inggris. Bukan orangnya, tapi wataknya.” Kolonialisme, imperialisme, kapitalisme dan isme-isme jelek itulah yang katanya kita lawan, kita perangi, dan kalau bisa kita lenyapkan dari muka bumi. Tentu saja penjelasan seperti ini dapat kita terima. Tetapi harus diakui bahwa kalau kita melaksanakan anti ini, anti itu, hendaknya tidak digerakkan oleh energi atau semangat kebencian. Bung Karno juga memberi contoh, kalau kaum Marhaen “anti kemiskinan” bukan berarti membunuh orang miskin, merusak gubuk-gubuk mereka, dan membakar gombal-gombal kekayaan mereka.

Masalahnya hari ini adalah, apakah kita tidak boleh benci sama sekali? Presiden Abdurrahman Wahid juga berpesan, kita boleh mengadili seseorang, tetapi bukan membencinya. Karena itu sering ditekankan pentingnya penghormatan kepada para pemimpin yang dulu telah dianggap berjasa, bekerja keras dan “berkorban” untuk

masyarakatnya. Tetapi karena emosi dan perasaan massa berubah, hal-hal yang dulu disukai dan disanjung-sanjung, mendadak dihujat dan disengsarakan. Sebaliknya, hal-hal yang dulu dibenci dan dilecehkan, kini disukai dan dibanggakan. Maka pertanyaannya, tidak bolehkah kita menyukai?

Dua pertanyaan ini ada di dalam hati kita. Bukan hanya kebencian dan penghormatan kepada ajaran yang konon “berbau kiri”, tetapi juga perasaan yang sama pada benda, konsep, idea, keadaan, tumbuhan, hewan maupun orang-orang lain. Manusia diperlengkapi dengan kebebasan untuk membenci dan mencintai. Karenanya ada pecinta kucing yang rela mengeluarkan uang dan mati untuk membela kucingnya. Tapi ada juga yang sebal setiap melihat kucing, dan selalu berusaha melemparinya dengan batu, meskipun mengakibatkan pecahnya jendela tetangga.

Hari ini kita bertukar renungan dan kalau mungkin perasaan, mengapa seorang penyayang kucing harus memahami perilaku pembenci kucing, yang percaya bahwa kucing bisa membunuh dan bikin alergi. Sebaliknya juga, mengapa para pemburu, penjerat, dan barisan masyarakat “anti kucing” perlu menghormati tetangga yang gemar memasang berlian di leher kucing favoritnya. Berdasarkan keyakinan masing-masing kita boleh berpikir bahwa Allah membenci permusuhan, perceraian, kemunafikan, kekufuran, dst. Tetapi berdasarkan keyakinan yang sama kita juga dilatih memahami bahwa Allah yang maha adil, maha pengampun dan maha pemurah itu tidak menyenyapkan iblis, bahkan dari hati mahluknya yang paling beriman.

Terakhir, kita juga perlu memberi ruang dalam re-

nungan kita pada pihak ketiga, keempat, kelima, dst yang paham bahwa kedua perasaan itu dapat diasah, diadu, dijadikan tontonan, dan dinikmati sepuas-puasnya. Lebih-lebih bila “panggung adu perasaan” ini ternyata dapat memberikan keuntungan moral dan material tanpa harus tersanjung sebagai yang kalah, maupun terhujat sebagai pemenang. Kalangan di luar yang beradu ini punya tugas moral agar perbedaan dan persamaan tidak memakan korban, apalagi menghancurkan benda, pikiran, dan jiwa-jiwa yang telah tercipta dengan penuh harapan.



Dari Puisi untuk Kehidupan

Hai langit, jangan engkau tinggi hati!

– Xin Yue

PUISI adalah jembatan hati. Ia bisa menghubungkan hati dua manusia, dua bangsa, dua generasi, bahkan dua kebudayaan yang meliputi filsafat, kesenian, adat istiadat dan agama. Kalau ingin mengerti isi hati orang Jerman, Brazil, atau orang Gayo, mari kita dengarkan syair lagunya, dan kita baca puisi-puisinya. Begitu juga kalau kita ingin tahu isi hati tetangga kita yang sehari-hari berbahasa Mandarin, atau berbahasa Batak, Kei, Indonesia, maupun Arab. Kita perlu membaca puisi mereka. Hemat saya, itulah manfaat terbesar dari penerbitan buku **Resonansi Indonesia** yang diluncurkan di Galeri Cipta II, 18 Maret 2000. Saya kebetulan diminta membuka acara.

Buku itu ditulis dalam dua macam huruf dan dua macam bahasa, oleh seratus pengarang. Hati saya mengatakan seluruhnya warga Indonesia. Hanya “terpaksa” dibumbui, bahwa separuh berbahasa Mandarin, dan separuh lagi berbahasa Melayu yang dinyatakan sebagai “bahasa Indonesia”. Kalau ditinjau dari latar belakang etnis, atau darah yang mengalir dalam tubuh mereka, seratus pengarang itu

keturunan macam-macam. Ada yang merasa Jawa, Sunda, Hokkian, Kanton, Madura, Batak, Riau, dan seterusnya. Jadi tidak adil kalau dibagi rata dua “bangsa” Tionghoa dan Indonesia. Tetapi dikotomi seperti itu mungkin perlu, meskipun fungsinya hanya untuk memudahkan dan menyederhanakan perkara.

Kalau dikotomi itu diterima, secara otomatis saya merindukan terbitnya puisi dwi bahasa lainnya seperti Indonesia – Arab, Indonesia – Tetum (Timor Loro Sae), Indonesia – Belanda, Indonesia – Jepang, dan seterusnya. Bahkan Indonesia – Aceh, dengan huruf rencong, dan Indonesia – Jawa, dalam aksara Jawa pun saya rindukan. Semuanya tentu bermanfaat memperkaya khasanah kedua kebudayaan, sekaligus menambah jumlah “jembatan hati” tempat kita saling berlatih mengerti, berlatih memahami, dan pada gilirannya belajar terus menerus mencintai.

Pertama kali membaca “Resonansi Indonesia” ini, saya langsung ingin tahu bagaimana isi hati sanak famili yang menulis dalam bahasa dan huruf Mandarin itu. Saya ingin tahu apa kata Xiao Ling, apa keinginan Yu Yun, isi hati Meng Han, cita-cita Lin Hong, dan seterusnya. Pendek kata, otomatis saya merasa lebih tertarik pada belahan kedua buku ini, daripada bagian pertama yang memuat karya-karya puisi Indonesia dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, termasuk puisi saya sendiri. Saya berharap, dari kalangan kritisi sastra berbahasa Mandarin, yang justru akan memfokuskan perhatian pada karya sastra Indonesia itu.

Bagi saya sendiri, buku macam ini lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Memang ada juga segi

jeleknya. Pertama, kalau kita tidak paham membaca huruf Mandarin, buku ini mubazir dan memberikan perasaan “asing” yang tidak perlu. Tetapi perasaan asing itu akan muncul juga seandainya yang dipakai adalah huruf lain yang belum tentu kita semua kenal. Misalnya huruf Bali, Arab, bahkan huruf Braille. Kedua, buku ini akan lebih efisien kalau melulu pengenalan dalam satu bahasa. Terjemahan sajak-sajak Mandarin ke dalam bahasa Indonesia, saya yakin cukup makan 50 sampai 80 halaman. Jadi bisa lebih terfokus dan mengena.

Tetapi, kebaikan buku ini ternyata lebih banyak. Pertama ditinjau dari segi pemasyarakatan, baik pengarang, teks, maupun pembaca kedua bahasa ini sangat penting. Kita tahu sebuah buku terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama adalah penulis. Dalam hal ini, buku Resonansi Indonesia boleh bangga mendapat dukungan dari seratus penyair, tua muda, maupun yang sudah almarhum. Jumlah penulis ini masih diramaikan lagi oleh partisipasi penyunting dan penerjemah. Kedua, dari segi teks, buku ini diperkaya oleh tipografi. Ekspose atau penyajian huruf-huruf Mandarin setelah sekian lama dibatasi, tak boleh dipertontonkan, membawa dampak psikologis dan kultural yang tinggi dan positif. Ketiga, unsur pembaca yang sangat luas juga tercakup dalam penerbitan ini, sebagaimana tampak diwakili oleh para pemberi sambutan.

Dari sisi pembaca, telah tampil penyambut kedua belah pihak seperti Sapardi Djoko Damono dan Leo Suryadinata dari “kubu” Indonesia; serta Dong Rui dan Huang Kun Zhang, dari “sisi” Tionghoa. Keempat pemberi

prakata itu tidak mengupas sajak, tetapi menyampaikan prinsip-prinsip mengapa kita perlu menyambut buku Resonansi Indonesia dengan gembira dan hati terbuka. Saya terkesan akan sambutan Huang Kun Zhang. Profesor kelahiran Indonesia yang kini menjadi dosen di Universitas Jinan, Guangzhou sejak 1966 ini berkata, “Kelebihan nyata antologi puisi ini adalah karyanya sangat mendekati kehidupan, namun lebih tinggi dari kehidupan pula.”

Hal ini persis sama dengan asumsi saya terhadap setiap sajak. Manusia menggunakan sajak untuk mencatat dan berbagi hidupnya. Dalam puisi kita menyembunyikan perasaan, pengalaman. Bahkan rahasia hidup yang paling dalam. Melalui susunan kata-kata itu juga kita mencoba menumpuk harapan, melampiaskan kekecewaan, mengekspresikan kemarahan, kerinduan dan kecintaan. Maka saya percaya, mengapa kita mesti buru-buru menyerap dan memahami ungkapan setiap penyair yang ada dalam buku ini. Kita bisa cepat-cepat lahap dan cerna larik-larik Liu Chang dalam karyanya “Seruling Malam di Kota Pegunungan”, misalnya.

*Bayang purnama di atas kali Cikapundung
Rupanya masih juga
Bayang purnama di Zaman Pajajaran”*

– tulis Liu Chang.

Dengan puisi semacam ini, kita merasakan bagaimana tetangga, rekan, kenalan, bahkan saudara kita yang berbahasa Mandarin itu berupaya mencakup sejarah manusia yang tinggal di kepulauan ini. Masih pentingkah sekarang

kita berpikir bahwa Cikapundung hanya milik warga Bandung atau etnis Sunda semata-wayang? Tentu tidak. Sungai, kota, pegunungan, perdesaan, laut, bulan, langit dan seterusnya bukan monopoli milik seseorang atau satu golongan. Cikapundung adalah milik seluruh umat manusia, begitu juga kepulauan Indonesia.

Mungkin masih ada yang berpikir Indonesia hanya milik bangsa Indonesia, atau kota New York hanya milik orang Amerika, sebagaimana desa Kanekes di Banten hanya milik orang Baduy, atau Ka'bah di Mekah hanya milik orang Arab. Tetapi saya percaya, akan lebih banyak manusia berpikir, bahwa bahkan bahasanya pun bukan monopoli mereka sendiri. Bahasa Mandarin bukan hanya milik orang Tionghoa. Sama seperti halnya bahasa Jawa, Inggris, Latin, Spanyol, dan seterusnya telah menjadi alat komunikasi atau simbol informasi segala bangsa.

Sapardi Djoko Damono menegaskan dengan sangat bagus dalam pengantarnya. "Versi bahasa Indonesia karya Shakespeare otomatis menjadi bagian dari sastra Indonesia, dan bukan lagi milik orang Inggris."

Dari sisi ini sebetulnya saya ingin menyentuh hal yang sedikit peka, yaitu daya tukar dan kecocokan antarbangsa dan antarbudaya. Kalau seorang Jawa kagum pada budaya dan bahasa Arab, seringkali menambah namanya dengan Achmad (Sukarno) atau Muhamad (Suharto). Demikian juga kalau kagum pada "Barat" atau agama Kristen. Bahkan warga desa di pelosok Tapanuli bisa dengan mudah bernama Clinton Siregar, atau John Simamora. Tetapi, meskipun saya terpesona pada budaya Tionghoa dan sangat kagum pada ajaran Konfusius, mengapa tidak

bisa mendapat “nama Tionghoa”?

Harry Tjan bisa dengan bangga menjadi “orang Batak” bermarga Silalahi. Tetapi saya, yang sejak kecil bergaul dengan teman Tionghoa, menikahi keturunan Tionghoa dan mempunyai anak-anak Tionghoa, ditertawakan saja kalau mau mengganti nama apalagi mengaku Cina. Maka, ketidak-adilan pertama dalam pertukaran budaya Tionghoa – Indonesia, adalah tidak adanya hubungan timbal-balik yang setara. Demikian pula kekhawatiran saya pada publikasi antologi karya sastra semacam ini. Seorang pembaca Mandarin akan jauh lebih mudah belajar membaca, memahami dan mencintai karya-karya Indonesia yang ditulis dalam huruf latin, daripada sebaliknya.

Menjaga Prinsip Egalitarian

Sejak sekolah dasar hingga lulus SLTA di Malang, kebanyakan teman saya Tionghoa. Pengertian tentang pandai atau bodoh, baik atau buruk, rajin atau malas, berbakti atau durhaka, berkembang atau paling sedikit dipengaruhi oleh pandangan teman-teman dan pergaulan saya. Maka tidak mengherankan jika selera saya tentang “kecantikan wanita” pun diwarnai oleh pengalaman sehari-hari. Lebih dari itu, pengertian saya tentang cinta, kerja keras, hormat pada orangtua, dan suka pada makanan enak. Dan yang terindah dari semuanya adalah pengertian saya tentang cinta dan kesetiaan.

Tadi saya berpikir bahwa Tionghoa, di mana pun bisa menyatu dengan “pribumi” setempat, menjadi Harry Tjan

Silalahi, Tirto Utomo, Chuan Leekpai, Corry Aquino, dan seterusnya. Sedangkan “pribumi” di mana pun tidak mungkin menjadi Tionghoa. Pernah saya coba bahas ini dengan seorang teman Perancis. Katanya, Tionghoa berasal dari peradaban yang sangat kuno. Dengan senang hati orang-orangnya bergabung dengan budaya yang lebih modern seperti Indonesia, Amerika, Perancis, Filipina, Thailand, Kanada, Australia dan seterusnya. Sebaliknya, mereka yang datang dari ekonomi lebih baru, akan sulit sekali dan tidak enak mengidentifikasi dengan pranata ekonomi lama seperti China, Mesir, Romawi, Babylon, Persia, dst.

Ternyata butir-butir pemikiran itu tidak sepenuhnya benar. Dulu saya malu, bahkan marah kalau dicaci-maki sebagai “Cina!” Bukan lantaran saya tidak berdarah Tionghoa, tapi juga jengkel. Seandainya saya betul-betul Cina, mau apa? Begitu alasan saya. Tidak urung saya disiram kopi juga di sebuah warung, dimaki-maki oleh seorang Ketua RT, dan diolok-olok keras sekali di sebuah WC Umum. Semua pengalaman itu menyakitkan. Bertahun-tahun saya mengenangnya dengan darah mendidih.

Tetapi sejak 2 Mei 2001, perasaan itu berubah. Saya tidak lagi merasa benar, dan tidak juga merasa bersalah. “Orang Asing” menjadi “pribumi” atau sebaliknya “pribumi” merasa atau mengidentifikasi dirinya sebagai Belanda, Tionghoa, Arab, dan seterusnya adalah hal yang sangat manusiawi. Pada hari itu, lahir cucu sulung saya, Chung Tse Liang, yang lebih dikenal sebagai Linus Abhyasa Wicaksana. Jadi siapa bilang “Orang Jawa” tidak bisa punya nama Tionghoa?

Saya keliru ketika berpikir Jawa tidak bisa jadi Tionghoa, padahal bisa jadi Amerika, Arab, Inggris, Belanda, dan seterusnya. Prinsip egalite rupanya telah dilupakan sendiri oleh teman Perancis saya, ketika ia berpikir bangsa yang lebih maju tidak bisa mengidentifikasi diri dengan sistem ekonomi yang lebih tua. Modern tidak bisa jadi kuno. Dan kuno tidak bisa jadi modern? Sungguh tidak adil bila anda hidup dalam pikiran “lebih hebat” dari pendahulu. Apalagi dari penerus kita. Perasaan hebat, lain daripada yang lain dan tidak mau disamakan itulah awal dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Puisi sebagai cermin isi hati yang dapat diwariskan manusia dari zaman ke zaman, dari satu bangsa yang satu kepada bangsa lainnya, punya misi untuk mengkoreksinya. Dengan kata-kata, roh dan semangat yang dikandungnya, puisi dapat terus menerus menjaga dan menghidupkan kemanusiaan. Hidup dalam puisi, berarti ikut sejiwa dengan kata. Penyair tidak lagi dibatasi oleh kelamin, usia, apalagi ras dan keturunannya. Sebagai bukti, bacalah karya yang baik. Tidak penting lagi apakah penulisnya sudah mati atau masih hidup, laki-laki atau perempuan, berkulit putih, coklat, merah, atau hitam. Di sinilah hubungan yang tulus antara kata-kata dan kehidupan dipertaruhkan.





Di Balik Sukses Non-Fiksi

DI BALIK sukses non-fiksi, adalah pengarang dan dunia yang berubah. Pada 1962, sebuah buku non-fiksi berjudul **Silent Spring** (Musim Semi yang Sunyi) mengguncang dunia. Dalam waktu singkat laku 500.000 eksemplar. Sedangkan penulisnya, Rachel Carson ditentang oleh para industri pestisida. Mengapa? Sebab buku itu melukiskan betapa sunyi bumi ini bila semua unggas dan serangga mati akibat disemprotkannya racun di lahan-lahan pertanian. Masyarakat tergugah. Tetapi pabrik-pabrik insektisida, pestisida, serta racun-racun lainnya marah. Beribu dolar dihabiskan untuk melancarkan kampanye bahwa Rachel Carson keliru. Penulis itu dianggap orang histeris yang dungu. Tapi hasilnya, ia malah mendapat berbagai macam hadiah. Kini, kita mengenal Rachel Carson sebagai pahlawan yang menyulut maraknya gerakan pelestarian lingkungan.

Jadi faktor apakah yang menentukan suksesnya buku non-fiksi? Bakat penulis yang hebat? Sistem publikasi, pemasaran dan distribusi buku yang baik? Atau apresiasi masyarakat yang kuat? Atau faktor lain seperti tentangan

dari kalangan yang berwenang, seperti penguasa ekonomi (bisnis dan industri), penguasa politik (pemerintah), dan penguasa ilmu pengetahuan (akademia)? Konon apabila sebuah buku dilarang, dibreidel dan diharamkan, justru jadi laris karena mendapat publisitas gratis.

Bagaimana dengan buku-buku tentang Osama bin Laden? Bertahun-tahun namanya dikenal sebagai seorang eksentrik yang berani menentang Amerika Serikat. Mendadak menjadi sangat populer setelah terjadi penabrakan gedung World Trade Center di New York, 11 September 2001, yang berlanjut pada penyerangan Sekutu terhadap kamp-kamp yang didakwa sebagai teroris di Afghanistan. Maka buku-buku yang memperkenalkan Osama dikabarkan laris. Teristimewa ketika berlangsung pekan buku di Jakarta.

Benarkah demikian? Tentu saja “laris” dan “sukses” ada bedanya. Demikian juga dengan buku “best seller” dan buku-buku yang “memenangkan penghargaan”. Kenyataannya, buku yang penjualannya melejit akibat didorong oleh peristiwa tertentu, tidak melahirkan karya yang bagus, apalagi pengarang yang besar. Sebagai contoh kita bisa mencatat buku-buku yang meledak penjualannya karena Putri Diana meninggal secara tragis. Atau buku-buku berbumbukan skandal politik, keuangan, seksual, dan kontroversi agama.

Faktor yang menentukan sukses Non-Fiksi

Faktor utama yang mendorong suksesnya sebuah buku non-fiksi adalah substansi atau isi buku itu sendiri.

Buku-buku non-fiksi sangat sukses bila menyentuh kepentingan orang banyak dan untuk jangka waktu yang panjang. Di Indonesia dapat diambil contoh adalah **Di Bawah Bendera Revolusi** oleh Ir. Soekarno. Isinya merekam perjuangan yang mempesona dalam upaya membangkitkan semangat hidup berbangsa. Esai-esai macam itu akan terus dapat dibaca, dan dicari. Substansinya bukan semata-mata masalah politik, tapi juga sejarah, dan yang terpenting: kemanusiaan. Kita akan melihat ciri serupa pada kumpulan surat-surat R.A. Kartini **Habis Gelap Terbitlah Terang**.

Faktor kedua yang rupanya menentukan adalah nilai kesusasteraan dari buku yang bersangkutan. Kekuatan bahasa, sebagai komponen teknis penulisan sangat membantu dalam menyampaikan materi yang kaya. Hal ini dapat dilihat dalam **Nyanyi Sunyi Seorang Bisu** karya Pramoedya Ananta Toer, yang selanjutnya menjadi memoir "The Mute's Soliloquy"; dan pada **Catatan Pinggir** (Jilid 1-4) karya Goenawan Mohamad, yang muncul di dunia internasional sebagai "Sidelines".

Sebagaimana segera tampak, karya-karya non-fiksi maupun fiksi yang hebat akan segera muncul ke berbagai bahasa. Bahkan tulisan RA Kartini lebih dulu dalam bahasa Belanda. Demikian pula memoir Pramoedya Ananta Toer, maupun karya Mochtar Lubis "Het Land Onder de Regenbouw" yang tidak pernah muncul sebagai Negeri di Kaki Pelangi, dalam bahasa pengarangnya sendiri. Karya-karya non-fiksi yang besar ditandai dengan daya jangkanya untuk melintasi berbagai kebudayaan, dan daya hidupnya untuk mencapai generasi selanjutnya. Karenanya

kita masih terus menggunakannya sebagai referensi, sekalipun ditulis beribu tahun lalu di Mesir, Yunani, Tiongkok, maupun Jawa.

Sifat universal dari non-fiksi ditandai oleh keanekaragaman genre. Buku non-fiksi mencakup berbagai ilmu pengetahuan. Dari mulai biografi sampai tinjauan ekonomi dan agama. Dari kisah perjalanan, resep masakan hingga kamus. Pengetahuan ragawi, seksual, hingga kumpulan cerita ghaib, mantra dan doa. Pemikiran yang utuh (monograf) maupun kumpulan tulisan pendek. Semua dapat dikategorikan sebagai karya-karya non-fiksi, yang dapat digarap oleh hampir semua orang. Termasuk seandainya yang bersangkutan buta-huruf sekalipun, sebab buku non-fiksi dapat terdiri atas kumpulan gambar dan simbol. Oleh karena itu, berbahagialah para penulis non-fiksi yang memahami betapa luas jagad-rayanya.

Kesadaran pengarang akan tidak terbatasnya jangkauan informasi ini akan turut menentukan suksesnya sebuah karya non-fiksi. Unsur pertama yang dijual melalui karya non-fiksi adalah informasi, atau pengetahuan. Bersamaan dengan itu pengetahuan memerlukan kebenaran, akurasi, integritas penulis dan kredibilitasnya. Bukan hanya kesanggupan dalam menggunakan bahasa yang lugas, tapi juga pikiran yang cerdas dan hati yang jernih. Di atas semuanya adalah pembicaraan yang terfokus. Kejujuran penulis dalam menampilkan data, menyampaikan kesimpulan, dan berbagi wawasan menjadi taruhan. Apakah perlu obyektif? Tidak selalu. **Buku Harian Anne Frank**, sebagai contoh non-fiksi yang indah justru mengandalkan subyektifitas dan emosinya.

Faktor lain seperti latar-belakang pendidikan pengarangnya, peralatan teknis yang dipakai untuk menulis dan publikasinya harus dinyatakan kurang relevan. Sebuah karya non-fiksi tidak dijamin lebih bagus bila penulisnya menggunakan deretan gelar akademis, dan digarap memakai *note-book* dengan pentium mutakhir. Bahkan kesadaran terhadap ada atau tidaknya pembaca bisa jadi kurang penting. Tingkat keterbacaan dan daya komunikasi sebuah buku sering dimulai dengan kesadaran sedang dibaca (*audience awareness*). Tetapi dalam menyusun non-fiksi yang paling ilmiah pun hal itu dapat diabaikan, kecuali bila ditujukan sebagai sarana pendidikan. Sebuah jurnal kedokteran, misalnya, bisa ditulis semurni-murninya sebagai ilmu pengetahuan. Namun bila ditujukan untuk pelajaran sekolah, masalahnya menjadi lain.

Motivasi Menulis Non-Fiksi

Apakah motivasi menulis non-fiksi menentukan kualitas buku bersangkutan? Bisa ya, bisa tidak. Sebenarnya mengapa seseorang menulis buku non-fiksi? Apakah ia terdorong karena ada perlombaan dan ingin mendapat hadiahnya? Atau karena proyek pesanan? Atau dengan tulus, tanpa pretensi apapun ingin membagi pengalaman, ilmu, perasaan dan cita-citanya? Kita dapat membuat daftar sederet motivasi manusia menulis buku-buku catatan, ulasan, analisa, maupun teks pengetahuan berikut ilustrasinya. Ada yang murni sebagai upaya mencari nafkah. Ada juga yang separuh berjuang, separuh terpaksa. Y.B. Mangunwijaya mengklasifikasikan ada pengarang iseng,

pengarang proyek, dan pengarang nurani. Yang terakhir ini, menulis karena panggilan hati.

Buku-buku yang ditulis untuk memenuhi proyek tertentu jelas memerlukan penilaian tertentu pula. Sedangkan karya-karya yang disusun tanpa tekanan, tanpa motivasi komersial, bahkan tanpa keinginan bakal membuat penulisnya menjadi selebriti, tentu berbeda hasilnya. Pendeknya, motivasi ini penting dalam menyelesaikan pekerjaan, termasuk melahirkan sebuah karya non-fiksi. Menulis sebuah non-fiksi dapat dipercaya sebagai sarat pernikahan. Bisa juga untuk mendapat gelar sarjana. Atau untuk meneruskan nasihat bagi cicit yang belum lahir. Tetapi bisa juga untuk mengaktualisasi diri, untuk berpikir dan bertindak merdeka. Bekerja sebagai sarana untuk membebaskan jiwa dan raga inilah konon yang menjadi obsesi pendidikan. Jadi menulis untuk merdeka.

Bila motivasi ini yang dipegang, insya Allah hasilnya bisa luar biasa. Berjuta orang menulis skripsi sarjana setiap tahun. Berarti berjuta non-fiksi paling ilmiah muncul setiap tahunnya. Tetapi jarang, bahkan sangat jarang yang betul-betul bagus. Mengapa? Karena rata-rata skripsi dikerjakan dengan terpaksa. Skripsi adalah kewajiban yang dibebankan pada setiap orang setelah diharapkan bosan menjadi mahasiswa. Untuk dapat meninggalkan kampus dengan terhormat, calon sarjana diminta menggarap skripsi yang harus memuaskan dua atau tiga orang dosennya. Maka jadilah karya-karya non-fiksi seperempat hati, atau tanpa hati sama sekali, seperti sering kita lihat. Tentu saja dengan beberapa pengecualian. Misalnya, **Chairil Anwar: Sebuah Pertemuan**, skripsi Arief Budiman pada Fakultas Psikologi

Universitas Indonesia, dan **Orang-orang di Sim pang Kiri Jalan** skripsi adiknya, yaitu Soe Hok Gie, ketika lulus dari jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Memang tidak banyak kita melihat skripsi menjadi karya non-fiksi terkenal. Sama sulitnya dengan mencari pemenang hadiah Nobel Kesusasteraan yang dihargai karena karya non-fiksinya. Selama seratus tahun terakhir, beberapa saja yang juga tersohor sebagai penulis non-fiksi. Misalnya Herman Hesse, dari Swiss yang menerima hadiah Nobel 1946, John Steinbeck (Amerika Serikat, 1962), Jean Paul Sartre, dari Perancis yang menolak hadiahnya pada 1964, dan Alexander Solsjenitsyn (Uni Soviet, 1970). Selebihnya tersohor karena novel atau puisinya. Perkecualian istimewa adalah untuk Sir Winston Leonard Spencer Churchill, orator ulung dari Inggris, yang menerima hadiah Nobelnya yang kedua pada 1953.

Novel Herman Hesse, **Siddharta**, misalnya dapat dianggap tidak seratus prosen fiksi. Buku itu melukiskan dengan luar biasa indah kehidupan Siddharta Gautama, yang mendirikan ajarannya di India. Demikian juga karya Steinbeck **The Grape of Wrath** yang melukiskan kesulitan rakyat jelata pada zaman maleise dan **The Gullac Archipelago**, karya Solsjenitsyn yang membahas kerja-paksa di bawah rezim komunis. Lagi-lagi di sini kita melihat bahwa karya non-fiksi yang baik mengemban misi kemanusiaan yang kuat. Demikian juga hendaknya karya-karya non-fiksi yang ditulis para guru Indonesia, sekalipun dengan sasaran “hanya” untuk bacaan murid-muridnya, pada sebuah mata pelajaran yang telah diprogramkan untuk menggunakan buku yang terbitnya telah diproyekkan.

Pengarang dan Dunia yang Berubah

Menilai buku non-fiksi yang diperlombakan melalui Pusat Perbukuan Republik Indonesia, rasanya sedikit berbeda dengan pemahaman terhadap buku-buku non-fiksi yang bagus, sebagaimana telah diuraikan. Kita tidak dapat membandingkan karya-karya non-fiksi dunia dengan pelajaran mengenai Gunung Merapi. Tetapi semangatnya untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan memperhalus budi-bahasa, hendaknya tetap bisa dirasakan. Tidak ada alasan untuk sama sekali membedakan gairah mempertahankan kelestarian alam pada Rachel Carson berikut **Silent Spring**-nya dengan buku yang membela budidaya pohon cendana di Nusatenggara Timur, misalnya.

Masalahnya seringkali para pengarang kita terjebak pada persoalan lokal, yang dibawa oleh bahasa maupun iklim politik dan budayanya. Kebanyakan penulis non-fiksi Indonesia belum dapat mengangkat persoalan dan informasi yang hendak ditawarkan menjadi kekayaan dunia. Sedikit sekali yang dengan tangkas mau dan sanggup melemparkan isu yang paling lokal menjadi masalah global. Di antara yang sedikit itu, kita boleh mengenang Soedjatmoko, Mohamad Hatta, dan Adi Negoro. Mereka patut dijadikan teladan bagi para penulis non-fiksi yang hendak merangkul pembaca seluas-luasnya, dengan menyajikan kepentingan yang sedalam-dalamnya. Melihat seorang gelandangan di Jakarta, misalnya; Soedjatmoko dapat menarik perhatian kita ke kalangan serupa di negara-negara yang sedang berkembang lainnya.

Hendaknya terpatri pada jari para penulis non-fiksi,

bahwa pikiran dan hati manusia bebas, leluasa, menembus berbagai batas politis dan budaya. Dalam perkembangan ekonomi yang globalistis seperti sekarang, dengan mudah karya-karya non-fiksi impor merajai pasaran buku, maupun benak anak-anak negeri mana pun. Ilmu pengetahuan Indonesia terbuka untuk lebih berkembang di tangan penulis lain dari bahasa lain dan budaya lain, ketimbang oleh penulis-penulis domestik. Di sini letak tantangan kita. Selama *mind-set* atau cara berpikir para penulis Indonesia belum bergerak ke tataran internasional, selama itu juga penulisan non-fiksi belum banyak berkembang. Sementara ini, kita melihat kenyataan bahwa karya-karya non-fiksi di Indonesia baru didominasi oleh wartawan, dalam bentuk karya jurnalistis.

Padahal, dalam kebutuhannya, karya non-fiksi merupakan konsumsi utama di sekolah, sebagai sarana pelajaran untuk anak-didik Indonesia. Untuk mencukupi kebutuhan inilah digelar berbagai lomba, dan dipesan berbagai macam buku pelajaran. Bacaan wajib sebagai teks, maupun bacaan suplemen pendidikan, memerlukan banyak pasokan non-fiksi yang bermutu. Artinya, bukan hanya sekadar menyampaikan informasi dalam bentuk “dongeng” yang dinon-fiksikan, tetapi betul-betul sebagai tulisan faktual yang dapat dipegang kesahihan dan kesangkilannya.

Kelemahan umum naskah non-fiksi Indonesia yang banyak beredar di pasaran adalah kelirunya pemahaman terhadap istilah “non-fiksi”. Tidak sedikit buku yang dikategorikan non-fiksi justru dikemas dalam bentuk “cerita fiksi”. Misalnya kisah sebuah keluarga miskin yang menjadi berkecukupan dengan cara memelihara lele dumbo. Isi

buku itu sesungguhnya pelajaran bagaimana budi-daya lele dumbo. Memang non-fiksi. Tetapi karena dicampur-adukkan dengan kisah sebuah keluarga yang jelas-jelas rekaan, maka hal-hal yang faktual jadi sengaja dikaburkan, atau difiksikan. Akibatnya, pemahaman tentang non-fiksi memerlukan reformasi total.

Non-fiksi adalah pengertian internasional dan universal. Kalau pengarang teralalu menjerat materi bukunya dengan wacana setempat, dan lupa bahwa setiap pengetahuan boleh dimiliki siapa saja, karya-karya yang terbaik pun tidak dapat dimanfaatkan. Di sanalah kegagalan utama dari karya non-fiksi. Parameter pertama apakah sebuah non-fiksi berhasil, adalah kemampuannya memperkaya manusia dengan pengetahuan, atau mendorong manusia melakukan tindakan baru, mengambil sikap baru. Oleh sebab itu banyak karya non-fiksi diwarnai oleh sifat praktis. Non-fiksi tidak hanya memberikan kebijaksanaan, tapi juga mendorong dilakukannya kebajikan. Dalam perbuatan baik inilah terkandung ketrampilan, kemampuan dan kemauan untuk melakukan tindakan nyata.

Misalnya buku non-fiksi tentang laut dan gunung, membuat pembacanya tergerak untuk menyatakan cintanya pada alam. Buku pelajaran ekonomi menolong pembacanya mempraktikkan sistim manajemen, kesadaran akan pentingnya pembiayaan dan pertumbuhan. Dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga untuk buku budi-pekerti, pelajaran agama, petunjuk olahraga, memasak, dan ilmu komputer. Buku non-fiksi diharapkan mampu meletakkan pembacanya di tengah konstelasi dan konfigurasi dunia yang terus menerus berubah. Penulisnya diharapkan tahu

dan mampu memberikan pertimbangan dalam melangkah dan sikap apa yang harus ditempuh, sesuai dengan pengetahuan dan kesanggupan pembacanya.



Masyarakat *Cyber* dan Sastra Multimedia

"Saya bangga Indonesia punya candi Borobudur, tapi saya benci jumlahnya hanya satu. Dengan teknologi multimedia mungkin bisa membantu kita menghasilkan sekaligus seribu mahakarya semacam itu "

PRESIDEN Bill Clinton dan First Lady, Hillary mengucapkan selamat tahun baru 1997 buat anda. Begitu pesan komputer saya pada suatu pagi hari di bulan Januari. Benar. Setelah dibuka memang ada *virtual card* dari Gedung Putih, di Washington. "Puisi" atau keindahan itu berlangsung sesaat. Kenangannya tergantung pada kekuatan memori kita masing-masing. Di dalam *mail box*, pesan-pesan lain menunggu. Ada lagu "Jingle Bells", ada clip Santa Claus datang membawa hadiah, bunga dan pizza. Keindahan itu muncul seperti pelangi yang hanya sesaat mewarnai langit, kemudian semua kembali kosong. Kembali sepi.

Sekarang sudah lebih 10 tahun kami menjadi warga masyarakat *cyber*. Pesan-pesan semacam itu menjadi sangat biasa. Apalagi pada hari ulang tahun. Berbagai lagu, puisi, lukisan, dan animasi tarian dikirimkan oleh teman-

teman dari segala penjuru dunia. Ada dari Blue Mountain, ada juga dari Indokado. Mulanya 1990, ketika saya mendapat Fulbright Visiting Scholarship untuk mengajar di Cornell University, Ithaca, New York. Setiap pengajar mendapatkan *account* internet, dan alamat E-Mail.

Setiap minggu diberi 100-200 unit pulsa gratis di komputer masing-masing. Komputer yang semula berfungsi sebagai mesin ketik, untuk menulis paper, skripsi, dan mencetak pengumuman, berubah jadi alat komunikasi. Modem dipasang, ditancapkan ke telepon, dan mulailah kita menjelajahi dunia. Semula seminggu saya menulis tiga sampai lima artikel, jadi merosot tinggal satu atau dua. Komputer berubah fungsinya, dari alat produksi menjadi alat konsumsi.

Sejak itu sebenarnya terjadi reformasi besar-besaran dalam tubuh seseorang. Pertama dari segi bahasa. Kedua dari substansi pengetahuan. Bahasa Indonesia menjadi berantakan karena masuknya istilah-istilah baru yang tidak mungkin dan tidak perlu diterjemahkan. Mulai dari *enter*, *exit*, *delete*, *view*, *escape*, hingga *error* dan *hang*. Belakangan di Tanahair pun orang mulai memasukkan istilah-istilah komputer itu ke dalam hidup sehari-hari. "Kalau lagi *error*, nggak usah bicara!" "Nah, *hang* nggak lu!" dan seterusnya.

Dari substansi pengetahuan, dunia seseorang berubah drastis. Manusia memasuki alam semesta yang jauh lebih luas dari yang dapat dipikirkannya. Siang-siang seorang teman mengirim pesan agar kita mengunjungi Museum l'Ouvre di Paris. Ada pameran lukisan baru. Kalau ibu saya datang, dengan mudah dapat kita tunjukkan koleksi

patung dan lukisan Bunda Maria yang tersebar di seluruh bumi. Berbagai kutipan dari berbagai buku, dapat dicari. Bahkan koran dan majalah dapat dibaca tanpa harus beli, apalagi bayar langganan. Ada **Pikiran Rakyat** di Bandung, ada **Bali Post**, **Sinar Indonesia Baru**, dari Medan; bahkan buletin perkumpulan-perkumpulan kecil di mana pun.

Sepulang ke Indonesia, fasilitas *on line* saya terima sejak bekerja pada Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP), 1993. Lantas di rumah, saya menerima komputer gratis dan Pada waktu akan memberikan ceramah tentang peran Parents & Teachers Association (organisasi orangtua dan guru) dengan mudah saya mendapat berbagai bahan hanya dengan menggunakan satu atau dua *search engine*. Baru **Yahoo!** Dan **Lycos** sudah kasih tahu begitu banyak bahan. Belum lagi **Alta Vista**, **Google**, **Catcha**, **Astaga** dan **Naver** dari Indonesia. Puluhan, kalau bukan ratusan atau ribuan “mesin penemu data”.

Tantangan berikutnya: kapan Indonesia punya situs sastra. Lantas siapa masyarakat *cyber* penggemar sastra Indonesia. Dan persoalan kedua adalah “Apa itu sastra multi media?”

Untuk menjawab pertanyaan pertama, tidak sulit. Kalau dua persen dari 200 juta orang Indonesia punya komputer berikut modemnya, maka empat juta pengguna internet di negeri ini. Jumlah ini bisa ditambah, atau dilipat duakan dengan banyaknya warung internet (warnet) dan berbagai penyewaan komputer. Belum lagi mereka yang memanfaatkan fasilitas komputer di kantor.

Statistik Penjualan

Sayangnya, berapapun jumlahnya tidak penting. Masalahnya: berapa banyak yang berminat pada sastra. Persis sama dengan pertanyaan di dunia penerbitan buku: berapa persen dari jumlah judul yang terbit setiap tahun masuk kategori karya sastra?

Kalau kita memakai definisi konvensional sebagaimana diajarkan di sekolah-sekolah formal di Indonesia, dunia sastra sempit sekali. Para murid yang kini telah menjadi dewasa dan jarang sempat belajar lagi, rata-rata percaya bahwa yang disebut sastra adalah puisi, cerpen, novel, kritik dan esai-esai tertentu. Kalau hal itu diterapkan pada “dunia *cyber*”, maka layar komputer tidak lebih hanya berfungsi sebagai halaman buku. Para penggunanya membaca huruf-huruf di komputer, sedangkan penyair memakai *key-board* sebagai pengganti mesin ketik.

Padahal komputer berfungsi jauh lebih besar ketimbang sebagai mesin tulis. Komputer sebagai sarana multimedia dapat menayangkan suara, lukisan, musik, dan bermacam konfigurasi cahaya. Sebagai “produk komunikasi” puisi diciptakan manusia untuk merekam dan melukiskan perasaannya, interaksinya dengan alam, seindah-indahnya, seefektif mungkin sehingga menyentuh jiwa orang lain. Komputer sebagai “sarana komunikasi” memberikan keterbatasan dan kelebihan yang tidak dapat dibandingkan dengan kalau manusia menulis sajaknya di atas batu, lontar, kulit, maupun kertas.

Ayat-ayat Al Qur'an yang diukir di atas kulit rusa dengan kaligrafi yang indah bertahan ratusan tahun di muse-

um. Dengan komputer kita tidak akan dapat merabanya, melihatnya setiap saat tanpa bantuan listrik dan teknologi. Tetapi menyalin ayat-ayat, puisi, maupun pidato pada komputer bisa menjadi sangat menarik, meskipun hanya sesaat. Baris-baris itu bisa muncul dengan animasi huruf yang indah, diiringi semburan warna-warni, latar belakang suara ombak, nyanyian burung, atau vokalisasi dan musikalisasinya. Inilah pengenalan pada sastra multi media dan sekaligus tantangan bagi para *sastrawan cyber*.

Dunia telah membuka peluang bagi sastrawan multi media sejak Winston Churchill mengantungi hadiah Nobel untuk sastra berkat pidato-pidato radionya, pada 1940-an. Dalam perkembangannya, sastra radio dan sastra televisi berkembang lumayan bagus, meskipun kurang digarap di Indonesia. Nilai-nilai puitik, pengolahan seni bahasa dan apresiasi sastra murni dapat dimunculkan dalam berbagai bentuk. Stasiun televisi NHK, di Jepang, misalnya, punya program apresiasi *haiku* tiap minggu. Pemirsa dipersilakan mengirimkan karya, baik dalam bentuk kaligrafi maupun sudah terolah sebagai film-film pendek. Stasiun televisi BBC di Inggris juga banyak memproduksi sajak-sajak pendek, atau memperkenalkan sastrawan dalam tayangan. Karya sastra dapat dijual-belikan dalam bentuk kaset video maupun audio, dan VCD.

Di Indonesia sering terdengar anggapan bahwa sastra lebih banyak muncul sebagai tradisi lisan ketimbang tertulis. Sayangnya hal itu juga tidak dapat ditunjukkan dalam bentuk banyaknya koleksi kaset, piringan hitam, pita rekaman, maupun jumlah penyanyi, kelompok penembang dan pementasan drama, pembacaan puisi, cerpen apalagi

roman. Dengan kata lain, produksi karya lisan mungkin sama rendahnya dengan produksi karya tulis. Dengan melihat perbandingan stasiun radio dan televisi dibandingkan jumlah penduduk, jam siaran media elektronik dan produksi film, drama radio, *soundslide*, video dan unit pesawat telepon pun belum menunjukkan bahwa budaya lisan kita kuat.

Jadi, kalau mau terjun ke dunia *cyber*, yang menggabungkan kesempatan menulis-membaca, bersuara-mendengar, dan bermain cahaya-memandang, kita harus rela dianggap baru mulai dari nol. Kualitas siaran radio kita baru sebatas suksesnya “Butir-Pasir di Pantai” yang dulu dimanfaatkan untuk kampanye keluarga berencana. Indonesia belum melahirkan karya-karya lisan bernilai sastra, maupun sekadar seorang ahli pidato atau dakwah yang berkaliber internasional. Untungnya bibit-bibit untuk berjejaring (melakukan *networking*) sudah bisa dibilang baik. Kalau kita lihat siapa saja yang terkait dengan *cyber sastra*, misalnya, kita mendapat harapan.

Dalam waktu singkat kita temukan puluhan, bahkan sudah lebih dari seratus situs pribadi maupun lembaga yang terkait dengan kegiatan kesusasteraan. Jumlah tayangan esai, cerpen, novel, apalagi puisi, segera menggelinding. Banyak. Atau cukup banyak. Meskipun terang, kualitasnya sangat mudah dipertanyakan. Seorang penyair konvensional, yang kini jadi wartawan dan menetap di Jakarta bahkan mempertanyakan apa beda sastra *cyber* itu dengan “tong sampah”. Artinya, siapa saja, asal punya komputer dengan fasilitas internet dapat mempublikasi cerpennya, puisinya, humornya, foto-fotonya, baik yang

paling sopan maupun yang paling porno.

Dunia kreativitas memasuki babak baru. Sensor dan peranan redaksi nyaris tak ada sama sekali. Langit yang luas, alam semesta yang maya menjadi arena anda bekerja. Tak ada batasnya, kecuali *transfer speed*, *bandwidth*, dan *file space* yang tersedia pada komputer kita. Anda bisa bicara apa saja, melukis apa saja, mengeluarkan bunyi dan cahaya apa saja. Jadi dalam sastra multi media, huruf bukanlah segala-galanya.

Sewaktu masih kecil, saya bangga Indonesia punya candi Borobudur. Tapi saya benci karena jumlahnya hanya satu. Dalam pemikiran saya, mestinya ada ratusan candi sebesar dan seindah Borobudur itu di berbagai kota, mulai dari Kutaraja di Aceh, sampai Merauke di Papua. Tetapi nyatanya hanya sebij, itupun di Jawa Tengah. Setelah memasuki era *cyber*, sekarang saya yakin orang dapat menciptakan “Borobudur” masing-masing sesuai dengan keahlian dan modal yang dimilikinya. Manusia tidak dibatasi lagi untuk membuat candi, monumen, dan mahakarya masing-masing.

Peluang inilah yang perlu dilihat dan dimanfaatkan oleh anak-anak yang paling kreatif di muka komputer masing-masing. Kita merasa bahagia melihat beratus orang berusaha menjadi penyair, menyamai atau mengalahkan nama-nama yang terlanjur masuk ke dalam kanon atau *main stream* sastra nasional dan sastra dunia. Peluang melakukan publikasi terbuka seluas-luasnya kini. Tinggal sejauh mana kebebasan itu dapat diolah menjadi karya-karya yang bermutu tinggi? Apa definisi “bermutu tinggi” “berbobot”, “berpengaruh” dan “indah” kini terpulang pa-

da masing-masing pribadi. Demikian pula bagaimana dan siapa yang dapat menilai, mengapresiasi, dan memperbaiki kualitasnya. Kemerdekaan telah menelan anda.

Pada hari Rabu, 9 Mei 2001, telah muncul “Grafitti Gratitude” sebagai tapak tilas pertama berkembangnya sastra *cyber* di Indonesia. Kita belum melihat perbedaan yang mencolok apapun dengan puisi-puisi konvensional yang biasa diterbitkan melalui media cetak. Bila puisi multimedia sebagaimana dimungkinkan lahir dari masyarakat *cyber* seperti yang telah dipaparkan, bentuk publikasi yang cocok adalah CD-Rom. Kita masih harus menunggu munculnya paket-paket karya sastra yang benar-benar bersifat multi media. Puisi bukan lagi dicetak di atas kertas yang memboroskan sumber alam, seperti pohon, dan bahan kimia seperti *chlorine*, tinta maupun cat, tapi muncul sebagai *screen saver*, dan tayangan-tayangan bagus yang pantas dimasukkan *book mark*.

Menikmati puisi multi media di masa mendatang tidak akan lepas dari kebutuhan komputer, *VCD Player*, *Sound blaster*, *LCD-in focus*, *disket* dan *hard disk* yang memadai. Sejarah sosialisasi puisi di Indonesia sudah mengenal “puisi kongkrit”, “puisi *sound slide*”, “musikalisasi puisi” dan seterusnya. Maka, bila multimedia dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi puisi, kita masih menunggu karya-karya terbaik yang bukan hanya dibukukan, tapi juga difilmkan, diberi animasi, dan dikembangkan penyebarannya secara kreatif melalui bahasa elektronik.

Listrik menduduki posisi kunci dalam *cyber* media maupun “sastra *cyber*”. Jadi bahasa listrik perlu dipelajari dan diolah sebaik-baiknya selain bahasa verbal yang

bertumpu pada kosa kata lokal, nasional, maupun internasional. Masih begitu luas lahan yang terbuka. Tapi yang pasti, perasaan manusia tetap berkisar pada suasana dan pola yang sama seperti: terharu, sedih, takut, senang, marah, kecewa, optimis, bahagia, khawatir, ngeri, dan seterusnya. Dalam koridor perasaan inilah puisi baik tertulis, dikatakan, maupun terlukiskan, menemukan dunia dan perannya yang optimal. Kita tidak mungkin melewati batas-batas keterharuan manusia, baik melalui kata-kata yang dikongkritkan menjadi huruf, menjadi tarian, bunyi, maupun warna.

Pertanyaan terpenting barangkali masih berkisar pada “untuk apa manusia berpuisi?” Apakah kita menulis dan membaca puisi sama seperti mencari dan membelanjakan uang? Sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya untuk memperoleh kesenangan dan kebahagiaan? Apakah hidup memerlukan puisi sama besarnya dengan memerlukan uang? Kembali pada kepercayaan lama: tanpa sastra manusia tidak akan mati, tetapi juga tidak akan “hidup”. Demikian pula mestinya tanpa uang.

Jadi masalahnya, mengapa perlu ada “sastra multimedia” dalam “masyarakat *cyber*”? Tidak mungkinkah kita bertahan menulis di atas daun lontar, kulit rusa, dinding-dinding gua dan batu marmer, lantas membacanya sambil bernyanyi, meniup seruling atau menari? Ataukah ini hanya semata-mata mengikuti perkembangan teknologi komunikasi? Kalau ya, kita sampai pada penutup yaitu uraian tentang kelebihan dan kekurangan sastra *cyber* itu sendiri. Pertama kelemahannya: sangat tergantung pada teknologi, khususnya ketersediaan listrik dan perangkat

keras komputer, jaringan telpon, monitor atau layar televisi. Kekuatannya: bisa mencapai sebanyak-banyaknya komunikasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bisa menampilkan aspek-aspek seni yang lain secara simultan, untuk menggali, mengolah dan menyampaikan keindahan.

Akhirnya, harus diingat bahwa bahan baku dan peralatan dasar untuk menghasilkan sastra multimedia itu tetap sama, yaitu manusia, pengalaman hidup, dan ketrampilannya berkomunikasi. Kesusasteraan adalah seni bahasa. Sedangkan sastra multimedia adalah seni berbahasa plus dukungan teknologi komunikasi. Namun yang hendak dicapai tetap sama, yaitu memperhalus budi pekerti, membagikan pengalaman, cita-cita, semangat, dan cita rasa pada waktu dan untuk menjalani kehidupan di bumi, yang semakin hari semakin kaya akan berbagai pilihan. Jadi hakikat berkesusasteraan tetap sama: dapatkah kata-kata membuat manusia lebih bahagia dan lebih bijaksana?





Dengan Hati dan Akal Sehat

DALAM kehidupan intelektual, bergaul adalah berkomunikasi. Itu berarti membaca dan menulis. Sejak awal 1996 hingga akhir 1999, saya mengikuti upaya menggalang kerjasama di antara organisasi LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan yayasan-yayasan pemberi dana (*grant making foundations*) di berbagai negara Asia. Awalnya didahului oleh penelitian sejumlah aktivis Jepang. Lantas saya diajak merancang satu jaringan kerjasama. Melalui internet, komunikasi berjalan dengan baik sekali. Hingga akhirnya mengadakan rapat persiapan di Bangkok, Thailand, pada bulan September 1996.

Setelah itu terbentuklah Konferensi Organisasi dan Yayasan Asia (Conference of Asian Foundations and Organizations, yang disingkat CAFO). Pertemuan-pertemuan selanjutnya diadakan di Tokyo, Manila, dan Hong Kong. Di antara teman-teman yang terlibat dari awal adalah Nagao (dulunya Sasakawa Peace Foundation kemudian dosen di Hiroshima University), Anmol Vellani (Indian Foundation for the Art), Anthony Tsui (Hong

Kong), dan Gisela Velasco dari Philippine Business for Social Progress. Dari delapan kali pertemuan penting selama tiga tahun itu, saya hadir 6 kali. Hanya dua kali saya berhalangan, karena situasi dalam negeri yang tidak menentu, dan saya (seperti halnya banyak aktivis LSM lain), memilih tinggal di rumah.

Bagaimana persisnya situasi di tanah air, masing-masing kita lebih tahu. Tapi izinkan saya meletakkan satu penafsiran karakter, di atas latar belakang historis baik secara politis, sosial, dan terutama budaya. Terlalu banyak yang harus ditulis, sebab terlalu banyak yang telah berubah dalam waktu yang singkat. Krisis multi dimensional (politik, ekonomi, sosial, budaya) mengubah bangsa Indonesia. Dari bangsa yang pasrah, menurut dan patuh pada pemerintah, berubah menjadi pribadi-pribadi yang mulai berpikir sendiri. Dasar baru mulai berlaku: demokrasi dan hak asasi manusia.

Tiap orang punya hak menafsirkan demokrasi dan mendefinisikan hak asasi masing-masing. Jadi, karena Indonesia dihuni 200 juta jiwa, maka ada 200 juta definisi hak asasi, dan 200 juta macam pengertian tentang demokrasi. Sebagian besar di antaranya kita lihat bermunculan selama 1998. Ada yang berpikir hak asasi berarti boleh menjadi presiden selama-lamanya. Ada juga yang percaya, demokrasi adalah membakar kantor pemerintah, membakar toko Tionghoa. Ada juga yang hanya tiduran di aspal sambil bernyanyi "ABRI Tidak Berguna. Bubarkan saja!"

Hak asasi adalah menulisi pintu dan jendela "Ini milik Pribumi". Demokrasi adalah bebas dari seragam. Dan seterusnya, sampai mulut berbusa, sampai nanti pagi dan

sore lusa. Anda boleh menambahkan apa saja yang tampak di muka pintu, sekiranya tidak ikut terjarah dan dibakar gelombang masa “reformasi total” Mei 1998 dan seterusnya. Tetapi bagi keluarga korban, yang dengan pilu telah kehilangan anak, adik, istri, suami, oom, teteh, mbakyu, engkoh, oma, paman, *budhe* dan orang-orang tercinta, terimalah simpati dan duka kami yang mendalam.

Begitu banyak yang telah jadi korban gelombang reformasi itu. Jakarta, Solo, Medan, Surabaya, bahkan kota-kota kecil seperti Bekasi, Tasikmalaya, Kupang, Situbondo, dan mana saja. Semua terjarah, terbakar, terluka. Untungnya umat beragama justru bersyukur. “Hati kami berkobar-kobar semakin mencintai Tuhan,” kata seorang jemaat yang gerejanya jadi puing-puing di Mangga Besar, Jakarta. Pengkhotbahnya, bernama Stephen Tong yang terkenal arif bijaksana dan suka musik, bahkan dirijen, jadi bingung. Bagaimana mungkin sampai 551 rumah Tuhan dibakar di negeri yang azas pertamanya “Ketuhanan yang maha Esa”. Baik gereja, maupun mesjid seperti di Kupang, Nusa Tenggara. “Bangsa yang paling atheis pun khabarnya tidak membakar 551 tempat ibadah” katanya.

Rekor kekejaman apakah yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Memang Uni Soviet menutup banyak gereja untuk dijadikan gelanggang remaja, tempat parkir, atau sekadar gudang. Tapi itu dilakukan karena umatnya “membubarkan diri” dan pemerintah meresmikannya seiring dengan berubahnya ideologi. Setelah komunisme runtuh, pun akhirnya orang dengan susah payah kembali membangun katedral Moskwa. Bangsa Cuba kembali berdoa, Rumania jadi peziarah lagi, dan mesjid-mesjid di

Beijing buka lagi. Tapi di Indonesia? Setelah rezim yang otoriter menyatakan berhenti, pembakaran dan perusakan rumah ibadah jadi marak, dan sepertinya tak berdasarkan apapun, kecuali disulut kebencian.

Itukah termasuk asas demokrasi dan pemahaman hak asasi? Kita dengan mudah mengutuknya. Kekerasan oleh negara terhadap perempuan, terhadap mahasiswa, terhadap kaum “non-pribumi” juga terungkap gamblang selama 1998. Ada aparat pemerintah yang kerjanya menculik patriot-patriot muda. Ada yang dibayar untuk menembaki demonstran. Ada pula yang berseragam, bertopeng, berperisai dan tiduran di taman-taman kota dengan dalih menjaga pensiunan diktator yang tercinta.

Yang penting sekarang, 1998 sudah tiada. Penggantinya 1999 lebih seru, meskipun relatif lebih damai. “Orde Baru” pelan-pelan menghilang dari muka bumi tanpa harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Sikap bangsa Indonesia belum berubah: cepat benci dan cepat suka. Roh kelembagaan belum atau tidak pernah terbina. Kita menjadi sekerumunan manusia yang cepat lupa. Tidak peduli pada masa lalu, hampir peduli pada masa depan dan sedikit peduli pada masa kini. Untung presiden baru, Kyai Haji Abdurrahman Wahid cepat tanggap. Begitu terpilih, ia cepat merangkul semua yang “dimusuhi” rakyat. Ia tahu sedikit saja muncul kebencian, dampaknya bisa berlebihan.

Kita perlu catat. Pada pertengahan abad 20, ketika dekolonisasi terjadi di mana-mana, sejumlah elit politik Indonesia menyatakan kemerdekaan “bangsanya”. Rakyat menyambut dengan penuh semangat dan mengusir orang-

orang yang dicap sebagai “penjajah”. Apa yang terjadi? Jepang, Belanda, dan Sekutu kita perangi. Bung Hatta dan Bung Karno sadar itu keliru. Tapi sudah terlambat. Bung Karno hingga 10 tahun setelah merdeka selalu menyatakan, bahwa kegagalan proklamasi terletak pada ketidakberhasilan kita merangkul musuh. Jadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan berhasil total, bila mampu membuat aparat pemerintah Belanda menjadi warga republik yang baru.

Para bapak bangsa sudah berjuang sekuat tenaga untuk mengerem kebrutalan massa “revolusi kemerdekaan”. Bung Hatta berkeliling Jawa untuk mengganti semboyan “Merdeka atau Mati” menjadi “Merdeka dan Membangun”. Tetapi siapa yang peduli hari depan? Siapa yang ingat bahwa Belanda, Jepang, apalagi Tionghoa, adalah juga manusia yang berhak menjadi warga biasa republik ini? Ketika Bung Karno semakin lemah, 1965, situasinya lebih buruk lagi. Kebencian semakin menjad-jadi di seantero negeri ini, dengan munculnya slogan, “Berantas Komunisme sampai ke akar-akarnya.” Pembunuhan berlangsung. Orang-orang tak bersalah kembali diperlakukan seperti hewan. Diburu, dicincang, dihancurkan.

Kebencian seolah-olah telah menjadi instrumen penting untuk mendirikan negara. Seakan-akan tidak mungkin Indonesia berdiri tanpa ada musuh bersama seperti “Belanda”, “Komunisme”, dan “GPK”. Hak-hak asasi manusia diputar-balikkan di Aceh, di Bumi Lorosae, di Papua. Kebenaran berikut penafsirannya dimonopoli oleh pemerintah. Padahal siapakah sebetulnya yang memerintah jutaan penduduk itu? Pemerintah pendudukan Jepang

mengklaim tak perlu sampai ratusan ribu orang untuk mengurus (persisnya: menguasai) rakyat dan lingkungan hidupnya dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir ke Talaud.

Itulah sebabnya, kalau ada beberapa ribu tentara yang baik, sesungguhnya teritorial bisa “diamankan”. Juga kalau anda mampu membuat partai yang militan, dengan sumberdaya manusia handal, yang didukung sejumlah tentara terlatih, mungkin bisa “menguasai” negeri ini. Maka, demam demokrasi tampak juga dalam musim mendirikan berbagai partai baru. Itulah demokrasi, itulah pertanda adanya hak asasi manusia yang dihormati di kepulauan ini. Maka gelombang “reformasi” 1998-1999 mestinya menjadi gerbang demokratisasi.

Sekarang, apakah demokrasi berarti kesadaran akan peluang yang sama dalam berkuasa? Bukankah selama bertahun-tahun Indonesia hidup dengan penguasa, dan bukannya “pemimpin”? Semoga tak ada yang keberatan mengenai kesimpulan ini. Jangan lupa, adalah kemalasan elit politik juga yang membuat suksesi jadi sulit, dan Jendral Soeharto didewakan selama bertahun-tahun. Seandainya para anggota DPR/MPR lebih serius sedikit saja, tentu tak ada seorang pun yang boleh “berkuasa” begitu lama. Atau apakah karena begitu lama, maka orang jadi semakin bodoh, menjadi fanatik dan mendukung buta?

Syukurlah ada spesies lain yang melihat bahwa otoriterisme tak bisa dibiarkan lama-lama. Ribuan mahasiswa Indonesia melihat ada yang tak beres dalam penyelenggaraan negara di tanah airnya. Pius Lustri Lanang, Budiman Sujatmiko, sejumlah pemikir yang berhasil

memisahkan diri dari wacana Orde Baru bangkit karena yakin bahwa pemerintahan tidak akan mampu menghadapi kebutuhan zaman. Dunia memerlukan administrasi negara yang lebih transparan, memihak kepentingan umum, dan berkelanjutan. Kenyataan yang dipertunjukkan oleh kabinet maupun oleh perwakilan rakyat, sama sekali bertolak belakang dengan aspirasi dan kebutuhan hidup rakyat.

Pemerintah bukannya terdiri atas orang-orang paling pintar di negeri ini, melainkan sebaliknya. Pegawai negeri terkenal lamban, bodoh, super patuh dan “nerimo”. Pemerintah berisi orang-orang yang tumpul, tak berani berpikir, apalagi bertanggung-jawab. Tak punya inisiatif sendiri dan hanya menunggu komando. Bahkan setelah pegawai negeri sipil dibebaskan untuk memilih partai sendiri, masih banyak yang ketakutan. “Saya sudah hampir pensiun. Nanti kalau dipecat bagaimana”. Jadi terus saja ‘terpaksa’ menyusuk Golkar.

Itulah hak asasi juga. Orang boleh bertekad bulat menjalankan reformasi total. Tapi boleh juga bertahan dalam “kubu statusquo”. Demonstran dan aparat keamanan punya panggilan yang sama: mewujutkan cinta mendalam pada Ibu Pertiwi. Itulah inti demokrasi. Sekarang jangan melihat terlalu jauh. Sudah adakah demokrasi dalam rumah anda, di kantor anda? Sudahkah ada mekanisme suksesi yang bagus dalam perusahaan, organisasi, atau kelompok bisnis anda. Juga koran anda. Sebetulnya mengganti direktur, memilih pemimpin redaksi, memilih gubernur, bupati dan kepala satpam tidak perlu diserahkan pada Tuhan.

Tetapi inilah sebagian dari religiusitas orang Indonesia dalam transisi memasuki abad 21. Kita berharap pikiran rasional dan logis mampu mengimbangi mistisisme dan takhyul publik. Entah kapan itu terjadi. Tan Malaka, melalui bukunya **Madilog**, Materialisme Dialektika Logika, telah lama mengimpikannya. Ia tidak menggunakan agama (Islam, misalnya) untuk memerangi takhyul dan mistisisme, tapi menggunakan logika. Menggunakan akal sehat.

Sekarang, sudahkah anda memperjuangkan akal sehat? Atau masih hidup dalam bayangan emosi, dituntun oleh horoskop, hongtui, bahkan “agama” dalam pengertian yang paling dogmatis? Kita tidak perlu menjawabnya. Akal sehat mungkin hanya baik bagi mereka yang berani jalan sendiri.

Dalam *setting* sosial, politik dan sejarah nasional yang demikian saya terlibat pada “pencarian wajah” atau kepentingan bersama (*common interest*) yang memungkinkan Asia bisa bekerjasama. Pertanyaan pertama tentu siapakah Asia itu? Dalam kerangka CAFO, selama tiga tahun pertama kami baru membatasi diri pada sebelas negara: India, Indonesia, Tiongkok, Jepang, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Muangthai, dan Taiwan. Dalam pertemuan di Tokyo, yang dihadiri peninjau-peninjau Australia, Amerika Serikat, Canada, dan beberapa aktivis Eropa memang dipertanyakan, mengapa banyak bagian Asia tidak disertakan. Mengapa Mongolia, Pakistan, Iran, Arab Saudi, dan lain-lain tidak diajak?

Apakah mereka tidak termasuk Asia? Tentu saja waktu itu jawabnya hanya alasan teknis. Pendanaan dan pemilihan peserta, misalnya. Yang penting kami sudah mulai.

Aktivis dari sebelas negara saja berkumpul sudah baik. “Belum tentu kakek kita dulu bisa berkumpul begini,” kata Nagao di Tokyo. “Ooo, kakek saya hampir membunuh seorang Jepang!” tambah saya. Jadi dua generasi yang lalu, lebih sulit mencari kesempatan bekerja sama itu. Sekarang, kesederajatan antarbangsa kian berkembang, dan saling pengertian tambah diutamakan. Kita mulai belajar terbuka. Tidak hanya memamerkan “kelebihan dan kehebatan”, tapi juga menunjukkan kelemahan dan borok masing-masing. Siapa tahu kami bisa saling membantu, saling mengobati.

Kita tahu, karakter tiap-tiap “bangsa” (apa sih bangsa itu?) berbeda. Tetapi juga banyak kesamaannya baik dari segi kebaikan, kejahatan, maupun kebodohnya. Kekejaman bukan hanya monopoli “Bangsa Orde Baru” dengan ABRI-nya. Di Kamboja, pembantaian juga berlangsung. Di Tiongkok, mahasiswa juga diberondong peluru seperti di Semanggi, Jakarta. Begitu pula di Kwangju, Korea Selatan. Perombakan besar-besaran juga dialami oleh Filipina dengan People’s Power dan Corazon Aquino-nya. Pemenjaraan pemimpin, perubahan paradigma, gelombang unjuk rasa, penghancuran lingkungan hidup, penyangkalan tradisi, juga terjadi di seantero Asia.

Di atas semua itu, ada kesamaan yang mungkin harus dijawab bersama, yaitu: dapatkah orang Asia berpikir? *Can Asians think?* Itulah dasar pemikiran mengapa hati begitu penting di Asia. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di India, Jepang, Tiongkok, hati adalah modal utama untuk menjalani hidup di bumi ini. Maka pelan-pelan, kita mulai berhadapan dengan teman-teman yang sudah bisa ber-

pikir, tapi hampir lupa (barangkali) menggunakan hatinya. Warga kota-kota yang rasional, ilmiah, realistis dan praktis, kelihatan mulai memimpin. Singapura dan Hong Kong adalah contoh yang paling cemerlang.

Saya mengenal Hong Kong pertama kali, Juni 1981, ketika lagu “Don’t Cry for Me, Argentina” meraung-raung di hampir setiap hotel. Dari restoran di lantai teratas hotel Miramar di Kowloon, kita bisa memandangi apartemen yang tambal-sulam, Hong Kong yang kumuh, penuh keringat, copet dan jambret dalam bus kota yang berdesak-desakan. Tetapi apa yang saya lihat ketika kembali ke Kowloon, Desember 1999? Pohon kantil (*michelia champaka*) dekat stasiun Kowloon Tong sudah sangat besar. Harumnya tercium hingga puluhan meter. Hong Kong memang bukan yang dulu lagi. Dalam stasiun bawah tanah saya tidak merasakan bedanya dengan kota-kota besar di Swiss, Jerman dan Perancis. Bahkan lebih bagus dan lebih modern dari rata-rata stasiun di Inggris.

Saya terpana. *Chief Secretary* Anson Chan, yang juga pejabat gubernur Hong Kong mengatakan negerinya termasuk yang paling aman dan nomor tiga paling “sadar lingkungan” di antara 60 kota besar dunia. Wahai! Apa yang telah terjadi padamu, Hong Kong? Ternyata jawabnya sederhana: Bandar ini mulai berpikir. Sementara kota-kota besar Asia lainnya hanya sibuk merasa, Hong Kong dan teristimewa Singapura mulai menggunakan otaknya. Begitu juga mestinya Seoul, Taipeh, Tokyo, dan Kuala Lumpur. Mereka yang tidak lagi menahan dendam dan sakit hati, akan melesat dengan gembira. Mereka mengadopsi disiplin dan rasionalitas barat, lengkap dengan kapitalisme dan

materialismenya. Seolah-olah tak peduli dan malah heran kalau ada yang melestarikan perasaan sedih, kemiskinan, ketertindasan dan kesengsaraan.

Dalam setiap pembicaraan kita dapat merasa: sedalam mana emosi dapat terbawa, mewakili kota-kota dan negeri tempat sebingkah hati dilahirkan dan dibesarkan. Hati-hati dari Beijing, Jakarta, New Delhi, dan Bangkok, terbebani oleh “tanggungjawab” aneh seperti pintu yang tidak mudah dibuka lantaran terganjal oleh sejarah, etnisitas, perasaan khusus yang berlebihan. Saya sendiri seperti merasa harus “berbicara untuk orang lain” harus mewakili kepentingan Indonesia, dan semacamnya.

Betulkah begitu dan mengapa begitu? Mungkin anda dapat menolong saya menjawabnya. Saya ingat dulu, ketika lulus sekolah menengah atas dan mau berangkat ke Jakarta. Saya berpamitan dengan kepala desa, camat, dan komandan koramil. Apa pesan mereka? Ingat, anda adalah duta besar bagi kecamatan ini. Jaga nama baik, jaga kehormatan kota dan propinsi!

Dalam rapat-rapat internasional, kita dengan mudah ingat pada beribu-ribu yayasan dan lembaga swadaya masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengapa saya “merasa harus” mewakilinya? Tidak dapatkah kita menjadi diri sendiri seperti teman-teman Hong Kong dan Singapura itu? Mereka tidak “terbebani” masalah menyusun delegasi, memilih anggota, apalagi “mengatasnamakan” diri bertindak untuk kepentingan negara, bangsa, dan seterusnya.

Ketika pertama kali mau rapat di Tokyo, saya diberi

wewenang membawa tiga teman untuk mewakili LSM Lingkungan, gerakan Civil Society, dan Pertukaran Kebudayaan. Cara paling mudah tentu memilih yang paling besar (seperti Bina Swadaya, sebuah LSM yang didukung 700-an orang aktivis), yang paling vokal (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI) dalam membela kepentingan publik, dan yang paling inovatif serta diterima berbagai kalangan, yakni Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH), Seloliman.

Untuk pertukaran kebudayaan, sebenarnya banyak yayasan yang patut diundang. Misalnya Yayasan Lontar di Jakarta. Dalam konferensi pertama di Tokyo, yang datang adalah seorang pembuat film dokumenter dari Yayasan Sejati, yaitu Dea Sudarman. Dalam pertemuan selanjutnya di Manila, 1998 delegasi Indonesia diperkuat oleh Medy Loekito dari Komunitas Sastra Indonesia. Lebih bagus lagi di Hong Kong, 1999 ditambah dengan dua narasumber yaitu Amna Kusumo dari Yayasan Kelola, dan Stephanus Djuweng dari Lembaga Dayakologi, Pontianak.

Sebenarnya tidak mudah menemukan kepentingan bersama di lapangan kesenian. Berbeda dengan kegiatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam waktu kurang dari satu tahun, kelompok kerja LSM Lingkungan sudah bisa menghimpun satu buku tentang berbagai kegiatan terbaik di negara masing-masing. PPLH Sanur di Bali, yang dipimpin Suryo Prawiroatmodjo menyumbangkan satu bab penting dan satu buku tersendiri tentang *Best Practice* di Jawa dan Bali. Di dalamnya ada kisah pabrik gelas yang membantu warga sebuah desa memanfaatkan limbah kaca. Ada juga upaya mengem-

balikan penanaman padi tradisional di Jawa Timur.

Kembali pada pertanyaan awal, betulkah kita orang Asia? Dapatkah kita menemukan dan mengambil hati Asia? Di manakah keasiaan kita? Saya ingat seorang pejabat Jepang di Tokyo, memulai pidatonya begini, “ Hampir 140 tahun lalu, Jepang meninggalkan Asia. Restorasi Meiji, 1868, membaratkan kami meskipun tetap berada di Timur. Sekarang, sudah waktunya kami kembali menjadi orang Asia lagi.” Apa artinya menjadi orang Asia atau orang Timur, dan bagaimana hal itu mengejawantah dalam kehidupan kita sehari-hari?

Di Hong Kong, mulai terdengar jawaban. “Kita orang Timur, tidak mudah tersinggung. Kita orang Asia terkenal sabar,” kata seorang pembawa acara. Timbul kesadaran bahwa kita tidak boleh mudah sakit hati. Modal utama Asia, adalah hatinya. Kalau hati kita rapuh, mudah patah, mudah pilu (seperti dalam lagu pop semasa Orde Baru), dan gampang tersayat-sayat, kasihan betul Asia. Sebaliknya, jangan sampai hati kita membatu, jadi keras, tertutup dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Hati Indonesia yang terbiasa terbuka, seperti laut dan pantainya mestinya telah terlatih menerima apa saja, dan memberikan apa saja kepada dunia. Dengan keberanian memberi dan menerima, kita sanggup mencintai.





Senyum untuk Calon Penulis

KOMUNITAS Bumi Manusia bersama Eksotika Karma-wibhangga dan Musyawarah Burung menggelar diskusi sastra untuk menyambut tiga buku baru. Saya sangat gem-bira dan berterima kasih diikutkan dalam acara ini. Berikut ini ada beberapa pokok masalah yang ingin saya pesankan. Terutama kepada para penulis yang dianggap atau merasa “masih muda”. Bagi saya sendiri istilah “penulis muda”, “penulis tua” atau “mantan penulis” sesungguhnya tidak relevan. Yang penting adalah produknya, daya jangkanya, dan kepeduliannya yang mendalam kepada para pembaca serta para penulis lain, baik di tempat berbeda maupun pendahulunya.

Selalu Ingat: Mengapa Anda Menulis?

Pertanyaan yang paling saya sukai adalah, “mengapa bayi menangis?” Jawabnya sangat jelas: ia ingin perubahan. Tepatnya ingin mendapat perhatian, supaya situasi menjadi lebih baik. Kalau sedang takut, ingin merasa terlindung.

Kalau basah ingin dikeringkan. Kalau kotor ingin dibersihkan. Dan kalau sakit ingin disembuhkan. Demikian pula hendaknya kalau kita menulis puisi, cerpen, novel dan segala tulisan lain, baik karya sastra atau bukan. Yang pertama kita ingat adalah “mengapa kita menulis”? Dan pertanyaan ini sangat dibenci oleh mereka yang tidak punya atau merahasiakan tujuannya.

Ada kalanya kita memang tidak tahu mengapa menulis. Tapi karena tangkas berpikir, dapat saja berkata: karena mau membebaskan kata. Atau karena ingin “membebaskan Tuhan dari rutin tafsir keagamaan”, “atau karena “ingin mendidik bangsa”, dan seterusnya. Almarhum Mangunwijaya pernah mengkategorikan penulis menjadi lima jenis. Mulai dari, penyair iseng, pujangga kraton, pengarang rutin, sastrawan proyek, penulis nurani.

Apapun motifnya, mereka semua punya hak hidup. Lagi pula bukan ada pendapat bahwa bukan motif yang menentukan, melainkan hasilnya. Jadi meskipun dibuat hanya demi iseng, kalau hasilnya “luar biasa” mau apa? Sedangkan yang dimuat atas panggilan hati nurani, kalau jadinya jelek, ya jelek saja. Hanya saja, secara alamiah, dunia dan sejarah akan mempertahankan karya-karya yang muncul bukan karena iseng, bukan karena terpaksa, bukan pula karena proyek besar, melainkan karena panggilan jiwa yang luhur, merdeka, mulia.

Sebuah karya sastra bisa menelanjangi kebobrokan masyarakat dan mengecam tandas kejahatan. Tetapi tulisan itu sendiri tidak berhenti di sana. Puisi “imlek 2551” yang ditulis Nuruddin Asyhadie, berakhir dengan baris “mana telinga, wijaya, mana telinga?” Ini bisa jadi

contoh bahwa dengan sastra kita sama sekali tidak bermaksud mempromosikan pemotongan telinga. Puisi itu justru mengingatkan kita, bahwa pada hari raya *imlek*, seyogyanya ingat nenek moyang kita (Wijaya) yang memotong telinga utusan dari Tiongkok pada akhir abad 13. Tujuh ratus tahun berikutnya (tahun 2000) kita ditawari “membangun hujan yang lain”.

Kalau tafsirannya membenarkan pemotongan telinga itu dan membangun masyarakat yang lebih kejam, tentu sajak itu tidak akan bertahan lama. Tapi bila yang diharapkan puisi itu adalah terciptanya masyarakat baru, yang lebih rukun, punya toleransi, dan bisa saling menghargai, saya yakin ia dapat menjadi karya besar.

Jadi niat dalam hati (*nawaitu*) bagi saya tetap merupakan hal yang paling penting dalam karya sastra. Bukan teknik saya, bukan keindahan bahasa, bukan plot dan kekayaan bahan, tetapi intinya. Isi cerpen, isi novel, isi puisi itulah yang bicara. Dan isi itu menyangkut dua komponen utama: latar belakang penciptaan serta tujuannya. Sama seperti mengapa bayi menangis, dan apa yang ingin diperolehnya. Dalam konteks seperti inilah saya menghormati Kartini, Idrus, Mohammad Hatta, Emha Ainun Najib, dan Chairil Anwar. Mereka punya visi yang jelas, dan menuangkan dalam karya tulis yang bermutu tinggi. Itulah keyakinan saya tentang karya sastra.

Linda Christanty sebetulnya juga dalam posisi demikian. Ia mengajak kita menghormati dan tidak melupakan Wiji Thukul. Memoirnya tentang tokoh Partai Rakyat Demokratik, pejuang dari kalangan buruh, dan penyair yang hebat tapi hilang tak menentu hingga sekarang itu

sangat menggetarkan. Pada tempatnya kalau kita ikut-ikutan terdiam dan menjerit dalam hati, seperti tulisan di spanduk yang dikutip Linda:Wiji Thukul, Pulanglah.

Pentingkah: Kapan Anda Menulis?

Sekarang boleh juga kita tanya: umur berapakah Linda? Kapan dia menulis? Waktu remaja, anak-anak, atau setelah cukup tua, bahkan setelah sangat lanjut, hampir pikun? Di sini terletak persoalan “penulis tua” dan “penulis muda”. Kalau kita tidak menganggap penting, kapan kita menulis karya, tentu persoalan ini tidak muncul. Tapi kenyataannya, ada saja yang mementingkan tahun, bulan, tanggal, bahkan jam penulisan sebuah puisi, sebuah lagu, atau sebuah cerpen. Itulah penyakit yang kerap kali dipakai untuk menandai adanya “angkatan muda”.

Kartini menulis karya-karyanya dalam umur 20-an tahun. Begitu juga Chairil, Idrus, Mohammad Hatta, dan Emha Ainun Najib. Penyair yang pernah menjadi guru besar di Osaka, Ajip Rosidi, bahkan menerbitkan buku-bukunya mulai umur belasan tahun. Demikian juga sejumlah sastrawan dunia. Singkatnya tua atau muda tidak relevan. Anda boleh menulisnya setelah pensiun, tetapi bukan berarti langsung menjadi “penulis senior”. Masalah usia ini memang sering menjadi *entry point* untuk menarik perhatian, sekaligus menunjukkan adanya *syndrom*.

Tapi yang lebih penting daripada menonjolkan usia, adalah melihat isi, atau pesan setiap pengarang. Kita mem-

baca banyak penulis besar mempunyai pesan-pesan yang kurang lebih sama. Pesan-pesan itu antara lain adalah menjunjung kemanusiaan, membela kehidupan, memelihara perdamaian. Kapan saja hal itu ditulis dan di mana saja, rupanya bukan masalah. Walmiki dengan epos Ramayana telah menulisnya 2500 tahun lalu di India. Shakespeare dengan drama-dramanya, pesan abadi yang paling umum adalah agar manusia saling mencintai, seindah-indahnya, setulus-tulusnya. Itulah cita-cita sosial dan spritual karya sastra.

Makanya kita tersentuh kalau membaca Mochtar Lubis, Pramoedya Ananta Toer dan Rendra membela hak-hak rakyat jelata, melindungi perempuan, membentengi kemanusiaan. Berapa banyak orang bisa diajak berbuat baik, adalah hasil nyata kesusasteraan. Hal itu terwujud dalam berapa eksemplar yang laku, dicetak berapa kali, diterjemahkan ke berapa bahasa, dan dibaca berapa tahun. Bukan kapan penulisnya membuat. Episode Abimanyu Gugur dalam Mahabharata konon ditulis oleh Panuluh, ketika sangat muda, dan harus melanjutkan pekerjaan Mpu Sedah. Karena itulah ia menghayati bagaimana jeritan hati seorang pemuda yang ditinggalkan ayahnya di medan perang. Episode itu termashur sampai ke ujung dunia berabad-abad kemudian.

Jadi, kalau ada yang menganggap perkembangan sastra di kalangan usia muda kurang dinamis, saya tidak setuju. Secara tradisional suksesi profesi dan kesinambungan kerja kesenian di kepulauan ini baik-baik saja. Reporter, penulis iklan, dan sastrawan yang masih sangat muda usia pun kini mendapat kesempatan seluas-luasnya di berbagai

media cetak dan elektronik. Kebebasan menulis meledak di Tanahair Indonesia, seperti belum pernah terjadi sejak terbentuknya bumi. Melalui internet kita bisa mempublikasi tulisan apa saja yang dianggap cerpen, puisi, humor, novel, bahkan serial karya pornografi. Sastra *cyber* pun bisa berkembang melalui munculnya berbagai situs, termasuk Situs Bumi Manusia. Pertanyaan yang mendasar adalah: bagaimana mutunya?

Mungkin benar, sebagai “bangsa yang besar” kita memerlukan karya-karya besar dan tentunya penulis-penulis besar. Di sanalah kerinduan, harapan, dan mimpi kita. Dan untuk itu kita memerlukan berbagai “arena” seperti yang diurus Linda Christanty dan Eka Kurniawan, yaitu Situs Bumi Manusia. Selain itu kita mendengar situs lain, Media Sastra, yang diasuh Medy Loekito dan teman-temannya. Jadi, pada hemat saya, lapangan, lahan, atau laut luas itu telah terbentang. Bukan hanya dalam bahasa nasional, tapi juga bahasa daerah dan bahasa internasional. Dunia tulis menulis di Indonesia kini memasuki zaman baru.

Jiwa Merdeka dan Gembira

Modal utama seorang pengarang adalah jiwa yang merdeka. Dengan bebas berpikir, bebas berimajinasi, bebas berkreasi, setiap penulis dapat melahirkan karya-karyanya. Tetapi kita tidak boleh lupa, semakin besar kemerdekaan, semakin besar juga tanggung-jawabnya. Mengapa begitu, sebab semakin luas yang ingin kita jangkau, berarti semakin banyak yang harus kita per-

hatikan, dan semakin perlu hati-hati. Menulis berarti memberikan yang terbaik dari pengetahuan kita, perasaan kita, pengalaman hidup kita, dan cita-cita. Setiap tulisan boleh diibaratkan sebagai wakil dari hati kita yang mengetuk hati pembaca.

Masalahnya barangkali ada kalanya kita lupa tersenyum. Meskipun judulnya “Ini... Sirkus Senyum” cerpen Putri Daskian belum membuat pembaca tersenyum. Mungkin karena belum cukup lucu, mungkin pula memang bukan humor. Secara umum kumpulan prosa dan puisi yang disunting oleh Eka Kurniawan, Linda Christanty, dan Nuruddin Asyhadie, terasa sangat serius, padat, tegang, berat dan menyesakkan. Saya kira di sini kendala menulis dan bicara bagi siapa saja yang merasa masih muda, masih kecil, atau masih baru. Padahal, kita tahu dengan tersenyum, segalanya bisa berubah.

Bayi juga tidak hanya bisa menangis. Ada kalanya bayi tertawa, berteriak-teriak, dan membuat terbahak orang di sekitarnya. Itulah ingin saya tangkap dari karya-karya terbaru. Saya yakin mereka tidak bersalah. Ketika saya mulai belajar menulis, pada awal 1970-an, di berbagai kota ada “guru” atau sekurangnya teman untuk belajar. Di Yogya ada Umbu Landu Paranggi. Di Malang ada Jasso Winarto. Di Bandung ada Zaini KM. Di Jakarta ada HB Jassin. Di Tegal ada Piek Ardiyanto Supriadi, dan seterusnya. Sungguh beruntung bila di sekolah ada juga guru yang dapat memberi apresiasi.

Di Sekolah Menengah Atas St. Albertus, di Malang (1971-1974), saya selalu berkonsultasi pada guru bahasa Indonesia saya, FX Suwadi. Lalu di IKIP, saya belajar pada

Jasso Winarto dan pada penyair dan sutradara Henri Suprianto. Bahkan untuk membaca sajak, saya diajari. Mulai dari kamar, dalam kelas, di aula, sampai di atas bebatuan Sungai Brantas. Kalau ada les menulis puisi pun saya ikuti. Dan ternyata itu sangat berpengaruh pada karya-karya sastra dan pandangan hidup saya selanjutnya. Maka ketika teman-teman Komunitas Sastra Indonesia mau belajar dan membuat lokakarya menulis di rumah kami di Depok, saya bahagia sekali.

Tetapi, ketika membaca selintas, ketiga buku yang diluncurkan, saya mendapat kesan teman-teman dalam situs Bumi Manusia tidak atau belum mementingkan “berguru” atau minimal menyunting karya-karyanya. Mulai dari penyusunan kalimat, hingga pemilihan font dan perwajahan buku, terkesan belum optimal. Buku Puthut EA malah tidak terbaca judulnya karena menggunakan warna merah, dengan huruf terlalu kecil, di latar yang gelap. Sedangkan buku Nuruddin menggunakan huruf kecil seluruhnya, termasuk dalam menulis nama. Saya khawatir dengan begitu, pembaca bisa merasa kurang dihargai.

Isinya juga belum diteliti. Saya takut, masih banyak karya yang harus ditulis ulang, diseleksi, supaya jangan terkesan “serampangan”. Tidak serius. Asal jadi. Apalagi karena menulis itu gampang, peluang mencetak buku luas, dan *posting* di internet murah. Hamburan kata-kata itukah yang lantas kita sebut sebagai “karya sastra”? Ada istilah yang lebih pas, barangkali, yaitu “grafomaniak” atau kegilaan menulis. Sekiranya para penulis *cyber* yang sangat produktif itu mau mengisi peluang untuk menjadi

sastrawan besar, rasanya penyakit aneh itu harus segera disembuhkan.

Bagaimana Menulis dan Apa Isinya

Ada dua orang guru besar yang sangat berjasa dalam karir penulisan saya. Pertama adalah Bakdi Soemanto. Kedua Hans Bague Jassin. Pada bulan Mei 1975, Bakdi mengulas sajak saya “Rel” di majalah **Semangat**, terbitan Yogyakarta. Ulasan itu sangat membesarkan hati, karena seolah-olah puisi saya dapat dibandingkan dengan karya Rendra dan Chairil Anwar. Bagi saya itu mungkin berlebihan, tapi menurut Bakdi, saya telah berhasil membuat refleksi yang cukup mendalam tentang rel kereta api, dalam kaitannya dengan hidup dan persahabatan. Sampai sekarang, saya belum pernah merasa berhasil berterima kasih kepadanya. Karena pujiannya itulah, saya terus giat menulis dan semoga tidak sia-sia.

Sekarang, mari kembali pada buku Nuruddin Asyhadie. Sungguh, saya tidak tahu bagaimana perasaan HB Jassin kalau membaca puisi itu. Tetapi sekiranya saya masih menjadi asisten beliau, seperti ketika menyeleksi kumpulan Sajak dari Fakultas Sastra UI, 1976, saya paham bagaimana reaksi beliau. Waktu itu awal April. Nuruddin yang lahir 27 Februari 1976, tentu belum genap dua bulan. Saya dan Pak Jassin duduk di beranda rumahnya, di Tanah Tinggi, kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dengan bangga saya menyodorkan hasil seleksi puisi teman-teman. Di antaranya ada yang “nakal” meskipun belum sejeorok tulisan Nuruddin. Apa kata Pak Jassin?

“Tulisan ini lucu. Tapi sebaiknya tidak kita publikasi.”

Saya tersentak. Menurut hemat saya bagus, tapi tidak boleh disebar-luaskan. Mengapa? Sebab seorang penulis, kata Pak Jassin, membawa tugas sebagai “guru” bagi pembacanya. Melalui tulisan, manusia bisa membongkar pikiran orang lain. Tetapi bila kita berhasil membongkar, tentu harus bisa merapihkannya. Tugas memperbaiki kembali inilah yang sering terlupakan oleh para “grafomaniak.” Kalau ingin lebih jelas, lihat saja coretan di tembok-tembok. Mana ada yang dihapus sendiri oleh penulisnya? Jadi bagaimana kalau kita tidak mencoret rumah orang, buku orang, pintu garasi orang? Apalagi mencorat-coret hati dan pikiran pembaca?

Semoga Linda dan teman-temannya memaafkan saya, seandainya saya juga tidak berani membawa buku “Ini... Sirkus Senyum” kepada Pramoedya Ananta Toer. Di pojok kanan atas buku ini tertulis besar: **Bumi Manusia**, Media Penulisan Kreatif. Kita bisa saja menyatakan bahwa situs www.bumimanusia.or.id tidak numpang popularitas novel yang judulnya serupa. Tetapi setiap pembaca yang baik tahu, bahwa dua kata itu adalah judul novel besar, Pramoedya Ananta Toer. Jangan heran bila pencetakan dan penyebaran tulisan semacam ini dapat dikategorikan sebagai vandalisme.

Bukan hanya “numpang terkenal” tapi juga mencorat-coret, seperti membuat grafiti di tembok, di penggaris, di buku orang, di mobil, di jembatan. Kita harapkan Pramoedya Ananta Toer dan para sastrawan senior lain masih bisa tersenyum. Teman-teman kita sedang belajar menulis. Mereka tidak melalui seleksi Taufiq Ismail atau

Sapardi Djoko Damono.

Saya takut, banyak di antara kita belum tahu bahwa untuk masuk ke dalam hati harus membungkuk, menghormat. Jangan pernah lupa bahwa kesusasteraan yang kini sedang diteruskan telah lahir dari banyak penderitaan. Bisa saja, puisi, cerpen dan esai yang masuk ke *cyber* media juga lahir dengan linangan darah dan air mata. Sayangnya saya belum atau gagal menemukan buktinya. Saya bahkan belum berhasil *read between the lines*, bahwa sesungguhnya mereka sudah tahu tugas pertama calon sastrawan, yaitu menghormati, dan memperbaiki prestasi para pendahulu. Bukan merusaknya.

Paling tidak, kita perlu belajar menangkap semangat yang benar. Membela kemanusiaan, meneruskan yang baik, mengkoreksi yang keliru, membela yang lemah dan tertindas. Bahkan menurut istilah Pablo Neruda, mendewasakan masyarakat. Banyak sekali yang tidak atau belum saya temukan dalam tiga buku yang diluncurkan ini. Contoh sederhana adalah kata-kata baru. Setiap sastrawan wajib memperkaya bahasanya, menjiwai kata-kata, dan memberi nilai tambah khasanah budayanya. Memang ada kalanya kita menemukan eksentrikisme, ekstrimitas, dan juga keindahan kalimat-kalimatnya. Tetapi hal itu hendaknya memperkuat pesan yang hendak disampaikan. Dan pesan penting atau tidak penting itulah yang belum berhasil saya temukan.

Buku 164 halaman ini memuat tulisan yang dikategorikan sebagai memoar, fiksi, esai, dan puisi. Di dalamnya ada juga cerita perjalanan yang sangat panjang, yaitu karangan Sigit Susanto “Ke Praha Mengunjungi Kafka”.

Ada catatan mengenai kontributor, yang menderetkan nama-nama penulis mulai dari Muhammad Al-Fayyadi sampai Yono Wardito. Seluruhnya 34 nama. Berbeda dengan keterangan Linda yang akan “memberi ruang bagi orang muda”, tidak satu pun dijelaskan bahwa penulis itu memang masih muda. Malah ada beberapa yang mungkin nyasar. Misalnya “memoar” Gabriel Garcia Marquez, pemenang Nobel Kesusasteraan, 1982, tatkala berjumpa Ernest Hemingway.





Sastra Industri dan Industri Sastra

SETIAP kali melihat ibu-ibu dan tukang sayur di pasar, saya suka bertanya-tanya: bagaimana buku bacaan mereka? Bagaimana puisi, esai, dan novel yang cocok untuk mereka? Kita tahu, sastra milik semua orang. Tidak seorang pun dilarang baca sajak, beli novel, dan menonton drama.

Setiap kali saya melihat buruh-buruh pabrik berbondong-bondong pergi atau pulang kerja di Tangerang, Bekasi, Rungkut, Belawan, dan pusat-pusat industri di sekitar Bandung, saya hampir yakin mereka tidak membaca karya sastra. Tidak sempat. Kalaupun sempat, apakah mereka paham dan tertarik pada avantgardisme dan teori kritis, post-modernisme, serta "nasionalisme baru" yang kini tengah diperdebatkan sejumlah cendekiawan kita. Yang jelas mereka belum cukup uang untuk membeli majalah sastra Horison dan jurnal kebudayaan Kalam dari Jakarta, atau majalah kebudayaan Basis, dari Yogya.

Syukurlah pandangan ini tidak sepenuhnya gelap gulita. Dari berbagai penjuru saya mendengar teater buruh

bermunculan. Di Cimanggis, Bekasi, Cilegon, Semarang, Surabaya. Bahkan di Jawa Barat muncul Institut Puisi Tangerang, yang siswa-siswanya adalah pekerja harian. Buruh pabrik tekstil dan berbagai macam industri manufaktur, termasuk kimia. Di Tangerang pula muncul Komunitas Sastra Indonesia (KSI), yang dipimpin seorang mahasiswa teknik kimia, Wowok Hesti Prabowo.

Ketika kelompok itu membuat antologi puisi, hampir 400 penyair dari seluruh Tanah Air dan beberapa dari luar negeri, menyambut, dan mengirim karya-karyanya. Seperti mimpi, saya melihat para buruh bersajak, berteater, dan belajar menulis esai-esai mereka. Mungkin pada awalnya para pengamat sastra meragukan. Bila ada buruh bermain drama, tentu karena tidak bisa protes. Larangan berdemonstrasi membuat mereka mencari ungkapan yang halus. Misalnya dengan berpuisi, main musik, bahkan melukis dan menari.

Memang pernah ada kesan begitu. Kritikus yang sinis boleh menduga puisi buruh adalah imbauan, gugatan, atau mungkin sumpah dan kutukan kepada majikan. Juga teater buruh. Tetapi nyatanya tidak. Para buruh juga bicara tentang nasib batu di alam bebas yang dibelah, dihancurkan untuk jadi gedung bertingkat. Para buruh juga menyuarakan doa anak-anak kecil di rumah petak. Jadi tidak cuma protesmelulu.

Singkatnya dapat disimpulkan, jiwa kaum buruh juga perlu sentuhan sastra. Bila mereka menulis, tentu saja juga membaca. Mereka perlu membaca. Mereka juga haus bahan bacaan, ingin ikut berbagai seminar dan lokakarya. Mereka perlu punya akses ke dunia sastra dan sastra dunia.

Sementara itu masyarakat kita sedang berubah. Sangat cepat, hingga sulit diikuti. Pusat-pusat peradaban dan kebudayaan kita bukan lagi di alun-alun, bukan juga di gelanggang remaja tetapi di berbagai mal. Konsumsi benda-benda dan kebutuhan jasmani digenjut habis-habisan melalui paket deregulasi impor. Berbagai barang, makanan dan jasa waralaba kini menjamur di sekitar kita.

Termasuk juga tentunya: produk budaya. Novel impor, kartu puisi, poster, video, piringan laser, dan film dari berbagai negara seperti mendominasi, bahkan nyaris menghapus adanya karya lokal. Bila ada sedikit penyair yang baik, dengan segera akan diserap biro iklan. Sumber daya masyarakat sastra kita minim. Sangat rendah jika dibandingkan kebutuhan untuk 200 juta warga Indonesia.

Akibatnya kita melihat berbagai *copywriter* berdatangan dari Hongkong, Singapura, Filipina, bahkan Pakistan. Mereka menangani proyek-proyek penulisan kreatif. Termasuk juga para penulis yang disewa Bank Dunia untuk membuat rancangan undang-undang maupun perencanaan pembangunan kita. Satu sumber di Progam Pembangunan PBB (UNDP) pernah mengeluhkan, bagaimana bangsa Indonesia belum bisa bikin perencanaan nasionalnya sendiri. Sedikitnya jumlah maupun mutu pengarang sekaligus mencerminkan kemiskinan intelektual bangsa kita. Itulah paradoks ledakan penduduk. Hampir di setiap bidang kita kekurangan sumber daya manusia yang handal.

Dunia kesusasteraan, seperti halnya kebudayaan kita

keseluruhan, sedang bergerak dari masyarakat pertanian menuju masyarakat industri. Industrialisasi bukan hanya berarti pembangunan pabrik dan mal, tetapi terutama perubahan pikiran. Masyarakat Indonesia sedang menjalani transformasi. Di kalangan para buruh, hal ini tampak pada gairah untuk maju. Kelompok seperti KSI malah mengadakan kursus penulisan skenario, dan lokakarya penulisan kreatif.

Pada hemat saya, setiap usaha kaum bawahan, terutama buruh industri, untuk mengembangkan kemampuan kreatif mereka perlu dibantu. Mulai akhir Juli 1997, pintu rumah saya terbuka untuk pelatihan para penulis dari Komunitas Sastra Indonesia. Rombongan pertama yang datang 15 orang. Sebagian besar (12 di antaranya) menginap.

Ada perpustakaan kecil yang dapat dimanfaatkan. Ada nara sumber yang dapat diundang untuk memberikan ceramah. Dan yang penting, ada kesempatan serta fasilitas ala kadarnya untuk latihan menulis. Mereka bebas menggunakan bangku-bangku kebun, topi-topi, dan sebuah rumah panggung untuk berkreasi. Jiwa bangsa Indonesia perlu dikembangkan dengan berbagai cara.

Itulah inti mengembangkan kesusastraan. Dunia yang kita bangun adalah dunia baja kata WS Rendra pada awal Orde Baru. Betul. Sastra yang sedang kita bangun adalah sastra untuk masyarakat industri. Tidak bersalah bila kita juga mulai mengenali industri sastra sebagai bisnis, profit maupun nirlaba. Sudah waktunya kita melihat kesenian sebagai produk kerajinan dan pemikiran bangsa.

Untuk mengeksplor produk-produk sastra, kita juga mulai melihat perlunya dukungan kepada lembaga penerjemahan seperti Yayasan Lontar. Sedangkan untuk memperkuat sumber daya manusia, Indonesia masih memer-

lukan banyak program penulisan kreatif. Sayangnya, belum ada universitas di Tanah Air yang membuka program khusus untuk menjadi penulis cerpen, penyair dan novelis. Padahal sejak belasan tahun terakhir Universiti Malaya di Kuala Lumpur punya jurusan mengarang. Lulusannya mendapat gelar *Master of Fine Arts* (MFA). Bagaimanapun kualitasnya, masyarakat modern memerlukan sastrawan yang "siap pakai" untuk berbagai lapangan literatur terapan. Contoh: penerjemah, penulis iklan dan biografi.

Kita bersyukur dewasa ini bermunculan lagi berbagai sanggar sastra, bahkan di kota-kota kecil di Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal itu pernah terjadi ketika industrialisasi mulai digalakkan di Tanah Air pada awal 1920-an. Misalnya adanya teater pergerakan di Batovis di Bandung, sandiwara keliling Ir Soekarno di Flores, bahkan kelompok-kelompok baca di Bengkulu dan Banda. Sampai awal kemerdekaan, kegiatan intelektual di daerah sangat marak. Misalnya, penyelenggara baca puisi Chairil Anwar yang pertama setelah penyair itu meninggal justru diadakan oleh satu kelompok sastra di Singaraja, Bali. Bukan di Jakarta.

Dalam kecenderungan globalisasi sekarang, tentu kita tidak boleh mengabaikan tumbuh dan berkembangnya berbagai studio, komunitas dan kelompok buruh pada khususnya, dan lembaga swadaya masyarakat pada umumnya. Belakangan, gerakan yang lebih menekankan aktivitas, dan bukan pada mutu karyanya, bermunculan di

Tegal, Cirebon, Jember, Jambi, dan banyak lagi.

Di Jakarta juga muncul "pusat" pusat kebudayaan alternatif yang baru seperti Galeri Oncor dan Teater Utan Kayu (TUK). Sentra kebudayaan seperti itu perlu mendapat perhatian istimewa dari kalangan sastra. Sebaliknya, lingkungan sastra kita yang sudah terkenal eksklusif, elit, terpencil, bahkan (dulu) terasing, hendaknya juga tidak menutup mata pada kalangan bawah.

Begitu pula murid-murid yang belum beruntung dalam pendidikan bahasa dan sastra di sekolah. Mereka bukan hanya perlu didorong jadi konsumen yang baik, tapi juga kesempatan untuk kreatif, produktif, dan mengindustrialisasi modal bakat dan minatnya. Majalah sastra Horison, di Jakarta, dengan brilian telah merespons kebutuhan ini, dengan menyisipkan lembaran Kaki Langit, guna menggenjot bakat dan memproduksi karya maupun nama-nama baru. Meski zaman industri, kita tidak bisa menghindari tuntutan kualitas dan produksi.



Sastra Kita Mau Global atau Universal?

KETIKA kita membaca prosa lirik *Pengakuan Pariyem* karya Linus Suryadi AG, kesan yang muncul pertama kali adalah warna lokal Yogyakarta yang kental. Ada nama Pariyem di sana. Bukan Jeannette, Claudia, atau Xaviera. Tetapi ketika kita mendengar bahwa *Pengakuan Pariyem* menjadi perbincangan di Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan Perancis, kita berpikir bahwa karya sastra yang sangat berbau perdesaan Jawa itu telah masuk ke pasar dunia, mengglobal.

Meskipun begitu, sebetulnya bukan globalitas yang menjadi aspek tulisan Linus, melainkan nilai-nilai universalnya. Jadi pertimbangan kita yang penting adalah universalitas, yang langsung terkait pada kualitas, dan bukan globalitas yang mengacu pada distribusi, atau pemasaran. Pertimbangan nilai atau mutu, hendaknya tetap merupakan hal yang fundamental bagi karya sastra.

Memang bisa juga, dengan mengedepankan aspek globalitas, kita seperti sedang menghadapi dunia baru. Tetapi yang lebih esensial, para penulis Indonesia tentunya

juga belajar dari kecenderungan yang mengarah pada peningkatan mutu karya masing-masing, meskipun belum tentu langsung berorientasi untuk mengekspor produksi mereka. Akibat dari maraknya divestasi yang belakangan ini sangat terasa di Tanah Air kita adalah dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menembus pasar.

Hal ini tampak betul ketika setiap kali mendengar bahwa berbagai perusahaan terbaik telah dijual ke pasar dunia. Pabrik semen menjadi milik Jerman, pertambangan tembaga dikelola Amerika, bahkan pabrik kecap dibeli Belanda, pengemasan air dibeli Perancis, perusahaan komunikasi dibeli Singapura. Globalisme seperti telah menyumbang logika baru, bahwa kita perlu bekerja optimal, supaya hasilnya mampu menarik hati dunia. Kita perlu menjadi dokter, insinyur, pilot dan sastrawan kelas global. Bukan hanya berkutat di bawah tempurung lokalitas adat, kepercayaan, dan kedaerahan masing-masing.

Amerikanisasi dunia, mulai dikembangkan dengan sistematis setelah Perang Dunia II. Mula-mula dengan mengekspor paham pembangunan, yang getarannya terasa hingga pada sajak-sajak Chairil Anwar. "Di zaman pembangunan ini," katanya, "Tuan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api." (*Diponegoro*), dan Indonesia sebagai entitas politik-ekonomi, mengadopsi "pembangunanisme" secara total selama pemerintahan Orde Baru.

Isme pembangunan itu menekankan pentingnya kebersamaan, pemenuhan kebutuhan manusia, menurut kaidah-kaidah modern yang dipercaya oleh Amerika dan sekutunya. Di dalamnya termasuk paham demokrasi, pasar bebas, hak asasi manusia. Kalau mau dilihat secara

kongkrit kita lihat pada kebutuhan sandang, pangan, dan peralatan sehari-hari (listrik, mobil, pesawat terbang), yang diakui atau tidak "ditemukan" dan mulai dikembangkan di Amerika.

Kebutuhan yang melahirkan selera dan nilai-nilai ini, tentu juga merambah ke kesusasteraan. Kita mendapat contoh-contoh sastra yang baik, dengan nilai-nilai yang sangat universal, dengan menawarkan sentuhan-sentuhan manusiawi, dari bahasa asli Inggris yang menjadi bahasa dunia, tanpa disebut sebagai "bahasa Amerika". Memang ada yang berpendapat bahwa karya-karya Shakespeare, Saroyan, Steinbeck, bahkan Khalil Gibran, menjadi sangat mendunia karena sistem distribusi produk yang dikembangkan Amerika.

Tetapi tentunya lebih dari sekadar penetrasi pasar atau gencarnya distribusi penjualan. Ada nilai-nilai dahsyat yang berperan sebagai roh globalisasi itu. Hal serupa juga berlaku untuk pemasaran produk musik klasik, sekalipun Beethoven, Mozart, bukan orang Amerika. Perkembangan sistem reproduksi karya seni maupun teknologi, sedemikian hebatnya, sampai membuat kita ragu: manusia terpaksa menyukai karena ketersediaan produk, atau memang karena kualitas produk yang bersangkutan.

Dengan semakin maraknya "amerikanisasi" yang mendasari "globalisasi" saat ini, sekarang terasa juga munculnya berbagai tantangan. Pertama yang paling jelas, adalah menguatnya sentimen tempatan, keagamaan, kesejarahan, dan kedaerahan. Semakin gencar proses globalisasi, semakin kuat juga upaya untuk menunjukkan perbedaan dan mengangkat nilai-nilai istimewa.

Kesastrawanan modern Indonesia harus dicatat berhutang budi pada logika dan nilai-nilai sastra "barat". Hikayat Abdullah bin Abdulkadir Munsyi, misalnya, muncul ke permukaan berkat ketrampilan teknologi komunikasi Abdullah, yang berpengalaman sebagai kerani (juru tulis) Thomas Stamford Raffles. Pada akhirnya, kita juga melihat kekayaan sastra Jawa kuno, melalui kaca mata Zoetmoelder.

Munculnya Muhamad Yamin, Nur Sutan Iskandar, Marah Rusli, dan yang terdepan: Sutan Takdir Alisjahbana, menandai bangkitnya globalisasi, kalau bukan nasionalisasi dan regionalisasi, sastra Indonesia. Tetapi pada saat itu bahasanya bukan mengacu pada kepentingan pasar yang lebih luas dan eksplisit, melainkan pada misi kemanusiaan dan kesejahteraan. Asrul Sani menyempurnakan universalitas (kesejahteraan) ini dengan manifestonya yang terkenal, *Surat Kepercayaan Gelanggang*.

Dengan percaya pada universalisme itu, sastra Indonesia dijadikan warga sastra dunia, sebagaimana dinyatakan oleh HB Jassin. Sejarah mencatat betapa gigih perjuangannya. Rupanya kita perlu disadarkan, bahwa sastra Indonesia tidak serta merta menjadi "warga" sastra dunia. Sekarang, kita memasuki medan yang lebih luas lagi, yaitu bagaimana membuat sastra yang lahir di berbagai daerah memiliki peluang untuk menjadi sastra nasional, bahkan internasional.

Tetapi, masalah pasar bukanlah hal yang hakiki bagi setiap pengarang. Motivasi tertinggi di dalam menulis, seperti dinyatakan oleh almarhum YB Mangunwijaya, adalah menjawab panggilan hati nurani. Seorang sastra-

wan sejati tidak semata-mata mengejar *best seller*. Remy Sylado pernah mengingatkan, "kalau mau laku keras, jual saja narkoba." Ukuran keberhasilan dalam menciptakan sastra bukan hanya ditentukan oleh jumlah eksemplar yang terjual. Tetapi kemampuannya menjangkau antargenerasi, antarbudaya, antarbangsa, dan "antarpasar" itulah yang akan memperlihatkan globalitas peredaran sekaligus universalitas nilainya.

Pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan untuk membela sastra yang terpinggirkan? Ajip Rosidi mempunyai inisiatif yang sangat brilian, yaitu dengan menyumbangkan hadiah Rancage, untuk karya-karya sastra yang dinilai terbaik dalam berbagai bahasa daerah. Kita diperkenalkan pada sastrawan-sastrawan bermacam etnis, yang karya-karyanya pun nyaris tidak pernah kita mengerti sama sekali.

Tidak ada jembatan memadai yang menghubungkan sastra etnis dengan sastra nasional. Berapa banyak novel atau puisi Bali, Sunda, Batak, Dayak, Betawi, yang telah diterjemahkan? Jangankan ke dalam bahasa internasional, kedalam bahasa nasional pun sangat jarang. Padahal, bukan tidak mungkin, bermacam karya sastra tempatan itu menawarkan kualitas dunia.

Kita memerlukan banyak upaya untuk menyelamatkan karya-karya sastra bermutu tinggi di kalangan etnis, yang dapat diterima oleh masyarakat dunia. Beruntung bila ada aktivis atau pemerhati yang menaruh minat dan memberi komitmen luar biasa seperti Claudine Salmon untuk sastra etnis Melayu Tionghoa. Tetapi kalau tidak ada pembela, penerjemah atau juru bicara, misalnya untuk sastra remaja

yang acap kali "meledak" penyelamatannya mungkin harus dilakukan sendiri.

Masalahnya, mengapa karya sastra remaja yang laris-manis itu kurang menarik minat untuk menjadi konsumsi global? Apakah karya-karya novelis, penyair, dan esais Indonesia belakangan ini kurang bersifat universal, sehingga sulit menembus pasar global? Atau dunia memang tidak adil terhadap produk-produk sastra dari negara yang terkenal korup, dan terkadang berkonotasi fanatik, berpandangan sempit, terkungkung oleh agama, adat-istiadat, dan bermacam pantangan?

Dengan menegaskan kembali bahwa sastra Indonesia, yang menurut HB Jassin telah berjasa mengiringi perjuangan bangsa, dan telah menjadi warga sastra dunia, sebetulnya kita tidak perlu merasa belum juga diperhitungkan. Tapi Temu Sastrawan MPU (Mitra Praja Utama) ini sepertinya mendesakkan perlunya pengakuan lebih lanjut. Kita seakan memerlukan "pembeli" karya sastra dari berbagai daerah, sebagai produk yang cocok untuk konsumsi global.

Padahal, masalahnya lebih dari sekadar memasarkan atau menerjemahkan. Dari perspektif pariwisata, almarhum Satyagraha Hoerip pernah menghitung, bila lima persen saja dari dua juta wisatawan manca-negara yang berkunjung ke Indonesia berminat membaca karya sastra, paling sedikit diperlukan 100.000 (seratus ribu) eksemplar karya terjemahan Indonesia ke dalam bahasa Inggris setiap tahunnya.

Tetapi nyatanya, berapa banyak karya sastra kita yang diterjemahkan dan ditawarkan pada para pengunjung

negeri ini? Sedikit sekali. Yayasan Lontar yang mempepori dan memimpin penerjemahan sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris pun tidak menikmati ledakan pasar itu. Hal ini sekali lagi menandakan bahwa pemuliaan sastra sama sekali terbebas dari penetrasi maupun tuntutan pasar.

Bila masalahnya adalah membela sastrawan yang merasa dimarjinalkan, maka kita harus berkaca, melakukan introspeksi, apakah karya-karya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang sedang berlangsung sudah memenuhi standar internasional?

Uluran tangan dari dunia luar, baik berupa lokakarya, program-program penulisan internasional, kerjasama penerjemahan, dan hibah kultural untuk pengembangan kesastraan juga perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan yang demokratis, keistimewaan perilaku dan keunikan adat-istiadat justru memberi peluang besar. Itulah berkah yang terselip dalam pesona maupun kengerian yang dibawa oleh kebebasan pasar.





Membuka Diri pada Tradisi

HUJAN badai tidak turun di Jakarta ketika Sincia. Waktu itu 5 Februari 2000. Beberapa keluarga menerima kiriman kue keranjang. Itulah kue khas yang dinikmati pada tahun baru Tionghoa. Sebagian orang merindukan hujan lebat, lambang kemakmuran yang diharapkan menandai tahun baru Imlek, atau “Sincia”. Mereka merayakan dimulainya Tahun Naga Emas, 2551. Sedangkan “Naga” adalah satu di antara 12 “shio” alias hewan mistis yang ditugaskan mewarnai karakter waktu. Kali ini adalah giliran Naga Emas (dari 5 macam yang ada) sehingga berotasi setiap 60 tahun sekali.

Begitu pentingkah tahun baru Imlek itu? Koran-koran dan majalah memberitakan dengan meriah. Barongsai, tari-tarian naga dan singa muncul kembali. Bahkan wayang potehi, panggung boneka kecil, dimainkan lagi di Surakarta. Pontianak, Medan, Jakarta, Semarang, dan berbagai kota seperti dihinggapi kegembiraan baru. Katanya sudah 32 tahun keturunan etnis Tionghoa dilarang bersuka-cita. Bahkan huruf-huruf Mandarin dilarang ditulis. Dilarang

tahu, dilarang baca. Hal itu dimulai resmi melalui instruksi Presiden (Inpres) 14/1967.

Selama “Orde Baru” (1966-1998) banyak hal dinyatakan terlarang. Termasuk tak boleh ada “agama Khonghu-cu” dan segala sesuatu yang berbau “Cina!” Dengan resmi dan tegas pemerintahan yang militeristis itu juga “melarang paham komunis berkembang di Indonesia.” Kalau ada yang diduga tersentuh, terkait apalagi terlibat pada komunisme bisa dibunuh, dipenjara, dibuang ke Pulau Buru, atau dikucilkan dari masyarakat ramai. Minimal tak bisa cari pekerjaan dengan mudah, tak boleh jadi tentara, tak boleh ikut pemilihan umum, dan mungkin juga susah cari menantu.

Apakah para keturunan Tionghoa juga diperlakukan seperti itu? Sedikit kurang dan sedikit lebih. Kurang bila dilihat dari birokrasi resmi. Tapi lebih bila melihat praktik pemerasan dan puncaknya, kerusuhan 13 Mei 1998. Humornya keturunan Tionghoa hanya boleh punya tiga “shio” yaitu “kambing hitam”, “sapi perahan” dan “kelinci percobaan”. Kasarnya, mereka dipelihara sebagai sumber keuangan bagi kalangan penguasa, dijadikan bulan-bulanan dalam amuk massa, sasaran macam-macam percobaan termasuk perkosaan.

Pelarangan yang berlebihan dan penderitaan orang-orang tak bersalah inilah yang pada gilirannya menumbuhkan bermacam simpati. Maka, setelah presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tampil, berbagai hal mulai diubah. Kemerdekaan untuk mempercayai dan memiliki tradisi dipulihkan. Larangan resmi itu dicabut dengan Keputusan Presiden (Keppres) 6/2000. Kegiatan yang

bersifat aktivisme maupun tradisionalisme kembali di-merdekakan. Tinggal sekarang pertanyaan kita: begitu pentingkah tahun baru Tionghoa?

Jawabnya tentu tidak lebih penting, tapi juga tidak kurang penting dari macam-macam tahun baru lainnya. Semua kaum punya tahun baru masing-masing. Ada tahun baru Arab, Jawa, Bali, Iran, Jepang, dan seterusnya. Semua diperingati dan dilupakan oleh pendukungnya. Jangan lupa, di kalangan Tionghoa sendiri banyak yang tidak lagi mengikuti tradisinya. Bahkan ada yang merasa malu pada kebudayaan sendiri. Demikian pula dari kalangan peradaban dan masyarakat lainnya.

Kebebasan telah membuat kita bersikap mendukung, skeptis, apatis atau menentang. Ada juga yang tidak mendukung dan tidak menentang. Banyak yang ikut-ikutan, seperti tidak suka atau seperti suka. Banyak juga sekadar penggembira. Dalam hal menyikapi “Kebudayaan Tionghoa”, kita melihat banyak hal yang istimewa, sebanyak hal yang tidak istimewa. Istimewa karena Tionghoa adalah mayoritas umat manusia. Seperlima dari seluruh manusia di bumi ini berdarah Tionghoa.

Tetapi di Indonesia, mereka terhitung minoritas. Hanya 3,5 persen, katanya. Jadi hanya 7 dari 200 juta orang Indonesia. Meskipun begitu dikabarkan sangat berpengaruh. Banyak peranan mereka, dan merata di berbagai aspek kehidupan. Mulai perekonomian sampai olahraga. Di lapangan kesenian, hampir semua bidang juga berperan. Tari, sastra, film, musik, senirupa, mode pakaian, maupun seni masak memasak atau tataboga, selalu ada aktivis-nya. Sebagian kecil saja dari mereka lari mengungsi ke luar

negeri, tidak kurang dari 40 milyar dolar modal ikut kabur. Begitu tafsiran para pengamat ekonomi, termasuk Theo F. Tumeon.

Atas berbagai pertimbangan inilah Mitra menampilkan “faktor Tionghoa” sebagai tema utama. Berbagai pertanyaan pun muncul. Mengapa Tionghoa, mengapa bukan “Cina” atau “China”? Kalau pun ketiga macam nama itu tak perlu dipersoalkan, betulkah mereka sangat berperan? Bagaimana bisa?

Apa rahasianya kelompok etnis Tionghoa (istilah yang dipakai sejak 1911) dimitoskan “menguasai 70 persen perekonomian” Indonesia? Pada masa lalu – sebelum Orde Baru – anak-anak sekolah diajar hidup hemat, rajin bekerja, ulet dan tidak mudah menyerah. “Kecinaan” (istilah Cina sudah dipakai berabad-abad, dan di berbagai sudut bumi, sebagai ketrurunan Maharaja Qin, kaisar pertama mereka) di berbagai kalangan sebagai keuletan, wirausaha, tangguhnyanya organisasi, dan kuatnya “tradisi”.

Tradisi pertama yang tak tergoyahkan adalah penggunaan nama marga. Kalau seorang warga di pelosok Sumatera atau Sulawesi ingin punya nama “Barat” mereka mudah saja menjadi Donald Pandiangan, John Simamora, Jeannet Purba atau Mary Pangemanan. Demikian juga kalau mau “berbau” Arab, dengan leluasa bisa menjadi Muhajir atau Istiqomah. Tetapi, kalau kita ingin menjadi Tionghoa, tidak begitu saja bisa pakai nama “China”. Warga pribumi Gunung Kidul yang bernama Sudono Salim, tidak boleh serta-merta mengganti namanya sendiri menjadi Liem Sioe Liong.

Anehnya, sebaliknya bisa. Banyak tokoh keturunan bahkan kelahiran Tiongkok dengan cepat punya “nama sini” seperti Eka Cipta Wijaya, Rudy Hartono, Riantiarno, dan seterusnya. Tetapi, sekali lagi, bukan sebaliknya. Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengaku berdarah Tionghoa, juga tidak (mungkin) punya nama Cina. Ini adalah satu tradisionalisme yang sulit ditembus.

Tradisi nama ini terkait dengan budaya tulis dan budaya darat yang telah mendarah-daging di kalangan keturunan. Kebudayaan Tiongkok, lengkap dengan sistim kalendernya, dipercayai sudah berlangsung beribu tahun. Mereka dikagumi sebagai penemu kertas, mesiu, sistim huruf dan hitung yang lestari dari abad ke abad. Pengobatan tradisional dan pertanian biologis mereka terkenal sangat baik, sehingga dapat menjelaskan mengapa jumlah Tionghoa yang hidup di bumi ini melebihi ras maupun etnis mana pun.

Tradisi kedua yang sangat jelas terlihat adalah cara hidup yang eksklusif. Ciri khas yang universal dari keturunan Tionghoa adalah persaudaraan yang kuat dan permukiman yang terkonsentrasi. Di berbagai kota besar di permukaan bumi ini dikenal adanya kawasan “percinaan” atau Pecinan, atau China Town. Ditandai dengan arsitektur yang khas, dengan patung-patung singa, naga, atau dewa-dewi, serta huruf-huruf kanji, kebudayaan Tionghoa memberikan ciri, atau “tanda tangan” tersendiri di mana-mana.

Upaya untuk memasyarakatkan budaya Tionghoa, jelas belum, atau tidak akan pernah seberhasil Amerikanisasi dunia, atau penyebaran agama-agama. Tetapi perlahan-lahan, akan semakin banyak terbuka

kesempatan, dalam perayaan Hari raya Imlek 2000, misalnya, sering ditonjolkan keikut sertaan warga bukan Tionghoa dalam tari, Cap Go Meh (festival lampion), pemberian Angpau (amplop merah berisi uang), pemasangan Cun Lian (selendang bersajak), dan terutama pembakaran petasan. Tari barongsai bahkan dipakai memeriahkan kampanye berbagai partai politik, dan upaya mengikut-sertakan massa.

Semua itu perlu diasumsikan untuk memperkaya kebudayaan dan meningkatkan toleransi hidup bermasyarakat. Globalisasi, yang ditandai juga oleh bangkitnya keistimewaan etnis, dan semangat “memamerkan keistimewaan” dan menunjukkan kearifan tradisional masing-masing, membuka peluang untuk menawarkan aktivisme dan tradisionalisme ini.

Semoga untuk selanjutnya hal ini menggairahkan partisipasi entitas budaya lainnya. Sehingga kita tidak hanya dimeriahkan oleh Sincia, tapi juga tradisi-tradisi tahun baru lain baik dari Tapanuli, Ambon, Minahasa, Bali, dan para pegiat serta penerus budaya etnis lainnya. Yang lebih penting dari itu tentu kita harapkan kebudayaan semakin inklusif, bukan hanya melakukan penetrasi, tapi juga membuka diri untuk partisipasi semua pemilik kebudayaan dunia.





Menimba Kekuatan dari Reruntuhan

APA yang kita bayangkan kalau mendengar “tumpukan” atau himpunan seribu satu pantun? Buku tua? Atau petatah-petitih lama dengan bahasa yang berbunga-bunga? Bagus tapi membosankan? Lebih dari itu semua! John Gawa, seorang warga Indonesia menetap di Darwin, Australia sejak 1974. Tiga puluh tahun berikutnya, ia pulang dan membawa oleh-oleh kumpulan 1001 pantun itu.

Betulkah isinya 1001 pantun? Ternyata lebih. Ia sendiri menulis lebih dari seribu, dan mengutip 600-an pantun tradisional dari berbagai suku. Jadi total lebih dari 1600 pantun dikumpulkan dalam buku yang manis. Lengkap dengan pengantar (eh, Sekapur Sirih!) Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana; uraian asal-usul penulisan itu oleh istrinya, Rita Carolien Umbas-Gawa; dan ulasan pakar. Dua pakar “sesama Flores” yang dimintai komentarnya adalah Daniel Dhakidae dan Frans Meak Parera.

Itulah kesan pertama, yang serba murah hati, dan menyenangkan dari buku setebal hampir 300 halaman ini. (Kebijakan dalam 1001 Pantun, *John Gawa, Penerbit*

Buku Kompas, Jakarta, Oktober 2004. xx + 275 halaman) Sekarang bagaimana isinya?

Medium Isyarat Kehidupan

Puisi atau sajak, atau pantun, atau bentuk sastra non-prosa pada umumnya (gurindam, talibun, soneta, tersina, stansa, quatrin, septima; asli maupun impor) sering dianggap sebagai pilar bahasa, atau sari-pati dari kebudayaan kata. Puisi lebih dari sekadar alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan informasi. Di dalamnya ada kekuatan magis dari kata dan bunyi. Karenanya pantun sering dipakai untuk menenangkan massa, menyihir manusia, membungkam ular, memanggil hujan, bahkan mengantarkan arwah ke alam baka.

Fungsi-fungsi pantun dan puisi konvensional pada umumnya cukup luas, meskipun jarang diakui. Pertama adalah sebagai pengawal pola berpikir. Keteraturannya, pola, rima dan estetikanya mendorong pemakai bahasa berhati-hati dalam bicara. Minimal berpikir dulu baru diucapkan. Bukan sebaliknya. Maka jangan heran kalau ada pendapat bahwa pantun bisa mendorong masyarakat berbicara lebih sopan, lebih berbudi pekerti.

Fungsi-fungsi ini bisa diperluas. Di antaranya sebagai alat pergaulan, media menyampaikan nasihat, pujian, doa-doa, penghargaan maupun kritik sosial. Khusus untuk pantun, kita perlu mempertimbangkan fungsi terpenting, yaitu untuk menyampaikan isyarat. Contoh:

*Asap api embun berderai
 Patah galah dalam perahu
 Niat hati tidak bercerai
 Kehendak Allah siapa tahu.*

Pantun seperti ini menyampaikan berbagai hal sekaligus. Kita bisa menikmati bahasanya, kosa katanya, iramanya; dan yang penting kedalaman maknanya. Di mana dan untuk siapakah pantun ini dapat dibacakan? Kita bisa memberikan tafsiran sesuai dengan kebutuhan. Mungkin pantun itu bisa dibaca dalam upacara pemakaman, perpisahan, atau sekadar sentilan, pada waktu berpamitan.

John Gawa mengumpulkan pantun-pantun, buatan sendiri maupun kutipan dari berbagai sumber. Ia tidak menjelaskan bagaimana dan di mana pantun-pantun itu dapat dipergunakan. Namun pilihannya banyak, kaya dan beragam. Untuk yang buatan sendiri, ia suka membuat judul atau semacam tema. Misalnya ada tema Silang Selisih.

*Atambua di perbatasan
 Lorosae dan Timor Barat
 Dua saudara harus berpisah
 Gara-gara 'jajak pendapat'*

Sangat jelas ada fungsi lain dalam penciptaan pantun yaitu sebagai media pendidikan dan pencatat sejarah. Secara lebih leluasa, John Gawa tanpa terbebani akurasi suku-kata, rima dan persamaan bunyi, mengedepankan fakta-fakta geografis, kejadian sosial politis, dan aspirasi pribadi maupun publik. Karenanya kita bisa menemukan

peristiwa Sebelas September (2001), ketika terorisme menyerang gedung World Trade Centre di New York, Amerika Serikat.

Ada banyak masalah kemanusiaan diangkat langsung, baik untuk sampiran maupun isi pantun. Inilah daya tarik pantun lama maupun baru pada umumnya. Bahayanya, ada kalanya muncul pelecehan terhadap etnis, kurang sadar jender, dan perlu peningkatan wawasan multikultural. Pantun memang rawan terhadap pelesetan, lebih-lebih yang berbau fanatisme, humor fisik dan eksploitasi lingkungan.

Salah satu contoh karya asli (bukan kutipan) adalah pantun Cium Ciuman yang mungkin diharapkan terdengar lucu, seperti berikut:

*Pulau Timor hasil cendana
Potong kayu baunya harum
Nona Timor memang sifatnya
Mahal senyuman walau dicium.*

Pantun ini tetap menyampaikan lebih dari sekadar informasi. Ada hasil cendana di pulau Timor. Dan ada stereotip perempuan yang tidak suka senyum, sekalipun sudah dicium. Tidak ada pelecehan di sana. Tapi wawasan jender dan lingkungannya bisa dipertanyakan. Lebih dari itu, kata “memang sifatnya” sangat patut didiskusikan. Benarkah dan mengapa ‘nona Timor’ harus dikatakan demikian.

Pantun Memperdalam Pesan

Biasanya, satu pesan dalam beberapa pantun, cukup mewarnai pembicaraan. Sutan Takdir Alisjahbana menunjukkan, dengan pantun Di mana Tuan di sana Sahaya, sebagaimana dikutip oleh John Gawa:

*Kalau tuan pergi ke Tanjung
Kirim saya sehelai baju
Kalau tuan menjadi burung
Sahaya menjadi ranting kayu.*

*Kalau tuan pergi ke Tanjung
Belikan sahaya pisau lipat
Kalau tuan menjadi burung
Sahaya menjadi benang pengikat.*

Begitu terus berlanjut sampai delapan bait. Pesannya tegas dan hanya satu: hubungan dekat yang terus menerus diperjuangkan. Bait ke delapan, atau yang terakhir pantun Melayu klasik itu berbunyi:

*Kalau tuan mencari buah
Sahaya pun mencari pandan
Jikalau tuan menjadi nyawa
Sahaya pun menjadi badan.*

Sangat terang, bahwa sasaran penghabisan setiap pantun adalah komunikasi intens dan mendalam di antara pemakai bahasa. Pantun diciptakan sebagai landasan, dermaga, atau jalan raya komunikasi manusia. Karena itu,

salah satu hal yang paling esensial adalah khasiat pantun untuk memperdalam kesan. Hal yang paling sepele pun bisa lebih indah, mendalam dan serius di dalam pantun.

Sebaliknya, hal yang serius, berat dan membebani, bisa diperingan. Contohnya adalah pantun-pantun yang memberikan hiburan, pantun jenaka, teka-teki dan permainan. Misalnya:

*Pohon manggis pohon embacang
Ketiga dengan pohon lulita
Duduk menangis abang pincang
Katanya jalan tidak rata.*

Sekali lagi, meskipun punya kemungkinan menyakiti, menyindir atau melecehkan kaum difabel, pantun itu bisa menjadi hiburan dan kritik simbolis. Siapa pun yang menderita kekurangan, boleh menyalahkan “pihak ketiga”. Itu bisa sarana yang tidak memadai. Bisa juga kondisi lingkungan dan alam yang di luar kendali pelakunya. Tetapi bisa juga dibaca sebagai humor. Hanya main-main, meskipun tadi: bisa menyakitkan.

Tentu ada yang benar-benar lucu. Pantun jenaka menyajikan humor-humor yang monumental dan tahan lama. Sekadar contoh bisa dicatat, pantun-pantun komik yang sangat karikaturis. Misalnya:

*Tanam jerangau di bukit tinggi
Mati dipijak anak badak
Melihat bangau sakit gigi
Gelak terbahak penghulu katak.*

Atau satu lagi:

*Jual pepaya dengan kandil
Kandil buatan orang Inggris
Melihat buaya menyandang bedil
Sapi dan kerbau tegak berbaris.*

Dunia agraris sangat mewarnai pantun jenaka. Karikatur kata-kata memberi kesan betapa kaya kosa kata, betapa cepat lompatan pikiran, dan betapa indah imajinasi yang terlukiskan. Coba saja:

*Anak bakau di rumpun salak
Patah taruknya ditimpa genta
Riuh kerbau tergelak-gelak
Melihat beruk berkaca-mata.*

Masalahnya adalah, bagaimana menerangkan arti kata-kata yang jarang lagi dipakai sehari-hari. Perlu ada kamus bergambar untuk menjelaskan arti 'anak bakau', 'taruk', bahkan barangkali 'genta'. Tantangannya adalah, bagaimana membuat keindahan bahasa tetap menarik, di tengah derasnya idiom-idiom baru yang dilansir teknologi komunikasi dan ledakan informasi.

Menciptakan Memori Kolektif

Pertanyaan utama tentu: mengapa pantun-pantun itu perlu dikumpulkan? Jawabnya sederhana. Pantun adalah properti publik, atau kekayaan masyarakat yang paling

nyata. Ia bisa menyatukan, membuat banyak orang merasa punya kelompok dan kaya, meskipun hanya dalam kata-kata.

Pantun yang diwariskan turun temurun, dari generasi ke generasi, bernilai seperti harta pusaka. Kalau kita tidak dapat menemukan sarana fisik seperti tembok besar Cina, candi Borobudur, piramid atau stadion dan arena purba; warisan verbal menjadi sangat penting. Dalam banyak hal, warisan non-fisik yang dimiliki berbagai suku bangsa di Indonesia mungkin bisa memberi sedikit penghiburan.

Dengan lain perkataan, kalau mau melihat kebesaran masa lalu di negeri yang serba lisan, lihatlah pantun atau lagu-lagu rakyatnya. Pantun, sama seperti kerajinan terakota di zaman Majapahit, serba kecil, unik, tapi mengisyaratkan kebesaran dan kemurahan hati atau kekayaan spiritual masyarakatnya.

Melalui berbagai usaha dan susah-payah, John Gawa mengumpulkan pantun-pantun dari berbagai daerah. Ada pantun kentrung dari Jawa Timur, dendang pauah dan kato pusako dari Ranah Minang. Ada juga sastra lisan Saluan dari Sulawesi Tengah dan sastra lisan Lio dari Flores. Yang paling banyak, tentu pantun Melayu.

Pantun-pantun itu menciptakan entitas kelompok dan memberikan memori kolektif. Di antaranya telah sering kita dengar dalam lagu-lagu, seperti Keroncong Kemayoran, Si Paku Gelang, Kicir-kicir, Dayung Sampan, Lenggang Kangkung, dan banyak lagi. Semua lagu berpantun itu memberikan peluang improvisasi seluas-luasnya. Artinya, pantun membuat rakyat leluasa berkreasi (menciptakan

dunia) dengan bahasanya.

Dari sanalah tercipta kebersamaan. Semakin sering ada kesempatan berpantun (baca: berkreasi), bisa diharapkan semakin kuat pertemanan atau persaudaraan. Saratnya tentu diperlukan pantun-pantun bermutu. Bukan hanya komunikatif, tapi juga menyentuh hati, dan menawarkan harapan, atau kenangan bersama.

Itulah fungsi dan peruntukan paling penting dari penciptaan kembali, atau publikasi pantun. Masalahnya mengapa hal seperti ini dapat disebut “kegiatan yang hampir tidak masuk akal (dan) melawan arus,” seperti dikatakan Daniel Dhakidae?

Apakah John Gawa sedang berjuang sendiri, melawan selera publik, dan cenderung sia-sia dengan menghimpun ribuan pantun itu? Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Pekerjaannya menjadi sia-sia apabila publik mengabaikannya. Tetapi justru bisa menjadi awal yang bagus, bila ternyata berhasil mendorong masyarakat kembali menyukai pantun dan mengembangkannya.

Bagi pemakai bahasa, kumpulan pantun dapat menjadi acuan. Pada waktu orang mulai belajar, pantun, teka-teki, dan peri bahasa adalah bahan paling kongkrit, sederhana dan mudah dihapalkan. Tetapi bagi rata-rata pemakai lama, yang jarang memperhatikan lagi bahasanya, kumpulan puisi apa pun dapat mengasah, menyegarkan kembali dan membekali dengan berbagai amunisi kosa kata, pemahaman maupun nilai-nilai yang terlupakan.

Pada saat kita kehilangan ide. Pada saat kita merasa lemah, selalu kita berpaling ke masa lalu. Pantun telah

menyimpan masa lalu itu dengan sebaik-baiknya, sekali pun tinggal berupa puing atau reruntuhan. Harus dicatat, justru reruntuhan itulah yang memberi kekuatan. Inilah fungsi utama dari kumpulan pantun John Gawa.

Dengan jumlah yang begitu banyak, kumpulan pantun ini dapat diibaratkan berkarung-karung saripati bahasa pergaulan. Ia seperti tumpukan gula atau garam. Dalam praktik sehari-hari, pantun adalah penyedap atau pemanis bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi dengan menghimpun lebih dari seribu pantun, John Gawa menawarkan berkarung bahan pemanis dan bumbu.

Di sini terletak dilema dari aspek penyajian buku ini. Berjibunnya pantun dari macam-macam tempat, yang membawa seribu satu 'kebijakan' atau pesan, membuat pembaca mudah sekali merasa mual. Dengan kata lain, buku ini berat untuk dibaca. Ia seperti kamus atau ensiklopedia, yang tidak mungkin, dan tidak perlu dibacaurut halaman demi halaman sampai tamat.

Kebijakan dalam 1001 Pantun akan lebih menarik bila dinikmati secara eceran. Semacam takaran demi takaran. Ibaratnya kalau kita mau menikmati gula atau garam, cukup diambil sendok demi sendok. Bahkan sering kali lebih sedikit lagi dari satu sendok. Cukup satu jumput atau celupan. Jadi penyajiannya perlu diperhatikan porsi demi porsi.

Buku ini cenderung tidak memperhatikan hal itu, sehingga terkesan sebagai gudang harta karun. Pembacanya diharap memilah-milah sendiri. Alangkah baiknya bila disertai indeks dan penomoran. Tampaknya ada upaya

memberi catatan kaki. Sayang tidak muncul, dan tidak ada penjelasan.

Kupasan dan komentarnya pun akan lebih hidup sekiranya pantun-pantun itu dapat diklasifikasi. Pantun dapat dibagi-bagi menurut peranan dan kegunaannya. Keterbacaan akan lebih optimal bila ada bingkai yang mengaksentuasi kebijakan yang satu dan lainnya. Tidak bisa disangkal lagi, kemasan merupakan hal penting untuk barang jadi yang berbentuk pantun klasik dari berbagai daerah ini.

Sedangkan untuk pantun-pantun ciptaan sendiri, kritik pertama menyangkut kualitas pantunnya. Temanya terkadang tidak tergarap dengan baik. Kosa katanya cenderung terbatas. Nilai-nilai yang ditawarkan banyak yang klise atau ketinggalan. Padahal, bila mau bercermin pada pantun lama, standar bahasa dan bobot tiap pantun masih bisa diperbaiki.

Resep bahwa akhir suku kata mesti a-b-a-b seyogyanya dipegang teguh. Yang tidak kurang pentingnya adalah jumlah suku kata yang berkisar antara 8 sampai 12 suku kata perbaris, juga harus diperhatikan. Cukup banyak pantun John Gawa yang kurang mentaati azas ini, meskipun tetap menawarkan nilai sendiri.

Misalnya, dalam tema Hidup dan Kehidupan. Dengan enteng diringkas dalam frase-frase berikut ini:

*‘Sering’ atau ‘jarang’
Bertemu setiap hari
Hidup 100 tahun atau kurang
Apa yang kita cari?*

Tentu saja, bentuk ini sudah memenuhi sarat sebagai puisi. Tetapi untuk dianggap sebagai pantun, tentu belum. Bukan hanya akhir katanya sudah a-b-a-b, tapi juga asas dua sampiran dua isi. Hal itu tidak terpenuhi. Demikian juga konvensi 8-12 suku kata tiap baris telah diabaikan, meskipun dapat dibenarkan dari sisi kebebasan penyair. Ada *licentia poetica*, yang seringkali dipakai untuk pembelaan, memberikan kekebalan untuk mencipta puisi bebas. Bukan untuk pantun.

Keteraturan, kejernihan dalam berpikir, kecerdasan menggunakan kata-kata adalah modal utama bagi pencipta pantun yang baik. Tetapi karena pantun diciptakan untuk menjadi khasanah publik, penciptanya perlu hati besar: tidak mengklaim kredit, atau menonjolkan namanya. Itulah sarat utama yang berhasil dipenuhi oleh John Gawa. Ia tidak mengklaim satu puisi pun dalam buku ini sebagai karya kerajinannya. Meskipun kita bisa meraba-raba yang kira-kira bukan klasik, dan murni ciptaannya.

Mengapa Hanya Satu Borobudur?

Budaya lisan di kepulauan Indonesia dan di Asia Tenggara, pada umumnya, sering dijadikan andalan. Hal itu bisa dipahami karena kawasan ini gelap gulita bila dipandang dari sisi budaya tulis. Sulit ditemukan bahan tercetak, dokumen tertulis, dan catatan pantun-pantun itu. Setiap suku bangsa dan bahasa, memiliki beribu-ribu pantun. Ada yang asli dari masa silam, ada juga yang diperbaiki dan diciptakan kembali hari demi hari.

Upacara adat (Gorontalo, Bima, Minangkabau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Flores, dst) selalu bertumpu pada puisi, khususnya pantun-pantun lokal. Inilah yang belum banyak diperhatikan teristimewa oleh generasi yang lebih muda. John Gawa, dalam batas-batas tertentu telah memelopori dan memberikan inspirasi. Pertama, ia memberi contoh menciptakan dan mengumpulkan karya-karya lisan yang sedang berkembang. Kedua, ia menengok secukupnya pada masa silam.

Ia juga mencoba menerjemahkan pantun-pantun itu ke dalam bahasa Inggris, meskipun hasilnya patut dipertanyakan. Jasanya yang harus dicatat adalah membuka diri pada pantun-pantun dari suku lain. Kita disadarkan, betapa selama ini telah terbiasa hidup dengan pantun-pantun klasik yang muncul dari lagu-lagu Maluku (O, Ulate dan Waktu Hujan Sore-sore).

Himpunan karya-karya itu, bila disajikan dengan tepat bisa menjadi cenderamata yang hidup. Karya-karya pantun Indonesia bisa diibaratkan 'borobudur' yang paling sederhana. Cobalah bernyanyi:

*Pukul tifa toto buang
Kata belimbing di kereta
Nona dansa dengan tuan
Jangan sindir nama beta.*

Pantun itu adalah sebuah 'borobudur' dalam arsitektur kata-kata. Ia diterima di mana saja, oleh tua maupun muda. Tantangannya selalu kembali pada generasi penerus. Bagaimana bisa menciptakan adikarya lain. Syukur

bila dapat membawa idiom apalagi jargon-jargon baru, dari zaman yang sedang berlangsung. Atau memang kita harus menerima kenyataan bahwa borobudur hanya satu.

Itulah yang bisa terjadi pada himpunan Kebijaksanaan dalam 1001 pantun ini bila tidak diikuti atau diperbaiki oleh para penyair zaman ini. Sehingga kita harus tetap bangga pada pantun perpisahan yang dari dulu selalu berbunyi:

*Kalau ada sumur di ladang
Bolehlah kita menumpang mandi
Kalau ada umurku panjang
Bolehlah kita bertemu lagi.*

Kita tidak tahu, berapa banyak anak-cucu di kota yang masih melihat sumur, seperti yang dibayangkan ada di ladang. Tetapi pantun itu tetap tegar – reruntuhan yang memberikan kekuatan – sebelum muncul pantun perpisahan baru. Mungkin akan tiba saatnya kita mendapat kwatrin perpisahan serupa yang lebih tersangkut pada komputer, telpon seluler, *play station* dan berbagai permainan elektronik. Semoga hal itu dapat dijadikan bahan penciptaan ‘borobudur’ baru dalam perpantunan pada umumnya, dan puisi terpakem Indonesia pada khususnya.



Mengelola Uang dan Rahasia

BARANG siapa ingat semboyan “seni untuk seni” mungkin sudah tahu arti “rahasia untuk rahasia” dan “uang untuk uang”. Pepatah Perancis *l’art pour l’art* memberanikan manusia berani memperjuangkan seni untuk kepentingan seni. Membangun keindahan demi tegaknya keindahan itu sendiri. Jadi bila diplesetkan menjadi “uang untuk uang” kita didorong memahami atau mendapatkan uang, untuk kejayaan uang, atau *finance* itu sendiri.

Singkatnya, pengertian menabung untuk menabung, belum atau tidak pernah memasyarakat di Indonesia. Penyebabnya macam-macam. Pertama secara teknis pikiran Melayu melihat uang sebagai sesuatu “yang harus dicari”. Berbeda dengan paradigma *making money*. Di sana, uang adalah sesuatu yang harus dibuat. Sedangkan di sini, uang sudah ada, entah di mana, entah berapa jumlahnya dan entah siapa yang membuat. Manusia bertugas mencarinya.

Kedua, secara filosofis kita tidak boleh mementingkan uang. Bahasa-bahasa lokal (Indonesia, Jawa, Toraja, Kubu, Papua, dst) tidak bisa dipakai membahas uang sampai

rinci. Untuk menolongnya harus dilengkapi pengertian impor seperti inflasi, deflasi, *currency rate*, *banking*, *financing*, *fund management*, *cost consciousness*, dan seterusnya. Dengan kata lain, rasanya sulit bagi kita untuk memahami apalagi menjadi borjuis atau kapitalis dalam arti yang sebenarnya.

Bahasa Indonesia pun tidak menjelaskan apa arti rupiah, dari mana asalnya, mengapa kita pakai rupiah, sejak kapan? Dalam hidup sehari-hari kita justru disarankan untuk tidak banyak membicarakan uang. Jumlah gaji seyogyanya dirahasiakan. Tidak sopan menanyakan besarnya penghasilan tetangga. Kurang ajar kalau tega menyebut harga rumah atau baju yang dikenakan teman, saudara, bawahan apalagi atasan.

Ketiga, kita diajar untuk percaya bahwa uang atau rejeki bukan milik kita. Semua titipan dari Yang Maha Pengasih. Sekadar amanat yang bisa diberikan dan dicabut lagi sewaktu-waktu. Jadi, uang bukan sesuatu yang dapat kita kuasai. Ia ada di luar kekuatan kita. Maka, sudah jelas bahwa dalam pikiran tradisional dan lokal, kita tidak dapat “make money”. Tetapi kita bisa mendapatkan sekian milyar atau sekian trilyun, bila nasib menghendaki. Sedangkan pemanfaatan dan pengelolaannya? Tunggu dulu!

Debat Pendangkalan Makna

Pada awal 1960-an, para budayawan Indonesia bertengkar hebat. Sebagian berpikir seni harus dimanfaatkan untuk masyarakat, *noblesse oblige*. Sebagian lagi bilang,

seni itu bebas, universal, tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Termasuk seni untuk seni, atau *l'art pour l'art*, tadi.

Setengah abad hampir berlalu. Bekas luka pertengkar-an itu masih terurat dalam sejarah. Perseteruan panjang antara pendukung Manifes Kebudayaan (Manikebu) melawan pendukung Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) dan konco-konconya. Peristiwanya kecil, tapi dampaknya panjang. Demamnya selalu terasa tiap kali ada berita yang terkait. Wafatnya Wiratmo Soekito. Peluncuran buku Pramodya Ananta Toer. Kampanye sastra Taufiq Ismail. Dan seterusnya.

Tetapi jarang, atau mungkin belum ada yang menarik konsep “seni untuk seni” dan “seni untuk masyarakat” itu ke lapangan yang lebih dekat, yaitu ke dunia kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Kita hanya tahu bahwa *l'art pour l'art* adalah visi masyarakat kapitalis. Sedangkan *noblesse oblige* adalah kompromi ideal yang berbau sosialis, pragmatis, terapan. Bukan bisnis untuk bisnis. Tapi bisnis untuk manusia. Dengan perspektif ini insya Allah kita bisa belajar memahami kapitalisme.

Mungkin kita alpa bahwa bisa juga hukum demi hukum, ekonomi untuk ekonomi. Seolah-olah sudah diwajibkan bahwa hukum harus mengabdikan pada manusia, ekonomi untuk rakyat, dan seterusnya. Di negeri ini, tidak dihargai prinsip ilmu untuk ilmu, politik untuk politik, atau bahkan kebenaran untuk kebenaran. Kita telah terlatih dengan pikiran bahwa semuanya diabdikan untuk manusia.

Ilmu pengetahuan dibebani kewajiban untuk mem-

bawa kesejahteraan. Begitu juga kekuasaan dan pemerintahan. Konsep negara tidak pernah ditegakkan sebagai negara. Setiap pemerintahan ditunggangi oleh berbagai harapan, impian, tuntutan, dan himbauan berjuta orang. Penuh sesak dengan beban dan “pesan sponsor” agar dapat memenuhi keinginan rakyat. Belum pernah kita tegaskan bahwa negara perlu dibiarkan sebagai negara, sama seperti biarlah kebenaran menjadi kebenaran.

Karena itu setiap hari kita dengar presiden disesalkan, gubernur dicerca, konglomerat digugat, lantaran tidak memenuhi keinginan rakyat. Puncak dari pandangan demikian adalah gagalnya masyarakat melihat uang sebagai uang. Dalam banyak kasus kita bisa membuktikan bahwa uang sering hanya dipandang sebagai alat, atau sarana untuk hidup. Tidak banyak warga Indonesia mampu melihat uang sebagai uang, seperti halnya melihat kata sebagai kata.

Akibatnya uang menjadi tidak sakti lagi. Rupiah tidak banyak ditabung apalagi dihormati. Daya beli sebagai nilai utama uang jadi rapuh. Ditambah dengan rendahnya tingkat “melek harga”. Maka rupiah hampir menjadi “anak bawang” dalam percaturan finansial bangsa-bangsa. Bukan karena masyarakat internasional memandang rendah. Tapi karena kurang dipahami oleh pemiliknya sendiri. Indonesia adalah bangsa yang belum paham benar akan arti rupiah. Sejak kapan punya rupiah. Mengapa dinamai rupiah dan bukan *florin* atau gulden. Apa artinya satu sen, satu perak, serenggint. Semua tidak penting, dan memang tidak dianggap penting.

Latar filosofinya jelas, kita tidak terlatih menghargai

hak asasi. Kita lupa bahwa semua benda, hidup atau mati, kongkrit atau abstrak punya kodrat. Itulah nilai asasi. Semua ajaran agama memang menganjurkan agar tidak mendewakan uang. Tetapi bukan berarti tidak memikirkan dan memahaminya dengan benar. Jadi lucu kalau jumlah penghasilan atau besarnya gaji dinyatakan rahasia. Tidak boleh diungkapkan betapapun besar atau kecilnya. Akibatnya tahu sendiri kalau buruh digencet habis, digaji se-rendah-rendahnya dan jumlahnya tetap dirahasiakan.

Sementara itu rupiah berjalan tanpa penghargaan, tanpa perhatian dan empati dari pemiliknya. Hidupnya mengambang, nilai kursnya tidak menentu, tidak terarahkan. Makanya pasar gembira bila mendengar kabar berbunyi “rupiah berhasil dikendalikan”. Padahal kenyataannya tentu tidak demikian. Sebagian besar merasa tidak bisa dan tidak mungkin mengendalikannya. Alasannya, uang tidak membutuhkan manusia. Justru manusialah yang membutuhkan uang.

Sama persis, politik juga tidak memerlukan orang. Justru orang yang seringkali dikorbankan untuk politik, sebagaimana dikorbankan untuk perang, untuk pembangunan, bahkan untuk agama. Mungkin, ilusi bahwa orang berhasil menunggangi politik, mengendalikan uang, memperalat agama, dan membisniskan perang adalah mimpi indah yang sekaligus juga mimpi buruk bagi kemanusiaan.

Menghamburkan Kesaktian

Ratusan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meninggalkan dusun dan orang-orang yang dicintai untuk bekerja di

Malaysia dan Timur Tengah. Mereka mengira bakal menaklukkan rupiah bila punya real, ringgit atau dolar di tangan. Mereka (juga kita!) mungkin berpikir bahwa ekonomi domestik bisa diperbaiki dengan cara mengabdikan pada ekonomi luar negeri. Mengapa begitu? Sebab pemahaman kita pada ekonomi tidak mungkin tumbuh bila mengandalkan atau mencari-cari pengertian tentang sistem perekonomian sendiri.

Demikian juga pengertian kita tentang hukum, tentang kenegaraan, tentang peradaban. Kita berpikir akan bisa hidup beradab dengan bercermin pada *civil society* yang telah berjalan di Amerika atau Eropa. Kita berpikir dapat menjadi bangsa dengan berkaca pada Jepang, Belanda, atau Australia. Bukan karena kita mengerti apa artinya menjadi modern, tapi justru karena Indonesia tidak pernah kita pahami sebagai Indonesia.

Di kepala dan hati kita masing-masing ada banyak Indonesia. Tapi kita ingin satu. Hanya satu persepsi tentang Indonesia. Indonesia yang bagaimana? Tentu yang makmur, rukun, kompak, aman, damai, maju, dan seterusnya. Kita lupa bahwa Indonesia punya hak asasi sebagai Indonesia. Berbagai harapan, cita-cita, kenangan dan trauma telah memaksa kita memperlakukan negeri ini sebagai sebuah impian yang syarat dengan berbagai beban.

Akibatnya jelas. Kita tidak pernah memilikinya. Kita tidak menemukan nilai dan kekayaan, keindahan, dan kemiskinan, kekuatan dan kelemahan, kekurangan dan kelebihan, sebagaimana adanya. Kita telah menghambur-hamburkan keindonesiaan itu sama seperti memboroskan rupiah, karena kita tidak pernah tahu sebanyak apa kita

bisa kehilangan. Kita juga tidak pernah paham sesungguhnya sekaya apa tiap orang maupun secara kolektif bila mampu menabung, betapapun kecilnya.

Erna Witoelar, ketika menjadi menteri kimpraswil (Permukiman dan Prasarana Wilayah) punya nasihat sederhana tapi brilian. Kalau satu orang bisa menghemat seliter air dalam sehari, maka seluruh warga Jabotabek bisa menyelamatkan 12 juta liter. Bayangkan, kalau satu orang Indonesia bisa menyimpan seribu rupiah dalam sebulan, maka separuh saja bangsa ini dapat memperkaya negaranya dengan $\text{Rp } 1000 \times 100 \text{ juta} = \text{Rp } 100 \text{ milyar}$. Setahun $\text{Rp } 1,2 \text{ trilyun}$. Hitung saja kalau 32 tahun, berapa tabungan separuh bangsa Indonesia?

Tapi kenyataannya tidak demikian. Rakyat kecil memang giat menabung. Sedangkan “rakyat besar” giat berhutang. Akibatnya bagaimana tabungan kapita kita dibandingkan dengan hutang perkapita? Jauh lebih mudah menghitung utang perkapita bangsa Indonesia ketimbang tabungannya. Cobalah tengok ekonomi keluarga sendiri? Berapa banyak rumahtangga di negeri ini yang lebih condong untuk menerima nasi bungkus, santunan, dan sumbangan ketika dilanda bencana?

Bahkan tanpa ada bencana pun, kondisi finansialnya seringkali minus. Sebuah desa nelayan di pantai utara Jawa tercatat punya penghasilan perbulan $\text{Rp } 76.000,-$ per kapita. Pada saat yang sama masing-masing keluarga terbebani cicilan hutang rata-rata $\text{Rp } 200.000,-$ per bulan. Rupanya wajar bila sepeda motor, televisi, kulkas, bahkan meja-kursi dan korden yang sudah rusak kebanjiran, ternyata belum lunas angsurannya. Bahkan sebelum krisis moneter,

jangan heran kalau mendengar pegawai pemerintah gajinya minus. Artinya, seluruh penghasilan satu bulan tidak cukup untuk membayar hutang. Akibatnya pada waktu gajian tidak pulang membawa uang, tapi justru masih harus nombok.

Itulah yang terjadi pada satu sisi. Jumlah uang yang tidak mencukupi harus ditopang dengan menggadaikan umur, hidup, martabat dan tenaga. Sedangkan pada ekstrim lain uang telah diperkuda sebagai alat serbaguna. Bagi pemegang uang yang berlebihan, muncul dugaan uang dapat membeli kebenaran, menegakan hukum, menyuap aparat, mencuci dosa.

Jangan-jangan kita telah gagal melihat uang sebagai uang. Akibatnya rupiah tidak pernah bertambah kuat. Rupiah dibebani fungsi macam-macam, termasuk untuk menggagalkan pemberantasan korupsi, dan mengembalikan martabat uang itu sendiri. Semua kembali pada visi menentang *l'art pour l'art*. Ketidak mampuan kita meningkatkan prestasi dan melewati kinerja kemarin dengan rekor pribadi maupun kolektif, telah mengembangkan budaya asal ada, asal jadi, asal-asalan.

Menuju Bangsa yang Jujur

Setelah banjir, kita tahu bahwa lingkungan harus dibela demi kepentingan lingkungan itu sendiri. Sebab, kalau lingkungannya baik, dengan sendirinya mahluk yang hidup di atasnya akan sejahtera lestari. Reformasi juga mengajarkan kita untuk menegakkan hukum demi hukum,

aturan demi aturan, dan membangun moral untuk meningkatkan standar moral itu sendiri. Kita sudah tahu bahwa pelanggaran hak asasi manusia tetap sebuah dosa, sekalipun seluruh dunia tidak melihatnya.

Pada masa yang silam, ada anggapan bahwa perselingkuhan baru dinyatakan terjadi bila sudah ketahuan dan dapat dibuktikan. Kejahatan baru dinyatakan kejahatan bila ada saksinya dan diakui. Tetapi, memasuki abad globalisasi yang masih kontroversial ini, kita diperkenalkan dengan nilai-nilai baru. Ada transparansi. Ada akuntabilitas, *good governance*, dan self assesment. Manusia diajar jujur menilai dirinya sendiri. Jujur pada kesehatannya lahir batin. Jujur pada moralitasnya, integritasnya, keuangannya, harta bendanya yang tampak maupun yang tersembunyikan.

Langkah paling sederhana adalah dikenalkannya laporan harta pejabat. Masih banyak yang belum mengisinya, apalagi mempublikasikannya. Amien Rais bisa bangga menyebutkan harga kompor gas murahan di dapur istrinya. Tetapi berapa banyak yang masih menyembunyikan jumlah harta sesungguhnya. Bahkan yang mengharamkan diri untuk tidak berterus terang juga tidak sedikit jumlahnya.

Ada kemungkinan, masyarakat kita akan selalu gagap setiap kali menghadapi perkara yang berkaitan dengan uang. Ketidak berdayaan, ketakutan atau kesombongan untuk melecehkan materialisme membuat rakyat dan pejabatnya sering salah tingkah. Masuknya multinasional dan bisnis trans-nasional seperti *hypermarket*, *e-commerce*, *credit card*, dan digitalisasi ekonomi, mungkin

bisa turut mempercepat lahirnya “Indonesia baru”. Kita memerlukan kearifan, artikulasi, dan semangat baru untuk mampu mengelola *personal fund*, kekayaan masyarakat, dan kekayaan alam. Dengan begitu, kita memberi makna lebih baik pada hidup ini.



pustaka-indo.blogspot.com

Sumber Tulisan

1. **Penyair dalam Struktur Mediasi**, Materi pelatihan nasional LEAD Indonesia, Cohort 7, Jakarta, 29 November 1999.
2. **Tulisan dan Perubahan**, Bahan lokakarya jurnalisme lingkungan dan kependudukan, diselenggarakan oleh UNFPA dan Care International, di enam kota: Jakarta, Makassar, Medan, Palangkaraya, dan Kupang, Oktober 1999 – Februari 2000.
3. **Menulis, Mendidik, Merdeka**, Pengantar penataran mengarang bagi para guru sekolah dasar propinsi Nanggroe Aceh Darrussalam, di Banda Aceh, 1 Desember 2000.
4. **Puisi dan Kekerasan**, Pidato peringatan hari puisi sedunia, di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Jakarta, 21 Maret 2001.
5. **Sastra Pasca-Nasionalisme**, Bahan diskusi Reformasi Sastra dan Pasca Nasionalisme, di Universitas Tirtayasa, Serang, Minggu 2 Mei 1999.
6. **Jurnalisme dalam Transisi**, Diskusi reguler di Yayasan Kippas, Medan, Oktober 1999.

7. **Kebudayaan dalam Reformasi**, Simposium dan Gelar Seni: Indonesia Semua “Mencari Strategi Kebudayaan Era Reformasi”, Senat Mahasiswa FSUI, Depok, 28 April 2000.
8. **Kepeloporan dan Reformasi**, Seminar Asas IKIP Bandung, Bumi Siliwangi, Bandung, 29 April 1999.
9. **Mobilisasi dan Peran Media**, Lokakarya Jurnalisme dan Lingkungan, UNFPA – CARE International, Hotel Acacia, Jakarta, 3 Februari 2000.
10. **Bila Penyair Berkicau**, Catatan Lepas, 30 tahun berpuisi (1972-2002).
11. **Dokumentasi = Jati Diri**, Ceramah pembelajaran untuk staf redaksi & reporter majalah Trubus, Januari 2000.
12. **Belajar dari Rahardi**, Pembahasan Sastrawan dan Karyanya, Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, Juni 2000.
13. **Sastra Indonesia dan Pasar Global**, Diskusi Komunitas Sastra Indonesia (KSI) di Tangerang, 2000.
14. **Persahabatan dan Kreativitas**, Pengantar diskusi keliling “Pijar Peradaban Manusia” (Penerbit Kanisius) di Jakarta, Bandung, Yogya, Trawas, dan Fisip Universitas Airlangga, Surabaya, Februari – April 2000.
15. **Pro dan Kontra *Sweeping* Buku**, Pengantar diskusi Masyarakat Fulbright Indonesia di auditorium AMINEF, Jakarta, 17 Mei 2001.
16. **Dari Puisi untuk Kehidupan**, Pengantar peluncuran antologi Resonansi Indonesia, Galeri Cipta II, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 18 Maret 2000.
17. **Di Balik Sukses Non Fiksi**, Pengantar lokakarya penulisan buku non fiksi, Pusat Perbukuan, Hotel Wisata, Jakarta 2002.

18. **Masyarakat *Cyber* dan Sastra Multimedia**, Peluncuran Yayasan Multimedia Sastra, Sahid Hotel, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2001.
19. **Dengan Hati dan Akal Sehat**, Catatan untuk buletin himpunan alumni Jepang FSUI (2000 – 2001).
20. **Senyum untuk Calon Penulis**, Diskusi Eksotika Karmawibangga dan Komunitas Burung, di aula Nichiren Syosyu Indonesia, Jakarta, 2000.
21. **Sastra Industri dan Industri Sastra**, *Kompas Online*, 31 Juli 1997.
22. **Sastra Kita Mau Global atau Universal**, Prasaran untuk Temu Sastrawan MPU (Mitra Praja Utama = semua propinsi di pulau Jawa ditambah Bali dan Lampung), di Hotel Patra Jasa, Anyer, Banten, 26-29 Juli, 2004.
23. **Membuka Diri pada Tradisi**, Editorial MITRA, jurnal filsafat dan kebudayaan, Jakarta, 2001.
24. **Menimba Kekuatan dari Reruntuhan**, Resensi Buku Pantun John Gawa, dimuat Harian *Kompas*, 19 Maret 2005, halaman 45 (Pustaka Loka).
25. **Mengelola Uang dan Rahasia**, *Sinar Harapan*, Jakarta, 8 November 2002.

Biodata Penulis

EKA BUDIANTA lahir 1 Februari 1956 di Jawa Timur, mengawali karirnya sebagai wartawan (1980-1991). Mulai dari majalah Tempo, harian Jepang Yomiuri Shimbun, hingga radio BBC, di London, Inggris. Ia menikah dengan Melani, temannya di masa kuliah.

Kumpulan sajaknya "Cerita di Kebun Kopi" (Balai Pustaka, 1981) dibeli pemerintah 80.000 eksemplar. Lainnya, "Lautan Cinta", "Sejuta Milyar Satu", dan "Rumahku Dunia" membuatnya banyak dibicarakan. Kritikus sastra HB Jassin menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang terpancar dalam puisi Budianta. Sedangkan wartawan Albert Kuhon menyebutnya "Macam Kumbang dalam perpuisian Indonesia." Beberapa karyanya terbit dalam terjemahan Inggris, Belanda, Jepang, Mandarin, Finlandia, Perancis, dan Jerman.

Pada 1986 ia mendapat penghargaan Ashoka sebagai inovator publik. Universitas Iowa di Amerika Serikat memberinya gelar Honorary Fellow in Writing,

1987. Eka Budianta juga seorang Fulbright Scholar sebagai pengajar di Universitas Cornell, 1990, tempatnya bekerja hingga 1992. Sekembali ke tanah air ia aktif di Bina Swadaya dan sebagai Direktur Eksekutif Dana Mitra Lingkungan (1994-1998). Kemudian menjadi Direktur Urusan Sosial dan Lingkungan Hidup pada PT Tirta Investama, industri air minum dalam kemasan, Aqua – Danone, hingga pensiun dini, Maret 2004.

Putera sepasang guru sekolah dasar ini alumni Program LEAD (Leadership for Environment And Development) International, dengan pelatihan di Costa Rica, Amerika Tengah (1995), Okinawa, Jepang (1996); dan Zimbabwe, Afrika (1997). Ia juga menulis buku-buku lain untuk bidang pendidikan, pariwisata, sosial politik, lingkungan hidup dan kebudayaan. Sejak 1996 Eka aktif bersama para “penyair buruh” yang tergabung dalam Komunitas Sastra Indonesia, dan pernah menjadi bendahara PEN (Organisasi Penyair, Esais dan Novelis) Indonesia.

Secara rutin, Eka mengisi kolom Seputar Agribisnis di majalah Trubus (sejak 2002), dan menjadi konsultan pembangunan untuk Program Jasa Lingkungan (ESP – USAID) sejak awal 2005. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, ia diangkat menjadi Sekretaris Umum Badan Pekerja Kongres Kebudayaan.

Buku-bukunya terbaru antara lain, “Mendengar Pramodya” (2005), “Rumah Sejati” (2004), dan “Humanisme Bisnis” (2003), “Mutiar Pegunungan” (2002), “Moral Industri” (1999).

"Eka Budianta memberi pertimbangan dengan opininya di tengah begitu banyak opini yang mengambil posisi memihak. Kita jadi punya ruang pandang yang lebih lega untuk bernafas dan kemudian mengambil opini sendiri. Ruang seperti itulah yang kini semakin langka di negeri kita ini."

—**PUTU WIJAYA, Novelis, Dramawan, Budayawan**

"Ada daya yang besar pada Eka untuk mempengaruhi dan menginspirasi. Tulisannya yang gamblang dan merdeka, informatif sekaligus melibatkan, lahir dari kekuatan moral dan inovasi sosial yang "menjunjung kemanusiaan, membela kehidupan, dan memelihara perdamaian"."

—**RIRIS K. TOHA SARUMPAET, Kritikus Sastra, Dosen Universitas Indonesia**

"It's a remarkable book that draws on value, social issue, writer's experience and cyber technology which can influence writer in building their capacity."

—**Ir. LIEKE RIADI, Ph.D – Vice Rector I, UBAYA**

"Eka Budianta memberi pembelajaran bagaimana karya sastra dapat bermanfaat bagi gerakan advokasi publik. Bukan main!"

—**AGUS PAMBAGIO, Visi Anak Bangsa**

"Sebagaimana yang dikemukakan oleh Eka Budianta, sastrawan, dalam hal ini penyair, pada hakikatnya adalah "man of thought" yang tidak secara langsung berambisi untuk mengubah jaman, namun menjadi saksi jaman. Kesaksian jaman inilah yang langsung atau tidak, akan mengantarkan manusia untuk berpikir mengenai perubahan-perubahan ke arah perbaikan, kendati, pada hakikatnya, sastrawan, dalam hal ini penyair, bukanlah "man of action"."

—**BUDI DARMA, Novelis, kritikus sastra, pengajar di Universitas Negeri Surabaya**

"Sebuah karya apik dari seorang maestro esai di Indonesia, Eka menuliskannya dalam rangkaian kata-kata yang begitu bebas, kreatif, berseni, berani dan realistis. Buku ini mengajak kita untuk menanggapi arti keterbukaan, kebebasan dan nilai-nilai sosial yang hakiki dari seorang Eka Budianta..."

—**MOHAMMAD YUNUS, Moderator Trainers Club Indonesia**

"Membaca buku ini saya menjadi terdidik...banyak sekali gubahan-gubahan nurani yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya."

—**ANI RAHARDJO, Relawan GE Elfun**

"Buku yang sangat luar biasa, yang membuat Anda untuk memiliki semangat Menulis."

—**JOHANES ARIFFIN WIJAYA, Life Inspirator, Penulis Best seller Kualitas Mental Positif untuk Meraih Sukses**



EKA BUDIANTA lahir di Jawa Timur 1 Februari 1956, mengawali karirnya sebagai wartawan (1980-1991). Mulai dari majalah *Tempo*, harian Jepang *Yomiuri Shimbun*, hingga radio *BBC*, di London, Inggris. Ia menikah dengan Melani, temannya di masa kuliah.

Kumpulan sajaknya *Cerita di Kebun Kopi* (Balai Pustaka, 1981) dibeli pemerintah 80.000 eksemplar. Lainnya, *Lautan Cinta*, *Sejuta Milyar Satu*, dan *Rumahku Dunia* membuatnya banyak dibicarakan. Beberapa karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Belanda, Jepang, Mandarin, Finlandia, Perancis, dan Jerman.

Secara rutin, Eka mengisi kolom Seputar Agribisnis di majalah *Trubus* (sejak 2002), dan menjadi konsultan pembangunan untuk Program Jasa Lingkungan (ESP – USAID) sejak awal 2005. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, ia diangkat menjadi Sekretaris Umum Badan Pekerja Kongres Kebudayaan.

Buku-bukunya antara lain, *Mendengar Pramoedya* (2005), *Rumah Sejati* (2004), *Humanisme Bisnis* (2003), dan *Mutiara Pegunungan* (2002).



AlvabetSastra
Divisi Penerbit Pustaka Alvabet

ISBN 979-3064-17-X



9 789793 064178